



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023



WALI KOTA
Periode 2018-2023
DERI ASTA, S.H

WAKIL WALI KOTA
Periode 2018-2023
ZOHIRIN SAYUTI, S.E



PENJABAT WALI KOTA
Dr. ZEFNIHAN, AP, M.Si



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat tersusun tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto merupakan salah satu agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Capaian Kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro yang meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Serta capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sawahlunto dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam laporan ini masih belum sempurna terkait masalah data, analisis informasi, metode penyajian, kesimpulan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami sebagai Walikota Sawahlunto mengharapkan masukan, saran, serta koreksi yang konstruktif dari Pemerintah demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan semua pihak yang telah membantu penyusunan LPPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Pemerintah Kota Sawahlunto selama tahun anggaran 2023.

Sawahlunto, 28 Maret 2024

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO

Dr. ZEFNIHAN, AP, M.Si

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR	i
-----------------	---

DAFTAR ISI	iii
------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN	1
-------------------------	---

1.1 Latar Belakang	1
--------------------------	---

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah	4
c. Jumlah Penduduk	5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	7
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	9
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	23
--	----

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	23
b. Visi Dan Misi Kepala Daerah.....	24
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah	26
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	71

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	443
---	-----

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH	460
--------------	-----

2.1 Capaian Kinerja Makro	460
---------------------------------	-----

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 IKK Keluaran (Outcome & Hasil (Output)	485
--	-----

2.2.2 IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	752
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	763
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	776
2.3.2 Pengukuran Pencapaian Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	796

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	922
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi	923
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kota Sawahlunto	928
Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah Kota Sawahlunto	
3.1.1 Target Kinerja	929
3.1.2 Realisasi	931
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Daerah Kota Sawahlunto	936
Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.	938
3.2.1 Target Kinerja	939
3.2.2 Realisasi	942
3.3 Permasalahan dan Kendala	943
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	944

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL	945
4.1 Urusan Pendidikan	945
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	945
4.1.2 Target Pencapaian SPM Kota Sawahlunto	946
4.1.3 Realisasi	950

4.1.4 Dukungan Personil.....	959
4.1.5 Permasalahan dan Solusi	959
4.2 Urusan Kesehatan	960
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	961
4.2.2 Target Pencapaian SPM Kota Sawahlunto	979
4.2.3 Realisasi	980
4.2.4 Alokasi Anggaran	1002
4.2.5 Dukungan Personil.....	1004
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	1005
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	1008
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	1008
4.3.2 Target Pencapaian SPM Kota Sawahlunto	1009
4.3.3 Realisasi	1011
4.3.4 Alokasi Anggaran	1011
4.3.5 Dukungan Personil.....	1012
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	1013
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	1014
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	1014
4.4.2 Target Pencapaian SPM Kota Sawahlunto	1015
4.4.3 Realisasi	1017
4.4.4 Alokasi Anggaran	1018
4.4.5 Dukungan Personil.....	1020
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	1021
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1021
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	1022
4.5.2 Target Pencapaian SPM Kota Sawahlunto	1022
4.5.3 Realisasi	1029
4.5.4 Alokasi Anggaran	1031
4.5.5 Dukungan Personil.....	1037
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	1039

4.6 Urusan Sosial.....	1042
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	1042
4.6.2 Target Pencapaian SPM Kota Sawahlunto	1043
4.6.3 Realisasi Pencapaian Penerapan SPM.....	1045
4.6.4 Alokasi Anggaran	1046
4.6.5 Dukungan Personil.....	1061
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	1062
 BAB V PENUTUP	 1073

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah, dan mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 serta menindaklanjuti Surat Dirjen Otonomi daerah Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, maka setiap Pemerintah Daerah pada akhir tahun wajib menyampaikan laporan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik Indikator Kinerja Kunci Output dan Indikator Kinerja Kunci Outcome.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembentukan Daerah sebagaimana tertulis pada Bab I Pasal 1 ayat (3) “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Bab II Pasal 2 ayat (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Pasal 4 ayat (2) Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi Wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota”. Bab IV Urusan Pemerintahan, Bagian Ketiga, Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 11 ayat (1) Urusan

pemerintahan kokuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar”.

Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) Sosial

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) Tenaga kerja ;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan,
- 5) Lingkungan hidup
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 9) Perhubungan
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil dan menengah
- 12) Penanaman modal
- 13) Kepemudaan dan olah raga
- 14) Statistic
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan

Pasal 12 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- 1) Kelautan Dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Transmigrasi

Selanjutnya berdasarkan prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi kewenangan Daerah/ Kabupaten Kota adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/kota
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabuapten /Kota dan atau;
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, terkait pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (3) Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 70 ayat (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada ayat (5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai bahan

dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

b. Data Geografis Wilayah

Kondisi geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dengan posisi 0°33'-0°43' Lintang Selatan, 100° 43'-100°-50' Bujur Timur. Ketinggian dari Permukaan Laut: 250 – 785 mdpl/m.a.s.l, dengan batas-batas administratif daerah:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Solok

Kota Sawahlunto dikenal sebagai Kota Tambang memiliki luas wilayah 27.345 Ha (273.45km²) atau sekitar 0,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Secara administrasi Kota Sawahlunto terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa. Kecamatan Silungkang menjadi kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 32,93 km² atau sebesar 12,04 persen sedangkan kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99,39 km² atau sekitar 36,35 persen keseluruhan Kota Sawahlunto.

Tabel : 1.b

Luas wilayah Kota Sawahlunto perkecamatan (km²)

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
(1)	(2)	(3)
1.	Kecamatan Silungkang	32,93
2.	Kecamatan Lembah Segar	52,58
3.	Kecamatan Barangin	88,55
4.	Kecamatan Talawi	99,39
	Jumlah	273,45

Sumber: BPS Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2023

Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya di Indonesia. Sebagai salah satu kota, Kota Sawahlunto lebih didominasi oleh Desa yang merupakan karakter

sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Kota Sawahlunto memperoleh dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu dana desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Kota Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya dengan anggaran dana desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri.

c. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk sangat menentukan dalam proses pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai data kependudukan bahwa penduduk Kota Sawahlunto tahun 2010 berjumlah 56.866 jiwa, tahun 2019 berjumlah 62.254 jiwa, tahun 2020 berjumlah 65.138 jiwa, tahun 2021 berjumlah 65.687 jiwa, tahun 2022 berjumlah 66.413 jiwa, dan tahun 2023 berjumlah 67.758 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Barangin dan terbanyak kedua di Kecamatan Talawi.

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto dan laju pertumbuhan Penduduk pertahun 2022-2023 sbb:

Tabel: 1.c1

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto perkecamatan (jiwa)

No	Kecamatan	Populasi 2022	Populasi 2023	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022-2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Silungkang	11.594	11.809	1,30
2.	Lembah Segar	13.504	13.722	1,06
3.	Barangin	20.863	21.379	1,91

No	Kecamatan	Populasi 2022	Populasi 2023	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022-2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
4.	Talawi	20.452	20.848	1,38
	Kota Sawahlunto	66.413	67.758	1,47

Sumber: BPS Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2023

Kecamatan Silungkang menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar mencapai 358,61. Dari pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan perkecamatan di Kota Sawahlunto terdapat data dengan rincian sebagai berikut.

Tabel: 1.c2

Kepadatan penduduk Kota Sawahlunto perkecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin			Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Silungkang	5.973	5.836	11.809	358,61
Lembah Segar	6.889	6.833	13.722	260,97
Barangin	10.679	10.700	21.379	241,43
Talawi	10.545	10.303	20.848	209,76
Kota Sawahlunto	34.086	33.672	67.758	247,79

Sumber: BPS Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2023

Rasio jenis kelamin merujuk pada jumlah laki-laki per 100 perempuan dalam suatu populasi tertentu. Biasanya dinyatakan sebagai rasio kelahiran laki-laki terhadap kelahiran perempuan, atau rasio jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan dalam populasi total. Jumlah Penduduk perkecamatan berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin/ *sex ratio* (SR) sebagai berikut:

Tabel 1.c3
Rasio jenis kelamin/sex ratio Kota Sawahlunto perkecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Sex Ratio (SR)
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Silungkang	5.973	5.836	11.809	102,35
Lembah Segar	6.889	6.833	13.722	100,82
Barangin	10.679	10.700	21.379	99,80
Talawi	10.545	10.303	20.848	102,35
Kota Sawahlunto	34.086	33.672	67.758	101,23

Sumber: *BPS Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa SR Kota Sawahlunto 2023 sebesar 101,23 yang artinya setiap 100 orang perempuan di Kota Sawahlunto terdapat 101-102 orang laki-laki. Keadaan serupa terjadi juga di Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Talawi yang memiliki SR melebihi 100. Di Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Barangin SR mendekati 100 yang mengindikasikan distribusi penduduk laki-laki dan perempuan yang lebih seimbang.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) kecamatan, 27 desa dan 10 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Talawi
- 2) Kecamatan Barangin
- 3) Kecamatan Lembah Segar
- 4) Kecamatan Silungkang

Masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa desa/kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan Talawi:

- 1) Desa Sikalang
- 2) Desa Rantih
- 3) Desa Salak

- 4) Desa Sijantang Koto
- 5) Desa Talawi Hilir
- 6) Desa Talawi Mudik
- 7) Desa Bukit Gadang
- 8) Desa Batu Tanjung
- 9) Desa Kumbayau
- 10) Desa Datar Mansiang
- 11) Desa Tumpuk Tengah

Kecamatan Barangin:

- 1) Desa Lumindai
- 2) Desa Balai Batu Sandaran
- 3) Desa Talago Gunung
- 4) Desa Santur
- 5) Desa Kolok Mudik
- 6) Desa Kolok Nan Tuo
- 7) Kelurahan Saringan
- 8) Kelurahan Lubang Panjang
- 9) Kelurahan Durian I
- 10) Kelurahan Durian II

Kecamatan Lembah Segar:

- 1) Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan
- 2) Kelurahan Kubang Sirakuk Utara
- 3) Kelurahan Air Dingin
- 4) Kelurahan Aur Mulyo
- 5) Kelurahan Pasar
- 6) Kelurahan Tanah Lapang
- 7) Desa Lunto Barat
- 8) Desa Lunto Timur
- 9) Desa Pasar Kubang
- 10) Desa Kubang Tengah
- 11) Desa Kubang Utara Sikabu

Kecamatan Silungkang:

- 1) Desa Taratak Bancah
- 2) Desa Muaro Kalaban

- 3) Desa Silungkang Tigo
- 4) Desa Silungkang Duo
- 5) Desa Silungkang Oso

e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

e.1 Jumlah Perangkat Daerah

Jumlah perangkat daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari 27 Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat Daerah
- 4) Dinas Pendidikan
- 5) Dinas Kebudayaan
- 6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- 7) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
- 9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 11) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 12) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 15) Dinas Perhubungan.
- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 17) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 18) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 19) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- 20) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 22) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 24) Kecamatan Talawi
- 25) Kecamatan Barangin
- 26) Kecamatan Lembah Segar
- 27) Kecamatan Silungkang

e.2 Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah

Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sawahlunto yang juga menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sawahlunto menjadi Satuan Pendidikan Formal.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto menjadi Satuan Pendidikan Formal.
- 3) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan

Walikota Sawahlunto Nomor 45 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.

- 4) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.
- 5) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 47 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto.
- 8) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

9) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto.

e.3 Pegawai Pemerintah

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto kondisi 31 Desember 2023 berjumlah sebanyak 2.416 orang yang terdiri dari 1.664 orang perempuan dan 752 orang laki-laki. Dari 2.416 orang tersebut 1.955 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan dominasi pada PNS Guru dan 461 lainnya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang didominasi oleh tenaga kesehatan. Perbandingan ASN per jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel di bawah:

Tabel 1.e1
Data ASN Pemko Sawahlunto Berdasarkan Jenis Kelamin
Kondisi 31 Desember 2021

No	ASN		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PNS	Guru	529	849	1.955
2.		Non Guru	111	463	
3.		Instansi Vertikal	1	2	
4.	PPPK	Tenaga Guru	27	130	461
5.		Tenaga Kesehatan	28	153	
6.		Tenaga Teknis	56	67	
Jumlah			752	1.664	2.416

Sumber: BKPSDM Kota Sawahlunto tahun 2023

Perincian Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto per Golongan terbagi atas PNS Golongan I sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 232 orang, Golongan III sebanyak 1.371 orang, dan Golongan IV sebanyak 351 orang. Sedangkan untuk

golongan PPPK terbagi menjadi PPPK Golongan V sebanyak 32 orang, Golongan VII sebanyak 146 orang, Golongan IX sebanyak 252 orang, dan Golongan X sebanyak 31 orang. Dari data di atas dapat dilihat bahwa persentase PNS terbanyak di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah PNS Golongan III dengan persentase sebesar 70,13 persen. Sedangkan untuk PPPK, persentase terbesar berada pada PPPK Golongan IX sebesar 54,66 persen. Sebaran PNS dan PPPK per Golongan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.e2
Data ASN Pemko Sawahlunto Berdasarkan Golongan
Kondisi 31 Desember 2023

No	PNS			PPPK		
	Golongan	Jumlah	%	Golongan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	I	1	0,05	V	32	6,94
2.	II	232	11,87	VII	146	31,67
3.	III	1.371	70,13	IX	252	54,66
4.	IV	351	17,95	X	31	6,72
1.955 100,00				461 100,00		

Sumber: BKPSDM Kota Sawahlunto tahun 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN Pemko Sawahlunto didominasi sebesar 57,74 persen merupakan lulusan pendidikan tinggi D4/S1. Lulusan D4/S1 tersebut berjumlah 1.395 orang yang terdiri dari 1.143 orang PNS dan 252 orang PPPK. Sebarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.e3
Data ASN Pemko Sawahlunto Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kondisi 31 Desember 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SD	4	-	4	0,17
2.	SLTP	11	-	11	0,46
3.	SLTA	198	32	230	9,52
4.	Diploma	277	146	423	17,51
5.	D4/S1	1.143	252	1.395	57,74
6.	Profesi	146	31	177	7,33
7.	S2/S3	176	-	176	7,28
Jumlah		1.955	461	2.416	100,00

Sumber: BKPSDM Kota Sawahlunto tahun 2023

Sejumlah 1.955 orang ASN Pemko Sawahlunto yang berstatus PNS didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 1.651 orang yang terdiri dari 1.248 orang dengan jabatan fungsional umum dan 403 orang dengan jabatan fungsional tertentu. Kemudian pada jabatan Eselon, Eselon II terdiri dari 28 orang, Eselon III 100 orang, dan Eselon IV 176 orang. Sebarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.e4
Data ASN Pemko Sawahlunto Berdasarkan Eselon
Kondisi 31 Desember 2023

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eselon II	22	6	28
2.	Eselon III	64	36	100
3.	Eselon IV	84	92	176
4.	Fungsional Tertentu	114	289	403
5.	Fungsional Umum	357	891	1248
6.	PPPK	111	350	461
Jumlah		752	1664	2.416

Sumber: BKPSDM Kota Sawahlunto Tahun 2023

f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara Alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp. 669.237.924.585,00 dan terealisasi sebesar Rp. 607.064.912.961,00 atau sebesar 90,71 %.

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Kota Sawahlunto dialokasikan sebesar Rp.625.185.465.083,00 dan terealisasi sebesar Rp. 605.315.736.275,64 atau 96,82 % dengan rincian pada pos Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 66.783.021.097,00 terealisasi sebesar Rp. 59.943.839.179,64 atau 89,76 %. Pendapatan Transfer Dianggarkan sebesar Rp. 558.402.443.986,00 terealisasi sebesar Rp. 545.371.897.096,00 atau 97,67 % dan tidak adanya anggaran pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah karena Pemerintah Kota Sawahlunto tidak memiliki potensi jenis pendapatan ini seperti hibah dan dana darurat serta pendapatan lain yang diamanatkan dalam peraturan

Untuk Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 7.909.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.149.995.371,- atau 103,05 % Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 4.133.470.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.691.622.325,- atau 65,12 %, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp. 15.628.865.561,- terealisasi sebesar Rp. 15.663.529.464,- atau 100,22 % dan Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 39.111.685.536,- terealisasi sebesar Rp. 33.438.692.019,64.atau 85,50 %.

Untuk Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp. 32.682.958.000,00 terealisasi sebesar Rp.34.188.263.466,- atau 104,61 %. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp. 356.278.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 357.769.014.914,- atau 100,42 %. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp. 54.035.717.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.548.393.204,- atau 93,55 %. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp. 53.125.393.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.234.698.510,-,atau 94,56 %. Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar Rp.21.339.313.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.339.313.000,- atau 100 % dan untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp. 37.140.612.986,- terealisasi sebesar Rp. 27.492.214.002,- atau 74,02 %.

Untuk Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan kota Sawahlunto tidak menganggarkan pendapatan tersebut.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah Kota Sawahlunto dianggarkan sebesar Rp. 669.237.924.585,- terealisasi sebesar Rp. 607.064.912.961,- atau 90,71 % dengan rincian pada pos Belanja Operasi sebesar Rp. 508.679.565.969,- terealisasi sebesar Rp. 465.316.924.124- atau 91,48 %. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 97.876.748.616,- terealisasi sebesar Rp. 84.381.971.361,- atau 86,21%. Belanja Tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 1.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 836.646.211,- atau 66,93 % dan untuk Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 61.431.610.000,00 terealisasi sebesar Rp. 56.529.371.265,- atau 92,02 %

Untuk Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 508.679.565.969,- terealisasi sebesar Rp. 465.316.924.124,- atau 91,48 % .Belanja Barang dan Jasa

dianggarkan sebesar Rp. 214.877.895.657,- terealisasi sebesar Rp. 189.393.433.222,- atau 88,14 % Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.122.101.270,- atau 89,77 %. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 26.746.034.136,- terealisasi sebesar Rp. 24.475.356.075,- atau 91,51 % dan Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 3.517.975.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.446.100.000,- atau 97,96 %.

Untuk Belanja Modal yang terdiri Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 13.202.204.963,- teralisasi sebesar Rp. 12.084.173.858,- atau 91,53 %, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 46.136.755.083,- teralisasi sebesar Rp. 35.635.719.133,- atau 77,24 % Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp. 38.266.106.060,00 teralisasi sebesar Rp. 36.392.598.160,- atau 95,10 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 271.682.510,- teralisasi sebesar Rp. 269.480.210,- atau 99,19 %.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 1.250.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 836.646.211,- atau 66,93 %

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan sebesar Rp. 1.204.270.000,- teralisasi sebesar Rp. 954.510.748,- atau 79,26 % dana Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 60.227.340.000,00 teralisasi sebesar Rp. 55.574.860.517,- atau 92,28 % sehingga defisit pada APBD 2023 adalah Rp. 1.749.176.685,36

Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 44.052.459.502,- dengan realisasi Rp. 10.746.689.591,38 atau 24,40 % dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 45.719.126.171 dengan realisasi Rp. 12.116.356.259,38 atau 26,50 % sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 1.666.666.669,- terealisasi Rp. 1.369.666.668,- atau 82,18 % sehingga diperoleh pembiayaan netto dengan anggaran Rp. 44.052.459.502,- direalisasikan sebesar Rp. 10.746.689.591,38,- atau 24,40 % yang akan digunakan sebagai penutup defisit sebesar

Rp.1.749.176.685,36,- sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.8.997.512.906,02,-

Secara rinci realisasi APBD Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	APBD 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENDAPATAN	625.185.465.083,00	605.315.736.275,64
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64
	Pendapatan Pajak Daerah	7.909.000.000,00	8.149.995.371,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	4.133.470.000,00	2.691.622.325,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.628.865.561,00	15.663.529.464,00
	Lain-lain PAD yang Sah	39.111.685.536,00	33.438.692.019,64
	PENDAPATAN TRANSFER	558.402.443.986,00	545.371.897.096,00
	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00
	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	356.278.450.000,00	357.769.014.914,00
	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.035.717.000,00	50.548.393.204,00
	Dana Transfer khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.125.393.000,00	50.234.698.510,00

No	URAIAN	APBD 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana Insentif Daerah (DID)		
	Dana Desa	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.140.612.986,00	27.492.214.002,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
	Dana Darurat	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
2	BELANJA	669.237.924.585,00	607.064.912.961,00
	BELANJA OPERASI	508.679.565.969,00	465.316.924.124,00
	Belanja Pegawai	262.287.661.176,00	246.879.933.557,00
	Belanja Barang dan Jasa	214.877.895.657,00	189.393.433.222,00
	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.122.101.270,00-

No	URAIAN	APBD 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belanja Hibah	26.746.034.136,00	24.475.356.075,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.517.975.000,00	3.446.100.000,00
	BELANJA MODAL	97.876.748.616,00	84.381.971.361,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.202.204.963,00	12.084.173.858,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.136.755.083,00	35.635.719.133,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.266.106.060,00	36.392.598.160,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	271.682.510,00	269.480.210,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	836.646.211,00
	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	836.646.211,00
	BELANJA TRANSFER	61.431.610.000,00	56.529.371.265,00
	Belanja Bagi Hasil	1.204.270.000,00	954.510.748,00

No	URAIAN	APBD 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belanja Bantuan Keuangan	60.227.340.000,00	55.574.860.517,00
	SURPLUS / DEFISIT	(44.052.459.502,00)	(1.749.176.685,36)
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.719.126.171,00	12.116.356.259,38
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.114.946.260,00	12.114.946.259,38
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	33.604.179.911,00	1.410.000,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.666.666.666,00	1.369.666.668,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.668,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	203.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	44.052.459.502,00	10.746.689.591,38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	8.997.512.906,02

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor atau lapangan usaha. Permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Sawahlunto dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan, maka permasalahan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebagai berikut yaitu :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto, melalui peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS);
2. Masih perlunya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Sawahlunto melalui peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH);
3. Tingginya pembiayaan infrastruktur akibat topografi daerah yang berbukit, kondisi tanah yang labil akibat penambangan di beberapa titik sentral Kota Sawahlunto;
4. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, melalui pengurangan kawasan kumuh di Kota Sawahlunto;
5. Masih tingginya angka pengangguran;
6. Sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata dan memadai di seluruh wilayah Sawahlunto;
7. Perlunya peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah;
8. Perlunya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani;

9. Perlunya peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah **“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”**.

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

KEBERSAMAAN dalam Visi tersebut adalah, menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun Kota disegala Bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, Pemerintah, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.

KOTA WISATA adalah mewujudkan Visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu **“ SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA ”** serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh *stakeholders* kota.

KREATIF maksudnya Pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.

INOVATIF maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya,

selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah. Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk yang yang Sawahlunto, baik itu Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah, Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya.

UNGGUL maksudnya seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Adat Istiadat, Infrastruktur, Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan.

BERMARTABAT maksudnya terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

BERKEADILAN maksudnya pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

SEJAHTERA maksudnya; masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang mampu dan lansia, terbukanya kesempatan kerja dengan penghasilan yang

memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto.

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan Visi. Untuk mewujudkan visi diatas, akan dicapai melalui beberapa misi yaitu :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui Blk
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan ntuk Seluruh Masyarakat
6. Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai
8. Penanganan Khusus terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal Lainnya
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut di atas, maka disusunlah Program Pembangunan Daerah sebagaimana Tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Program Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik				
Tujuan 1.1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto	(Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 % / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,77	Sekretariat Daerah
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 % / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,77	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase santri rumah/pondok tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (persen)	(Jumlah santri yang hafidz 1 juz / Jumlah santri rumah tahfidz) x 100 %	50	
	Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di	Jumlah pondok tahfidz tahun n-1 - Jumlah pondok tahfiz	60	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)	tahun n		Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
	Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (persen)	(Jumlah imam yang mengikuti pelatihan/ Jumlah imam mesjid)x 100%	100	
Sasaran 1.1.2. Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif/ total komunita budaya) x 100 %	88	
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari (%)	(Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total Jumlah objek pemajuan kebudayaan) x 100%	31,1	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	(Jumlah kelompok seni yang mandiri/ Jumlah kelompok seni yg ada) x 100%	13.3	
Program Pembinaan Sejarah	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah	(Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah lokal/Jumlah kelompok	60	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	lokal (%)	masyarakat yg ada) x 100%		
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK				
Tujuan 2.1. Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	(Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,53	
	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	
	Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / Jumlah penduduk) x 100%	2,01	
	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 2.1.1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)	(Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yg Tersedia/Jumlah Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja) x 100%	100	Dinas PTSP Naker
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	(Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi / Jumlah peserta pelatihan) x 100%	70	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	(Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100%	75,35	
Program Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	Jumlah Perusahaan yang memiliki Lembaga Kerjasama Bipartid (Perusahaan)	10	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 2.1.2. Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industry	418.106,23	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahnya sesuai dengan peraturan perkoperasian.	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/Jumlah koperasi x 100%	26,47	Dinas Koperindag
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)	Jumlah Koperasi sehat / Jumlah koperasi x 100 %	26	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang Jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	Jumlah koperasi yang Jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%/Jumlah koperasi x 100%	60	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha / Jumlah UMkM x 100%	53	
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya / Jumlah UMKM x 100%	1,5	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	Jumlah IKM yang meningkat skala usaha nya / Jumlah IKM x 100%	2	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil & Me-nengah yg mempunyai izin (%)	Jumlah industri kecil menengah yang mempunyai izin / Jumlah industri kecil dan menengah x 100%	30	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yg terpublis (%)	Jumlah IKM yang terpublish / Jumlah IKM x 100%	100	
Sasaran 2.1.3. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga	11.024,59	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(dijadikan pertahun)		
	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	615.823,20	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	Jumlah pasar rakyat dengan minimal tipe C / Jumlah pasar rakyat x 100%	50	
	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	422	
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	Jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	27.015,91	
Program Pengembangan	Persentase produk	Jumlah produk unggulanyang	60	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ekspor	unggulan yang diekspor (%)	diekspor / Jumlah produk unggulan x 100%		
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional yang tertib ukur / Jumlah pasar tradisional x 100%	30	
Program Penggunaan & Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)	Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)	300	
Sasaran 2.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	344.355,30	
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	72,33	
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)	Jumlah kecukupan kebutuhan pangan pokok dari bahan pangan lokal/jumlah kecukupan kebutuhan bahan pangan pokok	75	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Survei indeks rata-rata konsumsi pangan masyarakat terhadap 9 kelompok pangan	86	
Program Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	(Jumlah penurunan penduduk rawan pangan/Jumlah penduduk)x 100%	6	
Program Pengawasan Keamanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	Perbandingan produk pangan segar dan produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba / total bahan pangan	91	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan (ton)	Jumlah produksi perairan umum dan budidaya	218	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat	36,67	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indonesia selama satu tahun dalam bantuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	(Perbandingan luas sawah dengan handtraktor)	1:10	
	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	Produktivitas x luas panen	15.747	
	Jumlah Produksi Karet (ton)	Produktivitas x luas panen tanaman yang menghasilkan	1.730	
	Jumlah Produksi Kakao (ton)	Produktivitas x luas panen tanaman yang menghasilkan	569	
	Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)	pemotongan tercatat + 5%(pemotongan tercatat) x 173,5	355.68	
	Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	Daging Ayam Buras : (150% x populasi) x 0,715 kg	900,26	
		Daging Ayam Ras Pedaging: (60% x 97% x populasi) x 0,825 kg		

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Daging Ayam Petelur : (50% x populasi) x 0,825 kg		
	Jumlah Produksi Telur (ton)	Telur Ayam Ras: 60% x populasi x 10,6kg	135,86	
		Telur Itik 60% x populasi x 7,6 kg		
		Telur ayam buras : 30% x populasi x 1,4 kg		
Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	Penambahan sawah beririgasi / sawah beririgasi data awal	2,5	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	(Jumlah kejadian penyakit tahun lalu-Jumlah kejadian penyakit tahun ini / Jumlah kejadian penyakit tahun lalu) x 100%	10	
Program Pengendalian & Pena-nggulangan Bencana Pertanian	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	(Luas serangan OPT/luas tanam) x 100%	10	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik	(Penyuluh naik jenjang jabatan / Total penyuluh) X	5,55	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jenjang jabatan (%)	100 %		
	Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan (kelompok / Wilayah Binaan)	Hasil penilaian kelompok tani sesuai kriteria Permentan	5	
Sasaran 2.1.5. Tersedianya iklim investasi yang kondusif	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41	Dinas PTSP Naker
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker	B	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP	Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP	B	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	(Nilai Investasi Tahun N - Nilai Investasi (N-1)) x 100% / Nilai Investasi N-1	25	
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)	Jumlah Investasi PMDN Lokal	30	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)	Jumlah Investasi PMDN Nasional	10	
	Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)	Jumlah Investasi PMA	1	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)	(Jumlah Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal / Jumlah Total Perusahaan) x 100%	
Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)				
Tujuan 3.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,09	
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya kualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan	13,20	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	(AHLS)	akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.		Dinas Pendidikan
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,30	
	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total Jumlah lulusan SD) x 100 %	30	
Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	Angka Partisipasi Murni SD	101,3	
	APM SMP	Angka Partisipasi Murni SD	93,5	
	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 /total Jumlah lulusan) x 100 %	30	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	(Jumlah Guru yang bersertifikat Pendidik dan berkualifikasi Min S1	90,3	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		/ Jumlah Total Guru) x 100 %		
Program Pembinaan Perpustakaan	Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan pustaka	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	4	
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif				
Tujuan 4.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	61,54 (B)	
Sasaran 4.1.1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap Laporan kinerja pemerintah daerah	72,83 (BB)	
	Opini BPK terhadap	Opini BPK terhadap	WTP	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		Barenlitbangda
	Persentase peningkatan PAD (%)	$(\text{PAD tahun } n - \text{PAD tahun } (n-1)) / \text{PAD tahun } (n-1) \times 100\%$	4,45	
Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%	100	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)	(Jumlah Program di RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%	100	
	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan	(Jumlah Program di RKPD Bidang Perekonomian dan SDA dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama /	100	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)	Jumlah Program di RPJMD) x 100%		
	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)	(Jumlah Program di RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%	100	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan dalam Perencanaan/ Pembangunan (Proposal)	40	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget	(Jumlah Realisasi Belanja / APBD) x 100%	90	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Planning) (%)			
	Maksimal Defisit APBD (%)	Jumlah Pendapatan Daerah dikurangi dengan Belanja Daerah pada tahun yang sama	4,1	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	(Jumlah OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel / Jumlah Total OPD) x 100%	95	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	(Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah / Target Pendapatan Asli Daerah) x 100%	100	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	12	Sekretariat Daerah

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Arsip	Terkelolanya arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan arsip	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Terlaksananya perlindungan & penyelamatan arsip (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan perlindungan & penyelamatan arsip	12	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase administrasi desa yang dibina	Jumlah administrasi desa yang dibina/ Jumlah desa x 100%	100	
Program Penataan Desa	Persentase Desa yang ditata	(Jumlah desa yang ditata / Jumlah total desa) x 100%	-	Dinas Sosial, PPA
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina/ Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat x 100%	100	
Program Penyelenggaraan	Persentase Tindak	Persentase tindaklanjut LHP	100	Inspektorat

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengawasan	Lanjut Temuan (%)	(%)		
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Nilai APIP (Level)	Penilaian Target BPKP terhadap APIP Kota Sawahlunto (Level)	Level 4	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Urusan Pemerintahan Daerah yg berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan program	12	Seluruh Perangkat Daerah
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	(Luas wilayah dalam kondisi aman dan tertib/total luas wilayah)x 100%	100	Kec. Barangin
			100	Kec. Lembah Segar
			100	Kec. Silungkang
			100	Kec. Talawi
	Persentase fasilitasi penanganan kasus covid	Operasional penanganan kasus Covid-19	-	Badan Kesbangpol dan PBD
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	(Jumlah kegiatan terselenggara/total Jumlah kegiatan)x100%	100	Kec. Baringin
			100	Kec. Silungkang
			100	Kec. Talawi

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada) x 100 %	100	Kec. Barangin
			100	Kec. Lembah Segar
			100	Kec. Silungkang
			100	Kec. Talawi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	(Jumlah pelayanan publik yang terlayani/total pelayanan) x 100 %	100	Kec. Barangin
			100	Kec. Lembah Segar
			100	Kec. Silungkang
			100	Kec. Talawi
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	Jumlah Desa yang dibina/total Jumlah desa x 100%	100	Kec. Barangin
			100	Kec. Lembah Segar
			100	Kec. Silungkang
			100	Kec. Talawi
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah propemperda) x 100 %	100	Sekretariat DPRD

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase validasi data kependudukan (%)	Jumlah data penduduk yang telah melakukan validasi (update data) / Jumlah penduduk x 100%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / Jumlah penduduk x 100%	100	
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan / Jumlah penduduk x 100%	100	
Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas aparaturnya pemerintah	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	75	BKPSDM
Program Kepegawaian	Persentase ASN	(Jumlah ASN yang terlayani	100	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Daerah	yang mendapat pelayanan (%)	/ Jumlah seluruh ASN yang mengajukan permohonan pelayanan) x 100%		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN (paket)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi	2	
Tujuan 4.2. Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(Jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- Jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/Jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,049	
Sasaran 4.2.1. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(Jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- Jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/Jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,049	
Program Pembinaan dan	Persentase	(Jumlah Laporan Pembinaan	100	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalui Forum Strategis (%)	yang di tindaklanjuti / Jumlah Laporan) x 100%		Badan Kesbangpol dan PBD
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Rekomendasi hasil rapat yang ditindaklanjuti (%) (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi rapat) x 100%	(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi rapat) x 100%	100	
Program Peningkatan Keten-traman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda (%)	(Jumlah penyelesaian penegakan Perda/ Jumlah pelanggaran Perda) x 100%	100	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Krimilalitas (%)	(Jumlah Angka Kriminalitas Tahun (N-1) - Jumlah Angka Kriminalitas Tahun N) / Jumlah Angka Kriminalitas Tahun (N-1) x 100%	15	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Persentase organisasi	(Jumlah organisasi masyarakat	100	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Organisasi Kemasyarakatan	kemasyarakatan yang diawasi (%)	yang diawasi/jumlah organisasi kemasyarakatan) x 100%		
Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat				
Tujuan 5.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,09	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,42	
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah masyarakat yg memiliki jaminan kesehatan dibagi Jumlah penduduk x 100 %	97	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	(Gambaran kepuasan dari pasien/masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit + Puskesmas yang diukur melalui kuesioner) / 2	82	Keluarga Berencana
	Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	(Jumlah Rujukan IGD dan Rawat Inap / Jumlah kunjungan IGD dan Rawat Inap) x 100 %	≤ 4,00	
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	(Jumlah tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang sesuai standar / Jumlah tenaga kesehatan dan medis) x 100 %	92	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Keluarga Sehat (%)	Jumlah Keluarga Sehat dengan indek >0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga	37	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	(Jumlah tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan / Jumlah Tempat pengolahan	78	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		makanan yang diperiksa) x 100 %		
Sasaran 5.1.2 Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	5,90	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	(Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi/Jumlah pasangan usia Subur) x 100 %	69,21	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	235	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase pengendalian penduduk		2,22	
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan				
Tujuan 6.1. Meningkatkan kualitas perekonomian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n- 1)/ Nilai PDRB	4,53	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		ADHK tahun n-1) x 100%		
	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	
	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / Jumlah penduduk) x 100%	2,01	
	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278	
Sasaran 6.1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95.714,10	
	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,13	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengunjung yang	(Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek	90	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	wisata)		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(Jumlah objek wisata unggulan tipe A/ Total Jumlah objek wisata yg ada) x 100%	61,76	
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan (orang)	(Jumlah pengunjung objek wisata(tiket masuk)	1.300.000	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	(Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg mandiri/Jumlah pelaku ekonomi kreatif) x 100%	20	
	persentase MoU kemitraan aktif (%)	(Jumlah MOU kemitraan aktif/Jumlah MOU kemitraan) x 100%	90	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	(Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HAKI/Jumlah produk ekonomi kreatif) x 100%	0,50	
Program Pengembangan	Jumlah pemuda	Jumlah pemuda berprestasi	15	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	yang ber-prestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/ internasional (atlit)	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/ internasional (atlit)	160	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	75	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase budaya benda yang lestari (%)	(Jumlah cagar budaya yang lestari/Total Jumlah cagar budaya yang ditetapkan) x 100%	63,92	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan museum (orang)	(Jumlah kunjungan museum (tiket terjual)(orang)	33.000	
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai				

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 7.1. Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	
Sasaran 7.1.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	66,73	
	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	51,22	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)	(Panjang Jalan yang ditingkatkan +panjang jalan yang terpelihara)/total panjang jalan) x 100 %	72,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase jembatan dalam kondisi terpelihara (%)	((Panjang jembatan yang ditingkatkan +panjang jembatan yang terpelihara)/total panjang	79	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		jembatan)) x 100 %		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	52,34	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	(Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik / panjang saluran irigasi) x 100%	50,35	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	(Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar/ Jumlah bangunan pemerintah yang ada) x100%	89	
	Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	(Jumlah bangunan yang direkomendasi / Jumlah bangunan) x 100 %	66	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengembangan Permukiman	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	79,34	Dinas KP2LH
Program pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah	Persentase Air limbah yang ditangani (%)	(Jumlah RT yang terlayani Sanitasi / Jumlah RT) x 100 %	88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum	Persentase sarana dan prasarana air minum dalam kondisi baik (%)	(Jumlah sarana dan prasarana air minum dalam kondisi baik/ Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terpasang) x 100 %	91	
Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	(Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun (n-1) - Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n/ Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n-1) x 100 %	45	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Perkeretaapian	persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	(Jumlah sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia/Jumlah sarana prasarana perkeretaapian yang dibutuhkan) x100%	65	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.1.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Warga Kota Dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	Badan Kesbangpol dan PBD
Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar	(Jumlah Bencana yang tertangani / Jumlah bencana yang terjadi) x 100 %	100	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran (%)	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran) x 100%	100	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
	Persentase kerjasama penanganan pencegahan kebakaran (%)	(Jumlah kasus pencegahankebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kasus yang dilaporkan) x 100%	100	
Sasaran 7.1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air,	66,22	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)		Dinas KP2LH
Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/ Penyuluh-an tentang Lingkungan Hidup(%)	(Jumlah Masyarakat yang di diklat/Jumlah Masyarakat) x 100%	100	
Program Penghargaan Lingkung-an Hidup untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh	Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh	1	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	(Jumlah Sampah Tertangani /Timbulan Sampah Kota) x 100 %	77	
	Persentase Sampah berkurang dengan timbulan sampah (%)	(Jumlah Sampah Berkurang / Timbulan Sampah Kota) x 100 %	22	
Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	Persentase Ketaatan Pengelola-an dan	(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan / Jumlah	75	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
hidup	Pemantauan lingkungan	Kegiatan Usaha) x 100 %		
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%)	(jumlah kegiatan usaha yang memiliki izin PLB3/ Jumlah kegiatan usaha) x 100%	75	
Program Pembinaan dan penga-wasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan penge-lolaaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	(Jumlah usaha yang taat lingkungan /seluruh usaha yang berizin) x 100	75	
Program pengelolaan Keaneka-ragaman hayati (KEHATI)	Persentase Wilayah yg dilaksa-nakan konservasi SDA (%)	(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %	100	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen perencanaan yang memilliki dokumen kajian lingkungan hidup (%)	(Jumlah Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup / Jumlah Dokumen Perencanaan yang membutuhkan kajian lingkungan hidup) x 100%	100	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)	(Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan/ Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang dilaporkan) x 100%	100	
Sasaran 7.1.4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	90	
Program Penyelenggaraan penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / Jumlah dokumen kebutuhan penataan ruang) x 100%	22,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan (%)	(Jumlah rekomendasi izin membuka tanah yang diterbitkan/ Jumlah permohonan) x 100%	100	Dinas KP2LH
Program Pendatagunaan Tanah	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek	(Luas Tanah budidaya yg memiliki aspek hukum/luas tanah budidaya) x 100%	80	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Hukum (%)			
Program pengelolaan izin lokasi	Persentase rekomendasi penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan (%)	(Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan/ jumlah permohonan) x 100%	-	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)	(Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi/dengan Jumlah kasus pertanahan) x 100%	100	
Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	(Jumlah usulan ganti rugi tanah yang ditetapkan/ usulan ganti rugi dari OPD) x 100%	100	
Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)	Jumlah tanah ulayat yang ditetapkan dibagi Jumlah tanah ulayat x 100%	100	
Sasaran 7.1.5 Meningkatnya kualitas	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100%	7,5	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
perumahan dan permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	
	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total Jumlah rumah tangga) x 100%	90,1	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	
Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	85	
Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang tertata (%)	Jumlah PSU yang tertata/ Jumlah PSU x 100%	85	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi	Jumlah Rumah terkena bencana yang direhab/	90	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(%)	Jumlah rumah yang terkena bencana) x 100%		
Misi 8 : Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya				
Tujuan 8.1. Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan/IPM Laki-laki) x 100 %	95,52	Dinas Sosial, PMD, PPA
Sasaran 8.1.1. Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x100%	100	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang	{Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi / Jumlah total penyandang masalah	100	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	terfasilitasi	kesejahteraan sosial (PMKS)}x 100%		Dinas Sosial, PMD, PPA
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	(Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial /Jumlah total PMKS) x 100%	100	
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan	(Jumlah PSM & TKSK yang diberdayakan /Jumlah total PSM & TKSK) x 100%	100	
Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	(Jumlah penanganan bencana alam yang terfasilitasi/ Jumlah bencana alam) x 100 %	100	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang terfasilitasi	(Jumlah TMP yang terfasilitasi / Jumlah TMP) x 100%	100	
Sasaran 8.1.2. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,52	
Program	Indek	Nilai indeks peran	65,65	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Gender (IDG)	perempuan dalam ekonomi dan politik		
Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan perempuan dari kekerasan (%)	(Jumlah kasus kekerasan perempuan yang ditangani/Jumlah kasus kekerasan perempuan)x100%	100	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga	100	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (%)	Pencapaian hasil penilaian Kota Layak Anak	Utama	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase perlindungan khusus bagi anak (%)	Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus/Jumlah kasus pada anak x 100%	100	
Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor				
Tujuan 9.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu	61,54 (B)	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
bersih dan inovatif		Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB		Sekretariat Daerah
Sasaran 9.1.1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,10	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data dan Informasi tentang tingkat masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kepuasan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	89,87 (A)	
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menggu- nakan Sistem Informasi Peme-	(Jumlah OPD yang sudah meggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK /	95	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Target Kinerja 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	rintahan yang berbasis TIK (%)	Jumlah OPD) x 100 %		
Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	(Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100 %	95	Sekretariat Daerah
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)		90	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	Pengelolaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	12	

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran Tahun 2023 berdasarkan Perangkat Daerah yang bersumber dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1.2
PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN PERUBAHAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				119.464.348.229	136.845.973.101	136.609.786.017				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	80.506.100.382	110.651.547.324	110.631.547.324				

1	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	120.500.000	43.272.000	43.272.000		
1	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	120,500,000	43.272.000	43.272.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	69.587.225.434	102.807.544.776	102.807.544.776		
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	735 Orang/bulan	735 Orang/bulan	69,587,225,434	102.807.544.776	102.807.544.776	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Dokumen 20 Orang	4 Dokumen 20 Orang	265.000.000	84.999.800	84.999.800		
1	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	250.000.000	69.999.800	69.999.800	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BAngunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	12 Laporan 4 Paket 3 Paket 1 Paket 6 Paket 5 Paket	12 Laporan 4 Paket 3 Paket 1 Paket 6 Paket 5 Paket	1.919.000.000	844.039.750	824.039.750		
1	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	9.999.250	9.999.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	490.000.000	110.262.000	110.262.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	40.000.000	24.990.000	24.990.000	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Umum-DAU
1	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	358.000.000	225.140.000	205.140.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	348.000.000	164.965.500	164.965.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	673.000.000	308.683.000	308.683.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang disediakan	3 Unit	3 Unit	474.300.000	232.000.000	232.000.000		

1	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	474.300.000	232.000.000	232.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	7.791.524.648	6.362.455.998	6.362.455.998		
1	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.559.000	92.558.998	92.558.998	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.000.000	17.000.000	17.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.675.965.648	6.246.897.000	6.246.897.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit 150 Unit	64 Unit 150 Unit	348.550.300	277.235.000	277.235.000		
1	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64 Unit	64 Unit	250.675.300	215.760.000	215.760.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	97.875.000	61.475.000	61.475.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD APM SMP Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	101,3 93,5 30 %	101,3 93,5 30 %	38.583.247.847	26.009.656.677	25.899.895.893		
1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia Jumlah mebel sekolah yang tersedia Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	7 Paket 1 Paket 185 Orang 1 Unit 1 Ruang 5 Ruang	7 Paket 1 Paket 185 Orang 1 Unit 1 Ruang 5 Ruang	23.417.678.335	11.481.589.127	11.423.894.127		
1	01	02	2,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0 Ruang	350.000.000	100.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-

												Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0 Ruang	250.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- DAU
1	01	02	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	700.000.000	200.000.000	125.165.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	400.000.000	292.670.000	342.670.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	38 Ruang	0 Ruang	8.351.484.223	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	135.000.000	57.590.000	57.590.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	01	02	2,01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0 Ruang	125.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	125.000.000	133.549.000	133.549.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	1.470.000.000	252.702.000	257.857.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah	jumlah rumdin yang diperbaiki	8 Unit	0 unit	800.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	11 Paket	11 Paket	1.330.000.000	269.242.710	269.242.710	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	690.000.000	694.999.900	694.999.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5446 Peserta Didik	5446 Peserta Didik	6,946,793,812	1.604.917.617	1.711.617.617	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	65 Paket	0 Paket	200.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	62 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	36.800.000	25.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	50.000.000	21.249.900	21.249.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	544 Peserta Didik	544 Peserta Didik	543.998.300	496.297.900	531.297.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	15 Orang	2 kelompok	5.038.000	1.000.000	1.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	278 Orang	278 Orang	391.864.000	279.797.100	243.397.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	316.700.000	224.676.700	224.676.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	0	6.069.300.000	6.069.300.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Afirmasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja
1	01	02	2,01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	200.000.000	758.596.300	740.281.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah asrama sekolah yang dibangun Jumlah asrama yang telah direhabilitasi sedang/ berat Jumlah mebel sekolah yang tersedia Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ Golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	0 Unit 1 Unit 6 Paket 86 Orang 20 Orang 0 Paket 0 Peserta Didik 0 Peserta didik 1 Ruang 5 Ruang 0 Ruang 4 Unit 2 Unit 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan	0 Unit 1 Unit 6 Paket 86 Orang 20 Orang 0 Paket 0 Peserta Didik 0 Peserta didik 1 Ruang 5 Ruang 0 Ruang 4 Unit 2 Unit 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan	5.701.490.222	8.441.527.147	8.613.362.147	
---	----	----	------	--	--	---	--	--	---------------	---------------	---------------	--

						<p>Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama</p> <p>Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia</p> <p>Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik</p> <p>Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian</p> <p>jumlah ruang guru sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat</p> <p>Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat</p> <p>Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah sarana, prasarana dan</p>	<p>Pendidikan</p> <p>0 Peserta Didik</p>	<p>Pendidikan</p> <p>0 Peserta Didik</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						utilitas sekolah yang rusak sedang/ berat						
						Jumlah satuan pendidik sekolah menengah pertama yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan Jumlah siswa yang						

						mengikuti ajang kompetensi/ lomba akademik dan non akademik							
1	01	02	2,02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	0	921.758.900	924.158.900		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1	01	02	2,02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	0	217.535.300	218.435.300		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1	01	02	2,02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	0	540.246.100	550.106.100		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1	01	02	2,02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	500.000.000	497.493.590	497.493.590	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	800.000.000	361.428.460	361.428.460	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0 Ruang	750.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	02	2,02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	405.000.000	199.998.538	199.998.538	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU
1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	8 Paket	640.031.200	363.359.700	363.359.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	320.000.000	109.999.900	109.999.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2185 Peserta Didik	2185 Peserta Didik	1,391,585,022	1.801.569.109	1.994.844.109	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	12 Peserta Didik	0 Peserta Didik	27.200.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	50.000.000	8.999.900	8.999.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	488 Peserta Didik	488 Peserta Didik	273.000.000	244.445.250	244.445.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15 Orang	2 kelompok	5.038.000	1.000.000	1.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	153 Orang	153 Orang	269.636.000	190.943.600	156.343.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	270.000.000	110.548.800	110.548.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	0	2.872.200.000	2.872.200.000		DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Afirmasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja

1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah dibangun Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah dilakukan pemeliharaan rutin Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/ berat Jumlah mebeluer PAUD yang telah diadakan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang tersedia pada satuan PAUD Jumlah peraga siswa PAUD yang telah	17 Orang 6 Unit 6 Unit 8 Unit 7 Paket 77 Orang 370 Orang 45 Orang 6 Paket 2 Paket 2590 Orang 91 Orang 5 Unit 8 Unit	17 Orang 6 Unit 6 Unit 8 Unit 7 Paket 77 Orang 370 Orang 45 Orang 6 Paket 2 Paket 2590 Orang 91 Orang 5 Unit 8 Unit	7.120.084.290	5.234.079.000	5.027.021.700	
---	----	----	------	--	---	---	--	--	---------------	---------------	---------------	--

						menerima biaya personil peserta didik Jumlah perlengkapan PAUD yang telah diadakan Jumlah perlengkapan siswa PAUD yang telah diadakan Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar di PAUD Jumlah peserta didik PAUD yang telah menerima biaya personil peserta didik							
						Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun Jumlah saran, prasarana dan utilitas sekolah PAUD yang telah direhabilitasi sedang/ berat							
1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	1.981.920.000	611.920.000	611.920.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	1 Unit	1 Unit	446.512.000	857.575.000	882.575.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-

						PAUD yang Telah Dibangun						Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit	250.000.000	240.000.000	200.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	0 Paket	202.449.900	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	1.653.860.000	204.630.700	204.630.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	200.000.000	199.700.000	199.700.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1500 orang	0 orang	52.000.000	50.640.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	402.446.440	197.720.000	197.720.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana

												Semua Kelurahan	Alokasi Umum
1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	600 Peserta Didik	600 Peserta Didik	226.658.250	155.178.050	122.472.850	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer DAU
1	01	02	2,03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	20.500.000	18.090.000	18.090.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	77 Orang	77 Orang	701.800.000	700.700.000	463.885.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	419 Orang	419 Orang	499.280.000	428.744.750	598.924.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	399.757.700	293.715.500	251.638.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	0	1.205.400.000	1.205.400.000		Dana Transfer Khusus - Dana

													Alokasi Khusus Non Fisik
1	01	02	2,03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	2 Orang	2 Orang	82.900.000	70.065.000	70.065.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU
1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan yang tersedia Jumlah alat rumah tangga pendidikan nonformal/kesetaraan yang diadakan Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru nonformal/kesetaraan yang telah dibangun Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru pendidikan nonformal/kesetaraan yang direhabilitasi sedang/ berat Jumlah kelengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan yang tersedia Jumlah mebel	7 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Unit 5 Paket 4 Paket 4 Orang 92 Orang 200 Orang 250 Peserta didik 1 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan 3 Orang	7 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Unit 5 Paket 4 Paket 4 Orang 92 Orang 200 Orang 250 Peserta didik 1 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan 3 Orang	2.343.995.000	852.461.403	835.617.919		

						pendidikan nonformal/ kesetaraan yang diadakan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan Jumlah peserta didik nonformal/ kesetaraan yang menerima biaya personil Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan yang direhabilitasi sedang/ berat					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan yang telah dibangun Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal/ kesetaraan yang dilaksanakan pemeliharaan rutin Jumlah satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian jumlah sekolah nonformal/ kesetaraan yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah sekolah nonformal/ kesetaraan yang mengelola dana BOP kesetaraan Jumlah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

						BOP sekolah nonformal/kesetaraan							
1	01	02	2,04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	0 Unit	100.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	200.000.000	49.504.000	49.504.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	0 Paket	200.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	414.095.000	49.183.240	45.183.240	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	70 Peserta Didik	135.000.000	27.937.500	27.937.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2,04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/	450 Paket	450 Paket	150.000.000	81.070.360	81.070.360	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana

						Kesetaraan yang Tersedia							Semua Kelurahan	Alokasi Umum
1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	273.000.000	198.780.188	198.780.188	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	02	2,04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Orang	6 Orang	81.900.000	81.900.000	81.900.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	02	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang	140.000.000	83.154.240	83.154.240	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	600.000.000	26.631.975	13.788.491	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0	222.300.000	222.300.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	

1	01	02	2,04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	50.000.000	31.999.900	31.999.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	90,3 %	90,3 %	375.000.000	184.769.100	78.342.800		
1	01	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	4 Dokumen	375.000.000	184.769.100	78.342.800		
1	01	04	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Dokume	12 Dokumen	375,000,000	184.769.100	78.342.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									119.464.348.229	136.845.973.101	136.609.786.017		

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	

					Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Sumber Dana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				42.728.425.166	43.688.091.605	47.462.353.635			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	31.783.105.666	31.795.550.611	33.669.064.891			
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	3	3	27.026.873.038	28.131.558.200	29.434.823.305			
1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	273 Orang/ bulan	273 Orang/ bulan	27,018,873,038	28.123.558.200	29.428.823.305	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum	
1	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se m SKPD	18 Laporan	18 Laporan	8.000.000	8.000.000	6.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum	
1	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	3	3	7.311.000	7.310.650	4.124.450			

1	02	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2.561.000	2.561.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.499.850	1.874.650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.250.000	2.249.800	2.249.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	7	7	216.024.000	215.947.025	380.357.400		
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	12.824.000	12.822.250	12.285.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	51.986.500	51.985.375	51.967.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	17.643.500	17.643.500	17.643.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-,

												Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	22.000.000	21.999.900	21.999.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, DAU
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	109.570.000	109.496.000	274.462.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	3	3	89.000.000	50.000.000	50.000.000		
1	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, DAU
1	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	74.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah terlaksana	3	3	3.622.807.628	2.638.984.736	3.048.909.736		
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.649.700	1.640.000	1.640.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	213.157.928	198.419.736	198.419.736	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.408.000.000	2.438.925.000	2.848.850.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	3	3	816.590.000	750.850.000	750.850.000		
1	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	187 Unit	187 Unit	790.800.000	740.700.000	740.700.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	10.790.000	10.150.000	10.150.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD	7	7	4.500.000	900.000	0		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	4.500.000	900.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, DAU
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	97 % ≤ 4,00 % 82	97 % ≤ 4,00 % 82	10.800.685.250	11.399.125.044	13.299.872.794		
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3	3	751.897.350	1.043.381.025	869.588.925		
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	1 Unit	0 Unit	25.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, Dana

						dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas						Semua Kelurahan	Alokasi Umum
1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	375.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	150.000.000	150.000.000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum ,
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	102.550.000	598.212.675	598.212.675	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik

1	02	02	2,01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	100 Unit	100 Unit	35.000.000	33.181.000	24.885.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	100 Unit	64.347.350	61.987.350	46.490.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3	3	9.953.590.750	10.312.236.869	12.386.776.719		
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1263 Orang	1263 Orang	8.450.000	51.479.800	51.479.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAU Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1205 Orang	1205 Orang	8.270.000	21.470.000	20.710.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

													Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang	1100 Orang	35.750.000	137.780.600	132.460.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3944 Orang	3944 Orang	7.500.000	67.350.000	67.350.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	9957 Orang	9957 Orang	7.750.250	7.750.250	7.750.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, Dana

						Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							Semua Kelurahan	Alokasi Umum
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23265 Orang	23265 Orang	22,250,500	22.119.700	22.119.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum	
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang	4259 Orang	8.215.000	88.205.000	86.685.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ,Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1445 Orang	1445 Orang	14.087.500	12.567.250	8.548.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum	
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	498 Orang	498 Orang	12.075.000	8.544.850	8.544.850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum	

1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	248 Orang	248 Orang	11.275.000	11.275.000	11.275.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	557 Orang	557 Orang	55.445.250	51.645.100	51.645.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1284 Orang	1284 Orang	30.815.750	27.155.630	27.155.630	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	35.750.000	8.582.300	8.582.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	205.000.000	97.207.864	97.207.864	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	45.122.775	37.697.775	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	6 Dokumen	8.322.150	4.042.100	4.042.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	35.100.000	162.780.000	162.780.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000	3.900.000	3.900.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, Dana

						Mandiri dan Tradisional Lainnya						Semua Kelurahan	Alokasi Umum
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	55.692.600	55.692.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1119 Orang	1119 Orang	6.500.000	6.500.000	6.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	10.878.000	10.878.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	54.754.000	325.480.900	321.910.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer

													Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	8.991.653.650	8.149.852.750	10.248.006.350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	10.650.000	4.112.000	4.112.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	673.513.000	673.513.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	19.268.700	19.268.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, DAU

1	02	02	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	209.476.700	234.220.700	234.220.700	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	10362 Keluarga	10362 Keluarga	4.500.000	3.740.000	2.740.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang terlaksana	2	2	48.500.000	21.880.000	21.880.000		
1	02	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	18.200.000	18.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000	3.680.000	3.680.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/Kota	7	7	46.697.150	21.627.150	21.627.150		
1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	6 Unit	6 Unit	31.503.850	20.873.850	20.873.850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4 Dokumen	4 Dokumen	15.193.300	753.300	753.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	92 %	92 %	46.770.000	3.450.000	3.450.000		
1	02	03	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/kota	5	5	2.550.000	1.250.000	1.250.000		
1	02	03	2,01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.550.000	1.250.000	1.250.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi	9	9	3.500.000	2.200.000	2.200.000		
1	02	03	2,02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	3.500.000	2.200.000	2.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	03	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	3	40.720.000	0	0		
1	02	03	2,03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	8 Orang	8 Orang	40.720.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	78 %	78 %	49.314.250	377.523.950	377.523.950		
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha	Jumlah sub kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah	1	1	5.730.000	843.000	843.000		

					Mikro Obat Tradisional (UMOT)	kabupaten/kota yang terlaksana							
1	02	04	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10 Dokumen	10 Dokumen	5,730,000	843.000	843.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	04	2,02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sub kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dilaksanakan	1	1	8.050.000	2.253.750	2.253.750		
1	02	04	2,02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	6 Dokumen	6 Dokumen	8.050.000	2.253.750	2.253.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P_IRT sebagai Izin Produksi, Untuk produk makanan, minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang diterbitkan	65	65	18.500.000	134.850.000	134.850.000		
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	36 Dokumen	36 Dokumen	18,500,000	134.850.000	134.850.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	100	5.650.250	1.890.200	1.890.200		

1	02	04	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	5.650.250	1.890.200	1.890.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	25	25	5.790.000	76.304.000	76.304.000		
1	02	04	2,05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.790.000	76.304.000	76.304.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sub kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pos market pada Produksi dan Produk makanan Minuman	1	1	5.594.000	161.383.000	161.383.000		

						Industri Rumah Tangga hyang dilaksanakan							
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	20 Unit	20 Unit	5.594.000	161.383.000	161.383.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-DAU , Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Keluarga Sehat (%)	37 %	37 %	48.550.000	112.442.000	112.442.000		
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	1	1	8.500.000	38.908.000	38.908.000		
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000	38.908.000	38.908.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

													Khusus Non Fisik
1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabuapten/kota yang terlaksana	1	1	11.000.000	7.550.000	7.550.000		
1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000	7.550.000	7.550.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	1	1	29.050.000	65.984.000	65.984.000		
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	29.050.000	65.984.000	65.984.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

													Khusus Non Fisik
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk (%)	2,22 %	2,22 %	30.145.000	120.000.000	120.000.000		
2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	1	1	25.250.000	0	0		
2	14	02	2,01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	14	02	2,01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	3 Dokumen	0 Dokumen	5.250.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang dipetakan dan didata	19000	19000	4.895.000	120.000.000	120.000.000		
2	14	02	2,02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	0	64.200.000	64.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	02	2,02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	4.895.000	31.800.000	31.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	02	2,02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	0	24.000.000	24.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	69,21 %	69,21 %	16.875.000	1.028.731.000	1.028.731.000		
2	14	03	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder, organisasi yang mendapatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	8.275.000	554.600.000	554.600.000		

						Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							
2	14	03	2,01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40 Organisasi	40 Organisasi	3,750,000	80.000.000	80.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	2,01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	0 Dokumen	4.525.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	0	150.000.000	150.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

						serta Media Luar Ruang							
2	14	03	2,01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	12 Laporan	0	52.000.000	52.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	0	192.600.000	192.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	2,01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	12 Laporan	0	80.000.000	80.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

													Khusus Non Fisik
2	14	03	2,02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB yang melakukan penyuluhan	6 0	6 0	5.250.000	78.000.000	78.000.000		
2	14	03	2,02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	2 Organisasi	0	4.000.000	4.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	2,02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB) untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	0 Laporan	5.250.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	14	03	2,02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 Orang	200 Orang	0	74.000.000	74.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang mendapatkan distribusi alkon	7	7	3.350.000	201.131.000	201.131.000		
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	0	7.200.000	7.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	333 Orang	333 Orang	0	186.431.000	186.431.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	2,03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	12 Laporan	12 Laporan	3.350.000	7.500.000	7.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

						Jaringan dan Jejaringnya							Khusus Non Fisik
2	14	03	2,04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				0	195.000.000	195.000.000		
2	14	03	2,04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	0	9.000.000	9.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
2	14	03	2,04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12 Kampung	12 Kampung	0	186.000.000	186.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	235	235	18.250.000	677.550.000	677.550.000		
2	14	04	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan	3	3	18.250.000	677.550.000	677.550.000		

					Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan							
2	14	04	2,01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	37 Kelompok	0 Kelompok	4.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	,
2	14	04	2,01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	20 Unit	0	360.000.000	360.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

2	14	04	2,01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	85 Orang	85 Orang	3.750.000	2.550.000	2.550.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	04	2,01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	200 Orang	200 Orang	0	315.000.000	315.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	04	2,01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	0 Laporan	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	410.755.260	410.755.260		

1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				0	410.755.260	410.755.260		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	410.755.260	410.755.260	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				438.207.626	587.438.000	587.438.000		
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	32.482.000	32.482.000		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	40 Unit	0	32.482.000	32.482.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3	3	438.207.626	554.956.000	554.956.000		
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	160 Orang	0	50.330.000	57.820.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

													Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	152 Orang	0	23.905.000	22.052.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	511 Orang	0	35.597.000	27.960.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1118 Orang	0	12.050.000	12.050.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4749 Orang	0	3.100.000	3.100.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	0 Orang	0 Orang	0	13.000.000	13.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

						Pelayanan Sesuai Standar							Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	0	137.427.000	139.427.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	20.000.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	0	60.700.000	60.700.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	379.232.376	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	58.975.250	198.847.000	198.847.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN				0	159.560.000	159.560.000		

					MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	121.510.000	121.510.000		
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	0	121.510.000	121.510.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	38.050.000	38.050.000		
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	0	38.050.000	38.050.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	606.165.701	606.165.701		

1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				0	606.165.701	606.165.701		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	606.165.701	606.165.701	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				640.985.657	460.519.000	460.519.000		
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	24.082.000	24.082.000		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	37 Unit	37 Unit	0	24.082.000	24.082.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 3	3 3	640.985.657	436.437.000	436.437.000		
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	230 Orang	0	17.808.000	17.783.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana

													Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	819 Orang	0	23.050.000	23.075.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	1760 Orang	0	26.200.000	26.200.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	7479 Orang	0	3.800.000	3.800.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		120 Orang	0	45.500.000	45.500.000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	0	115.858.000	115.858.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	19.900.000	19.900.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	0	36.900.000	36.900.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	570.736.860	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	70.248.797	147.421.000	147.421.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				0	93.290.000	93.290.000		
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	84.690.000	84.690.000		

1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	0	84.690.000	84.690.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota				0	8.600.000	8.600.000		
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	0	8.600.000	8.600.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	703.119.754	703.119.754		
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				0	703.119.754	703.119.754		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	703.119.754	703.119.754	Kota Sawahlunto, Silungkang Silungkang Oso	Dana Transfer Umum-DAU
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				693.803.760	579.663.000	579.663.000		

1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	29.388.000	29.388.000		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	41 Unit	41 Unit	0	29.388.000	29.388.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 3	3 3	693.803.760	550.275.000	550.275.000		
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222 Orang	222 Orang	0	23.934.000	23.655.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	212 Orang	212 Orang	0	5.800.000	5.800.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	804 Orang	0	56.600.000	56.879.000	Kota Sawahlunto, Silungkang	Dana Transfer Khusus-Dana

												Semua Kelurahan	Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1723 Orang	0	10.750.000	10.750.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	7233 Orang	0	9.080.000	9.080.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	271 Orang	0	14.250.000	14.250.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	0	158.611.000	158.611.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	26.300.000	26.300.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	0	65.050.000	65.050.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Silungkang Oso	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	612.158.172	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	81.645.588	179.900.000	179.900.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				0	96.160.000	96.160.000		
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	87.510.000	87.510.000		
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	0	87.510.000	87.510.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

													Khusus Non Fisik
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	8.650.000	8.650.000		
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	0	8.650.000	8.650.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	1.448.297.153	1.448.297.153		
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				0	1.448.297.153	1.448.297.153		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1.448.297.153	1.448.297.153	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.343.799.972	784.146.000	784.146.000		

1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	40.973.000	40.973.000		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	79 Unit	79 Unit	0	40.973.000	40.973.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 3	3 3	1.343.799.972	743.173.000	743.173.000		
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	425 Orang	0	50.519.000	50.249.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	407 Orang	407 Orang	0	3.605.000	3.605.000		Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1376 Orang	0	75.470.000	75.740.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3009 Orang	0	38.100.000	38.100.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	12790 Orang	0	9.050.000	9.050.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	215 Orang	0	11.600.000	11.600.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	0	188.315.000	188.315.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	41.200.000	41.200.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	0	74.500.000	74.500.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

													Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	1.201.371.972	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	142.428.000	250.814.000	250.814.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				0	158.075.000	158.075.000		
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	147.537.000	147.537.000		
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	0	147.537.000	147.537.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	10.538.000	10.538.000		
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	0	10.538.000	10.538.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	497.572.298	497.572.298		
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				0	497.572.298	497.572.298		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	497.572.298	497.572.298	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				531.797.840	477.546.500	485.046.500		

1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	24.082.000	24.082.000		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	68 Unit	68 Unit	0	24.082.000	24.082.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 3	3 3	531.797.840	453.464.500	460.964.500		
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138 Orang	138 Orang	0	44.850.500	47.760.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131 Orang	131 Orang	0	5.900.000	6.828.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	138 Orang	0	39.036.000	42.676.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana

													Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1298 Orang	0	10.150.000	10.150.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5520 Orang	0	14.950.000	14.950.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	128 Orang	0	12.900.000	12.900.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	r
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	0	113.955.000	113.977.500	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	28.750.000	28.750.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	0	35.550.000	35.550.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana

													Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	465.189.840	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	66.608.000	147.423.000	147.423.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				0	76.262.500	68.762.500		
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	69.912.500	62.412.500		

1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	0	69.912.500	62.412.500	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	6.350.000	6.350.000		
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	0	6.350.000	6.350.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	369.262.880	369.262.880		
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				0	369.262.880	369.262.880		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	369.262.880	369.262.880	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				392.357.512	462.489.100	462.489.100		
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	23.993.000	23.993.000		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	37 Unit	37 Unit	0	23.993.000	23.993.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 3	3 3	392.357.512	438.496.100	438.496.100		
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92 Orang	92 Orang	0	27.610.100	25.120.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	88 Orang	0	5.350.000	7.320.100	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	363 Orang	0	37.618.000	38.138.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	767 Orang	0	11.000.000	11.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3262 Orang	0	12.700.000	12.700.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	64 Orang	0	9.500.000	9.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	0	116.689.000	116.689.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	34.100.000	34.100.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

													Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	0	37.050.000	37.050.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	355.450.512	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	36.907.000	146.879.000	146.879.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				0	89.286.900	89.286.900		
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	84.282.900	84.282.900		
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	0	84.282.900	84.282.900	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

													t Khusus Non Fisik
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	5.004.000	5.004.000		
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	0	5.004.000	5.004.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Bara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi t Khusus Non Fisik
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	97 % ≤ 4,00 % 82	97 % ≤ 4,00 % 82	326.170.000	1.393.646.124	1.393.646.124		
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3	3	257.550.000	1.348.838.124	1.348.838.124		

1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	125.000.000	540.235.124	540.235.124	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	132.550.000	776.101.000	776.101.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	12 Paket	0	32.502.000	32.502.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3	3	68.620.000	44.808.000	44.808.000		

1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	68,620,000	44.808.000	44.808.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
TOTAL									48.082.820.008	56.038.911.775	59.813.173.805		

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			65.400.038.027	74.555.960.801	76.922.158.511					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	63.379.138.027	61.767.849.276	64.873.366.986				
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	3	3	31.788.015.196	29.860.639.376	31.665.658.579				

1	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	256 Orang/bulan	256 Orang/bulan	31,513,015,196	29.860.639.376	31.665.658.579	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	275.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	2	2	451.600.000	0	0		
1	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	256 Orang	0 Orang	451.600.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	7	7	210.000.000	0	0		
1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	60.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	150.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah terlaksana	3	3	3.073.506.640	2.566.409.900	2.788.128.407		
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	892.976.640	698.693.700	899.424.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.180.530.000	1.867.716.200	1.888.704.407	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	3	3	425.580.000	340.800.000	419.580.000		
1	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	29 Unit	425.580.000	340.800.000	419.580.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD	7	7	27.430.436.191	29.000.000.000	30.000.000.000		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	27.430.436.191	29.000.000.000	30.000.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Pendapatan dari BLUD

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	97 % ≤ 4,00 % 82	97 % ≤ 4,00 % 82	2.020.900.000	12.788.111.525	12.048.791.525	
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	3	3	1.643.400.000	12.575.851.525	11.836.531.525	
1	02	02	2,01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	1 unit	0	8.695.999.325	11.139.749.325	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
1	02	02	2,01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 unit	1 unit	0	2.383.070.000	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
1	02	02	2,01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit	1.175.000.000	1.175.000.000	375.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Dana Transfer Umum-

						Yang Dilakukan Pemeliharaan							Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	268.400.000	185.000.000	185.000.000		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	205 Unit	205 Unit	200.000.000	136.782.200	136.782.200		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	3 3	3 3	177.500.000	112.320.000	112.320.000			
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	177.500.000	112.320.000	112.320.000		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/Kota	7	7	200.000.000	99.940.000	99.940.000			
1	02	02	2,04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	99.940.000	99.940.000		Kota Sawahlunto, Lembah	Dana Transfer Umum-

						Pelayanan Kesehatan Rujukan							Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum
TOTAL									65.400.038.027	74.555.960.801	76.922.158.511			

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			86.548.594.767	86.021.214.829	67.818.497.279				
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	10.465.656.014	8.263.186.757	8.263.186.757			
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi Keuangan (bulan)	13	13	7.202.526.792	5.457.405.350	5.457.405.350			
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	7,202,526,792	5.457.405.350	5.457.405.350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum	
1	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kemampuan dan Kapasitas sumber daya aparatur (bulan)	12	12	90.930.000	63.420.000	63.420.000			

1	03	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	48 Orang	90.930.000	63.420.000	63.420.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi Umum (bulan)	12	12	500.483.210	397.465.845	397.465.845		
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.350.000	20.344.374	20.344.374	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	120.663.210	112.202.671	112.202.671	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.475.000	10.640.000	10.640.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.847.000	44.846.800	44.846.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	284.148.000	209.432.000	209.432.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)	12	12	149.868.650	13.635.000	13.635.000		
1	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1 Unit	149.868.650	13.635.000	13.635.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	12	1.945.529.962	1.945.469.892	1.945.469.892		
1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.879.000	8.825.000	8.825.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	223.950.962	223.944.892	223.944.892	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	03	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.709.200.000	1.709.200.000	1.709.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	12	576.317.400	385.790.670	385.790.670		
1	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit	398.177.400	332.120.670	332.120.670	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	128.940.000	29.120.000	29.120.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	49.200.000	24.550.000	24.550.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, Dana

												Semua Kelurahan	Alokasi Umum
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,35 %	50,35 %	7.675.000.000	2.960.626.798	2.580.531.798		
1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola (unit)	20	20	3.770.000.000	1.986.446.791	1.606.351.791		
1	03	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	205.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	02	2,01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	305.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	02	2,01	06	Pembangunan Embung dan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	800.000.000	580.000.000	393.180.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-

					Penampung Air Lainnya							Kecamatan Semua Kelurahan	, Dana Alokasi Umum
1	03	02	2,01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	0.74 KM	1.860.000.000	1.160.000.000	966.725.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	02	2,01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM	0.075 KM	600.000.000	246.446.791	246.446.791	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	4000	4000	3.905.000.000	974.180.007	974.180.007		
1	03	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	6 Dokumen	1 Dokumen	605.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	02	2,02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.5 KM	0.673 KM	500.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, Dana

												Semua Kelurahan	Alokasi Umum
1	03	02	2,02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	2 Bendung	0 Bendung	1.200.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	0.562 KM	550.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	02	2,02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 Bendung	0 Bendung	400.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.25 KM	0.105 KM	650.000.000	224.180.007	224.180.007	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sarana dan prasarana air minum dalam kondisi baik (%)	91 %	91 %	3.660.000.000	3.868.850.000	3.958.850.000		

1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih (RT)	900	900	3.660.000.000	3.868.850.000	3.958.850.000		
1	03	03	2,01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Super Pembangunan/Peningkatan SPAM	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000.000	3.608.850.000	3.608.850.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	03	2,01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0 Liter/Detik	5 Liter/Detik	60.000.000	60.000.000	150.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	03	2,01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi	0	1 Lokasi	0	200.000.000	200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Air limbah yang ditangani (%)	88 %	88 %	799.775.000	1.385.300.000	1.385.300.000		
1	03	05	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi (Unit)	216	216	799.775.000	1.385.300.000	1.385.300.000		

1	03	05	2,01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	216 Rumah Tangga	216 Rumah Tangga	799.775.000	1.385.300.000	1.385.300.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	52,34 %	52,34 %	1.475.000.000	1.300.000.000	1.350.000.000		
1	03	06	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara (m)	1000	1000	1.475.000.000	1.300.000.000	1.350.000.000		
1	03	06	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	06	2,01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1000 M	374 M	875.000.000	900.000.000	950.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	06	2,01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	1000 M	200 M	500.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	79,34 %	79,34 %	7.535.000.000	6.480.000.000	6.486.725.000		
1	03	07	2,01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	73	73	7.535.000.000	6.480.000.000	6.486.725.000		
1	03	07	2,01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	73 Sistem Jaringan	70 Sistem Jaringan	7.535.000.000	6.480.000.000	6.486.725.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%) Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	66 % 89 %	66 % 89 %	22.036.907.253	22.619.128.650	14.300.128.650		
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	100	100	22.036.907.253	22.619.128.650	14.300.128.650		

1	03	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA) Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	100 Dokumen 0 Dokumen	100 Dokumen 0 Dokumen	300,000,000	135.003.480	135.003.480	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	20 Dokumen	21,000,000,000	20.484.125.170	12.065.125.170	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	08	2,01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan ubah suai	5 Unit	5 Unit	736.907.253	2.000.000.000	2.100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%) Persentase jembatan dalam kondisi terpelihara (%)	72,21 % 79 %	72,21 % 79 %	31.363.013.750	38.836.876.111	29.186.528.561		

1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara (Km)	13,9	13,9	31.363.013.750	38.836.876.111	29.186.528.561		
1	03	10	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	7 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000	684.022.599	684.022.599	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-DAU
1	03	10	2,01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	0 M ²	126 M ²	1.000.000.000	1.996.758.800	300.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU
1	03	10	2,01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000	296.493.750	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU
1	03	10	2,01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	0.7 KM	4.709.438.750	380.537.500	380.537.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3.4 KM	6.311 KM	9.090.000.000	18.688.043.250	17.980.708.250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6.5 KM	4.107 KM	4.155.000.000	8.545.786.250	3.696.026.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2 KM	1 KM	3.458.575.000	2.910.932.962	2.910.932.962	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	50 M	28 M	6.550.000.000	4.895.537.500	2.795.537.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	20 M	16 M	600.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	40 M	46 M	500.000.000	338.763.500	338.763.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	22,22 %	22,22 %	1.538.242.750	307.246.513	307.246.513		
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun (dok)	5	5	233.242.750	51.642.930	51.642.930		

1	03	12	2,01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	26.519.650	26.519.650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	12	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	33.242.750	25.123.280	25.123.280	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	12	2,02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah (kali)	1	1	1.000.000.000	124.704.234	124.704.234		
1	03	12	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	124.704.234	124.704.234	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	12	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	800.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	32	32	230.000.000	96.291.576	96.291.576		

1	03	12	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	130.000.000	51.440.832	51.440.832	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	44.850.744	44.850.744	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	12	2,04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	100	100	75.000.000	34.607.773	34.607.773		
1	03	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100 Dokumen	100 Dokumen	75.000.000	34.607.773	34.607.773	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	555.000.000	537.949.205	669.739.000		
1	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)	12	12	55.000.000	54.739.000	54.739.000		

1	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	55.000.000	54.739.000	54.739.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	12	500.000.000	483.210.205	615.000.000		
1	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	500.000.000	483.210.205	615.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
TOTAL									87.103.594.767	86.559.164.034	68.488.236.279		

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					15.409.877.718	14.358.490.242	15.014.120.242			

1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	11.117.098.468	9.590.765.842	10.252.166.842		
1	04	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	14 bulan	14 bulan	4.744.223.000	4.484.048.591	4.414.048.591		
1	04	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	560 orang bulan	4.744.223.000	4.484.048.591	4.414.048.591	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi pegawai (%)	2 %	2 %	25.000.000	24.880.000	24.880.000		
1	04	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	8 orang	25.000.000	24.880.000	24.880.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	100 %	100 %	667.989.300	442.113.515	439.113.515		
1	04	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	4.727.800	4.511.700	4.511.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	04	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	360.000.000	132.833.815	132.833.815	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	40.002.000	33.734.000	30.734.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	25.801.500	33.695.000	33.695.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	150 laporan	237.458.000	237.339.000	237.339.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang kegiatan rutin kantor	100 %	100 %	4.864.024.918	3.912.222.936	4.646.623.936		
1	04	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.300.000	4.550.000	4.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	12 laporan	12 laporan	242.799.918	242.798.936	242.798.936	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-

						daya air dan listrik yang disediakan						Kecamatan Semua Kelurahan	, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	7.500.000	4.500.000	4.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	4.598.425.000	3.660.374.000	4.394.775.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	100 %	100 %	815.861.250	727.500.800	727.500.800		
1	04	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	71 Unit	71 Unit	790.881.250	701.858.800	701.858.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	13.080.000	13.750.000	13.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	04	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	11.900.000	11.892.000	11.892.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	90 %	90 %	494.665.750	494.641.000	407.541.000		
1	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang direhab	10 unit	10 unit	63.717.750	63.710.200	56.610.200		
1	04	02	2,01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	63.717.750	63.710.200	56.610.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	02	2,02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	2 kali	2 kali	21.265.000	21.263.600	21.263.600		

1	04	02	2,02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	21.265.000	21.263.600	21.263.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	02	2,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban	10 unit	6 unit	400.785.000	400.781.000	320.781.000		
1	04	02	2,03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	10 Unit Rumah	400.785.000	400.781.000	320.781.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	02	2,04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendistribusian dan serah terima rumah korban bencana/relokasi	10 unit	10 unit	8.898.000	8.886.200	8.886.200		
1	04	02	2,04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.898.000	8.886.200	8.886.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	85 %	85 %	2.145.617.500	1.645.602.200	1.624.302.200		
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan kumuh yang ditata	16 kawasan	16 kawasan	5.617.500	5.607.600	5.607.600		
1	04	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen	5.617.500	5.607.600	5.607.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kualitas permukiman kumuh yang ditingkatkan	90 %	90 %	2.140.000.000	1.639.994.600	1.618.694.600		
1	04	03	2,03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang diperbaiki	75 Unit Rumah	75 Unit Rumah	2.140.000.000	1.639.994.600	1.618.694.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	19,08 Ha	19,08 Ha	122.496.000	122.494.200	232.494.200		

1	04	04	2,01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang diperbaiki di luar kawasan kumuh	6 unit	8 unit	122.496.000	122.494.200	232.494.200		
1	04	04	2,01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	6 Unit Rumah	8 Unit Rumah	122.496.000	122.494.200	232.494.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang tertata (%)	85 %	85 %	1.530.000.000	2.504.987.000	2.497.616.000		
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang tertata	19 paket	19 paket	1.530.000.000	2.504.987.000	2.497.616.000		
1	04	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	8 lokasi	8 lokasi	1.530.000.000	2.504.987.000	2.497.616.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)	100 %	100 %	26.167.500	26.167.000	22.167.000		

					SENGKETA TANAH GARAPAN								
2	10	04	2,01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	1 kasus	1 kasus	26.167.500	26.167.000	22.167.000		
2	10	04	2,01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	6.300.000	6.299.600	6.299.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	10	04	2,01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 berita acara	1 berita acara	19.867.500	19.867.400	15.867.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	100 %	100 %	35.301.000	35.300.200	31.300.200		

2	10	06	2,01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam satu daerah	1 dokumen	1 dokumen	35.301.000	35.300.200	31.300.200		
2	10	06	2,01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	19.874.000	19.873.700	15.873.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	10	06	2,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	7.127.000	7.126.900	7.126.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	10	06	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.300.000	8.299.600	8.299.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)	100 %	100 %	14.400.000	14.400.000	14.400.000		

2	10	07	2,01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah segmen batas tanah ulayat nagari yang akan dikeluarkan surat penetapannya dalam satu tahun anggaran	1 laporan	1 laporan	14.400.000	14.400.000	14.400.000		
2	10	07	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	14.400.000	14.400.000	14.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan (%)	100 %	100 %	17.910.000	17.909.800	17.909.800		
2	10	09	2,01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	1 dokumen	1 dokumen	17.910.000	17.909.800	17.909.800		
2	10	09	2,01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 dokumen	1 dokumen	17.910.000	17.909.800	17.909.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)	80 %	80 %	3.930.000	3.929.800	3.929.800		
2	10	10	2,01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pada	1 laporan	1 laporan	3.930.000	3.929.800	3.929.800		

					Daerah Kabupaten/Kota	OPD terkait penggunaan tanah							
2	10	10	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	3.930.000	3.929.800	3.929.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				0	288.208.000	288.208.000		
2	11	02	2,02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0	288.208.000	288.208.000		
2	11	02	2,02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	150.000.000	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	11	02	2,02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	138.208.000	138.208.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	75 %	75 %	40.604.450	39.464.450	39.464.450		

					LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	03	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	75 %	75 %	27.711.800	27.711.800	27.711.800		
2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	5.200.000	5.200.000	5.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	11	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	22.511.800	22.511.800	22.511.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	11	03	2,03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hidup	18 %	18 %	12.892.650	11.752.650	11.752.650		
2	11	03	2,03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 dokumen	1 dokumen	12.892.650	11.752.650	11.752.650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, Dana

												Semua Kelurahan	Alokasi Umum
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	100 %	100 %	287.841.200	337.838.000	387.838.000		
2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas taman dan lampu hias taman yang terpelihara (%)	100 %	100 %	287.841.200	337.838.000	387.838.000		
2	11	04	2,01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 ha	3.8 ha	16.813.200	16.813.200	16.813.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6.4 Ha	6.4 Ha	227.387.000	227.383.800	227.383.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	11	04	2,01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 unit	1 unit	43.641.000	93.641.000	143.641.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	75 %	75 %	8.549.500	6.549.500	6.549.500		
2	11	06	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha berizin yang dibina dan diawasi	75 %	75 %	8.549.500	6.549.500	6.549.500		
2	11	06	2,01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	8.549.500	6.549.500	6.549.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan	100 %	100 %	72.420.600	72.420.600	72.420.600		

					LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	tentang Lingkungan Hidup(%)							
2	11	08	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti diklat lingkungan	70 orang	70 orang	72.420.600	72.420.600	72.420.600		
2	11	08	2,01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga	17.430.600	17.430.600	17.430.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	11	08	2,01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	54.990.000	54.990.000	54.990.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh	1	1	22.000.100	15.189.402	15.189.402		
2	11	09	2,01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	1 penghargaan	1 penghargaan	22,000,100	15.189.402	15.189.402		

2	11	09	2,01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	4 Entitas	22.000.100	15.189.402	15.189.402	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah berkurang dengan timbulan sampah (%) Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	22 % 77 %	22 % 77 %	1.154.913.450	5.956.046.900	5.716.050.900		
2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola (ton)	99 %	99 %	1.154.913.450	5.956.046.900	5.716.050.900		
2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6950 Ton	6950 Ton	756.604.850	845.596.400	845.596.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum

2	11	11	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	398.308.600	833.387.500	593.391.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	11	11	2,01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	0 Unit	0	4.277.063.000	4.277.063.000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				320.020.965	307.920.340	307.920.340		
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	90 %	90 %	320.020.965	307.920.340	307.920.340		

1	04	02	2,05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terkelolanya rumah susun	12 bulan	12 bulan	320.020.965	307.920.340	307.920.340		
1	04	02	2,05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	1 Laporan	162.499.040	162.499.040	162.499.040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	04	02	2,05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	157.521.925	145.421.300	145.421.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				236.512.980	234.508.990	234.508.990		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	75 %	75 %	236.512.980	234.508.990	234.508.990		
2	11	03	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	75 %	75 %	236.512.980	234.508.990	234.508.990		

2	11	03	2,01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	236.512.980	234.508.990	234.508.990	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
TOTAL									17.650.449.463	21.714.343.224	22.171.977.224		

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	
							Target 2023		Pagu Indikatif						
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.162.764.434	5.444.723.968	5.565.493.386				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	5.043.898.834	4.911.176.718	4.912.906.136				
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan kantor	100	100	3.667.032.834	3.845.079.311	3.543.033.619				
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,667,032,834	3.845.079.311	3.543.033.619		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		

1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian kantor	100	100	67.400.000	20.200.000	20.200.000		
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	17.400.000	9.800.000	9.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	50.000.000	10.400.000	10.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi umum kantor	100	100	279.000.000	214.714.275	264.534.275		
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.000.000	2.018.975	2.018.975	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000	38.003.750	38.003.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	60.000.000	22.855.000	22.855.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	45.000.000	29.184.000	29.184.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	180.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	120.000.000	122.472.550	172.472.550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya barang daerah milik kantor	100	100	20.000.000	0	0		
1	06	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang daerah	100	100	865.466.000	668.262.482	872.217.592		
1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000	83.209.482	76.209.482	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	811.966.000	583.053.000	794.008.110	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik kantor	100	100	145.000.000	162.920.650	212.920.650		
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	125.000.000	149.520.650	199.520.650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	20.000.000	13.400.000	13.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan	100 %	100 %	55.400.000	43.436.000	43.436.000		

1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah PSM dan TKSK yang dikembangkan	41	41	55.400.000	43.436.000	43.436.000		
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	37 Orang	50.400.000	43.436.000	43.436.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	02	2,03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Sertifikat	0 Sertifikat	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	100 %	100 %	616.350.000	364.522.500	483.562.500		
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi (orang)	315	315	516.350.000	353.160.000	472.200.000		
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	35 Orang	35 Orang	11.900.000	61.760.000	61.200.000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

						Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						Kecamatan Semua Kelurahan	
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	14 Orang	8.000.000	8.000.000	10.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	0 Orang	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	45.450.000	49.400.000	49.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	04	2,01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	85 Orang	176.000.000	102.000.000	153.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	110 Orang	270.000.000	132.000.000	198.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang tertangani (Orang)	225	225	100.000.000	11.362.500	11.362.500		
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang	220 Orang	100.000.000	11.362.500	11.362.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	100 %	100 %	342.115.600	27.995.600	27.995.600		
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	1582	1582	342.115.600	27.995.600	27.995.600		
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1582 Orang	1582 Orang	15.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Keluarga	35 Keluarga	327.115.600	21.995.600	21.995.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	100 %	100 %	80.000.000	60.160.150	60.160.150		
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam yang mendapatkan bantuan (%)	100	100	30.000.000	29.595.000	29.595.000		
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30.000.000	29.595.000	29.595.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Persentase anggota tagana yang aktif	100	100	50.000.000	30.565.150	30.565.150		
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	29 Orang	50.000.000	30.565.150	30.565.150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase taman makam pahlawan	100 %	100 %	25.000.000	37.433.000	37.433.000		

					TAMAN MAKAM PAHLAWAN	(TMP) yang terfasilitasi							
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	4	4	25.000.000	37.433.000	37.433.000		
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 Makam	4 Makam	25.000.000	37.433.000	37.433.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				429.413.750	1.476.172.875	1.468.972.875		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	65,65	65,65	138.162.000	364.210.000	357.010.000		
2	08	02	2,01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintahan (lembaga)	3	3	18.162.000	11.710.000	11.710.000		

2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Perangkat Daerah	t26 Perangkat Daerah	18,162,000	11.710.000	11.710.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (organisasi)	100	100	70.000.000	120.000.000	120.000.000		
2	08	02	2,02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Organisasi	28 Organisasi	70,000,000	120.000.000	120.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	08	02	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	1	50.000.000	232.500.000	225.300.000		
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	232.500.000	225.300.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan dari kekerasan (%)	100 %	100 %	0	144.118.000	144.118.000		
2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	12	12	0	74.750.000	74.750.000		
2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	0	74.750.000	74.750.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

2	08	03	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	1	1	0	69.368.000	69.368.000		
2	08	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan	0	69.368.000	69.368.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	100 %	100 %	126.700.000	394.172.875	394.172.875		
2	08	04	2,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak (bulan)	12	12	111.700.000	394.172.875	394.172.875		

2	08	04	2,01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	384.572.875	384.572.875	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	08	04	2,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	11.700.000	9.600.000	9.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	08	04	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (Lembaga)	2	2	15.000.000	0	0		
2	08	04	2,02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	0 Lembaga	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	08	04	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	0 Orang	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (%)	Utama %	Utama %	10.000.000	0	0		
2	08	06	2,01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang terpenuhi haknya	100	100	10.000.000	0	0		
2	08	06	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus bagi anak (%)	100 %	100 %	154.551.750	573.672.000	573.672.000		
2	08	07	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	12	12	0	74.740.000	74.740.000		

2	08	07	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	0	74.740.000	74.740.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	08	07	2,02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	1	74.551.750	308.772.000	308.772.000		
2	08	07	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	0	277.472.000	277.472.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	08	07	2,02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	74.551.750	31.300.000	31.300.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	08	07	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	42	42	80.000.000	190.160.000	190.160.000		
2	08	07	2,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	190.160.000	190.160.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.910.170.618	1.300.524.137	1.420.880.975		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi desa yang dibina	100 %	100 %	965.984.118	719.894.137	840.250.975		

2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	185	185	944.186.500	580.630.000	580.630.000		
2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	41 Lembaga	41 Lembaga	419.186.500	110.708.300	110.708.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	37 Laporan	37 Laporan	20.000.000	9.202.500	9.202.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	37 Laporan	37 Laporan	5.000.000	2.290.000	2.290.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	42 Dokumen	42 Dokumen	500,000,000	458.429.200	458.429.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									8.502.348.802	8.221.420.980	8.455.347.236		

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.827.717.872	7.638.505.625	8.100.137.819				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	9.170.928.122	7.423.910.125	7.862.542.319				
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan administrasi keuangan (Bulan)	14 Bulan	14 Bulan	5.848.313.537	5.566.939.401	5.457.287.322				

1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5,848,313,537	5.566.939.401	5.457.287.322	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Perentase ASN Berpakaian dinas dengan Adribut lengkap (Persen) 2. Persentase aparatur yang meningkat SDM Nya (persen)	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	468.880.000	0	0		
1	05	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Satpol PP dan Damkar yang terpenuhi (Stel Lengkap) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan (Paket)	1 Tahun 0 Paket 1 Paket	0 Tahun 0 Paket 0 Paket	428.880.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Megikuti diklat dan Uji kopetensi (Orang) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0 Orang 0 Orang	40.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terfasilitasinya pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	354.121.100	92.521.875	130.624.375		

1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.500.000	744.000	1.751.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	19.999.875	25.004.875	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.000.000	29.988.000	29.988.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.499.100	3.000.000	5.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.122.000	38.790.000	68.780.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	2.378.143.235	1.681.538.849	2.100.093.519		

1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.529.950	500.000	1.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.131.685	53.455.452	68.455.452	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.315.481.600	1.627.583.397	2.030.638.067	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	121.470.250	82.910.000	174.537.103		
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	18 Unit	106.110.250	79.990.000	166.457.103	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 Unit	28 Unit	15.360.000	2.920.000	8.080.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda (%)	100 %	100 %	284.516.000	78.615.500	78.615.500		
1	05	02	2,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase gangguang keamanan yang ditangani secara terpadu	100 Persen	100 Persen	167.620.000	58.520.500	58.520.500		
1	05	02	2,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli , Pengamanan dan Pengawasan (Kasus)	0 Kasus 65 Kasus	40 Kasus 40 Kasus	65.520.000	18.000.000	34.286.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum

1	05	02	2,01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Kasus)	0 Kasus 8 Kasus	8 Kasus 8 Kasus	32.100.000	6.604.000	7.864.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
1	05	02	2,01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azasi Manusia (Orang)	490 Orang	450 Orang 450 Orang	70.000.000	33.916.500	16.370.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	05	02	2,02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan perkara yang ditegakkan (Perda)	220 Kasus	220 Kasus	91.896.000	20.095.000	20.095.000		
1	05	02	2,02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	30.000.000	10.109.000	10.109.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	02	2,02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksanya Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (Laporan)	25 Laporan	25 Laporan	21.896.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	02	2,02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Peraturan	48 Laporan	48 Laporan 48 Laporan	40.000.000	9.986.000	9.986.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

						Bupati/Walikota sesuai SOP (Laporan)							
1	05	02	2,03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	terpenuhinya aparatur yang mengikuti pembinaa PPNS (Orang)	1 Orang	1 Orang	25.000.000	0	0		
1	05	02	2,03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda (Laporan)	0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	25.000.000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN ,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kerjasama penanganan pencegahan kebakaran (%) Persentase penanganan kebakaran (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	372.273.750	135.980.000	158.980.000		

1	05	04	2,01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SOP penanganan bahaya kebakaran (Laporan)	50 Kasus	50 Kasus	333.273.750	131.980.000	152.980.000		
1	05	04	2,01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0 Laporan 25 Laporan	30 Laporan 30 Laporan	254.573.750	127.980.000	142.980.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	04	2,01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	28.700.000	4.000.000	10.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	05	04	2,01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	5 Orang	50.000.000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	04	2,03		Investigasi Kejadian Kebakaran	tersedianya data penyebab kejadian kebakaran (Laporan)	25 Laporan	25 Laporan	10.500.000	2.000.000	4.000.000		
1	05	04	2,03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (Dokumen)	0 Dokumen 25 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	10.500.000	2.000.000	4.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	04	2,04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Sosialisasi yang diadakan (Kegiatan)	80 Orang	80 Orang	28.500.000	2.000.000	2.000.000		

1	05	04	2,04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	0 Orang 80 Orang	80 Orang 80 Orang	28.500.000	2.000.000	2.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									9.827.717.872	7.638.505.625	8.100.137.819		

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				12.774.893.714	11.011.266.149	11.342.015.386			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12.269.393.714	10.801.653.649	11.132.402.886			
2	09	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase konsistensi program/	100 %	100 %	10.000.000	5.202.000	5.202.000			

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kegiatan RPJMD ke dalam RKPD							
2	09	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	5.202.000	5.202.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.689.416.714	8.924.984.386	9.017.953.166		
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	9,689,416,714	8.924.984.386	9.017.953.166	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase aparatur yang meningkat SDMnya	20 %	20 %	65.000.000	40.870.000	40.870.000		
2	09	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	65.000.000	40.870.000	40.870.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi perkantoran berjalan lancar dan tertib	12 bulan	12 bulan	815.000.000	553.061.051	561.544.301		
2	09	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	11.799.675	11.799.675	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	185.000.000	136.248.176	144.778.626	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	60.000.000	54.997.200	54.950.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	50.000.000	49.998.000	49.998.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	500.000.000	300.018.000	300.018.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi perkantoran berjalan lancar dan tertib	12 bulan	12 bulan	1.004.977.000	758.710.462	988.007.669		
2	09	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	81.538.608	81.538.608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	09	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	29.998.854	29.998.854	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	835.977.000	645.173.000	874.470.207	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan sarana Prasarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	685.000.000	518.825.750	518.825.750		
2	09	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87 Unit	89 Unit	477.000.000	443.155.750	443.155.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	8.000.000	4.200.000	4.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	200.000.000	71.470.000	71.470.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)	75 %	75 %	20.000.000	4.215.000	4.215.000		
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercukupan sarana minimal kemandirian pangan	20 %	20 %	20.000.000	4.215.000	4.215.000		
2	09	02	2,01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	20.000.000	4.215.000	4.215.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Muaro Kalaban	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	86	86	353.000.000	179.383.850	179.383.850		
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan pangan pokok	142 Kg/Kap/Thn	142 Kg/Kap/Thn	16,000,000	0	0		

2	09	03	2,01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	0 Unit	16.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				36.000.000	0	0		
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Ton	0 Ton	36.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi energi Protein	1.812 Kkal/ Kapita/ Tahun 55 Gr/Kapita	1.812 Kkal/ Kapita/ Tahun 55 Gr/Kapita	301,000,000	179.383.850	179.383.850		
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	5 Laporan	290.000.000	176.639.000	176.639.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	03	2,04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	11.000.000	2.744.850	2.744.850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN	Persentase Penurunan Jumlah	6 %	6 %	57.500.000	5.645.900	5.645.900		

					KERAWANAN PANGAN	Penduduk Rawan Pangan							
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	1	7.500.000	0	0		
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	0 Dokumen	7.500.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa rawan Pangan yang ditangani	1	1	50.000.000	5.645.900	5.645.900		
2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	5.645.900	5.645.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	91 %	91 %	75.000.000	20.367.750	20.367.750		
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Komoditi Kelompok Pangan Konsumsi yang diawasi	30	30	75.000.000	20.367.750	20.367.750		

					Segar Daerah Kabupaten/Kota								
2	09	05	2,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	1 Sertifikat	30.000.000	5.360.250	5.360.250	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Tengah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	09	05	2,01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU
2	09	05	2,01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	15.007.500	15.007.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				308.500.000	205.253.778	184.741.778		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan (ton)	218 Ton	218 Ton	248.500.000	155.142.778	134.630.778		
3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				248.500.000	155.142.778	134.630.778		
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	0 Unit	106.000.000	20.512.000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	135.000.000	132.554.778	132.554.778	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	25	04	2,04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Orang	1 Orang	2.500.000	2.076.000	2.076.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	36,67	36,67	60.000.000	50.111.000	50.111.000		
3	25	06	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi olahan ikan	275 Kg	275 Kg	60.000.000	50.111.000	50.111.000		

3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	60.000.000	50.111.000	50.111.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.126.474.200	3.288.332.828	3.282.838.828		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Daging Ayam (Ton) Jumlah Produksi Daging Sapi (Ton) Jumlah Produksi Kakao (Ton) Jumlah Produksi Karet (Ton) Jumlah Produksi Padi (Ton GKG) Jumlah Produksi Telur (Ton) Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	900,26 Ton 355,68 Ton 569 Ton 1730 Ton 15747 Ton GKG 135,86 Ton 1:10	900,26 Ton 355,68 Ton 569 Ton 1730 Ton 15747 Ton GKG 135,86 Ton 1:10	3.098.474.200	1.741.837.250	1.741.837.250		
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok penerima sarana yang didampingi Persentase Penggunaan Pupuk Bersubsidi yang disalurkan	100 % 95 %	100 % 95 %	99.474.200	9.169.250	9.169.250		

3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	2.969.250	2.969.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	84.474.200	6.200.000	6.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktifitas Kakao Produktifitas Karet Produktifitas Padi	1.13 Ton/Ha 1.28 Ton/Ha 5.19 Ton/GK	1.13 Ton/Ha 1.28 Ton/Ha 519 Ton/GK	454,000,000	291.597.550	291.597.550		
3	27	02	2,02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	1 VUB	86.000.000	12.980.000	12.980.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Utara Sikabu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000	22.845.000	22.845.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Kelurahan	Dana Transfer Umum-DAU
3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	298.000.000	255.772.550	255.772.550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kategori lomba yang dimenangkan Presentase benih unggul layak edar	0 kategori 95 %	0 kategori 95 %	50.000.000	33.424.200	33.424.200		
3	27	02	2,03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	33.424.200	33.424.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	02	2,05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelahiran sapi yg di IB	37 %	37 %	100.000.000	34.716.000	34.716.000		
3	27	02	2,05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	300 Ekor	300 Ekor	100.000.000	34.716.000	34.716.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	02	2,06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Populasi Ternak Ayam Kampung Jumlah Populasi Ternak Itik Ternak Kambing	49845 ekor 15022 ekor 2275 ekor	49845 ekor 15022 ekor 2275 ekor	2.395.000.000	1.372.930.250	1.372.930.250		

3	27	02	2,06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	1500 Ekor	1500 Ekor	2.395.000.000	1.372.930.250	1.372.930.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	2,5 %	2,5 %	3.075.000.000	851.546.750	846.052.750		
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Realisasi Perencanaan	66 %	66 %	180.000.000	87.974.100	87.974.100		
3	27	03	2,01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	15.381.950	15.381.950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan	3 Laporan	150.000.000	72.592.150	72.592.150	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Jaringan Irigasi yang Terpenuhi	60 %	60 %	2.895.000.000	763.572.650	758.078.650		
3	27	03	2,02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	4 Unit	2 Unit	960.000.000	161.024.000	161.024.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
3	27	03	2,02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit	200.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	5 Unit	725.000.000	590.701.150	585.207.150		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	03	2,02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	800.000.000	6.887.500	6.887.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
3	27	03	2,02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	10.000.000	4.960.000	4.960.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio Barangin, Kolok Nan Tuo Silungkang Muaro Kalaban Talawi, Batu Tanjung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi , Umum

3	27	03	2,02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit	200.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	10 %	10 %	388.000.000	338.647.518	338.647.518		
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Ternak yang aman dari penyakit PHMS dan Zoonosis	100 %	100 %	95.000.000	60.607.000	60.607.000		
3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 Laporan	4 Laporan	95.000.000	60.607.000	60.607.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	04	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang terlayani	3500 ekor	3500 ekor	238.000.000	228.407.518	228.407.518		
3	27	04	2,03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	4.928.000	4.928.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
3	27	04	2,03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	4 Laporan	223.000.000	223.479.518	223.479.518	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	04	2,04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah UPH yang berstatus Pra NKV	2 UPH	2 UPH	55.000.000	49.633.000	49.633.000		
3	27	04	2,04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	27.446.000	27.446.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	04	2,04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	22.187.000	22.187.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	10 %	10 %	160.000.000	116.261.000	116.261.000		

3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis komoditi yang dikendalikan	5 jenis	5 jenis	160.000.000	116.261.000	116.261.000		
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	320 Ha	120 Ha	160.000.000	116.261.000	116.261.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan (kelompok/ Wilayah Binaan) Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	5 kelompok / Wilayah Binaan 5,55 %	5 kelompok / Wilayah Binaan 5,55 %	405.000.000	240.040.310	240.040.310		
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi Jumlah ketenagaan Penyuluh yang berprestasi	1 kelembagaan 1 ketenagaan	1 kelembagaan 1 ketenagaan	405.000.000	240.040.310	240.040.310		
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	4 Unit	330.000.000	216.909.000	216.909.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	170 Unit	170 Unit	35.000.000	23.131.310	23.131.310	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	0 Unit	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	27	07	2,01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	0 Unit	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									20.209.867.914	14.504.852.755	14.809.595.992		

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.324.563.725	3.674.020.911	3.594.922.466				
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	3.916.752.515	3.489.904.911	3.374.802.916				
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	20	20	2.534.393.468	2.530.616.541	2.408.781.802				
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,534,393,468	2.530.616.541	2.408.781.802	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		

												Semua Kelurahan	
2	12	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	17.000.000	14.500.000	14.300.000		
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	17.000.000	14.500.000	14.300.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	100	274.189.000	293.914.450	293.914.450		
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000	2.922.500	2.922.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	102.189.000	90.757.550	90.757.550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	24.000.000	19.850.000	19.850.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	45.000.000	39.450.400	39.450.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	35 Laporan	100.000.000	140.934.000	140.934.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang	1	1	409.670.047	18.920.000	22.420.000		
2	12	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	309.670.047	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	5 Unit	100.000.000	18.920.000	22.420.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	99	99	436.500.000	437.464.620	440.897.364		
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- DAU

2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000	104.998.620	104.998.620	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	13 Laporan	330.000.000	330.966.000	334.398.744	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara, persentase peralatan yang terpelihara, persentase bagian gedung yang Terpelihara	100	100	245.000.000	194.489.300	194.489.300		
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	120.000.000	124.249.300	124.249.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	80.000.000	49.980.000	49.980.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	12	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	45.000.000	20.260.000	20.260.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	100 %	100 %	267.751.210	140.252.300	176.255.850		
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan dan persentase pengaduan yang diselesaikan	100 %	100 %	100.000.000	47.913.050	49.916.600		
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	3000 Dokumen	100,000,000	47.913.050	49.916.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase blanko, tonner, ribbon, cleaning kit dan bahan- bahan lainnya yang diadakan	100	100	138.330.800	78.368.750	90.368.750		
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	7000 Dokumen	100 Persen	138.330.800	78.368.750	90.368.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100	100	29.420.410	13.970.500	35.970.500		
2	12	02	2,03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	3000 Dokumen	20 Kali	15.000.000	7.470.500	29.470.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	02	2,03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk yang tersedia	48 Dokumen	10 Persen	14.420.410	6.500.000	6.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	100 %	100 %	80.000.000	29.021.200	29.021.200		
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil	100	100	80.000.000	29.021.200	29.021.200		
2	12	03	2,02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk	60 Laporan	1 Laporan	25.000.000	13.340.100	13.340.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

					Penduduk yang Beragama Islam	bagi Penduduk yang Beragama Islam							
2	12	03	2,02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	3500 Laporan	3500 Dokumen	30,000,000	6.611.400	6.611.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	03	2,02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4 Laporan	1 Laporan	25.000.000	9.069.700	9.069.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase validasi data kependudukan (%)	100 %	100 %	60.060.000	14.842.500	14.842.500		
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang diolah dan disajikan dan dimanfaatkan oleh OPD / Instansi lainnya	4	4	26.500.000	14.842.500	14.842.500		

2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3.342.500	3.342.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	04	2,01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	50 Dokumen	30 Dokumen	16,500,000	11.500.000	11.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase inovasi yang dibuat dan dimanfaatkan, persentase pemanfaatan data oleh OPD/ Instansi lainnya	1	1	33.560.000	0	0		
2	12	04	2,03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	0 Laporan	33.560.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				30.000.000	15.216.000	20.116.000		
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	15.216.000	20.116.000		

5	04	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	30.000.000	15.216.000	20.116.000		
5	04	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	30.000.000	15.216.000	20.116.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									4.354.563.725	3.689.236.911	3.615.038.466		

DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.973.303.148	8.904.142.565	9.190.765.534		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	8.286.103.083	7.429.471.216	7.716.094.185		
2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	14 Bulan	14 Bulan	2.777.035.083	2.448.240.741	2.452.915.219		

2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,777,035,083	2.448.240.741	2.452.915.219	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	100 Persen	100 Persen	161.461.900	40.000.000	40.000.000		
2	15	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	116.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	45.461.900	40.000.000	40.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi umum perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	306.506.100	200.973.175	199.973.175		
2	15	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.500.000	2.172.000	2.172.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	88.941.100	52.146.175	52.146.175	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	15	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	23.460.000	20.500.000	20.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.105.000	12.081.000	12.081.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000	112.574.000	112.574.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	4.834.220.000	4.594.869.800	4.877.818.291		
2	15	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7.650.000	5.150.000	5.150.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.750.000.000	3.900.540.000	3.900.540.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.076.570.000	689.179.800	972.128.291	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi umum perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	206.880.000	145.387.500	145.387.500		
2	15	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan motor yang dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	142.880.000	129.977.500	129.977.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	27.500.000	4.140.000	4.140.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	15	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	36.500.000	11.270.000	11.270.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	45 %	45 %	2.207.200.065	1.352.674.889	1.352.674.889		
2	15	02	2,01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian wahana tata nagraha	1 Dokumen	1 Dokumen	7.150.000	0	0		
2	15	02	2,01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	0 Kegiatan	7.150.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia	70 Persen	70 Persen	1.565.000.000	1.188.150.739	1.188.150.739		
2	15	02	2,02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota yang Terbangun Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit 22 Unit	0 Unit 22 Unit	350.000.000	135.500.000	135.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan kab/kota dan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	771 Unit	0 Unit 795 Unit	640.000.000	616.486.814	923.162.814		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	02	2,02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Jenis	1 Jenis	50.000.000	30.494.000	30.494.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	525.000.000	405.669.925	98.993.925	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor	70 Persen	70 Persen	556.588.600	83.219.750	83.219.750		
2	15	02	2,05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftar kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor dan Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	1 Unit	56.588.600	83.219.750	83.219.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Terpeliharanya sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	0 Unit 0 Unit	500.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angka kecelakaan lalulintas perseribu kendaraan	3 Persen	3 Persen	67.036.250	81.304.400	81.304.400		

2	15	02	2,06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	21.240.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan lalu lintas di jalan raya dan terkendalinya efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota dan Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	45.796.250	81.304.400	81.304.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	02	2,09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	Persentase tingkat pelayanan angkutan umum	15 Persen	15 Persen	11.425.215	0	0		

					(Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2	15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	3 Laporan	0 Laporan	11.425.215	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	65 %	65 %	480.000.000	121.996.460	121.996.460		
2	15	05	2,02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalur kereta api yang diaktifkan	3 Km	3 Km	480.000.000	121.996.460	121.996.460		

2	15	05	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan dan dipelihara dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	5 Laporan	5 Laporan	480.000.000	121.996.460	121.996.460	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									10.973.303.148	8.904.142.565	9.190.765.534		

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	
							Target 2023		Pagu Indikatif					
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			6.780.408.648	5.981.926.295	6.588.295.037				
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	6.410.408.648	5.330.491.945	5.936.860.687			
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	3.591.676.877	3.390.875.381	3.620.332.213			
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	12 Laporan	3.591.676.877	3.390.875.381	3.620.332.213	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	

												Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	38 %	38 %	30.000.000	18.254.000	18.254.000		
2	17	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	30.000.000	18.254.000	18.254.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	633.785.000	391.179.300	391.179.300		
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.000.000	7.948.750	7.948.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	218.785.000	110.436.750	110.436.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000.000	55.954.000	55.954.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	27.289.800	27.289.800	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-

						Penggandaan yang Disediakan						Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	250.000.000	189.550.000	189.550.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan dinas yang tersedia	1 unit	1 unit	25.000.000	0	0		
2	17	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik dan layak pakai (bulan)	12 bulan	12 bulan	1.829.946.771	1.267.140.184	1.664.052.094		
2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	750.000	750.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	199.991.184	199.991.184	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-

						Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.624.946.771	1.066.399.000	1.463.310.910	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	300.000.000	263.043.080	243.043.080		
2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	200.000.000	192.649.750	192.649.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	50.000.000	49.993.330	34.993.330	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	50.000.000	20.400.000	15.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.	26,47 %	26,47 %	172.145.500	66.915.000	66.915.000		
2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	74 %	74 %	172.145.500	66.915.000	66.915.000		
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	152.145.500	66.915.000	66.915.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN	Persentase Koperasi sehat (%)	26 %	26 %	57.854.500	74.202.800	74.202.800		

					KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								
2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat	80 %	80 %	57.854.500	74.202.800	74.202.800		
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	30.000.000	46.376.300	46.376.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	04	2,01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	27.854.500	27.826.500	27.826.500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	60 %	60 %	0	454.503.950	454.503.950		
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	74 %	74 %	0	269.634.450	269.634.450		

2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	68 Orang	68 Orang	0	269.634.450	269.634.450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	17	05	2,03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang bersertifikat	10 UMKM	10 UMKM	0	184.869.500	184.869.500		
2	17	05	2,03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang bersertifikat	105 UMKM	105 UMKM	0	184.869.500	184.869.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum , Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	53 %	53 %	70.000.000	55.812.600	55.812.600		
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi	4 %	4 %	70.000.000	55.812.600	55.812.600		

2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang difasilitasi	4 persen	4 persen	25.000.000	15.812.600	15.812.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 Orang	200 Orang	45.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	1,5 %	1,5 %	70.000.000	0	0		
2	17	08	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	50 UMKM	50 UMKM	70.000.000	0	0		
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	0 Unit Usaha	70.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.015.000.000	535.148.100	520.440.100		

3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	50 %	50 %	500.000.000	244.997.500	244.997.500		
3	30	03	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus	80 %	80 %	500.000.000	244.997.500	244.997.500		
3	30	03	2,01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	500.000.000	244.997.500	244.997.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah omset dipasar- pasar tradisional Sawahlunto	27015,91	27015,91	100.000.000	53.640.100	49.440.100		
3	30	04	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvey	80 %	80 %	100.000.000	53.640.100	49.440.100		
3	30	04	2,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	49.440.100	49.440.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3	30	04	2,02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	4.200.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	60 %	60 %	200.000.000	66.800.000	66.800.000		
3	30	05	2,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	2 Produk	2 Produk	200.000.000	66.800.000	66.800.000		
3	30	05	2,01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	200.000.000	66.800.000	66.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	30 %	30 %	80.000.000	20.508.000	10.000.000		
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase timbangan yang ditera	70 %	70 %	80.000.000	20.508.000	10.000.000		

3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	391 Unit	391 Unit	80.000.000	20.508.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)	125 Juta Rupiah	125 Juta Rupiah	135.000.000	149.202.500	149.202.500		
3	30	07	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipromosikan	50 %	50 %	135.000.000	149.202.500	149.202.500		
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	15 UMKM	135.000.000	149.202.500	149.202.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				375.000.000	25.331.937.109	25.626.178.867		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2 %	2 %	340.000.000	25.306.117.109	25.600.358.867		
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri	100 %	100 %	340.000.000	25.306.117.109	25.600.358.867		

3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi	4 IKM	4 IKM	200.000.000	99.818.000	99.818.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- , Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	140.000.000	25.206.299.109	25.500.540.867	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	30 %	30 %	35.000.000	25.820.000	25.820.000		
3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	50 rekomendasi	50 rekomendasi	35,000,000	25.820.000	25.820.000		

3	31	03	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	25.820.000	25.820.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									8.170.408.648	31.849.011.504	32.734.914.004		

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana
							Target 2023		Pagu Indikatif				
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.308.839.140	6.043.693.259	6.091.752.049		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	5.973.758.270	5.140.398.619	5.349.133.409		
2	07	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan OPD yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000		

2	07	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	3.544.643.378	3.358.300.063	3.350.213.253		
2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3,544,643,378	3.358.300.063	3.350.213.253	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresntase Aparatur yang meningkat SDM nya	50 %	50 %	26.500.000	26.500.000	46.500.000		
2	07	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	10 Orang	26.500.000	26.500.000	46.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi umum perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	560.730.642	445.636.460	532.312.460		
2	07	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.249.200	21.241.250	21.241.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	07	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	299.971.442	204.870.210	204.870.210	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	46.936.000	46.936.000	73.612.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	48.151.000	48.151.000	48.151.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	100 Laporan	144.423.000	124.438.000	184.438.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000	0	0		
2	07	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	300.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya sarana pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	1.215.113.600	933.430.896	1.013.576.496		

					Pemerintahan Daerah	administrasi perkantoran							
2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.655.000	6.655.000	6.655.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	234.108.600	304.093.296	304.093.296	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	974.350.000	622.682.600	702.828.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang dipelihara Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	319.270.650	369.031.200	399.031.200		
2	07	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	15 Unit	114.050.650	114.043.200	144.043.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	150.000.000	199.838.000	199.838.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	55.220.000	55.150.000	55.150.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)	100 %	100 %	110.000.000	0	0		
2	07	02	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	0	0		
2	07	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0 Dokumen	55.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	0 Perusahaan	55,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	70 %	70 %	996.920.870	648.510.490	511.834.490		

					PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi Persentase peserta pelatihan yang membuka wirausaha baru	50 % 10 %	50 % 10 %	996.920.870	648.510.490	511.834.490		
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96 Orang	80 Orang	775.523.070	599.999.740	463.323.740	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	03	2,01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4 Lembaga	4 Lembaga	71.397.800	48.510.750	48.510.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	03	2,01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3 Unit	0 Unit	150.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,35 %	75,35 %	180.000.000	150.752.400	150.752.400		

2	07	04	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase siswa yang meningkat pemahamannya tentang dunia kerja	80 %	80 %	160.000.000	136.952.200	136.952.200		
2	07	04	2,01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200 Orang	400 Orang	40.000.000	34.202.650	34.202.650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	04	2,01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	10 Orang	120.000.000	102.749.550	102.749.550	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	04	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	35 %	35 %	20.000.000	13.800.200	13.800.200		
2	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	20 Orang	20 Orang	20.000.000	13.800.200	13.800.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	10 Perusahaan	10 Perusahaan	48,160,000	104.031.750	80.031.750		

2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	100 %	100 %	31.000.000	95.572.950	71.572.950		
2	07	05	2,01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	10 Perusahaan	15.000.000	8.804.800	8.804.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	4 Laporan	16.000.000	86.768.150	62.768.150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus tenaga kerja yang terselesaikan	80 %	80 %	17.160.000	8.458.800	8.458.800		

2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	0 Perkara	7.160.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara	3 Perkara	10.000.000	8.458.800	8.458.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				790.214.500	726.936.900	726.936.900		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	25 %	25 %	150.000.000	100.000.000	100.000.000		
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peta potensi investasi	100 %	100 %	150.000.000	100.000.000	100.000.000		
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah) Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah) Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah)	1 Milyar Rupiah 30 Milyar Rupiah 10 Milyar Rupiah	1 Milyar Rupiah 30 Milyar Rupiah 10 Milyar Rupiah	31.250.400	16.264.500	16.264.500		
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang berinvestasi	25 Perusahaan	25 Perusahaan	31,250,400	16.264.500	16.264.500		
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	31.250.400	16.264.500	16.264.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPSTPNaker	B	B	108.964.100	108.334.100	108.334.100		
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	80 %	80 %	108.964.100	108.334.100	108.334.100		
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	80.509.200	79.879.200	79.879.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

					Terintegrasi Secara Elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						Semua Kelurahan	
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	25.335.000	25.335.000	25.335.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Orang	4 Orang	3.119.900	3.119.900	3.119.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)		100 %	0	406.900.000	406.900.000		
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan laporan investasinya		100 %	0	406.900.000	406.900.000		
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	0 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	0	299.009.800	355.209.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-

					Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Penanaman Modal						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha	0	107.890.200	51.690.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP	B	B	500.000.000	95.438.300	95.438.300		
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan perizinan yang terintegrasi pada MPP	56 %	56 %	500.000.000	95.438.300	95.438.300		
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	95.438.300	95.438.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									8.099.053.640	6.770.630.159	6.818.688.949		

DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			6.616.685.866	6.243.989.163	6.688.519.827				
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	4.717.468.256	3.982.742.163	4.002.552.827			
2	22	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen	100 Persen	7.500.000	0	0			
2	22	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	7.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	22	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keungan	12 Bulan	12 Bulan	2.472.832.633	2.564.899.610	2.248.652.582			
2	22	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2,472,832,633	2.564.899.610	2.248.652.582	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	22	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya	65 Persen	65 Persen	75.000.000	33.000.000	33.000.000			

2	22	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	13 Orang	65.000.000	33.000.000	33.000.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	515.027.190	331.494.275	334.694.275		
2	22	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.000.000	24.999.050	24.999.050	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	167.579.190	74.860.225	74.860.225	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	30.000.000	14.003.000	19.003.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.075.000	20.000.000	20.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
2	22	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	2.190.000	1.800.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	125 Laporan	265.183.000	195.832.000	195.832.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.469.711.383	943.458.528	1.276.316.220		
2	22	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0 Laporan	6.340.000	1.000.000	0	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	271.497.383	170.708.528	190.708.528	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	22	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.191.874.000	771.750.000	1.085.607.692	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	177.397.050	109.889.750	109.889.750		
2	22	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang di Pelihara dan Dibayarkan Pajak nya	11 Unit	11 Unit	121.147.050	93.939.750	93.939.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	3.750.000	1.000.000	1.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	17.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	35.000.000	7.450.000	7.450.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	31,1 %	31,1 %	422.935.100	110.967.000	200.967.000		
2	22	02	2,01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Budaya Yang Mandiri	75 %	75 %	229.105.100	0	0		
2	22	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	25 Objek	0 Objek	144.105.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	02	2,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	0 Orang	85.000.100	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	02	2,02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Palaku Kesenian Tradisional Yang lestari	55.56 Persen	55.56 Persen	193.830.000	110.967.000	200.967.000		
2	22	02	2,02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek	120.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	22	02	2,02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4 Laporan	4 Laporan	53.830.000	60.967.000	150.967.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	02	2,02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	0 Sertifikat	20.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13,3 %	13,3 %	172.572.000	0	0		
2	22	03	2,01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				172.572.000	0	0		
2	22	03	2,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	125 Orang	0 Orang	172.572.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	60 %	60 %	135.000.000	0	0		

2	22	04	2,01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mengetahui Sejarah Lokal	58 %	58 %	135.000.000	0	0		
2	22	04	2,01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	135.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92 %	63,92 %	801.855.000	53.000.000	115.000.000		
2	22	05	2,01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Budaya Benda Yang Dilindungi	97,28 %	97,28 %	23.000.000	0	0		
2	22	05	2,01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	15 Objek	0 Objek	8.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	05	2,01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	8 Objek	0 Objek	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	05	2,02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Budaya Benda Yang Dimanfaatkan	60.55 Persen	60.55 Persen	778,855,000	53.000.000	115.000.000		
2	22	05	2,02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	2 Objek	213.855.000	25.000.000	25.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
2	22	05	2,02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek	565.000.000	28.000.000	90.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33000 Orang	33000 Orang	366,855,510	2.097.280.000	2.370.000.000		
2	22	06	2,01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koleksi Museum Yang Lestari	62,32 %	62,32 %	366.855.510	2.097.280.000	2.370.000.000		
2	22	06	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	45 Unit	45 Unit	0	690.000.000	690.000.000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	22	06	2,01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	6 Orang	0 Orang	40.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	22	06	2,01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	6 Unit	6 Unit	0	927.280.000	1.150.000.000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	22	06	2,01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum	6 Unit	6 Unit	0	460.000.000	460.000.000		Dana Transfer Khusus- Dana

					dan Prasarana Museum	yang Tersedia dan Terpelihara							Alokasi Khusus Non Fisik
2	22	06	2,01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	6 Unit	0 Unit	326.855.510	20.000.000	70.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	33000 Orang
TOTAL									6.616.685.866	6.243.989.163	6.688.519.827		

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.810.994.039	3.281.302.983	3.266.302.983				
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	3.529.407.359	3.161.403.665	3.146.403.665				
2	23	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14	14	2.806.722.727	2.582.510.966	2.582.510.966				

2	23	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN/PNS yang Difasilitasi	14 Bulan	14 Bulan	2.806.722.727	2.582.510.966	2.582.510.966	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti	12	12	24.350.000	15.480.000	15.480.000		
2	23	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	24.350.000	15.480.000	15.480.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terasilitasi	12 0	12 0	180.495.750	150.947.140	145.947.140		
2	23	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.652.000	3.218.400	3.218.400	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	51.335.740	51.335.740	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000	8.231.000	8.231.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	18.043.750	12.024.000	12.024.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan	10.800.000	10.400.000	5.400.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	23	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	65.738.000	65.738.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang di Adakan	12	12	15.000.000	0	0		
2	23	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit 0 Unit	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang disediakan	12	12	392.850.932	326.015.009	316.015.009		
2	23	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	3.500.000	1.200.000	1.200.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Yang Dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	74.596.932	95.261.009	85.261.009	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Bulan	14 Bulan 0 Laporan	314.754.000	229.554.000	229.554.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	23	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	12	12	109.987.950	86.450.550	86.450.550		
2	23	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	12 Bulan	79.987.950	77.790.550	77.790.550	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	8.660.000	8.660.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	0 Unit 0 Bulan	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	276.586.680	119.899.318	119.899.318		
2	23	02	2,01		Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Di Kelola dan di Bina (Unit)	108	108	69.816.780	23.637.100	23.637.100		

					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	23	02	2,01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Paket	0 Paket	9.236.080	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana ,Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	02	2,01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	68000 orang	68000 orang	7.000.000	5.499.800	5.499.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	23	02	2,01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	106 Unit	106 Unit	7.557.500	3.092.900	3.092.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum

2	23	02	2,01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	0 Orang	6.641.750	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	23	02	2,01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	10 Klasifikasi	10 Klasifikasi	31,981,000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	Dana ,Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	4 Naskah	4 Naskah	5.000.000	0	0		
2	23	03	2,01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan (naskah)	4	4	5.000.000	0	0		
2	23	03	2,01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	20 Orang	0 Orang	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum · Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				119.876.900	68.600.500	68.600.500		

2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terkelolanya arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	71.414.400	36.004.000	36.004.000		
2	24	02	2,01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola Arsip Dinamis daerah sesuai standar (OPD)	26	26	71.414.400	36.004.000	36.004.000		
2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	500 Berkas	500 Berkas	20.000.000	11.877.500	11.877.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana , Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	24	02	2,01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Laporan	26 Laporan	51.414.400	24.126.500	24.126.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Terlaksananya perlindungan & penyelamatan arsip (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	48.462.500	32.596.500	32.596.500		
2	24	03	2,02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang terpelihara dan terselamatkan (Persen)	55	55	8.462.500	3.280.000	3.280.000		

2	24	03	2,02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Penanganan Arsip yang Rusak akibat Bencana	26 OPD	26 OPD	8.462.500	3.280.000	3.280.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	24	03	2,04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten / kota yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah (Paket)	1	1	20.000.000	12.985.000	12.985.000		
2	24	03	2,04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip Statis dan arsip Alih Bahasa yang di Autentifikasi	1 Paket	1 Paket	20.000.000	12.985.000	12.985.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	24	03	2,05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	jumlah arsip yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK (paket)	1	1	20.000.000	16.331.500	16.331.500		
2	24	03	2,05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	100 Arsip	100 Arsip	20.000.000	16.331.500	16.331.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									3.930.870.939	3.349.903.483	3.334.903.483		

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana

					Kegiatan/ Sub Kegiatan		Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				15.061.318.201	10.774.135.254	10.959.405.718		
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	8.400.198.701	5.531.441.254	5.659.061.718		
2	19	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	14.154.140	0	0		
2	19	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	14.154.140	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya sarana Pelayanan administrasi Keuangan (Bulan)	25 bulan	25 bulan	3.781.777.913	3.122.792.315	2.740.176.980		
2	19	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	294 Orang/bulan	3,781,777,913	3.122.792.315	2.740.176.980	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	99.000.000	40.880.000	40.880.000		
2	19	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	99.000.000	40.880.000	40.880.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrai	12 bulan	12 bulan	632.871.455	456.018.000	454.018.000		

						Umum Perangkat Daerah (Bulan)							
2	19	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	6.245.030	4.827.600	4.827.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	139.179.800	81.840.400	81.840.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	30.317.100	30.314.000	30.314.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	43.683.525	36.480.000	36.480.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	0 Dokumen	4.136.000	2.001.000	1.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	350 Laporan	409.310.000	300.555.000	300.555.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	19	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang (bulan)	10 bulan	10 bulan	50.000.000	12.929.125	12.929.125		
2	19	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	7 Unit	50.000.000	12.929.125	12.929.125	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang (Bulan)	12 bulan	12 bulan	3.598.484.000	1.724.308.064	2.236.543.863		
2	19	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.976.000	74.975.064	74.975.064	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.518.508.000	1.644.333.000	2.156.568.799	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Kendaraan, Mobiler Kantor dan Gedung Kantor (Bulan)	12 bulan	12 bulan	223.911.193	174.513.750	174.513.750		

2	19	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	153.801.193	132.685.750	132.685.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.808.000	5.800.000	5.800.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	37.078.800	22.018.000	22.018.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	23.223.200	10.010.000	10.010.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	15 Orang	15 Orang	698.619.500	56.800.000	47.750.000		

2	19	02	2,01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda Sawahlunto menjadi utusan pemuda pelopor (Kegiatan) Jumlah Pengurus Organisasi Kepemudaan yang Terlatih (Orang)	2 kegiatan 85 Orang	2 kegiatan 85 Orang	668.619.500	30.000.000	20.950.000		
2	19	02	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	5 Orang	30.000.000	30.000.000	20.950.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	02	2,01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	100 Orang	0 Orang	338.619.500	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	02	2,01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	85 Orang	0 Orang	300.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	02	2,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif (Organisasi)	19 Organisasi	19 Organisasi	30,000,000	26.800.000	26.800.000		

					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	19	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	26.800.000	26.800.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlit yang berpre provinsi/regional/nasion (atlit)	160 Atlit	160 Atlit	5.527.500.000	4.750.894.000	4.802.594.000		
2	19	03	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Sesuai Standar (Unit)	1 Unit 6 Unit	1 Unit 6 Unit	700.000.000	370.000.000	310.000.000		
2	19	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	2 Unit	700.000.000	370.000.000	310.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	03	2,02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit yang Berprestasi Tingkat Daerah (Orang) Jumlah Peserta yang Berpartisipasi (Orang)	80 Orang 80 orang	80 Orang 80 orang	217.500.000	195.894.000	205.894.000		

2	19	03	2,02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	80 Orang	80 Orang	217.500.000	195.894.000	205.894.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	03	2,03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit yang Berprestasi (Atlet) Jumlah Atlit yang Berprestasi Tingkat Provinsi (Orang)	160 Atlet 150 Orang	160 Atlet 150 Orang	150.000.000	185.000.000	296.700.000		
2	19	03	2,03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	150 Orang	150 Orang	150.000.000	185.000.000	296.700.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	03	2,04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang aktif (Organisasi)	1 Organisasi	1 Organisasi	3.835.000.000	3.335.000.000	3.335.000.000		
2	19	03	2,04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi	3.835.000.000	3.335.000.000	3.335.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	03	2,05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfasilitasinya Event Olahraga Rekreasi (Kegiatan)	5 Kegiatan	5 Kegiatan	625.000.000	665.000.000	655.000.000		

2	19	03	2,05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	3 Dokumen	245.000.000	230.000.000	240.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	03	2,05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	03	2,05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	135.000.000	135.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	03	2,05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	75 %	75 %	435.000.000	435.000.000	450.000.000		
2	19	04	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif (%) Terfasilitasinya kegiatan pembinaan kepramukaan (kegiatan)	100 % 1 kegiatan	100 % 1 kegiatan	435.000.000	435.000.000	450.000.000		

2	19	04	2,01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	2 Organisasi	435.000.000	435.000.000	450.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				7.890.824.675	9.901.068.474	13.620.330.474		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Objek Wisata (%) Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata (%)	14.7 % 10 %	14.7 % 10 %	6.444.402.745	9.113.986.474	12.828.986.474		
3	26	02	2,01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Objek Wisata (%) Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata (%)	14.7 % 10 %	14.7 % 10 %	2.200.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000		
3	26	02	2,01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	02	2,01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	02	2,02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan yang Terkelola (%) Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata (%)	10 % 10 %	10 % 10 %	2.469.278.180	816.210.000	741.210.000		

3	26	02	2,02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	02	2,02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	2.349.278.180	506.210.000	431.210.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
3	26	02	2,02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	200.000.000	210.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	02	2,02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	0 Laporan	10.000.000	10.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	02	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata (%) Persentase Destinasi yang Terkelola (%)	10 % 32.14 %	10 % 32.14 %	1.531.924.565	4.505.631.474	8.305.631.474		
3	26	02	2,03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3	26	02	2,03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	0	3.074.313.000	3.074.313.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	02	2,03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit	1.471.924.565	1.371.318.474	5.171.318.474	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
3	26	02	2,03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	02	2,04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota (Dokumen)	10 Dokumen	10 Dokumen	243,200,000	1.692.145.000	1.682.145.000		
3	26	02	2,04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000	6.600.000	1.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	02	2,04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000	6.600.000	1.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
3	26	02	2,04	05	Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	230.000.000	1.678.945.000	1.678.945.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum ,Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan (orang)	1300000 Orang	1300000 Orang	1,301,048,650	641.709.000	680.971.000		
3	26	03	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Rombongan Wisata (Rombongan)	70 Rombongan	70 Rombongan	1,301,048,650	641.709.000	680.971.000		
3	26	03	2,01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	201.963.490	67.420.000	67.420.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	03	2,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Laporan	10 Laporan	989.085.160	453.620.250	513.620.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3	26	03	2,01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000	21.498.000	760.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	03	2,01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000	99.170.750	99.170.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	0,50 %	0,50 %	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
3	26	04	2,02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekraf yang telah Mandiri (Dokumen) Jumlah Ekosistem Ekraf yang Telah Mandiri (Kelompok)	1 Dokumen 1 Kelompok	1 Dokumen 1 Kelompok	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
3	26	04	2,02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3	26	04	2,02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasii, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan) Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Orang) Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	1 Laporan 20 Orang 20 %	1 Laporan 20 Orang 20 %	105.373.280	105.373.000	70.373.000		
3	26	05	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Mandiri (%)	25 0	25 0	70.373.280	70.373.000	70.373.000		
3	26	05	2,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	20 Orang	20 Orang	20.373.280	20.373.000	20.373.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3	26	05	2,01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
3	26	05	2,02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang Berbadan Usaha (Orang)	5 Orang	5 Orang	35.000.000	35.000.000	0		
3	26	05	2,02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	5 Orang	0 Orang	35.000.000	35.000.000	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									22.952.142.876	23.749.516.728	27.654.049.192		

SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.229.234.525	0	0				
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	95 %	95 %	1.064.234.525	0	0			
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah inormasi yang disebarluaskan	12	12	1.064.234.525	0	0			

2	16	02	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah dokumen hasil monitoringopini dan aspirasi publik	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi pub;ik	12 dokumen	12 dokumen	75.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pelaksanaaan pengelolaan media komunikasi publik	12 dokumen	12 dokumen	295.272.200	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	4 dokumen	4 dokumen	48.546.400	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	jumlah layanan hubungan media	19 layanan	19 layanan	426.195.925	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	5 orang	5 orang	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	12 Dokumen	114,220,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	10 unit	10 unit	35.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	95 %	95 %	2.165.000.000	0	0		

2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan domain dan sub domain (bulan)	12	12	1.805.000.000	0	0		
2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	62 unit	62 unit	1.800.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya aplikasi publik yang terintegrasi	12	12	360.000.000	0	0		
2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan	2 dokumen	2 dokumen	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

					Daerah Kabupaten/Kota	pemerintahan daerah kabupaten/kota							
2	16	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	5,000,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	5 unit	5 unit	250.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

						Komunikasi Pemerintah Daerah							
2	16	03	2,02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	jumlah dokumen pengelolaan government chief information officer (GCIO)	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				81.110.600	0	0		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	90 %	90 %	81.110.600	0	0		
2	20	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data statistik sektoral yang tersusun (dokumen)	7	7	81.110.600	0	0		
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan dieminasi data statistik sektoral	7 dokumen	7 dokumen	47.123.420	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	20	02	2,01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	37 orang	37 orang	8.324.100	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	20	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.877.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	20	02	2,01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	26 Orang	26 Orang	11.049.080	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	20	02	2,01	05	Pengembangan Infrastruktur	jumlah infrastruktur statistik	1 unit	1 unit	1.736.200	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				104.107.850	0	0		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	104.107.850	0	0		

2	21	02	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan)	10	10	85.907.850	0	0		
2	21	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan tata kelola kemanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	3.465.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	21	02	2,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan analisi kebutuhan dan pengelolaan sumber daya kemanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	2 laporan	2 laporan	19.996.350	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	2 laporan	2 laporan	21.246.500	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	41,200,000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	21	02	2,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	Jumlah perangkat daerah yang menetapkan pola hubungan komunikasi sandi	26	26	18.200.000	0	0		

					Daerah Kabupaten/Kota								
2	21	02	2,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	25 OPD	25 OPD	18.200.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				36.613.508.458	41.556.385.422	45.027.551.258		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	22.295.514.718	23.924.329.947	25.770.531.783		
4	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasikinerja perangkat daerah	12	12	19.000.000	5.937.200	3.300.000		
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	2.000.000	1.594.800	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	2.300.000	2.300.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	2.042.400	1.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	23 Laporan	3.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	12	12	9.717.392.182	10.859.190.899	11.369.795.691		

4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1232 orang/bulan	1232 orang/bulan	9,712,392,182	10.856.705.899	11.367.310.691	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD dan Laporan Koor Penyusunan Laporan Ke Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	12 laporan	12 laporan	5.000.000	2.485.000	2.485.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	12	12	88.640.000	141.140.000	171.140.000		
4	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	25 orang	88.640.000	141.140.000	171.140.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	12	12	4.083.758.635	5.309.840.195	6.339.840.195		
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.190.425	100.190.425	100.190.425	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	400.806.275	400.804.850	400.804.850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	339.751.000	310.739.570	340.739.570	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	123.227.000	123.226.900	123.226.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	10 dokumen	10 dokumen	10.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	1.181.167.735	1.446.262.250	1.446.262.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	1.928.616.200	2.928.616.200	3.928.616.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan penunjang kegiatan	39	39	503.055.658	310.388.880	100.000.000		

4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	5 unit	503.055.658	310.388.880	100.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	12	12	3.082.016.640	2.515.014.168	2.690.554.732		
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	31.254.000	31.254.000	16.254.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	707.022.640	762.501.168	782.501.168	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	2.343.740.000	1.721.259.000	1.891.799.564	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	12	12	2.096.620.000	2.096.620.000	2.496.620.000		

4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	170 unit	95 unit	1.364.000.000	1.364.000.000	1.764.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	250 unit	250 unit	74.620.000	74.620.000	74.620.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 unit	7 unit	658.000.000	658.000.000	658.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	12	12	1.112.940.623	1.394.182.605	1.355.182.605		
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	28 orang/bulan	28 orang/bulan	273,840,623	555.082.605	555.082.605	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	2 paket	2 paket	379.600.000	379.600.000	379.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	7 orang	7 orang	59.500.000	59.500.000	59.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 orang/bulan	24 orang/bulan	400.000.000	400.000.000	361.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah	12	12	810.842.380	810.689.700	762.772.260		
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 paket	12 paket	427.442.680	427.290.000	427.290.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 paket	12 paket	335.482.260	335.482.260	335.482.260	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	0 paket	47.917.440	47.917.440	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi	Terciptanya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	27	27	373.040.600	247.829.500	247.829.500		

4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	7 dokumen	7 dokumen	48.560.100	48.560.100	48.560.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1 laporan	1 laporan	95.512.000	88.812.000	88.812.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2 dokumen	2 dokumen	128.968.500	110.457.400	110.457.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah (laporan)	12	12	408.208.000	233.496.800	233.496.800		
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	314.358.000	142.486.800	142.486.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 laporan	12 laporan	93.850.000	91.010.000	91.010.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz) Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (persen) Persentase santri rumah/pondok tahfudz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (persen)	60 100 % 50 %	60 100 % 50 %	13.700.983.590	17.255.156.875	18.800.120.875		
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	Terselenggaranya kegiatan administrasi pemerintahan (bulan)	12	12	645.682.300	223.522.950	208.386.950		
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	5 dokumen	5 dokumen	201.774.300	119.674.300	109.774.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	6 dokumen	6 dokumen	131.024.000	66.936.150	62.936.150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen	312.884.000	36.912.500	35.676.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	12	12	11.536.372.090	13.324.204.975	14.884.304.975		
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	12 Dokumen	1,655,038,340	1.185.152.425	1.540.752.425	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	11 Dokumen	6,714,074,250	7.886.116.600	9.090.616.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	11 Dokumen	11 Dokumen	3,167,259,500	4.252.935.950	4.252.935.950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dan	12	12	326.129.200	238.778.950	238.778.950		

						koordinasi hukum (bulan)							
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum daerah yang disusun	450 dokumen	450 dokumen	37,755,500	4.755.500	4.755.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	10 Kasus	255.400.000	201.050.000	201.050.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	350 dokumen	350 dokumen	32,973,700	32.973.450	32.973.450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Meningkatnya kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga (kegiatan)	20	20	1.192.800.000	3.468.650.000	3.468.650.000		
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	20 dokumen	20 dokumen	1.192.800.000	3.468.650.000	3.468.650.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	617.010.150	376.898.600	456.898.600		

4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terselenggaranya kegiatan perekonomian	12	12	200.018.750	106.176.400	186.176.400		
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	10 dokumen	10 dokumen	93.925.000	53.894.600	133.894.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	2 laporan	2 laporan	85.766.000	52.281.800	52.281.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 dokumen	1 dokumen	20.327.750	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	03	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan	12	12	111.766.150	97.712.800	97.712.800		
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	83.170.000	83.169.800	83.169.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	28.596.150	14.543.000	14.543.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP (level)	3	3	305.225.250	173.009.400	173.009.400		
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	12 dokumen	50.000.000	1.172.000	1.172.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	12 dokumen	12 dokumen	113.709.500	99.321.650	99.321.650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	9 orang	9 orang	141.515.750	72.515.750	72.515.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									40.027.961.433	41.556.385.422	45.027.551.258		

SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana

					Kegiatan/ Sub Kegiatan		Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	02				SEKRETARIAT DPRD								25.249.555.771	28.728.952.019	27.592.352.248		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar (bulan)	12 bulan	12 bulan	16.024.795.771	14.958.091.019	13.883.891.248						
4	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan daerah (bulan)	12 bulan	12 bulan	11.833.795.771	11.451.795.771	10.210.000.000						
4	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD (orang/bulan)	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	11,818,795,771	11.436.795.771	10.200.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
4	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	5 buah	5 buah	15.000.000	15.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
4	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian (bulan)	12 bulan	12 bulan	130.000.000	84.792.000	84.792.000						
4	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut yang Disediakan	2 paket	1 paket	30.000.000	10.500.000	10.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				

4	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	100.000.000	74.292.000	74.292.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah (bulan)	12 bulan	12 bulan	885.500.000	831.887.850	806.889.850		
4	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.500.000	38.333.850	38.333.850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	240.000.000	237.000.000	222.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	265.000.000	258.611.000	258.611.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000	19.998.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	300.000.000	259.945.000	259.945.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda (%)	100 %	100 %	400.000.000	45.043.240	45.043.240		
4	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 jenis	8 jenis	400.000.000	45.043.240	45.043.240	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (bulan)	12 bulan	12 bulan	1.135.500.000	904.572.158	1.097.166.158		
4	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	7.000.000	4.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	180.000.000	179.999.908	179.999.908	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.500.000	43.166.250	43.166.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000.000	674.406.000	870.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (bulan)	12 bulan	12 bulan	740.000.000	740.000.000	740.000.000		
4	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	425.000.000	425.000.000	425.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 jenis	3 jenis	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis	4 jenis	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	100 %	100 %	350.000.000	257.400.000	257.400.000		
4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	250.000.000	197.400.000	197.400.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	20 Orang	100.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD (bulan)	12 bulan	12 bulan	550.000.000	642.600.000	642.600.000		
4	02	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	120 Laporan	120 Laporan	250.000.000	342.600.000	342.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100 %	100 %	9.224.760.000	13.770.861.000	13.708.461.000		
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 %	100 %	200.000.000	191.882.000	191.882.000		
4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	141.882.000	141.882.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya rapat pembahasan	6 kali	6 kali	760.000.000	278.143.000	278.143.000		
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000	218.143.000	218.143.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	100 %	1.735.000.000	1.467.563.000	1.437.563.000		
4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	120 Dokumen	120 Dokumen	1,500,000,000	1.232.563.000	1.232.563.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	20 Dokumen	20 Dokumen	175,000,000	175.000.000	160.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	50.000.000	40.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	02	2,04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat (%)	100 %	100 %	300.000.000	350.000.000	317.600.000		
4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	60 Dokumen	300,000,000	350.000.000	317.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 %	100 %	6.229.760.000	11.483.273.000	11.483.273.000		
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	432 Dokumen 0 Dokumen	432 Dokumen 0 Dokumen	6,229,760,000	11.483.273.000	11.483.273.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									25.249.555.771	28.728.952.019	27.592.352.248		

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01				PERENCANAAN				7.402.127.803	6.447.388.398	6.478.615.333				
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	6.254.750.984	5.521.774.718	5.462.643.388				

5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	4.830.750.520	4.580.095.498	4.522.109.251		
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4,830,750,520	4.580.095.498	4.522.109.251	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	12 bulan	30.000.000	5.000.000	5.000.000		
5	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	30.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	596.996.164	473.882.100	491.494.645		
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.500.000	10.291.400	10.291.400	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	179.121.164	89.612.700	107.225.245	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	48.375.000	35.335.000	35.335.000	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

												Lubang Panjang	
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	54.000.000	27.882.000	27.882.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	305.000.000	310.761.000	310.761.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang Diadakan	12 bulan	12 bulan	175.000.000	0	0		
5	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	175.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	400.004.300	287.730.920	268.973.292		
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	3.100.000	3.100.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	54.998.920	54.998.920	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	341.004.300	229.632.000	210.874.372	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	12 bulan	12 bulan	222.000.000	175.066.200	175.066.200		
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	172.000.000	157.740.200	157.740.200	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000	2.366.000	2.366.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	30.000.000	14.960.000	14.960.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100 %	100 %	831.405.069	415.166.860	509.146.725		
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian Sistematiika Dokumen Perencanaan dengan Aturan	100 %	100 %	685.877.709	262.291.860	372.621.525		
5	01	02	2,01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	2 Dokumen	62.632.800	5.882.600	126.282.125	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	43.116.660	22.823.000	20.362.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	0 Berita Acara	9.261.035	7.003.860	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	147.446.035	52.953.475	47.548.475	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perenc Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM	3 Dokumen	3 Dokumen	423.421.179	173.628.925	178.428.925	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Perencanaan yang Terpenuhi	100 %	100 %	92.733.900	131.981.850	119.297.700		
5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	26 Orang	26 Orang	64.882.000	31.981.900	22.353.950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2,02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	250 Buku	250 Buku	27.851.900	99.999.950	96.943.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	1 lap	1 lap	52.793.460	20.893.150	17.227.500		
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	52.793.460	20.893.150	17.227.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

					Pembangunan Daerah							Semua Kelurahan	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%) Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%) Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	315.971.750	510.446.820	506.825.220		
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedalam RKPD	100 %	100 %	75.000.000	58.978.610	58.978.610		
5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000	6.138.750	6.138.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	01	03	2,01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	12.000.000	8.775.000	8.775.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	8.772.000	8.772.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000	14.996.960	14.996.960	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	14.000.000	11.296.100	11.296.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/ Renja bidang Pembangunan Manusia	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	9.000.000	8.999.800	8.999.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kedalam RKPD	100 %	100 %	140.971.750	374.965.600	374.965.600		
5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	43.768.750	63.736.350	63.736.350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	15.278.300	14.966.800	14.966.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	18.500.000	10.558.750	10.558.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	22.193.450	264.563.750	264.563.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	28.131.250	11.844.950	11.844.950	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	13.100.000	9.295.000	9.295.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	onsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kedalam RKPD	100 %	100 %	100.000.000	76.502.610	72.881.010		

5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	17.052.500	17.052.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	18.000.000	17.597.910	17.597.910	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	12.000.000	11.000.000	11.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	9.734.100	8.301.100	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	01	03	2,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	15.000.000	11.618.200	10.579.600	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

					Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	10.000.000	9.499.900	8.349.900	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				320.831.000	268.330.700	193.325.700		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	40 Proposal	40 Proposal	320.831.000	268.330.700	193.325.700		
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen yang Disusun	100 dok	100 dok	320.831.000	268.330.700	193.325.700		
5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	164.000.000	131.499.800	56.499.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05	02	2,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	156.831.000	136.830.900	136.825.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									7.722.958.803	6.715.719.098	6.671.941.033		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		Sumber Dana	
							Target 2023		Pagu Indikatif							
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02				KEUANGAN				77.801.148.065	69.065.428.632	82.596.531.310					
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	10.181.004.600	9.578.956.984	9.388.817.062					
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD yang Berkualitas	12 Bulan	12 Bulan	33.000.000	5.953.600	5.953.600					
5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	11.000.000	3.133.600	3.133.600	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-DAU			
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000	1.695.000	1.695.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-DAU			
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.000.000	1.125.000	1.125.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-DAU			

5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	6.585.114.600	6.414.766.683	6.146.863.790		
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6,585,114,600	6.414.766.683	6.146.863.790	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	8.250.000	105.000	1.805.000		
5	02	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	8.250.000	105.000	1.805.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%)	42 %	42 %	138.250.000	129.934.600	176.934.600		
5	02	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	8.250.000	1.934.600	1.934.600	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	32 Orang	130.000.000	128.000.000	175.000.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	836.500.000	809.774.672	845.070.672		
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	27.500.000	19.583.064	19.583.064	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-DAU

5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	145.000.000	131.230.008	131.230.008	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	82.000.000	81.983.600	81.983.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	132.000.000	127.032.000	132.328.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	350 Laporan	450.000.000	449.946.000	479.946.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Barang Milik Daerah yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	1.138.390.000	964.148.000	964.148.000		

					Pemerintah Daerah								
5	02	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	1.100.000.000	964.148.000	964.148.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	38.390.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.062.000.000	887.861.529	961.100.000		
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	16.500.000	15.250.000	6.500.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	82.500.000	82.498.629	48.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	963.000.000	790.112.900	906.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum

5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Dipelihara Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	379.500.000	366.412.900	286.941.400		
5	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	192.500.000	192.481.400	192.481.400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	82.500.000	82.471.500	8.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	104.500.000	91.460.000	86.460.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Maksimal Defisit APBD Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget Planning)	4.1 % WTP 90 %	4.1 % WTP 90 %	65.992.943.465	58.399.262.015	72.025.551.715		
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	100 % Tepat Waktu	100 % Tepat Waktu	1.207.497.000	1.058.694.650	1.058.694.650		

5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	225.500.000	206.049.850	206.049.850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	02	2,03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	131 Dokumen	131 Dokumen	27,500,000	14.012.600	14.012.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	27 Laporan	27 Laporan	23.089.000	3.359.800	3.359.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	110.000.000	66.540.000	81.540.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	02	2,03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	14.419.000	14.419.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	,
5	02	02	2,03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	54.000.000	9.938.200	9.938.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	02	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	14.981.300	14.981.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana

					Keuangan Pemerintah Daerah							Semua Kelurahan	Alokasi Umum
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang	140 Orang	50.000.000	49.991.600	75.474.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa	100 %	100 %	64.041.357.465	56.801.560.465	70.357.367.765		
5	02	02	2,04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.250.000.000	1.250.000.000	1.275.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	57.169.231.000	50.915.727.000	58.849.785.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
5	02	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	4.382.909.465	3.382.909.465	8.979.658.765	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

5	02	02	2,04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.239.217.000	1.252.924.000	1.252.924.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	02	2,05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Data Base Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	62.000.000	65.100.000	65.100.000		
5	02	02	2,05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	62.000.000	65.100.000	65.100.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel	95 %	95 %	1.025.500.000	606.158.475	611.158.475		
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan BMD sesuai Aturan	90 %	90 %	1.025.500.000	606.158.475	611.158.475		
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	26.937.100	31.937.100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	35.303.500	35.303.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	03	2,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	8.304.900	8.304.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	18 Laporan	18 Laporan	75.000.000	27.583.944	27.583.944	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	103.001.935	103.001.935	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	490.000.000	358.744.583	358.744.583	Kota Sawahlunto, Semua Kec., Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	25.500.000	19.421.079	32.817.513	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-

													Dana Alokasi Khusus Non Fisik
5	02	03	2,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	30.000.000	26.861.434	13.465.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space)	100 %	100 %	601.700.000	481.051.158	571.004.058		
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target PAD	95 %	95 %	601.700.000	481.051.158	571.004.058		
5	02	04	2,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000	7.687.300	7.687.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000	11.505.630	11.505.630	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	44.000.000	33.065.000	33.065.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	44.000.000	42.427.100	14.120.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									77,801,148,065	69,065,428,632	82,596,531,310		

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana
							Target 2023		Pagu Indikatif					
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN				7.537.421.023	5.846.324.761	5.438.510.339			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	5.735.654.004	4.472.014.611	4.177.410.189			
5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	13 bulan	13 bulan	4.823.251.439	3.702.384.497	3.294.577.443			
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4,823,251,439	3.702.384.497	3.294.577.443	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan	375.290.000	329.121.700	429.121.700		
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	8.400.000	7.204.700	7.204.700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 paket	80 paket	71.980.000	70.562.000	70.562.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	0 paket	17.800.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 paket	50 paket	44.750.000	35.200.000	35.200.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	30.440.000	23.625.000	23.625.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	201.920.000	192.530.000	292.530.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer UmuDana

												Semua Kelurahan	Alokasi Umum
5	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	20 unit	20 unit	68.700.000	23.750.000	23.750.000		
5	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 paket	0 paket	11.700.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	57.000.000	23.750.000	23.750.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan	335.839.815	292.881.664	306.084.296		
5	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	120 Laporan	5.775.000	4.300.000	4.300.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	35.651.815	47.217.664	52.206.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	294.413.000	241.364.000	249.577.496	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan	132.572.750	123.876.750	123.876.750		
5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	90.926.750	90.926.750	90.926.750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	0 Unit	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	13.010.000	13.010.000	13.010.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	23.636.000	19.940.000	19.940.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapat pelayanan (%)	100 %	100 %	1.801.767.019	1.374.310.150	1.261.100.150		
5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan,pemberhent dan informasi kepegawaian	98 persen	98 persen	306.589.019	218.918.150	80.708.150		
5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 dokumen	3 dokumen	241.215.269	180.970.150	42.760.150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	35.200.000	29.600.000	29.600.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	30.173.750	8.348.000	8.348.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi,jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	99 persen	99 persen	331.000.000	144.402.500	149.402.500		
5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,	4 dokumen	4 dokumen	250.000.000	104.161.500	109.161.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

						Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah						Semua Kelurahan	
5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	2 dokumen	75.000.000	34.241.000	34.241.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 dokumen	1 dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	130 orang	130 orang	1.098.212.000	986.591.300	1.006.591.300		
5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	130 Orang	130 Orang	499.962.000	468.712.000	468.712.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	59.710.000	79.710.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	35 Dokumen	35 Dokumen	150.000.000	80.535.300	80.535.300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	2 Orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	12 Dokumen	12 Dokumen	183,250,000	201.408.000	201.408.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	89.986.000	89.986.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	46.240.000	46.240.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang di evaluasi dan di bina	2150 Orang	2150 Orang	65.966.000	24.398.200	24.398.200		
5	03	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2150 Dokumen	2150 Dokumen	40,341,000	23.740.000	23.740.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang	6 Orang	15.000.000	658.200	658.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	02	2,04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	52 Orang	0 Orang	10.625.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				183.486.000	0	0		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN (paket)	2 Paket	2 Paket	183.486.000	0	0		
5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4 Dokumen	4 Dokumen	183.486.000	0	0		

5	04	02	2,02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	0 Laporan	133.486.000	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
TOTAL									7.720.907.023	5.846.324.761	5.438.510.339		

INSPEKTORAT KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	

					Kegiatan/ Sub Kegiatan		Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Sumber Dana
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				7.354.979.004	7.459.193.306	7.459.193.306			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	7.180.905.654	7.325.905.056	7.325.905.056			
6	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD	13 Bulan	13 Bulan	6.327.300.516	6.376.740.441	6.376.740.441			
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6,327,300,516	6.376.740.441	6.376.740.441	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	208.228.000	203.228.000			
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 orang	48 orang	150.000.000	208.228.000	203.228.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio		
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	226.501.728	257.233.994	257.233.994			
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.434.669	8.283.237	8.283.237	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.000.000	42.470.504	42.470.504	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	29.322.059	41.345.280	41.345.280	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DisediakanBarang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	27.000.000	26.999.973	26.999.973	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	127.745.000	138.135.000	138.135.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penambahan peralatan dan mesin	22 Unit	22 Unit	40.000.000	35.423.521	39.707.521		
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	40.000.000	35.423.521	39.707.521	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-DAU
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Kebutuhan Jasa Kantor	12 Bulan	12 Bulan	240.548.910	242.925.550	248.725.550		
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	1.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-

												Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33.198.910	36.027.300	45.827.300	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000	6.997.250	6.997.250	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	195.350.000	194.901.000	194.901.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	196.554.500	205.353.550	200.269.550		
6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11 unit	162.554.500	162.549.550	162.549.550	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	14.000.000	15.370.000	15.370.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 unit	1 unit	20.000.000	27.434.000	22.350.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer

					Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Lembah Segar, Aur Mulio	Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	100 %	100 %	120.549.350	76.326.350	76.326.350		
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obrik Beresiko Tinggi Yang Terawasi	100 Persen	100 Persen	120,549,350	76.326.350	76.326.350		
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	121 laporan	121 laporan	83.319.350	60.726.350	60.726.350	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	12 dokumen	37.230.000	15.600.000	15.600.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai APIP (Level)	4 Level	4 Level	53.524.000	56.961.900	56.961.900		
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan SKOR IPAK	100 Persen	100 Persen	53,524,000	56.961.900	56.961.900		
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	53.524.000	56.961.900	56.961.900	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									7.354.979.004	7.459.193.306	7.459.193.306		

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.770.500.438	3.367.304.500	3.354.368.750			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	5.382.037.988	3.367.304.500	3.354.368.750			
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	6.648.400	1.248.000	1.250.000			
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.648.400	1.248.000	1.250.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	12 bulan	12 bulan	3.612.024.088	2.883.673.000	2.883.673.000			

1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3,612,024,088	2.883.673.000	2.883.673.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 paket 8 tahun	1 paket 8 tahun	164.647.500	11.000.000	10.000.000		
1	05	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	14.647.500	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 15 Orang	0 Orang 15 Orang	150.000.000	11.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	344.577.000	231.826.000	199.789.600		
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.825.000	6.495.000	6.495.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	89.800.000	88.968.000	56.009.600	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.827.000	14.750.000	14.256.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.750.000	24.120.000	25.536.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-DAU
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	4.500.000	2.800.000	2.800.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-DAU
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 orang	120 orang	183.875.000	94.693.000	94.693.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-DAU
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	924.254.000	97.433.500	98.584.500		
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	1.000.000	1.200.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	29.998.500	29.998.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	844.254.000	66.435.000	67.386.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	329.887.000	142.124.000	161.071.650		

1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	235.000.000	62.640.000	92.635.650	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	64.416.000	64.416.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	37 Unit	19.887.000	15.068.000	4.020.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar (%)	100 %	100 %	3.388.462.450	0	0		
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun Persentase Jumlah Penduduk yang mendapat Informasi Layanan Kebencanaan	1 dokumen 100 %	1 dokumen 100 %	147.949.800	0	0		

1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	390 Orang	390 Orang	147.949.800	0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.917.512.450	0	0		
1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 Orang	150 Orang	47.653.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	399,999,900	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	4 Unit	4 Unit	88.639.500	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	05	03	2,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	393.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	1.908.725.550	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	11 Orang	79.494.500	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani	100 %	100 %	323.000.200	0	0		
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	350 Orang	350 Orang	305.000.700	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	500 Orang	17.999.500	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.281.240.124	2.136.424.224	8.609.408.632		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	0	0	58.520.000		
8	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0	0	58.520.000		
8	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	0	0	58.520.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi (%) persentase penurunan angka kriminalitas	100 % 15 %	100 % 15 %	325.000.000	789.321.400	789.321.400		
8	01	02	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	325.000.000	789.321.400	789.321.400		

8	01	02	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	243.125.400	243.125.400	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	250 Orang	200.000.000	546.196.000	546.196.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang	150 Orang	75.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalu Forum Strategis (%) Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Kepala fdaerah Tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu	100 % 65 % 80 % 85 %	100 % 65 % 80 % 85 %	834.664.124	632.913.924	7.047.378.332	
8	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Kegiatan)	11 dokumen 12 bulan	11 dokumen 12 bulan	834.664.124	632.913.924	7.047.378.332	

8	01	03	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	634,664,124	632.913.924	7.047.378.332	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 Orang	250 Orang	200.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi masyarakat yang diawasi Persentase Penurunan Angka Krimilatis (%)	100 % 15 %	100 % 15 %	15.000.000	0	0		

8	01	04	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun jumlah dokumen program kerja monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang PPO	3 org 4 dokumen	3 org 4 dokumen	15.000.000	0	0		
8	01	04	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pelaksanaan pembinaan melalui forum strategis Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilihan Gubernur Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Partisipasi	100 % 65 % 80 % 85 %	100 % 65 % 80 % 85 %	540.015.300	680.384.900	680.384.900		

						Pemilih pada Pemilu (%)						
8	01	05	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Jumlah gangguan terhadap kegiatan PEMILU (kasus)	3 dokumen 11 dokumen	3 dokumen 11 dokumen	540.015.300	680.384.900	680.384.900	
8	01	05	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	335.000.000	177.645.000	177.645.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	168 Orang	168 Orang	205.015.300	502.739.900	502.739.900	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

				Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rekomendasi hasil rapat yang ditindaklanjuti (%)	100 %	100 %	566.560.700	33.804.000	33.804.000		
8	01	06	2,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan FKDM, Pengawasan Orang Asing dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 bulan	12 bulan	566.560.700	33.804.000	33.804.000		

8	01	06	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	350,000,000	33.804.000	33.804.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	240 Orang	240 Orang	216.560.700	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									11.051.740.562	5.503.728.724	11.963.777.382		

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0	5.116.702.783	4.555.165.526				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	4.800.171.833	4.142.304.476				
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	2.832.500	2.832.500				
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	12 Dokumen	0	2.832.500	2.832.500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	3.436.310.573	2.594.104.144			
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0	3.436.310.573	2.594.104.144		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	11.000.000	11.000.000			

1	05	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	12 Orang	0	11.000.000	11.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	230.070.760	330.070.760		
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	12 Paket	0	6.510.000	6.510.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	12 Paket	0	46.168.760	146.168.760		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	12 Paket	0	21.750.000	21.750.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	12 Paket	0	32.740.000	32.740.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	12 Dokumen	0	2.800.000	2.800.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	12 Laporan	0	120.102.000	120.102.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	753.248.000	837.587.072		
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	12 Laporan	0	2.000.000	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	0	50.065.000	50.065.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 bulan	0	701.183.000	785.522.072		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	366.710.000	366.710.000		
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	12 Unit	0	276.110.000	276.110.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	12 Unit	0	75.000.000	75.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	12 Unit	0	15.600.000	15.600.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar (%)	100 %	100 %	0	316.530.950	412.861.050		
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun Persentase Jumlah Penduduk yang mendapat Informasi Layanan Kebencanaan	1 dokumen 100 %	1 dokumen 100 %	0	8.210.000	8.210.000		
1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	390 Orang	390 Orang	0	8.210.000	8.210.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0	184.019.150	184.019.150		
1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 Orang	150 Orang	0	32.432.500	32.432.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	05	03	2,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	4 Unit	4 Unit	0	63.157.500	63.157.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	0	9.737.500	9.737.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	0	28.691.650	28.691.650	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	11 Orang	0	50.000.000	50.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani	100 %	100 %	0	124.301.800	220.631.900		
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	350 Orang	350 Orang	0	106.386.800	206.375.900	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-

													Dana Alokasi Khusus Fisik
1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	500 Orang	0	17.915.000	14.256.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									0	5.116.702.783	4.555.165.526		

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				0	6.520.159.117	7.036.604.697			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)		12 bulan	0	3.263.071.494	3.574.311.474			
2	16	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan (bulan)		12 bulan	0	2.035.254.836	2.112.492.396			

2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	260 Orang/bulan	0	2.035.254.836	2.112.492.396	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian		12 bulan	0	31.590.000	71.270.000		
2	16	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	0	10.150.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	12 Orang	0	21.440.000	71.270.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi		12 bulan	0	641.706.695	589.629.339		
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	5.574.149	5.574.149	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	0	308.574.546	86.419.190		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	0	34.178.000	33.320.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	0	30.316.000	26.116.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	0	263.064.000	438.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Penunjang kegiatan		50 unit	0	0	249.064.321		
2	16	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	0	0	32.219.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		49 Unit	0	0	216.845.321		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bulan	0	371.809.963	372.875.418		
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2 Laporan	0	8.450.000	2.000.000		Dana Transfer Umum-

													Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	0	34.719.963	29.920.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	0	328.640.000	340.955.418		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran		12 bulan	0	182.710.000	178.980.000		
2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	12 Unit	0	84.560.000	80.830.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	92.380.000	92.380.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19 Unit	0	5.770.000	5.770.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	Persentase OPD yang menggunakan Sistem	95 %	95 %	0	1.092.040.523	1.337.310.523		

					KOMUNIKASI PUBLIK	Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)							
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah inormasi yang disebarluaskan	12	12	0	1.092.040.523	1.337.310.523		
2	16	02	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hassil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	2 Dokumen	2 Dokumen	0	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	2 dokumen	2 dokumen	0	14.947.150	14.947.150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	2 dokumen	2 dokumen	0	2.725.000	2.725.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	12 dokumen	2 dokumen	0	20.659.900	20.659.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 dokumen	12 dokumen	0	319.876.473	319.876.473	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	4 dokumen	5 dokumen	0	38.419.200	38.419.200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	19 layanan	38 layanan	0	484.505.000	729.775.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	5 orang	5 orang	0	4.587.800	4.587.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	2 Dokumen	0	114.220.000	114.220.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	02	2,01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	10 unit	3 unit	0	87.100.000	87.100.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, Dana

					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Semua Kelurahan	Alokasi Umum
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	95 %	95 %	0	2.165.047.100	2.124.982.700		
2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan domain dan sub domain (bulan)	12	12	0	1.739.921.800	1.889.921.800		
2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1 Dokumen	0	2.850.000	2.850.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	62 unit	73 unit	0	1.737.071.800	1.887.071.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya aplikasi publik yang terintegrasi	12	12	0	425.125.300	235.060.900		
2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e- government dalam	2 dokumen	2 dokumen	0	8.819.800	8.819.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- , Dana

					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota						Semua Kelurahan	Alokasi Umum
2	16	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	2 Dokumen	1 Dokumen	0	2.250.000	2.250.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	25 perangkat daerah	28 perangkat daerah	0	2.250.000	2.250.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	5 unit	5 unit	0	253.266.000	33.201.600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	2 Dokumen	0	120.614.900	150.614.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0	17.929.900	17.929.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

2	16	03	2,02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen pengelolaan government chief information officer (GCIO)	2 dokumen	2 dokumen	0	15.887.800	15.887.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	16	03	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	2 Dokumen	0	4.106.900	4.106.900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				0	77.279.125	77.279.125		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	90 %	90 %	0	77.279.125	77.279.125		
2	20	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data Statistik Sektoral Yang Tersusun (dokumen)	7	3	0	77.279.125	77.279.125		
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan dieminasi data statistik sektoral	7 dokumen	3 dokumen	0	46.857.500	46.857.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	20	02	2,01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	37 orang	37 orang	0	8.311.250	8.311.250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum

2	20	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	11.437.350	11.437.350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	20	02	2,01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		28 PD	0	9.843.650	9.843.650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	20	02	2,01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	1 unit	1 unit	0	829.375	829.375	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				0	72.505.150	72.505.150		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	0	72.505.150	72.505.150		
2	21	02	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan)	10	10	0	59.434.300	59.434.300		
2	21	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	0	2.584.800	2.584.800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-, Dana

					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan						Semua Kelurahan	Alokasi Umum
2	21	02	2,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	0	18.659.500	18.659.500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	2 laporan	2 laporan	0	14.725.000	14.725.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 perangkat daerah	28 perangkat daerah	0	23.465.000	23.465.000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
2	21	02	2,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menetapkan pola hubungan komunikasi sandi	26	26	0	13.070.850	13.070.850		
2	21	02	2,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 OPD	28 PD	0	13.070.850	13.070.850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum
TOTAL									0	6.669.943.392	7.186.388.972		

KECAMATAN BARANGIN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN				5.949.520.000	5.002.033.155	4.975.433.002			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	5.449.520.000	4.899.802.655	4.873.202.502			
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	40 orang/bulan	532 orang/bulan	4.800.000.000	4.482.439.205	4.311.600.482			
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	532 orang/bulan	4,800,000,000	4.482.439.205	4.311.600.482	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 Paket	1 Paket	35.720.000	8.950.000	8.950.000			
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	3.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	4 Orang	4 Orang	32.220.000	8.950.000	8.950.000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-	

					Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						Barangin, Santua	Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan umum	12 bulan	12 bulan	119.200.000	96.988.750	137.404.400		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	45.000.000	38.991.050	44.027.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0 Paket	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000	16.998.000	19.398.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000	9.999.900	9.999.900	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	0 Dokumen	1.200.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	40.000.000	30.999.800	63.979.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Barang milik daerah Penunjang		0 unit	30.000.000	0	0		

					Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah							
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	30.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	389.600.000	267.154.700	345.077.620		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 Laporan	3.600.000	1.000.000	1.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan	30.000.000	29.199.700	34.512.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Bulan	13 Laporan	356.000.000	236.955.000	309.565.620	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	44.270.000	70.170.000		
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	9 unit	55.000.000	44.270.000	55.030.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

					Operasional atau Lapangan								
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	1 unit	10.000.000	0	10.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	13 unit	10.000.000	0	5.140.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	45.000.000	11.960.000	11.960.000		
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang Terlaksana dengan baik	100 %	100 %	30.000.000	9.460.000	9.460.000		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Bulan	2 Laporan	30.000.000	9.460.000	9.460.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	172 kegiatan	12 kegiatan	15.000.000	2.500.000	2.500.000		

7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 bulan	12 Laporan	15.000.000	2.500.000	2.500.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	380.000.000	80.329.500	80.329.500		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	115 %	12 Bulan	370.000.000	80.009.500	80.009.500		
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	370.000.000	80.009.500	80.009.500	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	320.000	320.000		
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	4 Laporan	10.000.000	320.000	320.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100 %	100 %	20.000.000	2.500.000	2.500.000		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah dalam kondisi aman dan tertib	100 Persen	100 Persen	20.000.000	2.500.000	2.500.000		

7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1 Laporan	20.000.000	2.500.000	2.500.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100 %	100 %	35.000.000	4.945.000	4.945.000		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	4.945.000	4.945.000		
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	25.000.000	2.497.000	2.497.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	10.000.000	2.448.000	2.448.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100 %	100 %	20.000.000	2.496.000	2.496.000		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik	4 %	12 Bulan	20.000.000	2.496.000	2.496.000		
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	2.496.000	2.496.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN				629.500.000	661.898.700	661.798.700		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	479.500.000	514.764.000	363.999.700		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	172 kegiatan	12 kegiatan	479.500.000	514.764.000	363.999.700		

7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	479.500.000	514.764.000	363.999.700	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	150.000.000	147.134.700	297.799.000		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	147.134.700	297.799.000		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000	147.134.700	130.234.700	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	0	167.564.300	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN				629.500.000	668.358.350	668.358.350		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	479.500.000	568.358.350	453.521.600		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	172 kegiatan	12 kegiatan	479.500.000	568.358.350	453.521.600		

7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	479.500.000	568.358.350	453.521.600	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	150.000.000	100.000.000	214.836.750		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasiitasi	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	100.000.000	214.836.750		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	100.000.000	64.266.750	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	0	150.570.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN				627.000.000	591.741.000	591.741.000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	477.000.000	471.103.973	389.022.710		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamtan	172 kegiatan	12 kegiatan	477.000.000	471.103.973	389.022.710		

7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	477.000.000	471.103.973	389.022.710	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	150.000.000	120.637.027	202.718.290		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	120.637.027	202.718.290		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	84.637.027	42.482.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	36.000.000	160.236.290	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN				804.398.893	683.569.500	683.569.500		

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	655.000.000	625.054.500	446.834.300		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	172 kegiatan	12 kegiatan	655.000.000	625.054.500	446.834.300		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	655.000.000	625.054.500	446.834.300	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	149.398.893	58.515.000	236.735.200		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	149.398.893	58.515.000	236.735.200		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	50.000.000	25.000.000	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	49.398.893	8.515.000	211.735.200	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
TOTAL									8.639.918.893	7.607.600.705	7.580.900.552		

KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN				6.736.056.320	6.448.514.417	6.467.085.610					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	6.325.136.020	6.288.788.166	6.315.859.359					
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)	756	756	5.783.336.020	5.901.837.496	5.876.813.025					
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	756 Orang/bulan	5,783,336,020	5.901.837.496	5.876.813.025	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	Dana Transfer Umum-			

												Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peersentase Aparatur yang meningkat SDMnya % Persentase ASN beerpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)	38 100	38 100	33.500.000	19.660.000	20.660.000		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.500.000	2.500.000	3.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	30.000.000	17.160.000	17.160.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)	12	12	140.000.000	124.664.800	133.164.800		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.500.000	498.750	498.750	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	49.000.000	51.552.050	51.552.050	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.500.000	2.000.000	2.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	45.614.000	54.114.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	0 unit	77.500.000	30.000	0		
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 paket	0 paket	30.000.000	20.000	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 paket	0 paket	47.500.000	10.000	0	Kota Sawahlunto, Lembah	Dana Transfer Umum-

					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan						Segar, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	12	12	179.800.000	143.095.870	185.721.534		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	500.000	500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	29.999.870	29.999.870	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	148.300.000	112.596.000	155.221.664	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	12	111.000.000	99.500.000	99.500.000		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	11 Unit	83.000.000	83.000.000	83.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	9 Unit	3.000.000	1.500.000	1.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 paket	1 paket	15.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	Dana Transfer Umum- DAU
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	31 unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	122.920.300	77.720.000	69.220.000		
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (bulan)	12	12	101.000.000	75.440.000	66.940.000		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	28.000.000	5.440.000	5.440.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	73.000.000	70.000.000	61.500.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	Dana Transfer Umum-

												Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	1	12 Kegiatan	21.920.300	2.280.000	2.280.000		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	21.920.300	2.280.000	2.280.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	240.000.000	60.792.501	60.792.501		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)	6	12 Kegiatan	240.000.000	60.792.501	60.792.501		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5 lembaga	5 lembaga	5.000.000	2.450.000	2.450.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	3 Laporan	235.000.000	58.342.501	58.342.501	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100 %	100 %	20.000.000	12.613.750	12.613.750		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan)	1	1	20.000.000	12.613.750	12.613.750		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	12.613.750	12.613.750	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)		100 %	11.000.000	3.500.000	3.500.000		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	1	11.000.000	3.500.000	3.500.000		

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	250 Orang	6.000.000	2.980.000	2.980.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 tim	20 Orang	5.000.000	520.000	520.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100 %	100 %	17.000.000	5.100.000	5.100.000		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (bulan)	12	12	17.000.000	5.100.000	5.100.000		
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000	4.320.000	4.320.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

												Semua Kelurahan	
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	780.000	780.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	640.650.750	463.446.800	383.242.730		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	1	12 Bulan	640.650.750	463.446.800	383.242.730		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	640.650.750	463.446.800	383.242.730	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	212.248.250	122.330.000	200.210.000		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	212.248.250	122.330.000	200.210.000		

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2 Unit	129.350.000	122.330.000	95.902.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	82.898.250	0	104.308.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	550.899.000	460.105.000	397.750.930		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	1	12 Bulan	550.899.000	460.105.000	397.750.930		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	550.899.000	460.105.000	397.750.930	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	302.000.000	140.000.000	200.030.000		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	302.000.000	140.000.000	200.030.000		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	282.000.000	140.000.000	123.125.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	20.000.000	0	76.905.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	695.788.900	438.251.650	380.429.580		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	1	695.788.900	438.251.650	380.429.580		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	695.788.900	438.251.650	380.429.580	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	157.110.100	146.109.250	201.607.250		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	157.110.100	146.109.250	201.607.250		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	114.400.000	114.400.000	78.212.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	42.710.100	31.709.250	123.395.250	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	552.899.000	418.816.126	366.897.756		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	1	552.899.000	418.816.126	366.897.756		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	552.899.000	418.816.126	366.897.756	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	300.000.000	150.405.778	200.000.078		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	300.000.000	150.405.778	200.000.078		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	250.000.000	110.205.778	78.897.778	Kota Sawahlunto, Lembah	Dana Transfer Umum-

												Segar, Kubang S. Selatan	Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	40.200.000	121.102.300	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	573.048.800	467.945.475	390.248.905		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	1	573.048.800	467.945.475	390.248.905		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	573.048.800	467.945.475	390.248.905	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Umum- Dana rAlokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	279.850.200	119.898.500	195.271.000		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	279.850.200	119.898.500	195.271.000		

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	212.450.000	80.000.000	80.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Umum-Dana rAlokasi Umum
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	67.400.200	39.898.500	115.271.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	570.899.000	475.950.000	365.049.930		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	1	570.899.000	475.950.000	365.049.930		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	570.899.000	475.950.000	365.049.930	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	282.000.000	106.000.000	214.576.000		

7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	282.000.000	106.000.000	214.576.000		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	250.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	32.000.000	26.000.000	134.576.000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
TOTAL									11.853.450.320	9.957.772.996	9.962.399.769		

KECAMATAN SILUNGKANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN				3.011.845.604	2.408.338.776	2.341.082.687			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	2.787.645.404	2.326.117.382	2.258.760.559			
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	266	266	2.263.554.004	2.000.873.457	1.779.592.270			

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	238 Orang/bulan	2,263,554,004	2.000.873.457	1.779.592.270	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	100	29.350.000	11.720.000	33.500.000		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	1 Paket	5.500.000	0	3.500.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	4 Orang	23.850.000	11.720.000	30.000.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	12	12	106.861.400	85.646.725	121.437.725		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1.431.200	1.015.000	1.015.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	39.913.200	35.141.325	35.141.325	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	830.000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.670.000	19.110.000	23.725.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.261.000	10.214.400	10.214.400	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30.756.000	20.166.000	51.342.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	12	53.000.000	0	30.000.000		
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	53.000.000	0	30.000.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	238.746.000	176.722.200	229.087.614		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan	800.000	800.000	800.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	35.688.000	32.177.200	32.177.200	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	202.258.000	143.745.000	196.110.414	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	96.134.000	51.155.000	65.142.950		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	12 Bulan	58.604.000	46.325.000	60.312.950	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	2.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	12 Bulan	5.530.000	4.830.000	4.830.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	17.219.900	13.319.500	16.601.834		
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12	12	12.219.900	8.320.000	8.320.000		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	8.320.000	8.320.000	8.320.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.899.900	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	1	1	5.000.000	4.999.500	8.281.834		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1 Laporan	5.000.000	4.999.500	8.281.834	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	179.505.300	59.541.894	60.141.494		

7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	10 kegiatan	10 kegiatan	179.505.300	59.541.894	60.141.494		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.760.000	3.399.900	3.999.500	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	4 Laporan	175.745.300	56.141.994	56.141.994	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100 %	100 %	9.465.000	0	0		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat	1	1	9.465.000	0	0		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	9.465.000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100 %	100 %	2.500.000	0	0		

7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di kecamatan	1	1	2.500.000	0	0		
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	250 Orang	2.500.000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100 %	100 %	15.510.000	9.360.000	5.578.800		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12	12	15.510.000	9.360.000	5.578.800		
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5.010.000	3.900.000	3.900.000	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	7.500.000	5.460.000	1.678.800	Kota Sawahlunto, Silungkang Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									3.011.845.604	2.408.338.776	2.341.082.687		

KECAMATAN TALAWI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN				3.674.781.283	2.443.184.876	2.443.184.876			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	3.336.163.278	2.344.374.076	2.345.729.626			
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasi urusan keuangan	100 %	100 %	2.276.504.568	1.976.112.604	1.864.447.955			

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan	238 Orang/bulan	bulan 2,276,504,568	1.976.112.604	1.864.447.955	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya urusan kepegawaian	100 %	100 %	40.250.000	2.500.000	3.500.000		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	3.500.000	2.500.000	3.500.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5 orang	36.750.000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya urusan umum	100 %	100 %	145.100.000	83.667.300	94.790.300		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	2.100.000	986.000	986.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	63.000.000	34.498.500	34.498.500	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	20.000.000	17.988.000	17.988.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	7.999.800	7.999.800	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	22.195.000	33.318.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	22.439.710	3.898.000	3.898.000		
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	15.898.000	3.898.000	3.898.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	6.541.710	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa untuk menunjang pelayanan	100 %	100 %	795.369.000	225.026.572	317.849.601		

7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	1.000.000	1.000.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.000.000	32.395.572	43.200.201	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	736.869.000	191.631.000	273.649.400	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	100 %	100 %	56.500.000	53.169.600	61.243.770		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	45.000.000	44.989.600	53.063.770	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	5.000.000	2.990.000	2.990.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000	3.690.000	3.690.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100 %	100 %	12.499.850	7.518.550	6.163.000		
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1 keg	1 keg	7.499.850	6.855.550	5.500.000		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.500.000	5.500.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.850	1.355.550	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	100 %	100 %	5.000.000	663.000	663.000		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	663.000	663.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100 %	100 %	287.318.255	77.870.450	77.870.450		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	100 buah	100 buah	287.318.255	77.870.450	77.870.450		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	5 Lembaga	15.000.000	8.791.000	8.791.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	272.318.255	69.079.450	69.079.450	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100 %	100 %	5.000.000	5.320.000	5.320.000		

7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	100 kali	100 kali	5.000.000	5.320.000	5.320.000		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	5.320.000	5.320.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100 %	100 %	11.300.000	0	0		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di kecamatan	100 kegiatan	100 kegiatan	11,300,000	0	0		
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	300 Orang	6.300.000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25 Orang	25 Orang	5.000.000	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100 %	100 %	22.499.900	8.101.800	8.101.800		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	11 desa	11 desa	22.499.900	8.101.800	8.101.800		
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	7,499,900	0	0	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	7,500,000	602.000	602.000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000	7.499.800	7.499.800	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									3.674.781.283	2.443.184.876	2.443.184.876		

1.1.3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Standar Pelayanan Minimal tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional, pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa bidang program pelayanan dasar kepada masyarakat baik tingkat pusat maupun di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dikemudian dinyatakan dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari Bidang :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Adapun dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan berpedoman pada aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/20/WAKO_SWL/2023 tentang Penetapan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah disusun dengan tujuan menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan

jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperoleh berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya yaitu :

1. Kebijakan pada ***perspektif masyarakat/layanan*** adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada ***perspektif proses internal*** adalah kebijakan bagi operasional birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada ***perspektif kelembagaan*** yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengunkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada ***perspektif keuangan*** yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk

kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi pedoman perencanaan bagi stakeholder pembangunan di daerah. Oleh karenanya penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan menyusun arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan kebijakan selama lima tahun.

Mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah :
“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan 7 Misi Pembangunan Daerah untuk periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan
- b. Menyediakan Penyuluhan Hukum Keluarga Islami kepada Masyarakat terkait pernikahan, keluarga dan kehidupan bermasyarakat
- c. Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan di setiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz

- e. Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
 - g. Menyediakan dan meningkatkan kualitas imam di masjid-masjid yang berkualitas setara Lc
 - h. Membangun Islamic Center
 - i. Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah
 - j. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya
 - k. Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya, kreativitas, dan produktivitas
 - l. Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum
 - m. Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya
 - n. Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat
 - o. Mendorong peningkatan kunjungan wisata religi
 - p. Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan
 - q. Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka
 - r. Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK (Balai Latihan Kerja)
- Arah Kebijakannya :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja yang berkualitas dan sesuai standar
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional,
- c. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi
- d. Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri
- e. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.
- f. melakukan kerjasama magang ke daerah lain dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan professional
- h. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi industri
- i. Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri
- j. Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto
- k. Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat

sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah

- l. Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
- m. Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir
- n. Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha dan kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan
- o. Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif
- p. Menjadikan muaro kalaban sebagai terminal barang dan pasar Grosir silungkang
- q. Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan
- r. Melakukan Revitalisasi tanaman coklat dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak
- s. Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak
- t. Memfasilitasi bantuan bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan kepada masyarakat
- u. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana dan teknologi pertanian dan perikanan serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi
- v. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit

- yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan
- w. Penguatan peran pendidikan dalam menanamkan persepsi positif bahwa profesi petani yang awalnya dianggap profesi yang “rendah” menjadi profesi yang terhormat dan bergengsi.
 - x. Pembukaan akses lahan-lahan terlantar untuk petani atau calon petani sehingga dapat produktif.
 - y. Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata di daerah-daerah potensial Meningkatkan Ketersediaan dan keamanan pangan
 - z. Memperkuat kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)
- Arah Kebijakannya :
- a. Peningkatan kualitas guru sebagai role model dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik
 - b. Melakukan kerjasama dengan guru di daerah lain dalam bentuk magang guru dan studi banding
 - c. Pemerataan guru di setiap satuan pendidikan
 - d. Menyediakan jaminan pendidikan gratis 9 tahun melalui Kartu Sawahlunto Pintar atau sejenis
 - e. Meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah dan mengoptimalkan fungsi SKB
 - f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millenial, nyaman dan menyenangkan secara merata
 - g. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini

- h. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan pendidikan termasuk pendirian kampus di Kota Sawahlunto
 - i. Menyiapkan regulasi tentang pemberian penghargaan dan reward terhadap siswa dan mahasiswa berprestasi
 - j. menyediakan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu serta siswa dan mahasiswa berprestasi
 - k. Peningkatan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
 - l. Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
 - m. Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral diseluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI
4. Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif Arah Kebijakannya :
- a. Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.
 - b. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan
 - c. Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif
 - d. Peningkatan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa
 - e. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

- f. Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan
 - g. Memperbaiki sistem dan manajemen informasi keuangan daerah
 - h. Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi
 - i. Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah
 - j. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD
 - k. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat Arah Kebijakannya :
- a. Mengembangkan Sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan
 - b. memperkuat kerjasama dengan daerah/negara lain sebagai upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan dalam melayani masyarakat
 - c. memberikan fasilitas dan insentif khusus bagi dokter spesialis untuk menjamin kenyamanannya dalam bekerja di Sawahlunto
 - d. melakukan perekrutan dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk mengembangkan sistem karir dan

- perjenjangan serta insentif finansial dan non-finansial untuk pemenuhan tenaga kesehatan
- e. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
 - f. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan berbagai standard guideline pelayanan kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya
 - g. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan
 - h. Menjamin kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak
 - i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik
 - j. Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
 - k. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
 - l. Menyusun regulasi yang mendukung pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat
 - m. Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi
 - n. menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)
 - o. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat

6. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan

Arah Kebijakannya :

- a. Menyusun Perencanaan Teknis Pengembangan Pariwisata Sesuai RIPARDA
- b. menumbuhkembangkan destinasi dan atraksi wisata sesuai potensi daerah
- c. Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus
- d. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas Mengembangkan suatu kawasan sentral objek wisata kota Sawahlunto yang terfokus
- e. Menumbuhkembangkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto
- f. mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark
- g. Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata
- h. Mewujudkan kawasaan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya
- i. Mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif yang profesional
- j. Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran
- k. Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas

- l. Menyediakan fasilitas wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya
7. Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai Arah Kebijakannya :
 - a. Menyediakan infrastruktur jalan dan Jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah
 - b. melakukan pembangunan jalan yang berkualitas dengan Kabupaten tetangga (Simpang Napar-Padang Sibusuk) ; (Perumnas Kolok-Sulit Air)
 - c. Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto
 - e. Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana Rest Area Muaro Kalaban agar lebih representatif
 - f. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata
 - g. Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum
 - h. Meningkatkan pelayanan moda transportasi Kota
 - i. Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api
 - j. Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
 - k. Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah

- dan masyarakat untuk memperjelas status hukum kepemilikan tanah di Kota Sawahlunto
- l. Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana
 - m. Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial
 - n. Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota
 - o. Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya
 - p. Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas
 - q. meningkatkan pengelolaan terhadap sumber daya air menjaga ekosistem hutan sebagai kawasan DAS
 - r. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman Melakukan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat
 - s. Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
 - t. Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi
 - u. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana
 - v. Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sektor
 - w. Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana

- x. Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- y. menyediakan Informasi Tentang Daerah Rawan Bencana
- z. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana
- aa. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
- bb. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan
- cc. Menerapkan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah
- dd. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk pengendalian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan
- ee. Meningkatkan kualitas sdm dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- ff. Meningkatkan kesadaran masyarakat pemanfaatan ruang
- gg. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang
- hh. Mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang kota
- ii. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata
- jj. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
- kk. Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,

- II. Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang pertambangan dan lingkungan hidup
- 8. Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya

Arah Kebijakannya :

- a. Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Kota
- b. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- c. Penyempurnaan dan validasi data PMKS Kota Sawahlunto
- d. Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
- e. Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
- f. Membangun tempat wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya
- g. Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
- h. melakukan pemilahan data berdasarkan gender
- i. perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender
- j. menerapkan anggaran berbasis gender
- k. Pemenuhan hak anak dalam setiap aspek pembangunan

9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor

Arah Kebijakannya :

- a. menyiapkan regulasi tentang tata kelola *smart city*
- b. menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi
- c. Menyediakan dan meningkatkan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi
- d. meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
- f. Memberikan kemudahan bagi investor
- g. Meningkatkan Koordinasi sampai kerjasama dengan perantau dalam membangun kota dan peningkatan ekonomi kota

BAB II **CAPAIAN KINERJA** **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dari aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja makro diperoleh dari hasil pelaksanaan berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan daerah. Capaian kinerja makro menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Berikut capaian kinerja makro Kota Sawahlunto pada tahun 2022 dan tahun 2023 serta perubahannya.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kota Sawahlunto
Tahun 2022 - 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,73	75,91	2,96
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,28	2,27	- 0,44
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	70,85	69,90	- 1,34
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,96	4,46	12,63
5.	Pendapatan Per Kapita (juta/jiwa)	65,74	71,21	8,32

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	3,14	3,08	-3,66

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, Data Diolah 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu :

a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

b. Pengetahuan (*knowledge*);

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

c. Standard hidup layak (*decent standard of living*). Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

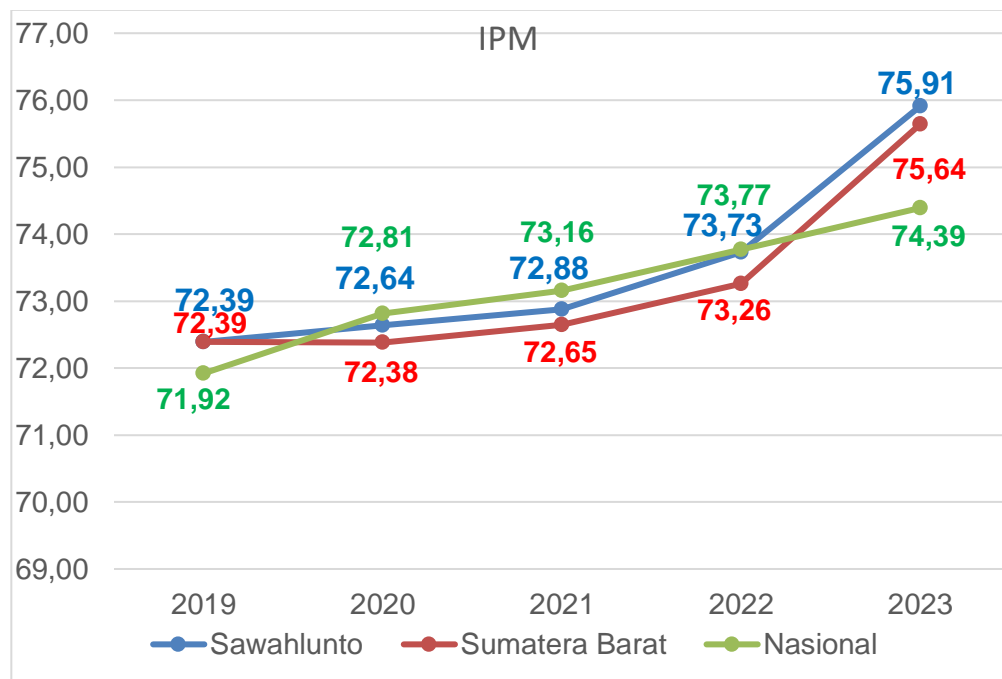
Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

IPM diklasifikasi menjadi 4 level, yaitu :

1. Rendah : IPM < 60
2. Sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
3. Tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$
4. Sangat Tinggi : IPM ≥ 80

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto pada tahun 2023 mencapai 75,91, meningkat sebesar 2,18 poin (2,96 persen) dari tahun sebelumnya (73,73). Peningkatan IPM Kota Sawahlunto tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2022 yang mencapai 0,85 poin (1,17 persen). IPM Kota Sawahlunto secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan peningkatan tahun 2023 ini adalah peningkatan tertinggi yang dicapai Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir. Berikut perkembangan IPM Kota Sawahlunto disandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional selama lima tahun terakhir:

Grafik 2.1
Perkembangan IPM
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa IPM Kota Sawahlunto pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Kondisi ini berbeda dengan kondisi tahun 2020-2022, dimana IPM Kota Sawahlunto lebih rendah dibandingkan IPM Nasional namun lebih tinggi dari IPM Provinsi Sumatera Barat.

IPM Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir telah berada pada “level tinggi”. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Sawahlunto harus terus berupaya meningkatkan IPMnya agar dapat sejajar dengan IPM kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dimana sudah ada dua kota yang mencapai level “sangat tinggi” di Provinsi Sumatera Barat, yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Berikut perbandingan IPM Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	61,26	61,09	61,35	62,19	65,79
Pesisir Selatan	70,08	69,90	70,03	70,84	72,24
Solok	69,08	69,08	69,24	70,02	71,92
Sijunjung	67,66	67,74	67,86	68,69	72,30
Tanah Datar	72,14	72,33	72,46	73,29	75,57
Padang Pariaman	70,59	70,61	70,76	71,63	74,54
Agam	72,37	72,46	72,57	73,29	74,44
Lima Puluh Kota	69,67	69,47	69,68	70,28	72,05
Pasaman	66,46	66,64	66,77	67,41	69,85
Solok Selatan	68,94	69,04	69,23	69,71	72,24
Dharmasraya	71,52	71,51	71,76	72,30	73,87
Pasaman Barat	68,21	68,49	68,76	69,57	72,03
Kota					
Padang	82,68	82,82	82,90	83,29	83,98
Solok	78,38	78,29	78,41	79,23	79,66
Sawahlunto	72,399	72,64	72,88	73,73	75,91
Padang Panjang	78,00	77,93	77,97	78,78	79,76

Bukit Tinggi	80,71	80,58	80,70	81,42	81,88
Payakumbuh	78,95	78,90	79,08	79,53	80,14
Pariaman	76,70	76,90	77,07	77,65	79,76
Sumatera Barat	72,39	72,38	72,65	73,26	75,64

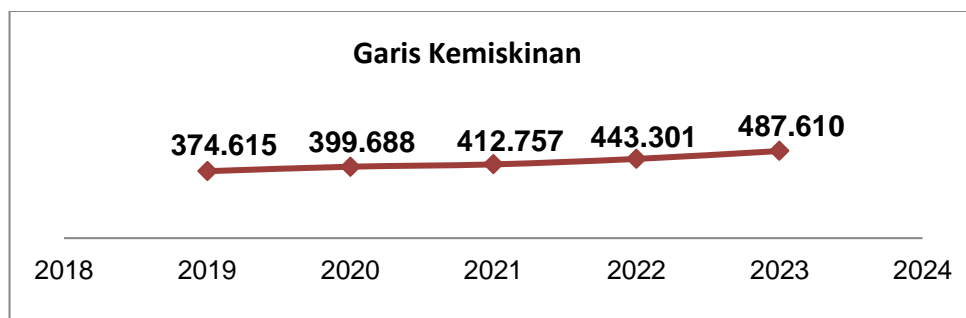
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel 2.2 di atas terlihat bahwa IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dicapai oleh Kota Padang dengan capaian IPM sebesar 83,58, sementara yang terendah adalah kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian IPM sebesar 65,79. Dibandingkan dengan kota-kota lain, IPM Kota Sawahlunto adalah yang terendah dan jauh di bawah IPM kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Berdasarkan definisi tersebut, maka Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.

Grafik 2.2
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto
(Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2019 – 2023

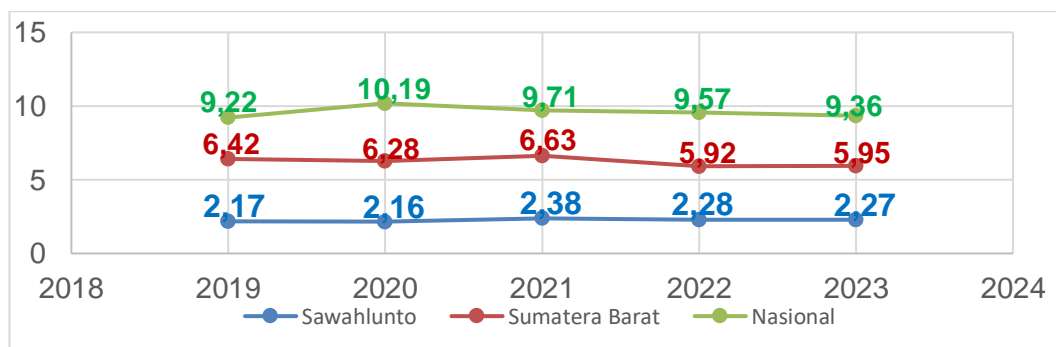


Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan laju inflasi yang terjadi. Pada tahun 2019 Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada level Rp 374.615,- per kapita per bulan dan pada tahun 2023 sudah jauh meningkat menjadi Rp 487.610,- per kapita per bulan, terjadi peningkatan Garis Kemiskinan rata-rata Rp 22.599 per tahun atau naik rata-rata 6,03 % per tahun.

Berdasarkan Garis Kemiskinan pada grafik 2.2, Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto tahun 2023 sebesar 2,27 persen, menurun sebesar 0,01 poin (0,44 persen) dari tahun sebelumnya (2,28 persen). Penurunan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto tahun 2023 ini lebih kecil dibandingkan penurunan tahun 2022 yang mencapai 0,1 poin (4,20 persen) dan penurunan tingkat kemiskinan tahun 2022 merupakan penurunan paling besar selama lima tahun terakhir. Berikut perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.3
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Selanjutnya tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	14,4	14,35	14,84	13,97	13,72
Pesisir Selatan	7,88	7,61	7,92	7,11	7,34
Solok	7,98	7,81	8,01	7,12	7,13
Sijunjung	7,04	6,78	6,80	6,00	5,88
Tanah Datar	4,66	4,40	4,54	4,26	4,16
Padang Pariaman	7,10	6,95	7,22	6,25	6,34
Agam	6,75	6,75	6,85	6,22	6,60
Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
Pasaman	7,21	7,16	7,48	6,85	6,80
Solok Selatan	7,33	7,15	7,52	6,51	6,45
Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	5,56	5,56
Pasaman Barat	7,14	7,04	7,51	6,93	6,92
Kota					
Padang	4,48	4,40	4,94	4,26	4,17
Solok	3,24	2,77	3,12	3,02	3,05
Sawahlunto	2,17	2,16	2,38	2,28	2,27
Padang Panjang	5,60	5,24	5,92	5,14	5,24
Bukittinggi	4,60	4,54	5,14	4,46	4,11
Payakumbuh	5,68	5,65	6,16	5,66	5,44
Pariaman	4,76	4,10	4,38	4,13	4,20
Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir (2019-2023). Bahkan tiga tahun terakhir (tahun 2021-2023), tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Indonesia. Berikut

disajikan 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional :

Tabel 2.4
Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota
Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional
Tahun 2019-2023

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1. Kota Tangerang Selatan	1. Kabupaten Badung	1. Kota Sawahlunto	1. Kota Sawahlunto	1. Kota Sawahlunto
2. Kabupaten Badung	2. Kota Denpasar	2,38	2,28	2,27
3. Kota Depok	3. Kota Sawahlunto	2. Kota Tangerang Selatan 2,57	2. Kota Balikpapan	2. Kota Balikpapan
4. Kota Denpasar	4. Kota Tangerang Selatan	3. Kota Depok 2,58	3. Kabupaten Bangka Barat	3. Kota Depok
5. Kota Sawahlunto	5. Kota Depok	4. Kabupaten Badung 2,62	4. Kota Tangerang Selatan 2,50	4. Kota Tangerang Selatan 2,57
6. Kota Balikpapan	6. Kabupaten Banjar	5. Kabupaten Bangka Barat 2,75	5. Kota Depok 2,53	5. Kota Denpasar 2,68
7. Kota Pekanbaru	7. Kota Balikpapan	6. Kota Pekanbaru 2,83	6. Kabupaten Badung 2,53	6. Kota Sungai Penuh 3,00
8. Kabupaten Bangka Barat	8. Kota Pekanbaru	7. Kota Balikpapan 2,89	7. Kabupaten Banjar 2,79	7. Kota Solok 3,05
9. Kabupaten Banjar	9. Kabupaten Bangka Barat	8. Kota Denpasar 2,96	8. Kota Denpasar 2,97	8. Kota Jakarta Selatan 3,10
10. Kota Jakarta Selatan	10. Kota Kota Solok	9. Kabupaten Banjar 3,04	9. Kota Sungai Penuh 2,97	9. Kota Pekanbaru 3,16
		10. Kota Solok 3,12	10. Kota Solok 3,02	10. Kota Dumai 3,21

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik

Pada tabel di atas terlihat pada tahun 2019, Kota Sawahlunto berada di posisi kelima terendah pada 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional, kemudian meningkat di posisi ketiga pada tahun 2020, dan tahun 2021-2023 berhasil berada pada posisi pertama terendah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk terus menekan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti pemberian Beasiswa dari pemerintah daerah, PKH dari Kementerian Sosial RI, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementerian Sosial RI, Dana Sharing Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Dana sharing Rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu dan Program Listrik untuk masyarakat kurang mampu. Bahkan Pemerintah Desa di lingkungan Kota Sawahlunto diwajibkan untuk menggunakan 20% dari Dana Desa untuk ekonomi kerakyatan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu : (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti

resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 4,98 persen, terjadi penurunan sebesar 0,02 poin (0,40 %) dari tahun sebelumnya (5,00 persen). Penurunan TPT Kota Sawahlunto tahun 2023 ini lebih kecil dibandingkan penurunan tahun 2022 yang mencapai 1,38 poin (21,63 %). Meskipun demikian, selama rentang waktu tiga tahun terakhir (tahun 2021-2023), TPT Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan penurunan.

Berikut perkembangan TPT Kota Sawahlunto disandingkan dengan TPT Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.5
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
Pesisir Selatan	5,84	7,00	5,97	4,61	4,75
Solok	4,65	4,65	4,67	5,89	4,99
Sijunjung	3,65	5,30	3,57	4,87	4,71
Tanah Datar	3,14	4,79	4,63	5,91	5,35
Padang Pariaman	5,97	8,13	8,41	6,60	6,69
Agam	4,72	4,61	5,06	4,93	4,96
Lima Puluh Kota	2,28	3,03	2,25	3,72	3,95
Pasaman	5,21	5,04	4,92	5,38	5,09
Solok Selatan	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
Dharmasraya	5,08	5,31	5,00	6,23	6,22
Pasaman Barat	4,64	4,69	5,02	6,33	6,01
Kota					
Padang	8,76	13,64	13,37	11,69	10,86
Solok	7,09	8,35	5,15	3,90	3,72
Sawahlunto	6,82	8,20	6,38	5,00	4,98
Padang Panjang	4,35	7,22	4,90	4,84	5,49
Bukittinggi	6,14	7,51	6,09	4,90	4,99
Payakumbuh	4,11	6,68	6,47	5,16	4,84

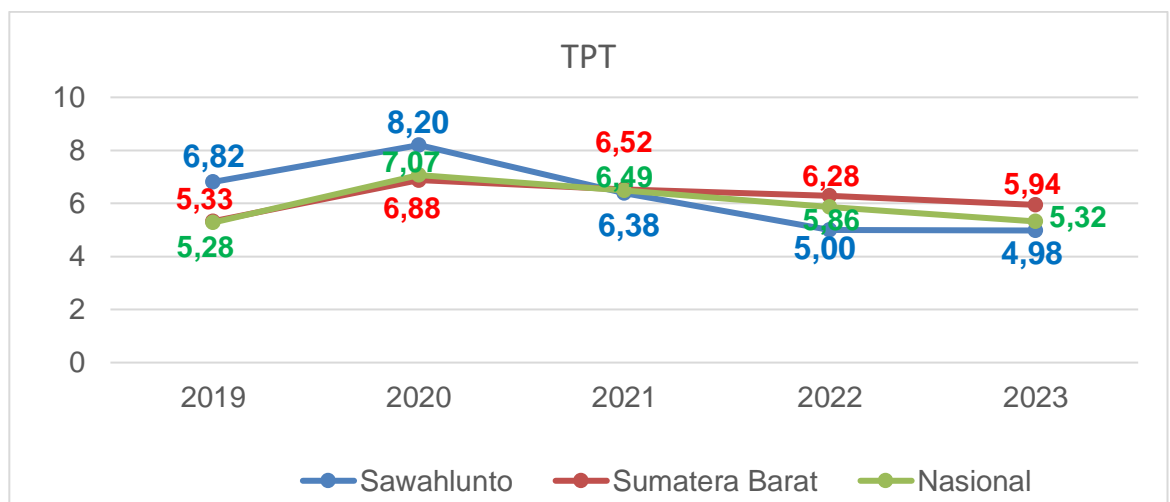
Pariaman	5,42	5,73	6,09	5,19	5,68
Sumatera Barat	5,33	6,88	6,52	6,28	5,94

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020, TPT Kota Sawahlunto adalah yang tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kota Solok. Kemudian pada tahun 2021 menjadi tertinggi keempat setelah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh. Namun pada tahun 2023, TPT Kota Sawahlunto berada pada posisi terendah ketiga tingkat kota se-Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Solok dan Kota Payakumbuh, dan posisi terendah kesembilan tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Berikut perkembangan TPT Kota Sawahlunto disandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama tahun 2019-2023 :

Grafik 2.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS, 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa TPT Kota Sawahlunto tahun 2019 dan 2020 lebih tinggi dari TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun tiga

tahun terakhir (tahun 2021-2023), kondisi tersebut berbalik, TPT Kota Sawahlunto lebih rendah dari TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menurunkan angka pengangguran terbuka ini melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan aktif menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja, Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, melaksanakan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, melakukan perluasan kesempatan kerja melalui Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, pembuatan peta potensi investasi, pembuatan video dan sekaligus biaya tayang video guna menarik para pelaku usaha dan calon investor untuk dapat mengurus perizinan berusaha di Kota Sawahlunto.

4. Pertumbuhan Ekonomi

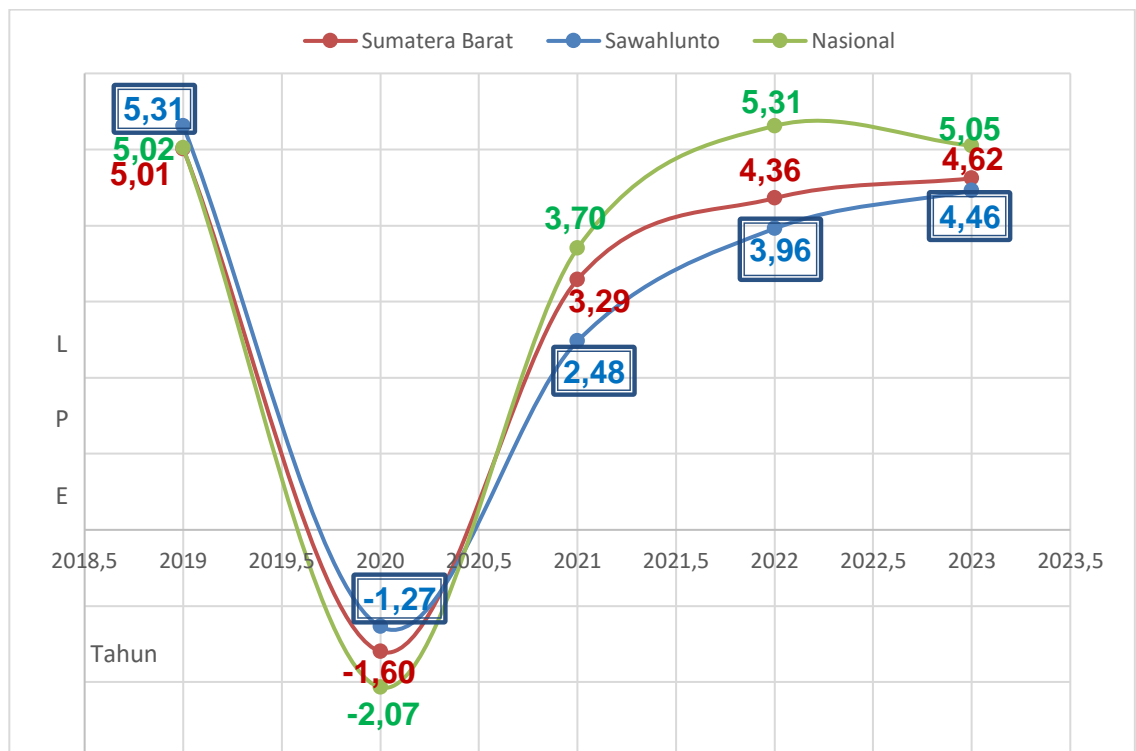
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu “indikator kinerja makro” yang merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan untuk menggambarkan Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa suatu wilayah yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tanpa dipengaruhi faktor harga (inflasi/deflasi).

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2023 mencapai 4,46 persen, meningkat sebesar 0,5 poin (12,63 %) dari tahun sebelumnya (3,96 persen). Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 lebih rendah dibandingkan peningkatan tahun 2022 yang mencapai 1,48 poin (59,68 %). Meskipun demikian, selama rentang waktu lima tahun terakhir (tahun 2019-2023), pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan

peningkatan, kecuali tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mengalami penurunan bahkan minus dengan capaian sebesar -1,27 persen sebagai dampak pandemi Covid 19 yang melanda hampir seluruh negara.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2019-2023) disandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional :

Grafik 2.5
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019 – 2023



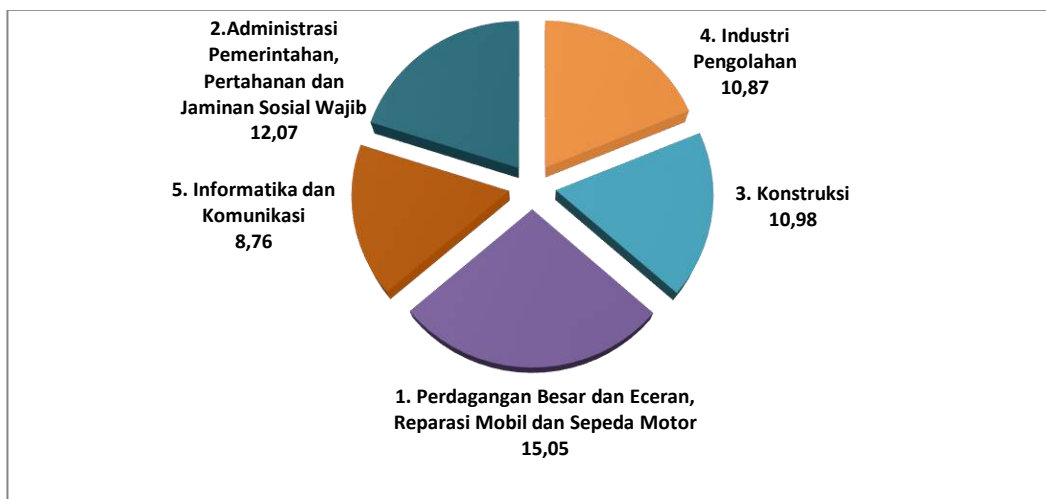
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemi covid-19 (tahun 2019) berada di atas angka 5,30 persen dan angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat pandemi covid-

19 melanda pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen, angka ini juga lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,62 persen. Namun saat perekonomian mulai menggeliat pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 2,49 persen, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang tumbuh sebesar 3,29 persen dan 3,70 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dimana angka pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Struktur perekonomian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan lapangan usaha dominan yang ada pada suatu daerah, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Berikut lima lapangan usaha dominan di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 :

Grafik 2.6
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto
Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2023 (Dalam persen)



Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari grafik di atas terlihat lima lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2023, yaitu :

1).Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,05 persen); 2).Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (12,07 persen); 3).Konstruksi (10,98 persen); 4).Industri Pengolahan (10,87 persen); dan 5).Informasi dan Komunikasi (8,76 persen).

Pada Tahun 2023 pertumbuhan lapangan usaha dominan di Kota Sawahlunto belum optimal sebagaimana kondisi sebelum Covid 19 melanda (tahun 2019), di samping lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang masih berkontraksi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha (*Supply Side*)
Tahun 2019 – 2023

NO	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,02	0,71	7,07	4,93	2,47
2	Pertambangan dan Penggalian	11,16	8,89	-28,23	-3,04	-0,87
3	Industri Pengolahan	-3,12	-2,98	4,91	2,56	5,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,07	-6,17	5,11	1,98	3,93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,09	-0,31	5,35	-0,70	3,61
6	Konstruksi	6,64	-5,21	3,18	3,19	5,83
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,44	-0,69	4,17	5,08	4,86
8	Transportasi dan Pergudangan	8,58	-10,96	4,35	3,53	5,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,95	-10,10	9,38	11,63	5,92
10	Informasi dan Komunikasi	8,27	8,19	7,08	5,77	7,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,60	0,91	9,49	5,55	3,63

12	Real Estat	5,87	0,13	4,94	5,94	6,27
13	Jasa Perusahaan	6,13	-3,16	3,43	5,14	5,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	-0,62	2,09	2,05	1,01
15	Jasa Pendidikan	9,03	4,41	4,85	4,00	1,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,62	6,26	7,35	4,48	7,15
17	Jasa Lainnya	8,97	-9,28	6,83	9,32	7,48
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		5,31	-1,27	2,48	3,96	4,46

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pada tabel di atas terlihat selama tiga tahun terakhir pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian minus (-28,23 % pada tahun 2021, -3,04% pada tahun 2022 dan -0,87% pada tahun 2023), lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 5,29 persen terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto (posisi ke 9), hal ini berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto. Di samping itu terdapat beberapa lapangan usaha dominan yang tumbuh jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum covid 19 (tahun 2019), seperti : 1).Kontruksi, sebelum wabah Covid 19 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 6,64 persen, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,83 persen; 2).Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebelum wabah Covid 19 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 5,44 persen, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,86 persen; 3).Informasi dan Komunikasi, sebelum wabah Covid 19 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 8,27 persen, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 7,69 persen; 4).Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sebelum wabah Covid 19 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 4,06 persen, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 1,01 persen.

Kondisi yang sama juga terjadi pada sisi pengeluaran, berikut disajikan perkembangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sisi pengeluaran (**demand side**):

Tabel 2.7
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	4,61	-2,61	2,20	3,56	2,81
Konsumsi LNPRT	10,05	-4,25	2,12	-0,19	5,11
Konsumsi Pemerintah	4,47	-9,41	2,60	-3,07	0,01
PMTB	5,31	-3,59	2,11	4,50	6,97
PDRB	5,31	-1,27	2,48	3,96	4,46

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan komponen Pengeluaran tahun 2023 belum tumbuh optimal sebagaimana kondisi tahun 2019 (sebelum wabah covid 19), kecuali komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh lebih tinggi. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : a).Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, sebelum wabah Covid 19 tumbuh sebesar 4,61 persen, tahun 2023 tumbuh sebesar 2,81 persen; b).Pengeluaran Konsumsi LNPRT, sebelum wabah Covid 19 tumbuh sebesar 10,05 persen, tahun 2023 tumbuh sebesar 5,11 persen; c).Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, sebelum wabah Covid 19 tumbuh sebesar 4,47 persen, tahun 2023 tumbuh sebesar 0,01 persen; d).Pembentukan Modal Tetap Bruto, sebelum wabah Covid 19 tumbuh sebesar 5,31 persen, tahun 2023 tumbuh sebesar 6,97 persen.

Berikut disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama lima terakhir (tahun 2019-2023), sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	4,73	-1,85	2,87	4,94	4,04
Pesisir Selatan	4,78	-1,11	3,35	4,01	4,19
Solok	5,04	-1,124	3,28	4,28	4,36
Sijunjung	4,80	-1,10	3,14	3,93	4,26
Tanah Datar	4,98	-1,13	3,27	4,16	4,44
Padang Pariaman	2,40	-10,47	2,15	6,83	5,46
Agam	4,78	-1,38	3,70	4,21	4,52
Lima Puluh Kota	5,06	-1,16	3,33	4,02	4,55
Pasaman	4,80	-0,87	3,35	4,08	4,41
Solok Selatan	4,86	-1,24	3,32	4,01	4,57
Dharmasraya	4,94	-1,39	3,40	4,27	4,35
Pasaman Barat	4,45	-1,34	3,71	4,13	4,33
Kota					
Padang	5,65	-1,86	3,65	4,31	4,54
Solok	5,49	-1,42	3,55	4,60	4,81
Sawahlunto	5,31	-1,27	2,48	3,96	4,46
Padang Panjang	5,56	-1,44	3,46	4,39	4,84
Bukittinggi	5,84	-1,74	3,61	4,67	4,79
Payakumbuh	5,89	-1,66	3,58	4,51	4,70
Pariaman	5,30	-1,32	3,51	4,53	4,79

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebelum wabah covid 19 (tahun 2019), pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan berada pada posisi ke 6 pada tingkat kota. Namun setelah wabah Covid-19 selesai, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di posisi terendah kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021, terendah kedua setelah Kabupaten Sijunjung tahun 2022 dan pada tahun 2023 berada pada posisi ke-11 tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat.

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menggambarkan pendapatan per kepala atau per satu orang penduduk. Peningkatan Pendapatan per kapita biasanya dianggap sebagai tanda ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, Pendapatan per kapita tidak dapat mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.

Pendapatan per kapita dihitung dengan cara membagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, meningkat atau menurunnya Pendapatan Per Kapita ditentukan oleh meningkat atau menurunnya total PDRB ADHB dan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk.

Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2023 mencapai Rp. 71,21 juta/jiwa, meningkat sebesar Rp 5,47 juta/jiwa (8,32 persen) dari tahun sebelumnya (Rp 65,74 juta/jiwa). Peningkatan Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,32 persen.

Berikut disajikan perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Sawahlunto dan variabel pembentuknya pada periode 2019-2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota
Sawahlunto Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Rp. Juta)	3.679.850	3.656.590	3.851.692	4.389.764	4.825.295
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	8,09%	-0,63%	5,34%	13,97%	9,92%
Jumlah Penduduk (Jiwa)	62,524	65,138	65,807	66,778	67,758

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,01%	4,18%	1,03%	1,48%	1,47%
PDRB Per Kapita (Rp.Juta/Jiwa)	58,85	58,02	58,53	65,74	71,21
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	7,00%	-1,41%	0,88%	12,32%	8,32%

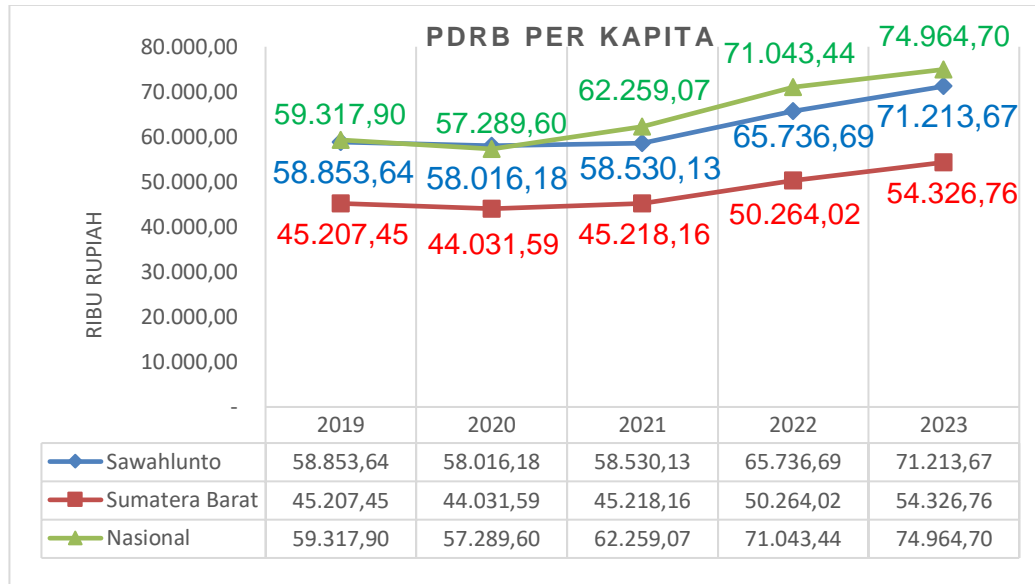
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah Tahun 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebagai salah satu variabel pembentuk Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu 2019-2023, kecuali pada tahun 2020 akibat dampak wabah covid 19, dimana PDRB ADHB Kota Sawahlunto mengalami kontraksi (minus) pertumbuhan sebesar 0,63%.

Di sisi lain, jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebagai variabel pembentuk PDRB Per Kapita lainnya, juga meningkat setiap tahunnya, apalagi saat pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat sebesar 4,18 % atau empat kali lipat dari rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya. Dengan demikian, Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020 mengalami kontraksi (minus) sebesar 1,41% karena PDRB ADHB berkurang, sementara jumlah penduduk meningkat.

Berikut perkembangan Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto tahun 2019-2023, disandingkan dengan Pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional :

Grafik 2.7.
Perkembangan Pendapatan Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pada grafik di atas terlihat pada tahun 2023 Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan Pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dari Pendapatan per kapita Nasional. Meskipun demikian, peningkatan dan penurunan Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2019 – 2023 searah dan sejalan dengan peningkatan dan penurunan Pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Berikut perkembangan Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto tahun 2019-2023, disandingkan dengan Pendapatan per kapita kabupaten/kota se- Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.10
Perkembangan Pendapatan Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah/jiwa)

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	50,44	49,46	54,60	60,45	64,69
Pesisir Selatan	30,25	29,96	29,27	32,08	34,31
Solok	36,36	35,96	35,88	39,42	42,72
Sijunjung	38,46	37,87	40,29	44,34	47,91
Tanah Datar	37,58	37,34	36,29	39,72	42,89
Padang Pariaman	51,14	42,94	42,31	50,02	55,54
Agam	41,80	41,19	39,91	43,94	47,41
Lima Puluh Kota	40,78	40,24	41,81	45,69	49,45
Pasaman	31,66	31,32	31,09	33,70	36,27
Solok Selatan	32,57	31,81	31,31	34,19	36,78
Dharmasraya	41,78	40,41	46,45	51,88	55,63
Pasaman Barat	34,68	33,75	36,47	40,31	43,43
Kota					
Padang	65,65	64,67	70,88	78,36	84,53
Solok	57,00	56,05	57,01	62,88	67,59
Sawahlunto	58,85	58,02	58,53	65,74	71,21
Padang Panjang	64,71	63,82	64,12	70,73	76,31
Bukittinggi	66,49	65,00	74,00	82,85	89,74
Payakumbuh	50,34	49,63	51,81	57,73	62,02
Pariaman	56,56	55,86	55,41	61,23	66,20
Sumatera Barat	45,21	44,03	45,22	50,26	54,33

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto lima tahun terakhir (tahun 2019-2023) berada di posisi keempat tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Gini Rasio bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari Gini Rasio adalah sebagai berikut :

1. Nilai Gini Rasio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang;
2. Nilai Gini Rasio terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang;
3. Nilai Gini Rasio terletak antara 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.

Gini Rasio Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 0,308 yang menunjukkan pemerataan relatif baik. Angka ini menurun sebesar 0,006 poin (-1,91 persen) dari Gini Rasio tahun 2022 dengan capaian sebesar 0,314. Penurunan Gini Rasio ini menunjukkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran atau pendapatan antar penduduk di Kota Sawahlunto tahun 2023.

Berikut perkembangan Gini Rasio Kota Sawahlunto tahun 2019-2023, disandingkan dengan Gini Rasio kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.11
Perkembangan Gini Rasio
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	0,336	0,273	0,321	0,233	0,259
Pesisir Selatan	0,246	0,264	0,253	0,246	0,259
Solok	0,285	0,277	0,246	0,243	0,235
Sijunjung	0,293	0,269	0,270	0,243	0,263
Tanah Datar	0,278	0,273	0,250	0,251	0,260
Padang Pariaman	0,297	0,257	0,269	0,245	0,257
Agam	0,251	0,278	0,272	0,298	0,255
Lima Puluh Kota	0,238	0,222	0,244	0,208	0,194

Pasaman	0,330	0,310	0,248	0,230	0,243
Solok Selatan	0,295	0,307	0,277	0,253	0,271
Dharmasraya	0,278	0,280	0,268	0,287	0,291
Pasaman Barat	0,283	0,258	0,261	0,277	0,238
Kota					
Padang	0,312	0,312	0,343	0,354	0,312
Solok	0,271	0,286	0,277	0,288	0,256
Sawahlunto	0,289	0,300	0,295	0,314	0,308
Padang Panjang	0,322	0,394	0,306	0,296	0,273
Bukittinggi	0,267	0,265	0,286	0,317	0,255
Payakumbuh	0,276	0,325	0,316	0,311	0,316
Pariaman	0,300	0,310	0,301	0,272	0,289
Sumatera Barat	0,306	0,305	0,306	0,300	0,280

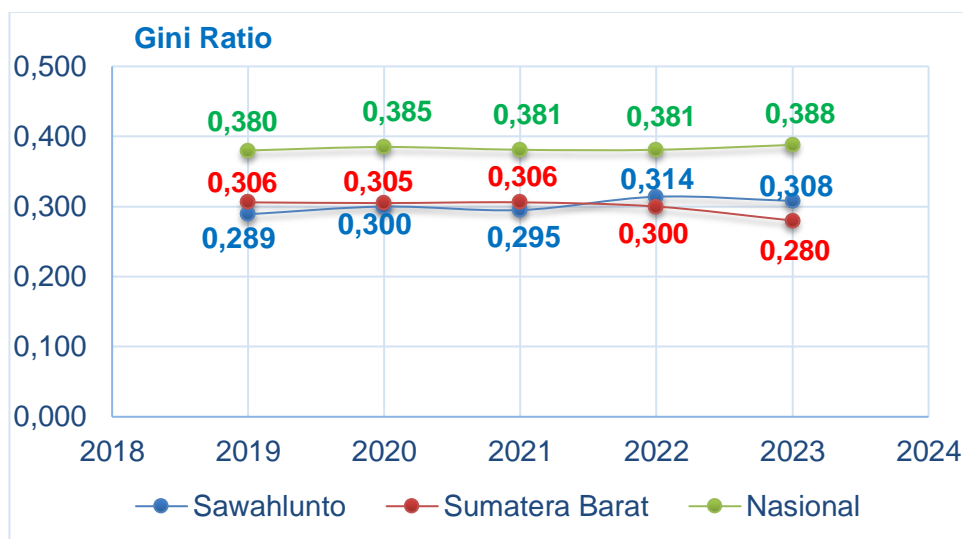
Sumber : BPS 2024

Secara umum, Gini Rasio Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2019-2023 berfluktuasi (naik dan turun), namun masih berada dalam rentang nilai 0,200-0,350 yang menurut Todaro (2006) menunjukkan pemerataan relatif baik, dengan kata lain, bahwa ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk di Kota Sawahlunto dalam kondisi pemerataan relatif baik.

Meskipun demikian, jika Gini Rasio Kota Sawahlunto dibandingkan dengan Gini Rasio kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, ketimpangan pendapatan atau pengeluaran Kota Sawahlunto tahun 2023 adalah yang tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Payakumbuh (0,316) dan Kota Padang (0,312).

Berikut perkembangan Gini Rasio Kota Sawahlunto tahun 2019-2023, disandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional :

Grafik 2.8
Perkembangan Gini Rasio
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Gini Rasio Kota Sawahlunto pada tahun 2019-2021 lebih rendah dari Gini Rasio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, dengan kata lain, ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2022 - 2023, Gini Rasio Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan Gini Rasio Provinsi Sumatera Barat, namun masih lebih rendah dibandingkan Gini Rasio Nasional.

2.1. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk gambaran dimaksud diatas, berikut disajikan tabel urusan-urusan yang diselenggarakan selama tahun 2021 dengan susunan dan urutan nomor sebagai berikut:

2.1.1. IKK Keluaran (*Outcome*) dan Hasil (*Output*)

2.1.2. IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.1.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN

1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{1344}{2188} \times 100\% = 61.42\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
1.	Pendidikan	1) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (negeri dan swasta)	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	---	-----	--

2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
1.	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar x 100%	6669x 100% 6878 = 96.96%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

		Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan	7083	ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	---------------------------------------	---	------	--

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Pendidikan	1) Jumlah SD Negeri Terakreditasi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
		7) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama x 100%	$\frac{3314}{3664} \times 100\% = 90.44\%$	

		Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan		
--	--	--	--	--	--

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Pendidikan	1) Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	--	-----	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
		9) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau yang sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan}} \times 100\%$	$\frac{82}{12493} \times 100\% = 0.65\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		dalam Pendidikan Kesetaraan	dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan		
--	--	-----------------------------	--	--	--

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Pendidikan	1)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2023	Keterangan
		6)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	...	(tidak perlu diisi)
		8)	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN

1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
2.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{104}{68.054} \times 100\% = 0.152\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase RS Rujukan	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS Rujukan}} \times 100\%$	$1 \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen

		kan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi	Jumlah RS di kab/kota	1	pendukung (yg ditandata-ngani kepala dan distempel basah)
--	--	---	-----------------------	---	---

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kota}} \times 100\%$	$\frac{774}{1.263} \times 100\% = 61.28\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Kesehatan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	----	--	-----	--

4. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kota}} \times 100\%$	$\frac{862}{1205} \times 100\% = 71.53\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Kesehatan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-------	----------------------	------------

2.	Kesehatan	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	$\times 100\%$ $\frac{3874}{4509} \times 100\% = 75.22\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Jumlah bayi baru lahir di kota		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
2.	Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	$\frac{3415}{4578} \times 100\% = 74.596\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Jumlah balita di kota		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota}} \times 100\%$	$\frac{7369}{10779} \times 100\% = 68.364\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	-------------------------------	----------------------	------------

		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar x 100%	20143 x 100% = 49.826	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota	40427	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah) – Tes Strip Gula Darah Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

9. Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas}} \times 100\%$	$4217 \times 100\% = 44.497\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	9477	
--	--	----------------	---	------	--

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
2.	Kesehatan		$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kota}} \times 100\%$	$\frac{1251}{15745} \times 100\% = 7.945\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	--	-----	--

11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapat- kan pelayanan kese- hatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kota}} \times 100\%$	$\frac{431}{852} \times 100\% = 50.587\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-------	----------------------	------------

2.	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yg mendapat-kan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x 100%	215 x 100% = 160.448%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-ngani kepala dan distempel basah)
			Jumlah penderita ODGJ di kota	134	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kota}} \times 100\%$	$\frac{482}{1852} \times 100\% = 26.026\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	--	-----	--

14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV di kota}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota}} \times 100\%$	$\frac{1112}{1112} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi
Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	$\frac{\text{Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kota (ha)}}{\text{Luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)}} \times 100\%$	$0 \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
				0	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
3.		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi,	Luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh		Tidak Ada Pantai

		erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota (m)	x 100%	0	x 100% = 0%	
			Luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kab/kota (m)		0		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	---	-----	--

3. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab/kota yg dilayani oleh jaringan irigasi yg dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan \& dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota (ha)}} \times 100\%$	$\frac{692,38}{1.605} \times 100\% = 43,139\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	1) Persentase panjang jaringan irigasi	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi}}{\text{}} \times 100\%$	$\text{=====} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

		primer dalam kondisi baik	baik (m) Panjang jaringan irigasi primer (m)		ditandata- ngani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase panjang jaringan irigasi sekun- der dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	$\times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

		3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	---	---	---	--

4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota}} \times 100\%$	$\frac{75}{255} \times 100\% = 29,412\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh di PLT}}{\text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}} \times 100\%$	$19 \times 100\% = 20\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Jumlah rumah di kab/kota	95	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

7)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septic</p> <hr/> <p>Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha</p>	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
----	--	--	-----	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		8) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\text{Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha}}$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT}}$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		11) Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan di kab/kota}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

		tinja	yang tersedia	...	ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota x 100%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		13) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14) Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

6. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	$\frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku x 100%	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganinya kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			Jumlah seluruh bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana)		
		2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah bangunan gedung	Cukup	...	Dibuktikan dengan dokumen

		negara milik Pemerintah Kab/Kota	jelas		pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	8)	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

7. Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kota}} \times 100\%$	$\frac{315,806}{454,87} \times 100\% = 69,428\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Panjang jalan yang dibangun	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Panjang jembatan yg dibangun	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		5) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		7) Panjang jembatan yang direhabilitasi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Panjang jalan yang dipelihara	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Panjang jembatan yang dipelihara	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

8. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknisi/analisis di wilayah kota}} \times 100\%$	$\frac{213}{426} \times 100\% = 50\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2) Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		10) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	--	-----	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		13) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
19) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
21) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		24) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		25) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

9. Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-------	----------------------	------------

3.	Pekerjaan Umum	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	<div>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi x 100%</div> <div>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</div>	<div>229 x 100% = 100%</div> <div>229</div>	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
----	----------------	--	--	---	--

--	--	--	--	--	--

2.2.1.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{6}{8} \times 100\% = 75\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan} + \text{rumah tangga penerima subsidi uang sewa} + \text{rumah tangga penerima penyediaan}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima}} \times 100\%$	$0 \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		kabupaten/kota	rumah layak huni		
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi criteria penerima pelayanan	0	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		4) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	---	-----	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		5) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab/Kota yang Ditangani
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	$\frac{49,37}{135,21} \times 100\% = 36,514\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	-------------------------------	----------------------	------------

	Perumahan Rakyat	1) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh $\times 100\%$	$\times 100\% = 10,508\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan

			di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	1521	distempel basah)
			Jumlah rumah di kab/kota	14474	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1)	Jumlah rumah di kab/kota	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Jumlah rumah tidak layak huni	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah Total Unit Rumah}}$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-

					ngani kepala dan distempel basah)
--	--	--	--	--	-----------------------------------

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah pengembang yang tersertifikasi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah pengembang yang teregistrasi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		9) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	--	-----	--

2.2.1.5. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kegiatan pemberian informasi rawan bencana, meliputi: <ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana- Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia- Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	32.925 Orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		2)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100%	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	----	---	--	-----	--

		sesuai jenis ancaman bencana	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		
--	--	------------------------------	--	--	--

2. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga yang di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelatihan, layanan pusdalops dan peralatan perlindungan sesuai jenis ancaman bencana - Data yang diambil adalah data tahun 2021 berdasarkan program dan anggaran 	290 Orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1) Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	3)	Persentase jumlah aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan (pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	$\frac{\text{Jumlah aparaturn dan warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparaturn dan warga Negara di kawasan bencana}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	4)	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	5)	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	6)	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-----------	----------------------	------------

5.	Trantibum Linmas	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- 'Yang dimaksud dengan jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga Negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana	75 Orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
----	------------------	--	---	----------	--

			- Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi korban bencana		
--	--	--	--	--	--

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah status penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala

		kejadian bencana	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		dan distempel basah)
--	--	------------------	--	--	----------------------

4. Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$	Seluruh kasus kebakaran yang masuk padad tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik dan dibuktikan dengan dokumen dan dokumentasi/foto

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	...	Seluruh kasus kebakaran yang masuk padad tahu 2021 dapat terselesaikan dengan baik dan dibuktikan dengan dokumen dan dokumentasi/foto

		2) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	...	Dibuktikan dengan dokumentasi/foto
		3) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	...	Dibuktikan dengan dokumentasi/foto dan buku ganti shift
		4) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	...	Pos damkar yang tersedia hanya di MAKO dan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Silungkang dan Talawi
		5) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	...	Dibuktikan dengan dokumentasi/ foto dan daftar sarana prasarana pemadam kebakaran
		6) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	...	Dibuktikan dengan personil damkar yang mengikuti pelatihan dan bintalsik pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat beserta dokumentasi/foto
		7) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	...	Dibuktikan dengan personil damkar yang mengikuti pelatihan dan bintalsik pemadaman kebakaran yang memiliki sertifikat beserta dokumentasi/foto

5. Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-----------	----------------------	------------

5.	Trantibum Linmas	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran - Yang dimaksud dengan rata-rata waktu tanggap adalah jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran 	± 15 Menit	Dibuktikan SOP dan administrasi pencatatan terjadinya kebakaran
----	------------------	--	--	------------	---

6. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{7.767}{7.767} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	4)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	5)	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	6)	Tersedianya sarana prasarana minimal	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

7. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.6. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL

1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
6.	Sosial	persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	$\frac{144}{144} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
6.	Sosial	1) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	-----	--

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		11) Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

paket perbekalan kesehatan		
13) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		14) Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		16) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		17) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		19) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	20) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	21) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
6.	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
6.	Sosial	1) Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

*BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

	5) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	6) Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	...	Dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.7. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN TENAGA KERJA

1. Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK (rencana tenaga kerja) yang telah disusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	<p>Menghitung selisih 6 indikator ketenagakerjaan dengan rumus :</p> $\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	----	--	---	-----	--

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{105}{3.936} \times 100\% = 2,668\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	1)	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi}}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster}} \times 100\%$		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah instruktur seluruhnya}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur}}{\text{Jumlah peserta pelatihan}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

				distempel basah)
4)	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh LPK}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		5) Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan}}{\text{Jumlah LPK yang terdata}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah penganggur yang dilatih	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikasi pelatihan}}{\text{Jumlah orang yang dilatih}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja}}{\text{Jumlah lulusan}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah CPMI dilatih}}{\text{Jumlah CPMI terdaftar}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		11)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	-----	--	-------------	-----	--

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (ADHK)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi - (pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja)	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

**4. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak
(PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)**

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	$\frac{27}{29} \times 100\% = 93,103\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3)	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
----	---	-------------	-----	--

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
		4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah mogok kerja	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah penutupan perusahaan	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9)	Jumlah perselisihan kepentingan	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
----	---------------------------------	-------------	-----	--

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		11) Jumlah perselisihan PHK	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/Tidak	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		15) Persentase perselisihan	Jumlah perjanjian bersama	...	Dibuktikan dengan dokumen

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$		pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	--	--	--	--

**5. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)
Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab/Kota**

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{0}{313} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Tenaga Kerja	1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3)	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
4)	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\text{Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\text{Jumlah CPMI/CTKI}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\text{Jumlah PMI yang pulang}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\text{Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\text{Jumlah PMI/TKI}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\text{Jumlah LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.8. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD}} \times 100\%$	$\frac{7,243}{85,65} \times 100\% = 8,457\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia < 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kab/kota}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia < 18 tahun)}} \times 100\%$	$\frac{29 \text{ kasus}}{21.422} \times 100\% = 135,375\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2020)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

*BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
----	---	-------------	-----	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2020)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di kab/kota}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk 100.000 perempuan}} \times$	$\frac{3}{23.624} \times 100\% = 12698,95\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPP0 pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		6)	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan $\times 100\%$...	

*BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.8. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN

1. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
9.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	$\frac{10.516}{6.181} \times 100\% = 170,142\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
9.	Pangan	1) Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	...	-Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)/Pekarangan Pangan Iestari (P2L) -Kegiatan Desa Mandiri Pangan (DMP)
		5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	...	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Sawahlunto

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		6) Tertanganinya kerawanan pangan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.10. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN

1. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah}}{\text{...}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala

bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ <i>Absentee</i> dan Daftar Subyek	kelebihan maksimum <i>absentee</i>		dan distempel basah)
	Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform		

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui} + \text{jumlah izin membuka tanah yang ditolak}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Luas izin lokasi yang diterbitkan	0	

4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

--	--	--	--	--	--

2.2.1.11. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 30\%) + (\text{IKU } 30\%) + (\text{IKTH } 40\%)$ <p> IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara IKTH = Indeks Kualitas Tutupan Hutan </p>	62,39	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
11.	Lingkungan Hidup	1) Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	_____ x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		Tutupan Hutan (IKTH)			
--	--	----------------------	--	--	--

2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
11.	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total timbunan sampah kab/kota}} \times 100\%$	6.704 x 100% = 97,966% 6.844	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
11.	Lingkungan hidup	1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

				TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan		
--	--	--	--	---	--	--

3. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
11.	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
11.	Lingkungan hidup	1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota}}{\text{daerah kab/kota}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dan distempel basah)

Jumlah usulan permohonan yang
terregistrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)
		3) Penetapan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)
		4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana}}{\text{Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)
		6) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	$\frac{\text{Pengadaan masyarakat yang ditangani}}{\text{_____}} \times 100\%$		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		LH yang di terbit-kan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupa- ten/kota yang ditangani	Total jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	_____x 100% =	dan distempel basah)
--	--	--	--	---------------	----------------------

2.2.1.12. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**1. Perekaman KTP elektronik****a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
12.	Dukcapil	Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	$\frac{47.336}{48.150} \times 100\% = 98,309\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
12.	Dukcapil	1) Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Penerbitan akta kematian	$\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			Peristiwa kematian yang dilaporkan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Penyajian data kependudukan	Data 2 tahun (2020 dan 2021)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
12.	Dukcapil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	$\frac{12.292}{19.004} \times 100\% = 64,681\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Kepemilikan akta kelahiran

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
12.	Dukcapil	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	$\frac{21.110}{21.376} \times 100\% = 98,756\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
12.	Dukcapil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.13. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	---	-----	--

2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)}} \times 100\%$	$\frac{3,7}{14} \times 100\% = 26,429\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
---	-----	--

*BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.14. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
14.	Pengendalian Penduduk & KB	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok Umur 45-49 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>	1985	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
14.	Pengendalian Penduduk & KB	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-perda-kan	Cukup Jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia	...	Median usia kawin pertama wanita usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Tren usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di indonesia.
		3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$	10,68	ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun.
		4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) x 100%	_____ x 100%	

		Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	=85, 92	
--	--	--	---------	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Cukup jelas	12	

2. Persentase Pemakaian Konstrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
14.	Pengendalian Penduduk & KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	$\frac{6655}{9253} \times 100\% = 71,923\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
14.	Pengendalian	1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang	Jumlah faskes yang siap melayani		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

	Penduduk & KB		siap melayani KB MKJP	KB MKJP x 100%	x 100% = 100%	ditandatangani kepala dan distempel basah)
				Jumlah faskes		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 71,92\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	4	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 28$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
				Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan		
				KB pasca persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari		

3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

a. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	------------

14.	Pengendalian Penduduk & KB	1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	58,15	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
-----	-------------------------------	---	--	-------	---

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah keluarga PBI}} \times 100\%$ <p>Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah</p>	$\text{—————} \times 100\% = 72,92$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.15. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERHUBUNGAN

1. Rasio Konektivitas Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Perhubungan	Rasio Konektivitas Kab/Kota	<p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek})$ dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu 	25	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Perhubungan	1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	$\frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	$\frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times 100\% =$	
		4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota}}{\text{_____}} \times 100\%$	$\frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times 100\% =$	

			jalan Kabupaten atau Kota	Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota		
--	--	--	---------------------------	--	--	--

2. V/C Ratio di Jalan Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota}} \times 100\%$	————— x 100% = 45	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.15. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	<div>26</div> <div><div></div><div>x 100% = 100%</div><div>26</div></div>	<div>Dibuat dalam bentuk daftar</div> <div>(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)</div>

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Kominfo	1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	<div></div> <div><div></div><div>x 100% =</div><div></div></div>	<div>Dibuat dalam bentuk daftar</div> <div>(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)</div>

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang $\times 100\%$	$\times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar
--	--	---	---	------------------	----------------------------

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Jumlah OPD	_____	
15.		3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Cukup jelas	...	

2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	21 $\times 100\% = 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Jumlah layanan publik	21	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Kominfo	1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No 5/2015}}{\text{Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{100\% \text{ Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah		
4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis x 100% yang telah diimplementasikan secara elektronik	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	Jumlah layanan		

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		telah diimplementasikan secara elektronik			
		5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah system elektronik}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan public dan layanan administrasi}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

pemerintah	Jumlah perangkat daerah		dan distempel basah)
10) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis datanya	$\times 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		$\times 100\% =$	

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		data (sesuai renstra kominfo)			
		11) Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{100\% \text{ Jumlah data yang dimiliki pemda}} \times$	$\text{—————} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Cukup jelas	Ada/Tidak	

- 3. Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota**
- a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)***

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kominfo	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	573 $\frac{573}{67.007} \times 100\% = 0,855\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kominfo	1) Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\text{Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\text{Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi}} \times 100\%$	$\frac{\text{Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\text{Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi}} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP}}{\text{Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	<p>Dibuat dalam bentuk daftar</p> <p>(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)</p>

2.2.1.17. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
17.	KUKM	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{7}{68} \times 100\% = 10,294\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
17.	KUKM	1) Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	Diskoperindag tidak mempunyai wewenang untuk menertibka izin usaha
		2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{—————}} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	Diskoperindag tidak mempunyai wewenang untuk menertibka izin usaha

		koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		
--	--	--	--	--	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		dalam daerah kabupaten/kota			
		8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	(tidak perlu diisi)	(tidak perlu diisi)	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%= _____	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan

	koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang ada	
--	---	--------------------------	--

2. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
17.	KUKM	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{17}{47} \times 100\% = 36,17\%$	<ul style="list-style-type: none">Usaha Mikro Adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan Dan/Atau Badan Usaha Perorangan Yang Memenuhi Kriteria Usaha MikroDokumen Pendukung

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
17.	KUKM	1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase jumlah usahamikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%= _____	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda tangani kepala dan distempel basah)
		3) Persentase jumlah usahamikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{100\% \text{ Jumlah usaha mikro yang ada}} \times$	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		4) Persentase jumlah usahamikro yang diberikan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar

		dukungan fasilitas	sertifikasi		
--	--	--------------------	-------------	--	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standard dan sertifikasi produk		(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Persentase jumlah usahamikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)
		6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)
		7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.18. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL

1. Persentase Peningkatan Investasi Di Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
18.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	$\frac{(\text{Jumlah investasi 2021} - \text{Jumlah investasi 2020})}{\text{Jumlah investasi 2020}} \times 100\%$	$\frac{-15.777}{28.277} \times 100\% = -55,794\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
18.	KUKM	1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/busi-ness forum, one on one meeting	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		5) Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.19. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota}}{\text{Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{76}{3800} \times 100\% = 2\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Cukup jelas	76.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Cukup jelas	31.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan

					distempel basah)
--	--	--	--	--	------------------

2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{0}{3800} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Cukup jelas	31	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan
--	---	-------------	-----	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		organisasi kepemudaan			distempel basah)

3. Peningkatan Prestasi Olahraga

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	178	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	------------

19.	Kepemudaan dan Olahraga	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. ▪ Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai 	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
-----	-------------------------	----	---	---	-----	--

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
				pelatih olahraga		
		2)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.20. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistic Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	$\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Statistik	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Cukup jelas	13	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Cukup jelas	2	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
----	--	-------------	---	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Cukup jelas	1	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Cukup jelas	1	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	<div> Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral <div>x100%</div> <div>%</div> </div> <div> Jumlah kegiatan statistik sektoral </div>	<div> x 100%=66,67% </div>	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7)	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	<div> Jumlah metadata indikator statistik sektoral <div>x100%</div> <div>%</div> </div> <div> Jumlah indikator statistik sektoral </div>	<div> x 100%=66,67% </div>	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	26 _____ x 100% = 100% 26	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.21. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

1. Tingkat keamanan informasi pemerintah

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan tingkat keamanan informasi pemerintah dilihat dari Indeks KAMI ▪ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ▪ Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu (a) tata kelola keamanan informasi, (b) pengelolaan resiko keamanan informasi, (c) kerangka kerja keamanan informasi, (d) pengelolaan asset informasi dan (e) teknologi dan keamanan informasi ▪ Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan 	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
21.	Persandian	1) Persentase kegiatan strategis yang telah	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis}}{\text{Jumlah kegiatan strategis}} \times 100\%$	$\times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		diamankan melalui	teramankan		
--	--	-------------------	------------	--	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	<p>Jumlah kegiatan strategis yg ada</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain ▪ Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis ▪ Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan 		(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMK I dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{umlah SE yang ada}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)
--	---	---	-------------------------------	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll ▪ Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan ▪ Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu 		

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

			organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai		
--	--	--	--	--	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		▪ Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan		_____	
		4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi ▪ PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. 		
--	--	---	--	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi 		

2.2.1.22. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN

1. Terlestarikannya Cagar Budaya

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
22.	Kebudayaan	Terlestarikannya cagar budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	$\frac{518}{801} \times 100\% = 64,669\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
22.	Persandian	1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek Pemajuan Kebudayaan yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	482	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek Pemajuan Kebudayaan (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	16	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan	Jumlah objek dimanfaatkan	2	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	kesejahteraan masyarakat)			
--	---------------------------	--	--	--

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	71	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah Cagar Budaya ditetapkan - Jumlah Cagar Budaya dihapuskan	144	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah Cagar Budaya (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	85	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah Cagar Budaya diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah Cagar Budaya (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	29	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah Cagar Budaya dimanfaatkan	144	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	671	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	17420	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		13) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		671	(tidak perlu diisi)
		14) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran Cagar Budaya yang dibentuk	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		15) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli Cagar Budaya	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		16) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli Cagar Budaya yang disertifikasi	1	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		17) Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM Cagar Budaya + jumlah SDM Museum	33	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

18)	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (Cagar Budaya + Museum)	35	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
-----	---	--	----	---

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		19)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (Cagar Budaya + Museum)	18	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		20)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.23. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	2000	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
23.	Perpustakaan	1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	_____ x 100% =	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	_____ x 100% =	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perputakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	_____ x 100% =	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	---	--	----------------	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$ <p>Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku</p>	_____ x 100% =	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-------	----------------------	------------

23.	Pekerjaan Umum	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	—————x 100% = 72,43	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
-----	----------------	--	---	---------------------	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$	_____	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
23.	Pekerjaan Umum	1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan		
--	--	--	--

*BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.24. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEARSIPAN

1. Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 Dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j) / 4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	21535	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
24.	Kearsipan	1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$	_____ x 100% = 953	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		2)	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan x 100% daftar arsip	x 100%= 1212	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-
--	--	----	--	--------------	---

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah seluruh arsip inaktif		tangani kepala dan distempel basah)
		3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$	$\text{---} \times 100\% = 83994$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)
		4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan statis pemerintahan daerah}} \times 100\%$	$\text{---} \times 100\% = 0$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)

2. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-------	----------------------	------------

24.	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p>	1022	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
-----	-----------	---	---	------	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p>b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
24.	Kearsipan	1) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	901	Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya penghapusan anggaran akibat Covid-19

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	---	---	--

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	50,3 .	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	80,66	Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya penghapusan anggaran akibat Covid-19
		5) Pencarian arsip statis yg pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	6) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	1	Tidak terlaksana karena tidak ada dalam DPA kegiatan
--	--	--	---	--

2.2.1.25. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)
dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
25.	Kelautan dan perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	215,92	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
25.	Kelautan dan perikanan	1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Cukup jelas	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
---	-------------	-----	--

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Cukup jelas	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Cukup jelas	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.26. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PARIWISATA

1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2021} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2020})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2020}} \times 100\%$	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Cukup jelas	7	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Cukup jelas	7	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	Cukup jelas	117	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	4) Jumlah wisatawan mancanegara per	Cukup jelas	7	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		kebangsaan			distempel basah)
		5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Cukup jelas	11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pameran/city expo rakerwil I Apeksi Tahun 2020 ▪ Sales Mmission ke Bengkulu ▪ Lomba Fotografi dalam event SISSCa Tahun 2020 ▪ Sales Mission ke Pekanbaru
		6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Cukup jelas	1	Perwakilan Asosiasi Homestay Kota Sawahlunto
		8) Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% = 42,1\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Persentase SDM peserta	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Dibuktikan dengan dokumen

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan x 100%	x 100%= 100%	pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan	Cukup jelas	16	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		kemitraan usaha masyarakat			

2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2021} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2020})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2020}} \times 100\%$	$\frac{-4936}{95988} \times 100\% = -5,142\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Tingkat hunian akomodasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	$\frac{9532}{285} \times 100\% = 3344,561\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku**a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Cukup jelas	225474,834	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5. Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD**b. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Cukup jelas	309491,741	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2.2.1.27. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANIAN

1. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	$\frac{25728,9}{4} \times 100\% = 791,587\%$ 3250,3	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
27.	Pertanian	1) Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Cukup jelas	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	4) Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$		Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	5)	Jumlah usulan yang difasilitasi x 100%	...	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan usaha pertanian		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
27.	Pertanian	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	$\frac{(\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun 2021} - \text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun 2020})}{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun 2020}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
27.	Pertanian	1) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (kejadian/kasus penyakit hewan menular)	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$	$\text{_____} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.28. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

a. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
28.	Kehutanan	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.29. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERDAGANGAN

1. Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan
(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{19}{21} \times 100\% = 90.476$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan dis++tempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	1) Persentase perizinan yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan < 5 hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala

sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$	$\underline{\hspace{2cm}} \times 100\% =$	dan distempel basah)
---	--	---	----------------------

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2) Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} < 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di kab/kota}}$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} < 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri			
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} < 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	_____ x 100%=	
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri			

			Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit < 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar x 100%	x 100%=	
--	--	--	---	---------	--

BAB II Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		
		4) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kab/kota}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit < 1 hari kerja (1x24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$		Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya - a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) - b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) 	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

BAB II Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		7) Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	---	--	-----	---

2. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	$\frac{383}{397} \times 100\% = 96,474$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual system u melalui ystem elektronik		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	------------

29.	Perdagangan	1)		a x 100%	x 100%=	
-----	-------------	----	--	----------	---------	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$b \times c$ <p>a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera 100\% dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{1650}{1650} \times 100\% = 100$	

		sah yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang Metrologi Legal ▪ Yang dimaksud dengan Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan 	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	--	------------------	--	-----	--

		<p>pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera ▪ Data yang dimasukkan seluruh data tera sah masih berlaku pada tahun pelaporan. 		
--	--	--	--	--

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	1) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTP yang wajib ditera dan tera ulang di kab/kota}} \times 100\%$	_____ x 100%=	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{_____}} \times 100\%$	_____ x 100%=	

		yang berlaku	Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		
--	--	--------------	--	--	--

2.2.1.30. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	Pertambahan jumlah 513ndustry kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{(\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020})}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020}} \times 100\%$ Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016)	119 _____ x 100% = 7,513 1584	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan}} \times 100\%$ izin yang masuk	_____ x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIK

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing – masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ ▪ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ ▪ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut 	0,07	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	1) Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)	...	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		

**3. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan
dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait**

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	98 _____ x 100% = 100 98	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	1) Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	_____ x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel ábasah)

4. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan dengan
Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{98}{98} \times 100\% = 100$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	1) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\text{—————} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah Izin Yang Dkeluarkan}} \times 100\%$	98	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
				$98 \times 100\% = 100$	

6. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-------	----------------------	------------

30.	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) 	1	Informasi industri adalah hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.
-----	---------------	---	--	---	--

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	2) Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota}} \times 100$	$\text{—————} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2.2.2. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)
(PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$	$\frac{877}{206} \times 100\% = 425,7282\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{352}{1078} \times 100\% = 32,65\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Jurusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Inginsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	asio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{50}{352} \times 100\% = 14,20455 \%$	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.2. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	urusan Pemerintahan	ndikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	ungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	eviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	<div>Nilai absolut dari</div> <div>Total belanja dalam realisasi</div> <div>total belanja APBD dikurangi satu</div> <div>100%</div> <div>• Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus</div> <div>• Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan</div>	<div>5.347.371.28</div> <div>6</div> <div>9.237.924.58</div> <div>5</div> <div>100% = 11,041%</div>	buktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Inginsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{bagi total PAD dalam APBD dikurangi satu}} 100\%$ <ul style="list-style-type: none">• Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus• Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan	$\frac{1.943.839.17}{1.783.021.09} \times 100\% = 10,2409\%$	Buktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Assets Management

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Inginsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Assets Management	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	<ol style="list-style-type: none">1. Ya2. Ya3. Ya4. Ya	Buktikan dengan dokumen pendukung terkait

4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	asio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai Realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none">Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahun sebelumnyaAngka yang diambil adalah angka realisasi	$\frac{997.512.906,02}{2.809.902.738} \times 100\% = 1,32\%$	Buktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.2. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

1. Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang
Dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-------	----------------------	------------

	Kategori Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n $\frac{\quad}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	$\frac{0}{329} \times 100\% = 0\%$	Buktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Yang dimaksud dengan kontrak <ul style="list-style-type: none">▪ infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur▪ Yang dimaksud dengan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya▪ Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah		

2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Kategori Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Jumlah Pengadaan yang	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	$\frac{33}{\quad} \times 100\% = 1,027\%$	Buktikan dengan dokumen pendukung

	(Pengadaan)	Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan	3.213	(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
--	-------------	------------------------------------	---------------------------------	-------	--

3. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	asio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none">▪ Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi	$\frac{50,10}{43.446,5 + 49.651} \times 100\% = 0\%$	duktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
----	---------------------	----------------------------------	-------	----------------------	------------

	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	ingkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jmlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) <div>Jmlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk 100% Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Koperasi Tahun (n-1)</div>	41.431.3 10.600 <div>34.724.5 100% = 230,5394% 23.736</div>	buktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.2. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2.4. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)

1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{8.135.737,157}{9.237.850,902} \times 100\% = 72,57\%$	Buktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Rasio PAD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$	$\frac{1.920.994,265,62}{490.598,30} \times 100\% = 1.490.247\%$	Buktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Jurusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
	Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none">Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terdugaYang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modalAngka yang diambil adalah angka realisasi	$\frac{99.219.869.624}{133.653.414.741} \times 100\% = 77,56\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Opini Laporan Keuangan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Jurusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja 2023	Keterangan
----	----------------------	-------------------------	-------	----------------------	------------

		Keluaran			
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	ini Laporan Keuangan	ini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	2016-2023 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)) 2 (2013-2014 WDP (Wajar Dengan Pengecualian))	uktikan dengan dokumen pendukung terkait

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media laporan. Bab Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

Dalam bab ini disajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran Kota Sawahlunto Tahun 2023 juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2023 yang dibiayai dari dana APBD Kota Sawahlunto.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan), selanjutnya pada akhir tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang (Performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA
1.	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikator – indikator pencapaiannya. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut disusun secara berjenjang dari yang sifatnya general pada visi sampai ke hal – hal yang spesifik pada sasaran.

VISI adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita – cita atau nilai sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Visi juga adalah pikiran pikiran yang ada dalam benak para pendiri. Pikiran – pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan tahun 2018-2023, visi Kota Sawahlunto adalah **“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”**

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

KEBERSAMAAN dalam visi tersebut adalah, menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun kota disegala bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, pemerintah, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.

KOTA WISATA adalah mewujudkan visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu **“SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA ”** serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh *stakeholders* kota.

KREATIF maksudnya pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru

yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.

INOVATIF maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya, selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah. Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk Sawahlunto, baik itu penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pertanian, industri, pariwisata dan lainnya.

UNGGUL maksudnya seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, agama, adat istiadat, infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan.

BERMARTABAT maksudnya terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

BERKEADILAN maksudnya pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

SEJAHTERA maksudnya; masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang

mampu dan lansia, terbukanya kesempatan kerja dengan penghasilan yang memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto.

MISI merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan VISI. Untuk mewujudkan visi diatas, akan dicapai melalui beberapa misi yaitu :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
9. Mewujudkan kota berbasis *smart city* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Semakin Baik

Misi ini merupakan upaya dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera secara batin dan kembali ke tata kehidupan masyarakat Minangkabau sesuai falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Konsep meramaikan kembali rumah ibadah sebagai sarana dakwah dan sosial kemasyarakatan, diharapkan akan terwujud melalui misi ini. Peningkatan kualitas rumah ibadah, serta penyediaan guru agama, guru mengaji, dan imam masjid yang berkualitas adalah beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan misi ini. Selain itu, peningkatan peran ninik mamak, dan alim ulama serta tokoh masyarakat dalam pembentukan akhlak dan karakter masyarakat juga akan dilaksanakana dalam misi ini. Jika misi ini dapat terlaksana, diharapkan karakter Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya akan semakin kuat dan diamankan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan pada misi ini “Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya”. Sasaran pembangunan Misi 1 ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan	Sasaran
1.1 Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	1.1.1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat
	1.1.2 Melestarikan budaya dan tradisi yang

	menjadi karakter kota
--	-----------------------

Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK

Misi ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto yang semakin baik, berkualitas dan produktif. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi ini dititikberatkan pada pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pembentukan perekonomian daerah di Kota Sawahlunto akan dijadikan perhatian utama dalam pengembangan ekonomi pada periode 2018-2023 ini. Selain itu, sektor industri pengolahan seperti Songket Silungkang, Kerupuk Kubang, Minyak Atsiri dan produk unggulan UMKM lainnya, juga akan diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi lima tahun kedepan. Sebagai dasar utama peningkatan kualitas ekonomi ini akan dimulai dari peningkatan keterampilan dan kualitas calon pencari kerja. Beberapa kegiatan strategis nantinya yang akan dilaksanakan seperti pendirian bangunan untuk Balai Latihan Kerja, kerjasama dengan perusahaan lain dalam penyerapan tenaga kerja, dan fasilitas magang ke luar negeri. Diharapkan, jika secara ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto sudah baik, maka kesejahteraan masyarakat secara ekonomi akan terwujud.

Dengan adanya pandemi Covid-19, fokus pembangunan Kota Sawahlunto 3 tahun kedepan adalah untuk memulihkan ekonomi masyarakat, dengan memaksimalkan seluruh potensi ekonomi yang ada. Tujuan pembangunan pada misi ini adalah “Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan”. Untuk sasaran pembangunan sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan		Sasaran
2.1	2.1 Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	2.1.1 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		2.1.2 Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan
		2.1.3 Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat
		2.1.4 Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan
		2.1.5 Tersedianya iklim investasi yang kondusif

Misi 3: Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahluno, khususnya dari segi pendidikan. Penekanan misi ini adalah pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat untuk mewujudkan manusia yang unggul dalam pendidikan, kreatif mengambil tindakan dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Selain peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik, pada misi ini juga akan diperhatikan aplikasi dari pendidikan karakter pada setiap jenjang pendidikan, serta pengamalannya oleh generasi muda pada kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Sawahlunto akan memberikan

jaminan pendidikan kepada seluruh masyarakat, melalui beasiswa dan reward kepada siswa berprestasi.

Dengan adanya pandemi Covid-19, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam memperoleh ilmu dan pembelajaran. Pembelajaran secara daring, membuat siswa harus menyesuaikan diri. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pendidikan. Tujuan pembangunan dan sasaran pembangunan pada misi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan		Sasaran
3.1	3.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	3.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan

Misi 4: Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Melalui misi ini diharapkan adanya upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, bersih dalam pengelolaan tata pemerintahan dan mampu berinovasi dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif ini akan terwujud jika aparatur sipil negara (ASN) pada pemerintahan Kota Sawahlunto ini mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam bekerja dan mampu menterjemahkan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

sasaran pada misi 4 ini “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat” diarahkan kepada konsep pelayanan secara online dan memanfaatkan teknologi. tujuan dari misi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan		Sasaran	
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
		4.1.2	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah
4.2	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	4.2.1	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto

Misi 5: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk seluruh Masyarakat

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahluno, khususnya dari segi kesehatan. Penekanan misi ini adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat ditingkat pelayanan dasar dan rujukan, untuk mewujudkan manusia yang sehat secara jasmani, dan mempunyai kepercayaan diri dalam jaminan pelayanan kesehatannya. Hal ini akan diwujudkan melalui pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selalin itu, pada misi ini juga akan diperhatikan perilaku hidup sehat masyarakat, yang dimulai dari diri, keluarga dan lingkungannya.

Adanya pandemi Covid-19 ini, menyebabkan masyarakat harus lebih mampu menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan. Sebagai akibatnya terhadap pembangunan daerah, upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta pelayanan masyarakat harus lebih optimal dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 5

Tujuan			Sasaran	
5. 1	5.1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	5.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			5.1.2	Menurunnya prevalensi stunting

Misi 6: Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk melanjutkan komitmen daerah dalam mencapai Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto ini perlu inovasi, keseriusan, terkonsep secara jelas dan berkelanjutan. Melalui misi ini diharapkan sektor pariwisata di Kota Sawahlunto betul-betul mampu menjadi mesin penggerak utama dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Yang menjadi perhatian utama pada misi ini adalah peningkatan kualitas destinasi wisata, pembinaan atraksi wisata sesuai potensi daerah, peningkatan kualitas promosi wisata agar lebih tepat sasaran dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan mendukung berkembangnya sektor pariwisata ini. Pariwisata diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* yang positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Tujuan pembangunan pada misi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 6

Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran
6.1 Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	6.1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata

Misi 7: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Melalui misi ini, diharapkan ketersediaan jalan dan jembatan sebagai aksesibilitas seluruh sektor berada dalam kondisi baik, ketersediaan lingkungan yang bersih dan berkualitas, ketersediaan air bersih masyarakat yang layak, ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman yang lebih baik, serta pembangunan yang sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan. Pada misi ini, juga akan memperhatikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, penanggulangan dan penanganan bencana.

sasaran pada misi ini adalah “*meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang*”. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 7

Tujuan	Sasaran
7.1 Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	7.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai
	7.1.2 Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana
	7.1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	7.1.4 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
	7.1.5 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Misi 8: Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal lainnya

Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan pembangunan yang berkeadilan bagi kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya di Kota Sawahlunto. Misi ini merupakan pengejawantahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak bagi kelompok marginal tersebut. Pemerintah harus memberikan keadilan dan kesetaraan pembangunan pada lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu,

pemerintah juga akan memperhatikan kesetaraan dan keberdayaan gender dalam pembangunan lima tahun kedepan.

Untuk misi ini tujuannya adalah Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. seperti pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 8

Tujuan	Sasaran
8.1 Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender	8.1.1 Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
	8.1.2 Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Misi 9: Mewujudkan Kota Berbasis *Smart City* dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien yang berbasiskan informasi dan teknologi. Melalui misi ini, diharapkan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Sawahlunto akan cepat, efektif dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelayanan. Jika hal ini terwujud, secara langsung akan mempermudah pelayanan investasi ke Kota Sawahlunto melalui kemudahan birokrasinya. Akses terhadap informasi potensi daerah juga akan mudah diketahui oleh masyarakat.

Fokus tujuan pembangunan misi ini sama dengan misi 4 yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif*” sedangkan untuk

sasaran pembangunan “*meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi* “ dan “*meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat*”. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi 9

Tujuan	Sasaran
9.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	9.1.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi
	9.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam konteks Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikelompokkan menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang. Sesuai dengan kebutuhan di Pemerintah Kota Sawahlunto, urusan-urusan Pemerintahan tersebut dikelompokkan lagi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023. Berdasarkan pengelompokkan tersebut disusunlah target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. ZEFNIHAN, AP, M.Si**
Jabatan : **Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO**

berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sawahlunto, 1 November 2023

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


Dr. ZEFNIHAN, AP, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
WALI KOTA SAWAHLUNTO**

**VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA ,
YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA**

I Misi 1 Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Semakin Baik		
	Tujuan	Sasaran
	1.1 Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	1.1.1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat
		1.1.2 Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota
II Misi 2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK		
	Tujuan	Sasaran
2.1	2.1 Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	2.1.1 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		2.1.2 Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan
		2.1.3 Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat
		2.1.4 Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan
		2.1.5 Tersedianya iklim investasi yang kondusif
III Misi 3 Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)		
	Tujuan	Sasaran
3.1	3.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	3.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan yang bertandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan
IV Misi 4 Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif		
	Tujuan	Sasaran
4.1	4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

4.2	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	4.1.2	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah
		4.2.1	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto

V Misi 5 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk seluruh Masyarakat			
Tujuan		Sasaran	
5.1	5.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	5.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		5.1.2	Menurunnya prevalensi stunting

VI Misi 6 Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan			
Tujuan : 1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto			
Tujuan Setelah Perubahan		Sasaran	
6.1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	6.1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata

VII Misi 7 Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai			
Tujuan		Sasaran	
7.1	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	7.1.1	Tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai
		7.1.2	Meningkatnya kesiagaan kota dalamantisipasi dan penanggulangan bencana
		7.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		7.1.4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
		7.1.5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

VIII Misi 8 Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.			
Tujuan		Sasaran	
8.1	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender	8.1.1	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, perempuan jawa dan perempuan

Bab II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	KESKUTUPAN KOTA	KEKAWIHAN, GELANGGALA JAWA TIMUR PENYELANGGARAN masalah kesejahteraan sosial lainnya
		8.1.2 Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan
IX Misi 9 Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor		
	Tujuan	Sasaran
	9.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	9.1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi 9.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Target Kinerja
Pemerintah kota Sawahlunto Tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARAKAN TUJUAN			
1.	Persentase Peningkatan Zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kota Sawahlunto	$(\text{Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun } n - \text{Jumlah zakat pada BAZNAS tahun } n-1) \times 100 \%$ / Jumlah zakat pada BAZ n-1	1,37
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	$(\text{Nilai PORB ADHK Tahun } n - \text{dikurangi Nilai PORB ADHK tahun } n-1) / \text{Nilai PORB ADHK tahun } n-1) \times 100\%$	4,53
3.	PDGB Perkapita (Data Rupaiah) (SDGs)	PDGB ADHK/(Penduduk Perumahan tahun)	56,03
4.	Tingkat Kemiskinan (PIS) (SDGs)	$(\text{Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan} / \text{jumlah penduduk}) \times 100\%$	2,01
5.	Girl Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang di keluarkan BPS	0,278
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,09
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Perubahan keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kementerian RB	61,54
8.	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	$(\text{Jumlah kasus pelanggaran perda tahun } (n-1) - \text{jumlah kasus pelanggaran perda tahun } (n)) / \text{jumlah kasus pelanggaran perda tahun } (n) \times 100 \%$	0,049
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tega	83,57
10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$(\text{IPM Perempuan} / \text{IPM Laki-laki}) \times 100$	95,12

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	15.022.550	Sekretariat Daerah
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.047.807.136	
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16.821.875.732	
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	295.235.100	

Bab II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.929.770.778	Sekretariat DPRD
7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.655.689.000	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.811.682.960	Inspektorat
10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	76.326.350	
11	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	56.961.900	BKPSDM
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.200.240.204	
14	Program Kepegawaian Daerah	987.773.950	BPKAD
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.464.444.633	
17	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	65.437.974.825	BPKAD
18	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	561.625.301	
19	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.666.666.669	Barenlitbangda
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.204.557.947	
22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	319.872.000	Bakesbangpol
23	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	461.016.770	
24	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	138.127.600	BPBD
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.420.931.200	
27	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	790.874.340	DinsosPMDPPA
28	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	5.987.912.424	
29	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	673.039.900	DPUPR
30	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	68.804.000	
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.015.614.205	DinsosPMDPPA
33	Program Penanggulangan Bencana	416.520.050	
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.871.055.704	DPUPR
36	Program Pemberdayaan Sosial	43.000.000	
37	Program Rehabilitas Sosial	483.562.500	DPUPR
38	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	24.495.600	
39	Program Penanganan Bencana	55.660.150	DPUPR
40	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.031.950	
41	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	379.053.200	DPUPR
42	Program Perlindungan Perempuan	144.110.400	
43	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	393.902.875	DPUPR
45	Program Perlindungan Khusus Anak	567.818.000	
46	Program Administrasi Pemerintahan Desa	819.262.231	DPUPR
47	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	499.804.000	
49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.303.886.489	DPUPR
56	Program Penyelenggaraan Jalan	26.251.264.231	
53	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.350.000.000	DPUPR
55	Program Penataan Bangunan Gedung	12.724.338.650	
54	Program Pengembangan Perumahan	7.091.725.000	DPUPR
51	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.058.850.000	
52	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.385.300.000	DPUPR
50	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.590.531.798	
57	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	217.108.955	DPUPR

Bab II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94.052.518,404	
60	Program Pengelolaan Pendidikan	24.774.258,064	Dinas Pendidikan
61	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	76.166,400	
63	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.907.528,069	
64	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.308.369,952	Dinas Perhubungan
65	Program Pengelolaan Perkeretaapian	84.042,000	
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.827.213,856	
68	Program Pengembangan Kebudayaan	141.967,000	Dinas Kebudayaan
71	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	55.000,000	
72	Program Pengelolaan Permuseuman	2.370.000,000	
74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.352.442,209	
75	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	512.072,790	
76	Program Penempatan Tenaga Kerja	50.662,850	
77	Program Hubungan Industrial	100.503,750	DPMPTSPNaker
78	Program Promosi Penanaman Modal	16.264,500	
79	Program Pelayanan Penanaman Modal	108.334,100	
80	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	409.900,000	
81	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	95.438,300	
83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.592.077,133	
84	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	47.760,000	
85	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	4.760.444,000	
86	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	373.740,000	
87	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	12.692.545,818	Disparpora
88	Program Pemasaran Pariwisata	609.929,750	
89	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	7.640,500	
90	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.075,000	
92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.430.334,700	
93	Program Pembinaan Perpustakaan	133.892,362	DPK
94	Program Pengelolaan Arsip	36.004,000	
95	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	32.596,500	
97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.627.612,145	
98	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.940.202,442	
99	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.460,000	
100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	377.153,750	DinkesdadukKB
101	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	764.472,380	
102	Program Pengendalian Penduduk	120.000,000	
103	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.028.731,000	
104	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	677.550,000	
106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.134.761,007	
107	Program Pengembangan Perumahan	725.795,988	
108	Program Kawasan Pemukiman	1.622.502,200	
109	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	225.244,200	
110	Program Peningkatan Prasarana, Sarana&Utilitas Umum(PSU)	2.499.087,000	
111	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	670,000	
112	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	12.172,200	
113	Program Penetapan Tanah Ulayat	85,200	
114	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	7.337,500	DPKP2LH
115	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	286.208,000	
116	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	243.773,440	
117	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	387.838,000	

Bab II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

118	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	6.549.500	
119	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	72.420.600	
120	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15.189.402	
121	Program Pengelolaan Persampahan	5.703.649.200	
123	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.961.823.657	
124	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	31.822.500	
125	Program Pelatihan Kesehatan ksp/usp Koperasi	64.233.700	
126	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	454.503.950	
127	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	43.717.800	
128	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	46.234.100	Diskoperindag
129	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	237.797.500	
130	Program Pengembangan Ekspor	65.864.000	
131	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	10.000.000	
132	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	145.028.500	
133	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	25.883.358.563	
134	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	25.800.000	
136	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.384.506.792	
137	Program Pendaftaran Penduduk	150.198.800	Disdukcapil
138	Program Pencatatan Sipil	29.021.200	
139	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.842.500	
141	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.816.905.168	
142	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.820.000	
143	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	141.065.850	
144	Program Pengamanan Kerawanan Pangan	4.475.900	
145	Program Pengawasan Keselamatan Pangan	14.981.500	
146	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	130.773.078	DKP3
147	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	312.000	
148	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.768.237.535	
149	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	761.545.050	
150	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300.099.218	
151	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	110.388.000	
152	Program Penyuluhan Pertanian	225.356.910	
154	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.609.522.982	
155	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	61.039.000	Satpol PP Damkar
156	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	140.637.100	
157			
158	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.164.253.084	
159	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.113.253.673	
160	Program Aplikasi Informatika	2.051.368.250	Diskominfo
161	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	77.279.125	
162	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	32.214.050	
164	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.228.927.090	
165	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.601.834	Kec. Silungkang
166	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	59.541.894	
169	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.578.800	
171	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.293.817.859	
172	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	66.649.800	
173	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.792.501	
174	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.613.750	
175	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.500.000	Kec. Lembah Segar
176	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.100.000	

Bab II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

177	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (6 Kelurahan)	2.194.146.837	
178	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (6 Kelurahan)	1.210.245.192	
180	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.826.976.252	
181	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.980.000	Kec. Barangin
182	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80.329.500	
183	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.500.000	
184	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.945.000	
185	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.495.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.653.378.310	
186	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	952.089.240	
187	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.341.991.426	
188	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.163.000	Kec. Talawi
189	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	77.866.000	
190	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.912.500	
191	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
192	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.916.000	

Sawahlunto, 1 November 2023

PJ. WALI KOTA SAWAHLUNTO


Dr. ZEFNIHAN, AP, M.Si

Target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Target Kinerja
Pemerintah kota Sawahlunto Tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Perubahan
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN			
1.	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota sawahlunto	$((\text{Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun } n - \text{Jumlah zakat pada BAZNAS tahun } n-1) \times 100 \%) / \text{Jumlah zakat pada BAZ } n-1)$	1,77
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	$((\text{Nilai PDRB ADHK Tahun } n \text{ dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun } n-1) / \text{Nilai PDRB ADHK tahun } n-1) \times 100\%$	4,53
3.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
4.	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01
5.	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,09
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu	61,54

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
		Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	
8.	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	$\frac{(\text{jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)} - \text{jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n)})}{\text{jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n)}} \times 100 \%$	0,049
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\left(\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}} \right) \times 100$	95,52
INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN			
1.	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	$\left(\frac{\text{Jumlah Komunitas budaya yang aktif}}{\text{total komunitas budaya}} \right) \times 100 \%$	88

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43
3.	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	418,106,23
4.	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11.024,59
5.	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	615.823,20
6.	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	344.355,30
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	72,33
8.	Nilai total Investasi (Milyar	Jumlah Investasi Lokal,	41

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
	Rupiah)	Nasional dan Asing	
9.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,2
10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,30
11.	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	30
12.	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
14.	Persentase peningkatan PAD (%)	$\frac{(\text{PAD tahun } n - \text{PAD tahun } (n-1))}{\text{PAD tahun } (n-1)} \times 100\%$	4,45
15.	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	75
16	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,42
17.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	5,90
18.	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95.714,10
19.	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	$\frac{(\text{Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata})}{\text{Total}}$	2,13

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
		PAD) x 100 %	
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57
21.	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	66,73
22	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	51,22
23.	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	66,22
		Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)	
25.	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	90
26.	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7.5
27.	Luas kawasan permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota	19,08

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
	kumuh (hektar) (SDGs)	(Ha)	
28.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	90,01
29.	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	100
30	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi	3,1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target
		oleh Pemerintah daerah	
31	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	89,87 (A)

B. PENGUKURAN PENCAPAIAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Capaian kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada table berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Capaian Kinerja Tahun 2023		
			2023		
			Target	Realisasi	%
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN				
1.	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun n - Jumlah zakat pada BAZNAS tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,77	24,47	1.382
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,53	4,46	98,45

3.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	71,21	107,84
4.	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,27	112,94
5.	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278	0,308	110,791
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh	74,09	74,42	100,45

		dunia			
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	61,54	64,35	104,57
8.	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,049	53,51	109.204,08
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	88,70	106,14
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,52	95,17	99,63

INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN					
1.	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya) x 100 %	88	79,49	90,33
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	4,98	77,45
3.	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	418,106,23	432174,39	103,36
4.	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11.024,59	10829,00	98,23
5.	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	615.823,20	Belum rilis	-

6.	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	344.355,30	Belum rilis	-
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	72,33	Belum rilis	-
8.	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41	212,79	519,00
9.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,2	13,69	103,71

Bab II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,30	10,44	92,39
11.	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	30	22,00	73,33
12.	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	B (62,84)	86,26
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100
14.	Persentase peningkatan PAD (%)		4,45	-10,57	-237,53

		(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%			
15.	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	75	61,26	81,68
16	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,42	70,69	100,38
17.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	5,90	4,60	77,97
18.	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95.714,10	BELUM RILIS	-

19.	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata / Total PAD) x 100 %	2,13	3,22	151,17
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	88,70	106,14
21.	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	66,73	70,93	106,29
22	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	51,22	51,26	100,08
23.	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas	0,57	0,46	80,70

		penanggulangan bencana daerah			
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	66,22	63,10	95,29
		Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)			
25.	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	90	84,37	93,74
26.	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7.5	2,66	35,47

27.	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	24,61	128,98
28.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	90,01	98,34	109,25
29.	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	100	100	100
30	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi	3,1	3,09	99,68

	(SPBE)	oleh Pemerintah daerah			
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	89,87 (A)	86,95 (B)	96,75

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Capaian Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			2023			
			Target	Realisasi	%	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN					
1.	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun n - Jumlah zakat pada BAZNAS tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,77	24,47	1.382	24,47
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,53	4,46	98,45	3,98

3.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	71,21	107,84	66,1
4.	Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,27	112,94	2,28
5.	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278	0,308	110,791	0,31
6.	Indeks Pembangunan	Pengukuran indek pembangunan dari harapan	74,09	74,42	100,45	73,73

	Manusia (IPM)	hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia				
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	61,54	64,35	104,57	55,68
8.	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,049	53,51	109.204,08	53,51

9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	88,70	106,14	87,60
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,52	95,17	99,63	95,17
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN					
1.	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya) x 100 %	88	79,49	90,33	88,71
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	4,98	77,45	5,00
3.	PDRB Sektor industri	Jumlah PDRB ADHB dari	418,106,23	432.174,39	103,36	432.174,39

	pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	sektor industri				
4.	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11.024,59	10829,00	98,23	10.537,00
5.	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	615.823,20	Belum rilis	-	560.862,45
6.	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	344.355,30	Belum rilis	-	345.211
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk	72,33	Belum rilis	-	73,85

		mengetahui ketahanan pangan suatu daerah				
8.	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	41	212,79	519,00	112.593,00
9.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,2	13,69	103,71	13,42
10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang	11,30	10,44	92,39	10,32

		mengulang)				
11.	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	30	22,00	73,33	22,00
12.	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	B (62,84)	86,26	B (61,92)
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100	WTP
14.	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun	4,45	-10,57	-237,53	0,28

		(n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%				
15.	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	75	61,26	81,68	63
16	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,42	70,69	100,38	70,40
17.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	5,90	4,60	77,97	5,60
18.			95.714,10	BELUM	-	97.528,60

	PDRB sektor Pariwisata- (juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran		RILIS		
19.	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,13	3,22	151,17	3,30
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	88,70	106,14	87,60
21.	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik)	66,73	70,93	106,29	68,57

		/ 5				
22	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	51,22	51,26	100,08	50,73
23.	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,46	80,70	0,65
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	66,22	63,10	95,29	62,89

		Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)				
25.	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	90	84,37	93,74	92,16
26.	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7.5	2,66	35,47	11,38
27.	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	24,61	128,98	42,15

28.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	90,01	98,34	109,25	92,16
29.	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	100	100	100	100
30	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh	3,1	3,09	99,68	2,84

	Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemerintah daerah				
31	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	89,87 (A)	86,95 (B)	96,75	83,40 (B)

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Capaian Kinerja Tahun 2023			
			Target	Realisasi	%	Skor

1.	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota sawahlunto	$\frac{((\text{Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun } n - \text{Jumlah zakat pada BAZNAS tahun } n-1) \times 100 \%) }{\text{Jumlah zakat pada BAZ } n-1)}$	1,77	24,47	1.382	SANGAT TINGGI
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	$\frac{((\text{Nilai PDRB ADHK Tahun } n \text{ dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun } n-1) / \text{Nilai PDRB ADHK tahun } n-1) \times 100\%}{}$	4,53	4,46	98,45	TINGGI
3.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	66,03	71,21	107,84	SANGAT TINGGI
4.	Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis	2,01	2,27	112,94	SANGAT TINGGI

		kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%				
5.	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,278	0,308	110,791	SANGAT TINGGI
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,09	74,42	100,45	SANGAT TINGGI
7.		Penilaian keberhasilan	61,54	64,35		

	Indeks Reformasi Birokrasi	pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB			104,57	
8.	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,049	53,51	109.204,08	SANGAT TINGGI
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	88,70	106,14	SANGAT TINGGI
			95,52	95,17	99,63	SANGAT TINGGI

10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100				
INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN						
1.	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya) x 100 %	88	79,49	90,33	SANGAT TINGGI
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,43	4,98	77,45	TINGGI
3.	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	418,106,23	432174,39	103,36	SANGAT TINGGI
4.	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah	11.024,59	10829,00	98,23	SANGAT TINGGI

		tangga (dijadikan pertahun)				
5.	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	615.823,20	Belum rilis	-	
6.	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	344.355,30	Belum rilis	-	
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	72,33	Belum rilis	-	
8.	Nilai total Investasi (Milyar	Jumlah Investasi Lokal,	41	212,79	519,00	SANGAT

	Rupiah)	Nasional dan Asing				TINGGI
9.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,2	13,69	103,71	SANGAT TINGGI
10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,30	10,44	92,39	SANGAT TINGGI
11.	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	30	22,00	73,33	SEDANG

	juz 30 (%)					
12.	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	BB (72,83)	B (62,84)	86,26	TINGGI
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100	SANGAT TINGGI
14.	Persentase peningkatan PAD (%)	$(PAD \text{ tahun } n - PAD \text{ tahun } (n-1) / PAD \text{ tahun } (n-1)) \times 100\%$	4,45	-10,57	-237,53	SANGAT RENDAH
15.	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan	75	61,26	81,68	TINGGI

		pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya				
16	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,42	70,69	100,38	SANGAT TINGGI
17.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	5,90	4,60	77,97	TINGGI
18.	PDRB sektor Pariwisata- (juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	95.714,10	BELUM RILIS	-	
19.	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah	2,13	3,22	151,17	SANGAT

		Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %				TINGGI
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	83,57	88,70	106,14	SANGAT TINGGI
21.	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	66,73	70,93	106,29	SANGAT TINGGI
22	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	51,22	51,26	100,08	SANGAT TINGGI

23.	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,46	80,70	TINGGI
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	66,22	63,10	95,29	SANGAT TINGGI
		Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)				

25.	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	90	84,37	93,74	SANGAT TINGGI
26.	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7.5	2,66	35,47	SANGAT RENDAH
27.	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	24,61	128,98	SANGAT TINGGI
28.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah	90,01	98,34	109,25	SANGAT TINGGI

		rumah tangga) x 100 %				
29.	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	100	100	100	SANGAT TINGGI
30	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,1	3,09	99,68	SANGAT TINGGI

31	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	89,87 (A)	86,95 (B)	96,75	SANGAT TINGGI
----	----------------------------	---	-----------	-----------	-------	---------------

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left\{ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Terget Biaya}} \times 100\% \right\}$$

Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto dialokasikan sebesar Rp. 669.237.924.585,00 dan terealisasi sebesar Rp. 607.064.912.961,00 atau sebesar 90,71 %.

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Kota Sawahlunto dialokasikan sebesar Rp.625.185.465.083,00 dan terealisasi sebesar Rp. 605.315.736.275,64 atau 96,82 % dengan rincian pada pos Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 66.783.021.097,00 terealisasi sebesar Rp. 59.943.839.179,64 atau 89,76 %. Pendapatan Transfer Dianggarkan sebesar Rp. 558.402.443.986,00 terealisasi sebesar Rp. 545.371.897.096,00 atau 97,67 % dan tidak adanya anggaran pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah karena Pemerintah Kota Sawahlunto tidak memiliki potensi jenis pendapatan ini seperti hibah dan dana darurat serta pendapatan lain yang diamanatkan dalam peraturan

Pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut:

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

N o	URAIAN	APBD 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENDAPATAN	625.185.465.083,00	605.315.736.275,64
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64
	Pendapatan Pajak Daerah	7.909.000.000,00	8.149.995.371,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	4.133.470.000,00	2.691.622.325,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.628.865.561,00	15.663.529.464,00
	Lain-lain PAD yang Sah	39.111.685.536,00	33.438.692.019,64
	PENDAPATAN TRANSFER	558.402.443.986,00	545.371.897.096,00
	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00
	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	356.278.450.000,00	357.769.014.914,00
	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.035.717.000,00	50.548.393.204,00
	Dana Transfer khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.125.393.000,00	50.234.698.510,00
	Dana Insentif Daerah (DID)		

N o	URAIAN	APBD 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana Desa	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.140.612.986,00	27.492.214.002,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
	Dana Darurat	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
2	BELANJA	669.237.924.585,00	607.064.912.961,00
	BELANJA OPERASI	508.679.565.969,00	465.316.924.124,00
	Belanja Pegawai	262.287.661.176,00	246.879.933.557,00
	Belanja Barang dan Jasa	214.877.895.657,00	189.393.433.222,00
	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.122.101.270,00-
	Belanja Hibah	26.746.034.136,00	24.475.356.075,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.517.975.000,00	3.446.100.000,00
	BELANJA MODAL	97.876.748.616,00	84.381.971.361,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan	13.202.204.963,00	12.084.173.858,00

N o	URAIAN	APBD 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Mesin		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.136.755.083,00	35.635.719.133,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.266.106.060,00	36.392.598.160,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	271.682.510,00	269.480.210,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	836.646.211,00
	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	836.646.211,00
	BELANJA TRANSFER	61.431.610.000,00	56.529.371.265,00
	Belanja Bagi Hasil	1.204.270.000,00	954.510.748,00
	Belanja Bantuan Keuangan	60.227.340.000,00	55.574.860.517,00
	SURPLUS / DEFISIT	(44.052.459.502,00)	(1.749.176.685,36)
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.719.126.171,00	12.116.356.259,38
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.114.946.260,00	12.114.946.259,38
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	33.604.179.911,00	1.410.000,00

N o	URAIAN	APBD 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.666.666.666,00	1.369.666.668,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.668,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	203.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	44.052.459.502,00	10.746.689.591,38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	8.997.512.906,02

**F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN
TARGET KINERJA**

**HASIL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PD
TRIWULAN IV TA 2023**

NAMA OPD	JUMLA H PROGR	JUMLA H KEGIAT	JUMLA H SUB KEGIAT	RATA- RATA CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	
					Rp	(%)

Bab II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		AM	AN	AN	KINERJA RKPD (%)		
1	Sekretariat Daerah	3	18	46	97	38,158,446,653	84,74
2	Sekretariat DPRD	2	13	33	100	25.928.552.234	88.09
3	Inspektorat	3	8	18	98,45	6.053.873.885	87,17
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	13	35	76	4.186.977.714	67
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	4	13	64	100	67.791.012.664	90,41
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26	9	2	140,64	4.812.948.170	92,59
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	28	100	9.243.322.207	100
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	27	100	3.035.169.251	99,63
9	Dinas Pendidikan	3	11	71	100	113.779.644.98 5	95,3
10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	29	163	90,68	44.764.760.082	90,68

Bab II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	46	28	12	100	13.733.557.140	96,2
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	20	50	97,03	59.261.689.789	91,79
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	12	23	50	100	7.527.157.319	90,51
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	12	26	87,19	3.120.322.793	87,19
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8	23	51	81	15.240.065.413	62,3
16	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	6	13	30	91	5.820.151.594	90,2
17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	17	30	54	100	20.443.494.379	100
18	Dinas Perhubungan	3	11	26	96,15	9.389.941.021	95,32
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	9	16	30	89,29	5.969.118.878	88,53

	Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja						
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	12	19	34	93	26.104.797.405	80
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	13	31	100	3.267.151.347	98,42
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	9	20	95,2	7.811.199.082	91,8
24	Kec. Lembah Segar	6	12	29	100	9.088.445.048	100
25	Kec. Barangin	6	12	25	100	6.865.704.084	90,57
26	Kec. Silungkang	6	11	27	84	38,158,446,653	93
27	Kec. Talawi	6	12	28	92	2,433,768,926	92
TOTAL		225	418	1070			

1) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. **45,027,551,258,-** untuk membiayai 46 sub kegiatan dengan 18 kegiatan yang tersebar pada 3 program, dan capaian kinerja tahun 2023 kinerja sebesar **97%** dengan prediket **“Sangat Tinggi”** dan realisasi keuangan sebesar Rp. **38,158,446,653** atau **84,74%** dengan prediket **“Tinggi”**, dengan rincian sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dilingkup Sekretariat (bulan) yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan didukung oleh 11 kegiatan dengan 29 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp.25,770,531,783,-** dengan capaian kinerja **100%**, dan realisasi anggaran sebesar Rp. **22,300,940,315** atau **87%**. Beberapa anggaran kegiatan tidak bisa direalisasikan pada triwulan IV (Capaian Realisasi Kinerja atau anggaran <90%) dikarenakan adanya surat edaran walikota terkait efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023, dan beberapa kegiatan capaian kinerjanya terhitung rendah karena target yang tidak disesuaikan pada saat RKPD perubahan diantaranya Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 0%,
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Realisasi Kinerja 100%, realisasi anggaran 70%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 87%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 87%
- Penataan Organisasi Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 30%
- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 69%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, anggaran terealisasi Rp. 71,650,500, atau 72%, dengan realisasi kinerja 5 unit atau 13%, ini tercatat sangat rendah dikarenakan target yang tidak dirubah pada saat RKPD perubahan yang seharusnya target 5 unit, tercatat 39 unit.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Realisasi Kinerja 100, Realisasi anggaran 83%, pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang realisasinya diatas 100%, yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hal ini karena target kinerja yang tidak disesuaikan pada saat penyusunan RKPD Perubahan.

- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Realisasi Kinerja 100, Realisasi anggaran 81%. Dan kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Realisasi Kinerja dan anggaran, 100 dan 80%. Rendahnya capaian realisasi anggaran pada 2 kegiatan ini karena habisnya masa jabatan walikota dan wakil walikota.

b) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja 1. Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (PondokTahfiz), 2. Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (persen), 3. Persentase santri rumah/pondok tahfiz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (persen) dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setdako Sawahlunto, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Sawahlunto dan Bagian Hukum Setdako Sawahlunto. Program ini ditujukan untuk mendukung **Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik** dan **Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif**.

Pencapaian indikator kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh 4 kegiatan dengan 10 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 18,800,120,875** dan hanya terealisasi sebesar **Rp. 15,671,269,262** atau **83%**. Berdasarkan hasil pengendalian dan pemantauan yang dilakukan, hampir semua sub kegiatan sudah berjalan dengan sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sudah 100%, namun realisasi anggaran yang masih cukup rendah, dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada triwulan 4, sesuai dengan edaran Walikota, diantaranya kegiatan:

- Administrasi Tata Pemerintahan Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 74%
- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 80%
- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 81%

c) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator kinerja Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan (bulan) ditujukan untuk mendukung **Misi 4: Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif** yang dilaksanakan oleh Bagian Statistik, Perekonomian dan Pembangunan. Pencapaian indikator kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 3 kegiatan dengan 7 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 456,898,600** dan hanya terealisasi sebesar **Rp. 195,690,900** atau **43%**, dengan capaian kinerja program **100%**. **Capaian** Realisasi anggaran pada program ini sangat rendah, hal ini juga terkait dengan SE Walikota terkait efisiensi anggaran, capaian masing-masing kegiatan diantaranya kegiatan:

- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 39%
- Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Realisasi Kinerja 75%, Realisasi anggaran 0%
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi Kinerja dan anggaran masing-masingnya 100% dan 71%

-

d) Kesimpulan

- Secara keseluruhan pencapaian program dan kegiatan sudah baik dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 97% dengan prediket “Sangat Tinggi” dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 38,158,446,653 atau 84,74% dengan prediket “Tinggi”,

- Masih adanya target kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang tidak disesuaikan pada saat renja perubahan.
- Realisasi capaian anggaran yang belum optimal dikarena terbitnya surat edaran walikota terkait efisiensi penggunaan anggaran pada TW IV.

e) Rekomendasi

- Perangkat daerah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang capaian kinerja dan anggarannya masih rendah
- Perangkat Daerah memastikan kesesuaian antara program renja dengan renstra PD serta RPD
- Perangkat daerah agar lebih teliti dalam penetapan target kinerja dan penginputan target kinerja kedalam aplikasi SIPD

2) SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD memiliki 2 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, berikut penjabarannya:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Realisasi kinerja	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

(75%), Realisasi Anggaran (60.71%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang -undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

		Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

<p>Realisasi kinerja (100%),</p> <p>Realisasi Anggaran (101.52%)</p>	<p>Pembahasan Kebijakan Anggaran</p>	Pembahasan APBD
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	<p>Peningkatan Kapasitas DPRD</p>	Pendalaman Tugas DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
		Penyusunan Program Kerja DPRD
	<p>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p>	Pelaksanaan Reses
	<p>Fasilitasi Tugas DPRD</p>	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Secara umum rata-rata capaian realisasi kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Tahun 2023 Sekretariat DPRD adalah:

- Realisasi kinerja 100 % dan
- Realisasi anggaran 88.09 %, Anggaran APBD awal sebesar Rp.29.585.459.776,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.928.552.234,-

Realisasi kinerja dan anggaran sub kegiatan terkategori sangat tinggi (51-100 %), yaitu:

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran 72 % dan realisasi kinerja 53 %
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi anggaran 54% dan realisasi kinerja 100%

Kegiatan yang Realisasi Kinerja dan Anggarannya rendah ($\leq 50\%$) adalah:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyerapan anggaran masih 1 % dengan kinerja 33 %.
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan. Anggaran belum terserap karena belum ada permintaan bahan bacaan dari anggota DPRD
 - Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, realisasi anggaran direncanakan di TW IV
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, penyerapan anggaran rendah karena belum ada permintaan MCU dari anggota dewan
- **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**
 - Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan monitoring dan evaluasi dari Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023:

- Secara umum realisasi kinerja dan anggaran pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD pada Monev Triwulan II masih rendah yaitu dibawah 50%, terlebih pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Kondisi ini dikarenakan banyak kegiatan yang diagendakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.
- Terdapat beberapa kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih dalam Proses SPJ, sehingga tidak dapat terakumulasi pada perhitungan penyerapan anggaran di Bulan Juni.

SARAN

Saran yang dapat diberikan pada pembahasan Monitoring dan Evaluasi Renja Sekretariat DPRD pada Triwulan III Tahun 2023 ini , agar kegiatan yang realisasi kinerja dan anggarannya masih rendah, dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan proses pencairan anggaran

3) INSPEKTORAT DAERAH

Dialokasikan anggaran pada Inspektorat Kota Sawahlunto sebesar **Rp. 6.944.981.210** untuk membiayai 18 sub kegiatan dengan 8 kegiatan yang tersebar pada 3 program dan sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar **Rp. 6.053.873.885 atau 87,17 %** dengan prediket “**tinggi**”. Sedangkan capaian kinerja sub kegiatan rata-rata sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar **98,45 %** dengan prediket “**sangat tinggi**”. Berikut dilihat capaian indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Program :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 15 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, terdapat 14 sub kegiatan yang berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sudah terlaksana sesuai dengan rencana dengan capaian kinerja rata-rata sub kegiatan sebesar **96,15 %** dengan prediket “**sangat tinggi**”, dan serapan anggaran sebesar **Rp. 5.956.453.470 atau 87,44 %**. Terdapat satu sub kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dan terdapat satu sub kegiatan pada Program ini yang capaian kinerjanya lebih dari 100 % dengan prediket capaian kinerja “**sangat tinggi**”, yaitu sub kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dari 12 orang yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 42 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 350 %. Sub kegiatan ini memfasilitasi pegawai yang mengikuti ujian dinas, bimtek tentang audit kinerja, penilaian PAK fungsional, bimtek PK APIP, evaluasi SAKIP, evaluasi Reformasi Birokrasi, dan pelatihan penyusunan kinerja pegawai dan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

b) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sub kegiatan yang berada pada Program Penyelenggaraan Pengawasan sudah terlaksana semua dengan capaian kinerja rata-rata sub kegiatan sebesar **116,12 %** dengan prediket **“sangat tinggi”**, dan serapan anggaran sebesar Rp. **61.229.215** atau **80,22 %**. Terdapat satu sub kegiatan dengan capaian kinerja di atas 100 % dengan prediket kinerja “sangat tinggi”, yaitu sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dari 121 dokumen target rencana, terealisasi sebanyak 160 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 132,23 %.

c) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sub kegiatan yang berada pada Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi sudah terlaksana dengan capaian kinerja sub kegiatan sebesar **100 %** dengan prediket **“sangat tinggi”**, dan serapan anggaran sebesar Rp. **36.191.200** atau **63,54 %**.

4) BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Barenlitbangda secara umum terdiri dari 35 Sub Kegiatan, 13 Kegiatan dan 4 Program yaitu:

- Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi dan Siknronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW IV tahun 2023 pada Barenlitbangda adalah : realisasi kinerja 76% dan realisasi anggaran 67 % dengan anggaran APBD sebesar Rp. 6.123.576.567,- dan terealisasi s/d Desember 2023 sebesar Rp. 4.186.977.714,-

a) Kesimpulan

- Realisasi Anggaran pada Barenlitbangda tidak tercapai 100% dikarenakan adanya surat edaran WAKO..
- Anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2023, ada beberapa Sub Kegiatan pada dinas Barenlitbangda mengalami reconfusing
- Monev Barenlitbangda Tahun 2023 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2025

b) Saran

Agar Monev Tahun Selanjutnya agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional
Agar Program dan Kegiatan harus berorientasi pada sasaran yang hendak dicapai bukan pada ceremonial saja, maksudnya Belanja yang dikeluarkan tidak berfokus pada belanja rutin tetapi output yang dicapai

5) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada tahun 2023 melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan Anggaran APBD Perubahan Rp. 74.985.565.944,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV (tw I-IV) sebesar Rp. 67.791.012.664,- (90,41%) dengan kategori tinggi.

a) Semua Program yang dilaksanakan oleh BPKAD realisasi kinerjanya = 100% yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat) dengan realisasi anggarannya 88,44%.
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Program yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi) dengan realisasi anggarannya 91,20%.
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Program yang dilaksanakan oleh Bidang Aset) dengan realisasi anggarannya 85,98%.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Program yang dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan) dengan realisasi anggarannya 73,58%.

b) Ada satu Sub Kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD. Hal ini disebabkan oleh adanya Surat Edaran terkait efisiensi penggunaan anggaran.

c) Dari 64 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD, sebanyak 53 sub kegiatan realisasi kinerjanya = 100% antara lain adalah :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi anggarannya 84,63%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi anggarannya 100%.
- Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dengan realisasi anggarannya 99,58%

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggarannya 99,73%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggarannya 79,53%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi anggarannya 76,40%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi anggarannya 90,46%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi anggarannya 38,17%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggarannya 89,75%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi anggarannya 93,78%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggarannya 80,99%.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi anggarannya 85,74%.
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan realisasi anggarannya 82,92%
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan realisasi anggarannya 81,76%
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan realisasi anggarannya 18,79%
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan realisasi anggarannya 90,58%.
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan realisasi anggarannya 72,56%
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan realisasi anggarannya 56,97%.

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan realisasi anggarannya 83,49%.
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan realisasi anggarannya 26,78%.
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan realisasi anggarannya 94,94%
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan realisasi anggarannya 99,83%.
- Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dengan realisasi anggarannya 98,20%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan realisasi anggarannya 95%.
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan realisasi anggarannya 91,43%.
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan realisasi anggarannya 99,22%.
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggarannya 96,77%.
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan realisasi anggarannya 99,31%.
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban dengan realisasi anggarannya 67,56%.

- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggarannya 44,79%.
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan realisasi anggarannya 96,46%.
- Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan realisasi anggarannya 75,20%.
- Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan realisasi anggarannya 99,19%.
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan realisasi anggarannya 81,39%.
- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dengan realisasi anggarannya 89,77%.
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan realisasi anggarannya 92,28%.
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan realisasi anggarannya 66,93%.
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan realisasi anggarannya 79,26%.
- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan realisasi anggarannya 85,98%.
- Penyusunan Standar Harga dengan realisasi anggarannya 68,05%
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan realisasi anggarannya 65,62%.
- Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan realisasi anggarannya 94,54%.
- Pengamanan Barang Milik Daerah dengan realisasi anggarannya 16,72%.
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan realisasi anggarannya 40%.

- Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan realisasi anggarannya 73,46%.
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggarannya 77,62%.
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan realisasi anggarannya 71,54%.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan realisasi anggarannya 80,55%.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan realisasi anggarannya 13,57%.
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan realisasi anggarannya 85,60%.
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan realisasi anggarannya 95,66%.
- Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan realisasi anggarannya 9,70%.
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan realisasi anggarannya 76,19%.

d) Ada beberapa Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 100% yaitu :

- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yaitu 152,73% dengan realisasi anggarannya 99,65%.
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah yaitu 114,25% dengan realisasi anggarannya 78,73%.
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yaitu 150% dengan realisasi anggarannya 53,22%.

- e) Ada satu Sub Kegiatan yang realisasinya sangat rendah (<50%) yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah = 25% dengan realisasi anggarannya 43,21%.
- f) Kendala/Permasalahan pencapaian target kinerja secara umum adalah sebagai berikut :
- Kurang cermatnya OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (masih menggunakan pola lama yang hanya berfokus kepada anggaran saja, besarnya indikator kinerja diabaikan).
 - Beberapa kegiatan pelaksanaannya berhubungan dengan laporan dan permintaan dari OPD lain.
 - Beberapa sub kegiatan pelaksanaannya harus dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan.
- g) Saran/Rekomendasi untuk perencanaan/pelaksanaan kegiatan di APBD Perubahan dan tahun berikutnya :
- Disarankan agar para PPTK kegiatan agar sebelum kegiatan dimulai sudah mempersiapkan administrasi kegiatan dengan baik dan lengkap, sehingga setelah kegiatan selesai administrasi pertanggungjawaban sudah bisa disampaikan pada bagian keuangan. Sehingga terwujud keselarasan antara tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian realisasi anggaran.
 - Disarankan agar PPTK merencanakan output dan apa yang seharusnya dihasilkan, bagaimana tahapannya, sehingga dengan memperhatikan standar harga satuan barang/jasa, ditetapkan total anggaran yang dibutuhkan.
 - Disarankan agar PPTK menyusun “perencanaan” dengan pola “anggaran berbasis kinerja”, sehingga tidak ditemui lagi kondisi realisasi kinerja dan keuangan yang timpang/tidak berbanding lurus.
 - Agar para PPTK melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule dan rencana anggaran kas yang telah disusun.

6) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Dialokasikan anggaran pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto sebesar Rp. **5.198.014.154** untuk membiayai 26 sub kegiatan dengan 9 kegiatan yang tersebar pada 2 program dan sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar **Rp. 4.812.948.170 atau 92,59 %** dengan prediket **“sangat tinggi”**. Sedangkan capaian kinerja sub kegiatan rata-rata sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar **140,64%** dengan prediket **“sangat tinggi”**. Berikut dilihat capaian indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Program :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 13 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, semua sub kegiatan yang berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sudah terlaksana sesuai dengan rencana dengan capaian kinerja rata-rata sub kegiatan **sebesar 99,59 %** dengan prediket **“sangat tinggi”**, dan serapan anggaran sebesar Rp. **3.993.030.242 atau 95,07%**.

b) Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 13 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sub kegiatan yang berada pada Program Kepegawaian Daerah sudah terlaksana semuanya dengan capaian

kinerja rata-rata sub kegiatan sebesar **178,76%** dengan prediket “**sangat tinggi**”, dan serapan anggaran sebesar Rp. **819.917.928** atau **82,17%**

Sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja tertinggi dan melebihi 100 % adalah sub kegiatan Pengelolaan Penghargaan Bagi pegawai dengan indikator kinerja Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan, dimana ditargetkan 6 orang sementara realisasinya 71 orang, sehingga capaian realisasinya sebesar 1183 %. Hal ini disebabkan banyaknya ASN yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang terdiri dari : a). Satyalancana Karya Satya XXX tahun sebanyak 18 usulan; b). Satyalancana Karya Satya XX tahun sebanyak 11 usulan; dan c). Satyalancana Karya Satya X tahun sebanyak 42 usulan. Usulan Satyalancana Karya Satya masih dalam proses di Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri.

Sub kegiatan lain yang juga mempunyai kinerja melebihi 100 % adalah sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN dimana ditargetkan 2 dokumen sementara realisasinya 7 dokumen, sehingga capaian realisasinya sebesar 350 %. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terlaksana 7 kali kegiatan pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut : 1). Pelantikan Eselon II tanggal 2 Januari 2023 sebanyak 4 orang; 2). Pelantikan Eselon III dan IV tanggal 2 Januari 2023 sebanyak 26 orang; 3). Pelantikan Kepala Sekolah tanggal 3 Februari 2023 sebanyak 8 orang; 4). Pelantikan Eselon II tanggal 5 Mei 2023 sebanyak 2 orang, Eselon III dan IV sebanyak 40 orang; 5). Pelantikan Kepala Sekolah tanggal 5 Mei 2023 sebanyak 2 orang; 6). Pelantikan Kepala Sekolah tanggal 18 Juli 2023 sebanyak 4 orang; 7). Pelantikan Kepala Sekolah tanggal 12 September 2023 sebanyak 12 orang.

Disamping itu terdapat Sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja kurang dari 100 % dengan prediket capaian kinerja **“sangat rendah”**, yakni sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan indikator kinerja Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan, yang mana dari 2 orang yang ditargetkan, terealisasi hanya 1 orang sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 50 %.

Sub kegiatan lain yang memiliki capaian kinerja kurang dari 100 % dengan prediket capaian kinerja **“rendah”**, adalah sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan indikator kinerja Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, dari 130 orang yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 77 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 59 %.

7) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 5 program dengan total anggaran RKPD-Perubahan sebesar Rp 11.963.777.382,- dan APBD-Perubahan sebesar Rp 10.941.591.864,-, dengan program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a) Realisasi kinerja sangat tinggi (90-100%) :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100% dan anggaran 65,01%. Rata-rata kinerja sudah tinggi karena kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang setiap bulan dilaksanakan, seperti penyediaan gaji ASN, pembelian ATK dan fotocopy barang cetak, pembayaran tagihan listrik, servis dan suku cadang kendaraan dan lainnya. Namun kinerja anggaran masih rendah karena Kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran, sehingga kegiatan di triwulan IV tidak bisa direalisasikan anggarannya kecuali dengan persetujuan Walikota Sawahlunto.
- Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan realisasi kinerja 100% dan anggaran 48,05%. Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan 3 upacara hari besar yang direalisasikan 100%, namun kinerja anggaran rendah karena sisa anggaran tidak bisa direalisasikan untuk kegiatan selanjutnya.
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Dalam program ini dilakukan kegiatan pemberian hibah Parpol kepada 9 parpol dan Hibah KPU serta Bawaslu. Realisasi kinerja 100% dan anggaran 924% karena dalam RKPD Perubahan Hibah KPU dan Bawaslu tidak ada, seiring pembahasan RAPBD Hibah ini harus ditambahkan.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kinerja program ini dilaksanakan 100% dan kinerja anggaran sebesar 83,85% sesuai dengan indikatornya Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis. Dalam program ini difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), HANI, P4GN, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan realisasi kinerja 100% dan

anggaran 157%. Dalam program ini difasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

b) Kegiatan yang melebihi target 100% :

Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pelaksanaan kegiatan Paskibraka yang realisasi kinerja 136% dan anggaran 82,70%. Realisasi kinerja sangat tinggi karena jumlah orang yang mengikuti Paskibraka mulai dari seleksi awal sampai akhir sebanyak 341 orang melebihi dari target 250 orang.

Agar Perangkat Daerah lebih selektif dalam menetapkan target kinerja dan menyesuaikan kembali dengan RKPD Perubahan.

8) BADAN PENANGANAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 Program, yaitu ;

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- Program Penanggulangan Bencana
- dengan anggaran RKPD-P Rp 4.555.165.526,- dan APBD-P sebesar Rp 4.532.082.808,-

a) Realisasi kinerja sangat tinggi (90-100%) :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100% dan anggaran 67,52%. Rata-rata kinerja sudah tinggi karena kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang setiap bulan dilaksanakan, seperti penyediaan gaji ASN, pembelian ATK dan fotocopy barang cetak, pembayaran tagihan listrik, servis dan suku cadang kendaraan dan lainnya. Namun kinerja anggaran masih rendah karena Kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran, sehingga kegiatan di triwulan IV tidak bisa direalisasikan anggarannya kecuali dengan persetujuan Walikota Sawahlunto.

- Pada Program Penanggulangan Bencana ;
Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan realisasi kinerja 100% sudah dilakukan kegiatan sosialisasi rawan bencana kepada masyarakat.
Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan realisasi kinerja sudah 100%.

b) Realisasi kinerja sedang (50-90%) ;

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan kinerja 58% dan anggaran 79,27%. Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti oleh sebanyak 7 orang dari target 12 orang. Sisa anggaran tidak bisa digunakan karena tidak mencukupi untuk pembayaran kontribusi pelatihan sehingga tidak jadi direalisasikan.
- Pada Program Penanggulangan Bencana sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 80% dan anggaran 93,18% karena sudah dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sebanyak 120 orang dari target 150 orang. Hanya sejumlah 120 orang yang mencukupi dengan anggaran yang tersedia.
- Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 81,82% dan anggaran 23,51%. Hanya 9 orang yang mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas dari 11 target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena defisit anggaran di triwulan IV sehingga tidak ada pelatihan yang bisa diikuti lagi.
- Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi 85,71% dari target 350 orang telah dilakukan evakuasi terhadap 300 orang sesuai dengan kejadian bencana. Realisasi anggaran 59,65% karena kegiatan ini dibiayai dengan dana BTT dan BNPB dengan status saat kejadian Kota Sawahlunto darurat bencana.

c) Realisasi kinerja rendah (0-50%) :

- Pada Program Penanggulangan Bencana sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan kinerja 25% dan anggaran 99,63%. Kegiatan ini adalah pembelian 1 unit alat selam dari 4 target yang ditetapkan dan sisanya adalah pembiayaan pendidikan dan pelatihan tim penanggulangan bencana.

d) Rekomendasi / Saran

1. Agar Perangkat Daerah lebih selektif dalam menetapkan target kinerja dan menyesuaikan kembali pada RKPD Perubahan.
2. Perlu perhatian dan pertimbangan untuk pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan penyediaan sarana prasarana penyelamatan kebencanaan. Karena secara kuantitas dan kualitas BPBD Kota Sawahlunto masih rendah.
3. Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana agar segera dapat diwujudkan di Kota Sawahlunto, karena keberadaannya mempunyai fungsi dalam pelaksanaan koordinasi, penyiapan, pengelolaan data dan analisa pemantauan potensi ancaman bencana, pengerahan sumber daya, informasi kebencanaan dan pelaksanaan komunikasi kedaruratan dan rekomendasi operasi penanganan darurat bencana.

9) DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan secara umum terdiri dari 71 Sub Kegiatan ,11 Kegiatan dan 3 Program yaitu:

- Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 4 tahun 2023 Dinas Pendidikan adalah : realisasi kinerja program 100% dan realisasi

anggaran 95,30 % , anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 119.388.014.572,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.779.644.985.

a) Hasil Pengendalian dan Evaluasi Triwulan 4 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan Pemerintahan

Pada umumnya pelaksanaan pekerjaan pada program ini telah mencapai 100% (kinerja). Dengan realisasi pemanfaatan anggaran pada angka 95,08 %.

- Program Pengelolaan Pendidikan, kemajuan pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SD, capaian pelaksanaan kinerja 100 % dan realisasi keuangan sebesar 96,78 %.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP, capaian pelaksanaan kinerja 100 % dan realisasi keuangan sebesar 95,36%

Kegiatan Pengelolaan PAUD, capaian pelaksanaan kinerja 100 % dan realisasi keuangan 97,32%

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, capaian pelaksanaan kinerja 90% dan realisasi keuangan 88,02%.

- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terdapat 1 sub kegiatan dengan realisasi kinerja mencapai 95% serta keuangan sebesar 90,91%.

b) Kesimpulan

- Realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Pendidikan sampai dengan akhir Triwulan 4 2023 termasuk tinggi (kinerja 100% dan keuangan 95,30%).

- Kelebihan anggaran sebesar 14.615.590.453,- (4,7%) berasal dari kelebihan gaji PNS yang pensiun, beasiswa PIP (karena sumber anggaran PIP dari APBN & APBD) dan sisa nilai kontrak DAK Fisik.

c) Rekomendasi / Saran

Urusan Pendidikan sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (SPM). Untuk itu perlu upaya maksimal dan terintegrasi oleh seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto.

Pemerintah pun perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan berkualitas di Sawahlunto.

10) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum terdiri dari 163 Sub Kegiatan ,29 Kegiatan dan 8 Program yaitu:

- Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan
- Program Sediaan Alat Kesehatan, makanan dan minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Program Pembinaan Keluarga Sejahtera

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW IV tahun 2023 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah : realisasi kinerja program % dan realisasi anggaran 90,68 % , anggaran APBD Perubahan sebesar Rp.49.364.286.655,- ,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.764.760.082 -.

Berikut dilihat capaian indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Program :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinkesdalduk KB Kota Sawahlunto terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 20 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, semua sub kegiatan yang berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sudah terlaksana sesuai dengan rencana dengan capaian kinerja rata-rata sub kegiatan **sebesar** dengan prediket **“Sangat tinggi”**, dan serapan anggaran sebesar **Rp. 31.880.955.837,-** atau **94,7 %**.

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinkesdalduk KB Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dan 46 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sub kegiatan yang berada pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sudah terlaksana sebanyak 4 kegiatan atau terdapat 42 sub kegiatan dengan capaian program **sebesar Rp** dengan prediket **Tinggi**, dan serapan anggaran sebesar Rp.12.586.598.139,- atau **82,71%**.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sub kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia sudah terlaksana sebanyak 3 sub kegiatan yang terlaksana dengan capaian kinerja rata-rata sub kegiatan 89% dengan prediket **“Tinggi”**, dan serapan anggaran sebesar Rp. 1.798.400,- atau **73%**.

d) Program Sediaan Alat kesehatan dan Makanan dan Minuman

Program Sediaan Alat kesehatan dan Makanan dan Minuman terdiri dari 6 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sub kegiatan yang berada pada Program Sediaan Alat kesehatan dan Makanan dan Minuman sudah terlaksana sebanyak 3 sub kegiatan dan 3 sub kegiatan yang belum terlaksana yang rencananya akan dilaksanakan di TW IV. Capaian kinerja rata-rata sub kegiatan **sebesar 112,1%** dengan prediket **“sangat tinggi”** , dan serapan anggaran sebesar Rp.259.608.163,- atau **68,8 %** dengan kinerja **“Sedang”**.

e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sub kegiatan yang berada pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sudah terlaksana sebanyak 3 sub kegiatan capaian kinerja program **sebesar 116,2 %** dengan prediket **sangat tinggi** , dan serapan anggaran sebesar Rp.35.799.543,- atau **31,8 %**.

f) Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian penduduk terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sub kegiatan yang berada pada Program pengendalian penduduk sudah terlaksana sebanyak 3 sub kegiatan Capaian kinerja program **sebesar 100,%** dengan prediket **“Sangat Tinggi”** , dan serapan anggaran sebesar **Rp. 55.585.136,-** atau **46,54%**. Rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan oleh secara umum kegiatan bidang KB lebih dari 70 persen adalah pertemuan, ada makan minum, transport. Namun untuk penyerapan biaya transportasi yang tidak dicairkan karena tidak tersedia di SSH dan SBU.

g) Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program Pembinaan Keluarga terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023. Sub kegiatan yang berada pada Program Pembinaan Keluarga Berencana sudah terlaksana sebanyak 10 sub kegiatan. Dan terdapat 2 sub kegiatan yang belum terlaksana. Capaian kinerja

program **sebesar 101,9** dengan prediket **sangat tinggi** , dan serapan anggaran masih rendah baru sebesar Rp.375.045.700,- atau 36,5 %. Rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan oleh secara umum kegiatan bidang KB lebih dari 70 persen adalah pertemuan, ada makan minum, transport. Namun untuk penyerapan biaya transportasi yang tidak dicairkan karena tidak tersedia di SSH dan SBU.

h) Program Pembinaan Keluarga Sejahtera

Program Pembinaan Keluarga Sejahtera terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sub kegiatan yang berada pada Program Pembinaan Keluarga Sejahtera sudah terlaksana sebanyak 2 sub kegiatan atau terdapat 1 sub kegiatan yang belum terlaksana, hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran sehingga dihapus sub kegiatannya. Capaian kinerja program **sebesar 100%** dengan prediket **sangat tinggi**, dan serapan anggaran masih sudah tinggi sebesar Rp.654.910.400,- atau **96,7 %**.

i) Saran dan Rekomendasi

- Dinas Kesehatan masih banyak kegiatan SPM yang tidak tercapai, karena adanya permasalahan sehingga perlu dilakukan penyusunan perwako untuk penetapan sasaran yang akan dijadikan target pelaksanaan sehingga tidak susah dalam pencapaian SPM
- Pada Bidang KB, realisasi anggaran masih rendah karena adanya perbedaan juknis sehingga kegiatan untuk transportasi yang tidak dibayarkan. Saran yang diberikan agar menyiapkan juknis yang sesuai sehingga penyerapan anggaran bisa tercapai.
- Pelaksanaan kegiatan banyak tidak tepat pada waktunya, sehingga kegiatan banyak dilakukan di akhir tahun. Untuk kegiatan yang menghadirkan narasumber agak menjadi kendala. Disarankan kepada Dinkesdalduk KB agar melaksanakan kegiatan tepat pada waktunya, sehingga tidak menumpuk diakhir tahun.

11) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan umum terdiri dari 56 Sub Kegiatan ,24 Kegiatan dan 12 Program yaitu:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah
- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program penanganan kerawanan pangan
- Program pengawasan keamanan pangan
- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Program penyuluhan pertanian

Secara umum capaian ralisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 4 tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dengan realisasi anggaran 96,20 % , anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 14.275.960.229,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.733.557.140,-.

a) Kinerja Sub Kegiatan yang realisasi sangat tinggi (100 %) adalah:

- Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi anggarannya 88,47 %.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN realisasi anggarannya 96,26 %.

- Pada Sub Kegiatan Peningkatan Komponen Instalasi Listrik realisasi anggarannya 95.08%.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik realisasi anggarannya 98,88 %.
- Pada Sub Kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor realisasi anggarannya 92,43%
- Pada Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi anggarannya 99,70 %
- Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Realisasi Anggarannya 91,04 %
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Infra Struktur dan Kemandirian Pangan Lainnya realisasi Anggarannya 100 %
- Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Berbasis sumberdaya lokal realisasi anggarannya 98,91 %
- Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi Perkapita pertahun realisasi anggarannya 97,25%
- Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten kota realisasi Anggarannya 99,65 %
- Pada Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan Kabupaten Kota realisasi anggarannya 90,67 %
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten kota realisasi anggarannya 94,87 % (target anggaran tidak tercapai karena ada edaran Wako tentang eviesiansi anggaran)
- Pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam satu daerah Kabupaten kota realisaisi anggarannya 93,82 % (Target Kinerja pada TW 1 dan TW 3 Tidak ada Karena disana Cuma ada Pembayaran OHK)

- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha pengelolaan ikan dan pemasaran Skla Mikro dan Kecil realisasi anggarannya 100% (Kegiatan dikurangi di perubahan menjadi sebanyak angka yang sudah direalisasikan yaitu sebesar Rp 312.000,-)
- Pada Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan teknologi dan spesifik lokasi realisasi anggarannya 89,16 %.
- Pada Sub Kegiatan pendampingan sarana pendukung pertanian realisasi Anggarannya 100%.
- Pada Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Pelestarian SDG Hewan/ Tanaman realisasi anggaran 91,67%
- Pada Sub Kegiatan peningkatan Kualitas SDG Hewan realisasi anggarannya 96,15 %
- Pada Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan dan Tanaman realisasi Anggarannya 95,50% (TW1-4 OHK dan pada TW II tercapai indikator Out put)
- Pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Mutu bibit ternak bahan pakan skala kecil realisasi anggarannya 99 %.
- Pada Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi jalan usaha tani realisasi anggarannya 99,60%.
- Pada Sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi jalan usaha tani Realisasi anggarannya 97,89%.
- Pada Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi RPH realisasi anggarannya 99,87%
- Pada Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya realisasi anggarannya 99,06%
- Pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis realisasi anggarannya 99,09%
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Realisasi anggarannya 97,13%
- Pada Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Ventirenier realisasi anggarannya 96,69%

- Pada Sub Kegiatan Pendampingan unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Realisasi anggaranya 89,60% (Realisasi Anggaran Tidak tercapat karena evisiensi anggaran)
 - Pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Realisasi anggaranya 100 %.
 - Pada Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Sub Sektor TPH)
- b) Kinerja Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya dibawah 100 % adalah:
- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Realisasi Kinerja 85 % sedangkan realisasi anggarannya 100 %
 - Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor realisasi kinerja 30 % sedangkan realisasi anggaran 88,34% (Realisasi Anggaran tidak tercapai karena adanya edaran wako tentang evisiensi anggaran).
- c) Kinerja Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 100 % adalah:
- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya realisasi Kinerja sebesar 133,3% sedangkan Realisasi anggarannya sebesar 98,77 persen hal ini terjadi karena target kinerja pada APBD Perubahan tidak disesuaikan dengan capaian yang ada.
 - Pada Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Bibit Ternak realisasi kinerja 110,33% dan Realisasi anggarannya 99,12% (Realisasi Kinerja berlebih di Karenakan target kinerja di perubahan blum disesuaikan)
 - Pada Sub Kegiatan Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari kabupaten kota lain realisasi kinerjanya 101,40% dan realisasi anggarannya 96,12 %.
 - Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya realisasi kinerjanya 133,33% sedangkan Realisasi anggarannya 89,39%.(Tw II target output kosong karena pembayaran gaji.

Dan suku cadang alsintan Sedangkan indikator tercapai pada tw I dan III dan pada target perubahan target kinerja tidak disesuaikan dengan realisasi)

- Pada Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Sub Sektor TPH) realisasi kinerja 160,91 % sedangkan realisasi anggaran 95,295 (Realisasi Kinerja berlebih di Karena target kinerja di perubahan blum disesuaikan)
- Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa realisasi kinerjanya 340 % realisasi anggaran 96,69% (hal ini disebabkan karena pada saat perubahan anggaran target kinerjanya tidak disesuaikan)
- Pada Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa (UPTD) realisasi kinerjanya 165,71% dan realisasi anggarannya 97,61% (TW I dan TW II target output nya kosong tetapi realisasi anggaran ada dikarenakan biaya transpor, honor narasumber sedangkan target output tercapai pada tw IV)

d) KESIMPULAN

Kesimpulan hasil monev Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Secara umum realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan pada sub kegiatan Monev Triwulan 4 sudah terealisasi 100 %.
- Masih adanya target kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang tidak disesuaikan pada saat renja perubahan

e) Kendala/Permasalahan

- Kurang Cermatnya OPD dalam menyusun rencana kerja Anggaran (masih menggunakan Pola yang lama yang hanya berfokus pada anggaran saja indicator kinerja terabaikan)

f) Saran /Rekomendasi

- Saran hasil monev Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan untuk perencanaan /Pelaksanaan APBD Tahun berikutnya adalah Disarankan agar PPTK merencanakan output dan apa yang seharusnya dihasilkan, bagaimana tahapannya dengan memperhatikan Standar Satuan Barang dan Jasa dandi tetapkan total anggaran yang dibutuhkan.
- Serta di sarankan PPTK menyusun Perencanaan dengan Pola Anggaran berbasis kinerja sehinga tidak ditemui lagi kondisi realisasi kinerja dan keuangan yang timpang/tidakberbanding lurus

12) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum terdiri dari 50 Sub Kegiatan ,20 Kegiatan dan 9 Program yaitu:

- Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sumber Daya (SDA)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Secara umum capaian ralisasi Kinerja dan anggaran Monev TW 4 tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum adalah realisasi kinerja 97,03 % dan realisasi anggaran 91,79 % , anggaran APBD perubahan sebesar Rp. 86.559.164.034,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **59.261.6892.789,-**., rincian realisasi kinerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a) Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan yang realisasinya cukup tinggi (91-100 %) adalah:

Pada umumnya realisasi kinerja dan anggaran Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah mencapai 91-100 %, dan masih ada beberapa kegiatan/Sub kegiatan yang realisasi kinerja atau anggaran yang masih kurang 90 % dan lebih dari 100 % .

- b) Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan yang realisasinya rendah kurang dari 90 % adalah:

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sampai saat ini realisasi kinerja 22,92 % dan realisasi anggaran masih 57,09 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggaran Sub kegiatan ini adalah karena terbatasnya biaya kontribusi untuk bintek sementara biaya perjalanan dinas memadai.
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi kinerja sampai saat ini masih 22,9 % realisasi anggaran 39,8 %, hal ini disebabkan karena kegiatan serapan rendah karena kegiatan masuk dalam anggaran pengurangan.
- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi kinerjanya 87,5 % karena sesuai kebutuhan.
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor raealisasi anggarannya 83,3 % karena perlunya pengurangan anggaran.
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi anggaran 65,7 %, rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena anggaran perlunya pengurangan anggaran.
- Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi kinerja 8,3 %,

rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena angka target kinerja APBD terlalu tinggi yaitu 12 unit.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi anggaran 36,83 %, rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena kebutuhan.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi anggaran 70,6%, rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena sesuai kebutuhan.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi anggaran 50,43 % , rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena perlunya pengurangan anggaran.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi anggaran 82, %, rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena sesuai kebutuhan anggaran.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi kinerja 35,29 % dan realisasi anggaran 75,22 % , rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena perlunya pengurangan anggaran.
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi anggaran 51,7 %, rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena perlunya pengurangan anggaran.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Alat Berat) realisasi kinerja 35,29 % dan realisasi anggaran 75,22 % karena perlunya pengurangan anggaran.

- Sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air realisasi kinerja 45,09 %, rendahnya realisasi kinerja Sub kegiatan ini adalah karena tidak tercapainya Panjang saluran disebabkan kondisi lapangan.
- Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air realisasi kinerja 50,7 %, rendahnya realisasi kinerja Sub kegiatan ini adalah karena kondisi dan kebutuhan dilapangan.
- Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala realisasi kinerja 85,19 % dan realisasi anggarannya 89,64 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggaran karena kondisi lapangan.
- Sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase realisasi kinerja 54,3 %, rendahnya realisasi kinerja Sub kegiatan ini adalah karena sesuai kebutuhan dilapangan.
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase realisasi kinerja 27,0 %, rendahnya realisasi kinerja Sub kegiatan ini adalah karena target RKPD terlalu tinggi sementara anggaran APBD berkurang.
- Sub kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman diKawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pengembangan Permukiman realisasi kinerja 73,97 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini adalah karena targetnya terlalu tinggi.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan persyaratan bangunan gedung (PBB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG pada Program Penataan bangunan Gedung realisasi kinerja 22 % dan realisasi anggarannya 20,23 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini adalah karena sesuai permintaan izin.
- Sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota pada Program Penataan bangunan

Gedung realisasi kinerja 20 % dan realisasi anggarannya 70,95 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini adalah karena pengurangan anggaran di perubahan .

- Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Program Penyelenggaraan Jalan realisasi kinerja 57,14 % realisasi anggarannya 83,20 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini karena termasuk dalam anggaran pengurangan..
- Sub kegiatan Pembangunan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan realisasi kinerja 85,71 % realisasi anggarannya 56,16 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini karena termasuk dalam anggaran pengurangan.
- Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan Program Penyelenggaraan Jalan realisasi kinerja 51,77 %, rendahnya realisasi kinerja Sub kegiatan ini adalah karena sesuai kondisi dan kebutuhan lapangan .
- Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Program Penyelenggaraan Jalan realisasi kinerja 46,99 % realisasi anggarannya 86,89 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini karena termasuk dalam anggaran pengurangan.
- Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Program Penyelenggaraan Jalan realisasi kinerja 30 % realisasi anggarannya 60,29 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini karena termasuk dalam anggaran pengurangan.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Penataan Ruang realisasi anggarannya 85,27 %, rendahnya realisasi anggran Sub kegiatan ini karena sesuai rapat koordinasi yang terlaksana.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang realisasi anggarannya 51,51 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini karena termasuk dalam anggaran pengurangan.

- Sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang realisasi kinerja 0 % dan realisasi anggarannya 3,2 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini karena termasuk dalam anggaran pengurangan dan sisanya dalam proses pencairan dan akan diselesaikan pada monev TW 4.
 - Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang realisasi kinerja 88,0 % dan realisasi anggarannya 79,87 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini karena sesuai dengan permintaan rekomendasi.
- c) Realisasi kinerja anggaran sub kegiatan yang sangat tinggi lebih dari 100 % adalah :
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan realisasi kinerja 100,24 %, tingginya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini adalah karena sesuai kondisi dilapangan .
 - Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan realisasi kinerja 112,91 %, tingginya realisasi kinerja dan anggran Sub kegiatan ini adalah karena dari semula hanya 4,4 km teraealisasi 3,8 km hal ini sesuai kondisi di lapangan.
- d) KESIMPULAN
- Kesimpulan hasil monev Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah : Secara umum realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Monev Triwulan 4 sudah cukup baik, perlu diperhatikan target kinerja dan anggaran yang tidak akan tercapai untuk di evaluasi sebelum penyusunan anggaran perubahan sehingga target kinerja dan anggaran DPUPR akan sama sama tertcapai dan tepat sasaran.
- e) SARAN
- Saran hasil monev Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :
1. Pada saat TW 3 agar mengevaluasi kegiatan yang tidak akan terlasana sehingga Target kinerja untuk dirasionalkan .

2. Agar memperhatikan Target kinerja yang terlalu rendah atau terlalu tinggi perlu dirasionalkan.

13) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak secara umum terdiri dari 50 Sub Kegiatan, 23 Kegiatan dan 12 Program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
-

a) Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran 50 Sub Kegiatan Monev triwulan IV tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak adalah rata-rata realisasi kinerja 12 program sebesar 100% dan rata-rata realisasi anggaran 90,51%. Adapun anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 8.316.756.610,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.527.157.319,-.

Adapun rincian capaian kinerja dan realisasi keuangan Renja DinsosPMDPPPA Kota Sawahlunto tahun 2023 yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Nama Program	Capaian 80-100%		Capaian 50-79%		Capaian <49%		Total Sub Kegiatan	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12	11	1	2	-	-	13	13
Program Pemberdayaan Sosial	1	1	-	-	-	-	1	1
Program Rehabilitasi Sosial	6	5	-	1	-	-	6	6
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1	1	-	-	1	1	2	2
Program Penanganan Bencana	1	1	1	1	-	-	2	2
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	-	-	1	-	-	1	1
Program Pengarusutamaan	3	3	-	-	-	-	3	3

Nama Program	Capaian 80-100%		Capaian 50-79%		Capaian <49%		Total Sub Kegiatan	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Gender Dan Pemberdayaan Perempuan								
Program Perlindungan Perempuan	2	-	-	1	-	1	2	2
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2	2	-	-	-	-	2	2
Program Perlindungan Khusus Anak	4	2	-	1	-	1	4	4
Program Administrasi Pemerintahan Desa	7	8	1	-	-	-	8	8
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3	4	1	-	-	-	4	4
Total	43	38	4	7	1	3	48	48

Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 sub kegiatan yang realisasi kinerja di bawah 49% dan 3 sub kegiatan yang realisasi anggarannya masih di bawah 49%. Hal ini dikarenakan beberapa alasan:

- Pekerjaan pada Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota yang sejak awal dijadwalkan pada bulan Oktober tidak jadi terlaksana dikarenakan beredar Surat Edaran Wali Kota Sawahlunto nomor : 900/494/BPKAD/SWL/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Akhir Tahun Anggaran 2023 dan dipertegas dengan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto tanggal 5 Desember 2023 tentang Pengelolaan Kas Daerah Akhir Tahun 2023.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 34,25% dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran 24,22% dikarenakan terdapat DAK NF, dimana dalam penggunaan anggarannya terikat kepada juknis sehingga beberapa pekerjaan seperti honor pendamping tidak bisa dicairkan. Namun dibalik itu, segala kegiatan pendampingan tetap dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% walau pun anggaran tidak bisa dicairkan.

Terdapat pula sebanyak 4 sub kegiatan dengan pencapaian kinerja antara 50 sampai 79% dan 7 sub kegiatan dengan pencapaian anggaran 50 sampai 79%. Hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti:

- Terdapat beberapa kegiatan yang telah dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan IV, namun batal dilaksanaka dikarenakan Surat Edaran Wali Kota Sawahlunto nomor : 900/494/BPKAD/SWL/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Akhir Tahun Anggaran 2023 dan dipertegas dengan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto tanggal 5 Desember 2023 tentang Pengelolaan Kas Daerah Akhir Tahun 2023.

- Adanya beberapa sub kegiatan yang baru dapat dimanfaatkan jika terjadi kasus, seperti kasus kejadian bencana.
- Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan realisasi anggaran 74,79% dikarenakan bantuan yang sudah teranggarkan pada APBD Perubahan 2023 tidak terjadi tersalurkan menggunakan APBD. Bantuan tersebut telah diakomodir oleh APBN.

b) Kesimpulan dan saran

Rata-rata capaian realisasi keuangan DinsosPMDPPPA triwulan IV tahun 2023 yang masih di bawah 80% dikarenakan terbitnya Surat Edaran Wali Kota Sawahlunto nomor : 900/494/BPKAD/SWL/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Akhir Tahun Anggaran 2023 dan dipertegas dengan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto tanggal 5 Desember 2023 tentang Pengelolaan Kas Daerah Akhir Tahun 2023. Namun di samping itu, beberapa sub kegiatan tetap dilaksanakan walau pun terkendala anggaran.

14) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum terdiri dari 26 Sub Kegiatan, 12 Kegiatan dan 4 Program yaitu:

- Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : realisasi kinerja program 48% dan realisasi anggaran 87,19 % , dari anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 3.578.569.292,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.120.322.793,-.

a) Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan 4 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan Pemerintahan

Rata – rata capaian pelaksanaan pada program ini telah mencapai 90% , dengan realisasi pemanfaatan anggaran pada angka 88,87% . Pelaksanaan belum maksimal karena terkendala aturan untuk melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran.

- Program Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

Rata – rata capaian pelaksanaan pada program ini telah mencapai 90% , dengan realisasi pemanfaatan anggaran pada angka 88,87% . Pelaksanaan belum maksimal karena terdapat 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran yang belum maksimal dengan alasan salah satunya sisa belanja pengadaan di E katalog tidak bisa digunakan lagi diperubahan, statusnya berubah dari dokumen menjadi 100 %

- Program Pencatatan Sipil

Rata – rata capaian pelaksanaan pada program ini telah mencapai 90% , dengan realisasi pemanfaatan anggaran pada angka 88,87%. Pelaksanaan belum maksimal karena terdapat 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran yang belum maksimal dengan alasan :

- Pelaksanaan Isbat terpadu dilakukan 1 kali dari target 80 pasang pasutri, yang mendaftar 63 pasang, yang lolos seleksi 8 pasang untuk Isbat
- Sudah diusulkan untuk dihilangkan pada perubahan anggaran karena pelaksanaan pelayanan Dafdud sejalan dengan pelayanan Capil
- Capaian kinerja terlaksana dengan penghematan anggaran
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Pelaksanaan belum maksimal karena terkendala aturan untuk melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran dan Kerjasama pemanfaatan data belum maksimal, karena belum ada OPD yang memenuhi standar ISO 270001

b) Kesimpulan

Beberapa Realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan akhir Triwulan 4 belum terlaksana sesuai target dikarenakan Surat Edaran tentang Pencairan Dana Akhir Tahun 2023

c) Rekomendasi / Saran

Agar pelaksanaan di Tahun selanjutnya untuk dioptimalkan.

15) DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto secara umum terdiri dari 8 Program, 23 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto pada Monev TW IV tahun 2023 adalah realisasi kinerja diatas 81% dan realisasi anggaran 62,3%, anggaran APBD awal sebesar Rp. 24.446.153.728,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.240.065.413,-. Untuk sub kegiatan lainnya Kinerja dan Anggarannya masih dibawah 50% sebagian besar karena adanya edaran walikota tentang efisisensi anggaran sehingga kegiatan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

KESIMPULAN

Secara umum realisasi kinerja dan anggaran pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto pada Monev Triwulan IV sudah hampir mencapai target, Kondisi ini dikarenakan adanya edaran walikota tentang efisisensi anggaran sehingga kegiatan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan pada pembahasan Monitoring dan Evaluasi Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada Triwulan IV Tahun 2023 ini adalah:

- a) Agar kegiatan yang realisasi kinerja dan anggarannya masih rendah, disaat perubahan ketika anggaran dikurangi tidak lupa mengurangi target kinerja.

- b) Target kinerja yang terlalu rendah atau terlalu tinggi perlu dirasionalkan lagi untuk tahun depan.

16) DINAS KEBUDAYAAN

Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto secara umum terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan.

- a) Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan secara umum capaian realisasi kinerjanya sudah mencapai/melebihi 90% dan 2 buah sub kegiatan yang tidak tercapai atau dibawah 50% disebabkan adanya edaran walikota untuk efisiensi anggaran tahun 2023 yaitu sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian kinerjanya sebanyak 46% dan sub kegiatan Pemeliharaan Meubel capaian kinerjanya sebanyak 30%.
- b) Program Pengembangan Kebudayaan yang mempunyai 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan secara umum capaian realisasi kinerjanya sudah mencapai 100% dan pada sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional capaian kinerjanya mencapai 150% serta pada sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan tidak terlaksana karena adanya edaran walikota tentang efisiensi anggaran.
- c) Program Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang mempunyai 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan tidak terlaksana adanya edaran walikota tentang efisiensi anggaran.
- d) Program Program Pembinaan Sejarah yang mempunyai 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan tidak terlaksana adanya edaran walikota tentang efisiensi anggaran.
- e) Program Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang mempunyai 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan secara umum capaian realisasi kinerjanya sudah

mencapai 100% pada sub kegiatan Pelindungan Cagar Budaya sedangkan 2 sub kegiatan lainnya tidak terlaksana karena adanya edaran walikota tentang efisiensi anggaran.

- f) Program Pengelolaan Permuseuman yang mempunyai 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan secara umum capaian realisasi kinerjanya sudah mencapai 100% karena anggarannya berasal dari dana DAK Non Fisik serta yang berasal dari APBD hanya 70 juta.

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto pada Monev TW 4 tahun 2023 adalah realisasi kinerja diatas 91% dan realisasi anggaran 90,2%, anggaran APBD awal sebesar Rp. 6.449.180.856,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.820.151.594,-.

KESIMPULAN

Secara umum realisasi kinerja dan anggaran pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan pada Monev Triwulan IV tahun 2023 sudah mencapai.

SARAN

Saran yang dapat diberikan pada pembahasan Monitoring dan Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan pada Triwulan IV Tahun 2023 ini adalah:

1. Agar kegiatan yang realisasi kinerja dan anggarannya masih rendah, disaat perubahan ketika anggaran dikurangi tidak lupa mengurangi target kinerja.
2. Target kinerja yang terlalu rendah atau terlalu tinggi perlu dirasionalkan lagi untuk tahun depan.

17) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup secara umum terdiri dari 54 Sub Kegiatan, 30 Kegiatan dan 17 Program yaitu:

- a) Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto terhadap APBD 2023 adalah sebesar 79.79% dengan penyerapan dana sebesar Rp.20.443.494.379,- (93,16%)
- b) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum & Tanah Absentee tidak terlaksana maksimal karena beberapa sub kegiatan tidak terlaksana yaitu:
 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek dan Redistribusi Tanah
 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemetaan redistribusi tanah dlm 1(satu) daerah kab/kota
- c) Program Penatagunaan Tanah juga tidak dilaksanakan karena kebijakan defisit anggaran.
- d) Program Perencanaan Lingkungan hidup belum selesai dilaksanakan pada tahun 2023, karena kegiatan berupa penyusunan dokumen KLHS (Kajian lingkungan Hidup Strategis) Rencana Tata Ruang dan KLHS RPJPD yang membutuhkan validasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Pada saat laporan ini dibuat masih menunggu jadwal dengan pihak pemerintah provinsi
- e) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH pelaksanaannya tidak maksimal dengan capaian kinerja 75% dan realisasi anggaran sebesar 84,76% dari anggaran APBD Perubahan. Hal ini karena kebijakan terhadap defisit anggaran.
- f) Kesimpulan Dan Saran
 - a. Kesimpulan

Secara keseluruhan pencapaian program sudah sangat baik, walau ada program yang tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran dan kebijakan pengurangan anggaran.

b. Saran

Agar OPD lebih mempertimbangkan target Renstra yang telah ditetapkan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan yang akan diusulkan.

18) DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan secara umum terdiri dari 26 Sub Kegiatan ,11 Kegiatan dan 3 Program yaitu:

- Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Program Pengelolaan Perkeretaapian

Secara umum capaian ralisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW 4 tahun 2023 Dinas Perhubungan adalah realisasi kinerja 96,15 % dan realisasi anggaran 95,32 % , anggaran APBD awal sebesar Rp. **8.904.142.565,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **9.389.941.021**, ada kenaikan anggaran pada APBD perubahan untuk penambahan gaji.

a) Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan yang realisasinya cukup tinggi (90-100 %) adalah:

Pada umumnya realisasi kinerja dan anggaran Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Perubungan sudah mencapai 90-100 %, dan masih ada beberapa kegiatan/Sub kegiatan yang realisasi kinerja atau anggaran yang masih kurang 90 % dan lebih dari 100 % .

b) Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan yang realisasinya rendah kurang dari 90 % adalah:

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi kinernya adalah 80 %, hal ini disebabkan karena besarnya biaya kontibusi diklat.
- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota sampai saat ini realisasi kinerjanya 75 % dan realisasi anggaran 89.32 %, hal ini disebabkan karena kegiatan ini anggarannya termasuk dalam anggaran pengurangan sehingga realisasi anggaran tidak dilanjutkan.
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisaio kinerjanya 75 %, rendahnya capaian sub kegiatan ini karena perlunya pengurangan anggaran.
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor realisasinya kinrjanya 75 % dan realisasi anggaran 81,97 %, rendahnya realisasi kinerja dan anggaran karena perlunya pengurangan anggaran dan sesuai kebutuhan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi kinerja 75 %, kegiatan ini anggarannya termasuk dalam anggaran pengurangan sehingga realisasi anggaran tidak dilanjutkan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi anggaran 83,50 %, kegiatan ini anggarannya termasuk dalam anggaran pengurangan sehingga realisasi anggaran tidak dilanjutkan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi kinerja 75,00 % dan realisasi anggaran 77,6%, rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena perlunya pengurangan anggaran.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi Kinerja 75 % dan realisasi anggaran 77,6 %, rendahnya

realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena perlunya pengurangan anggaran

- Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota realisasi kinerja 0,13 % dan realisasi anggaran 87,5 % hal ini disebabkan karena target di terlalun tinggi yaitu 771 dan realisasi hanya 1 unit.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) realisasi Kinerja 74,81 % dan realisasi anggaran 61,34 %, hal ini disebabkan karena perubahan indikator sub kegiatan.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) realisasi kinerja 61,34 % dan realisasi anggaran 74,81 %, hal ini disebabkan karena perlunya pengurangan anggaran.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pengelolaan Perkeretaapian realisas ikinerja dan realisasi anggaran 58,33 %, hal ini disebabkan karena sesuai kebutuhan.
- c) Realisasi kinerja anggaran sub kegiatan yang sangat tinggi Plebih dari 100 % adalah :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi Kinerja 130 %, tingginya realisasi kinerja Sub kegiatan ini adalah karena adanya penambahan kendaraan dinas.
 - Sub kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor realisasi kinerjanya adalah 120 %, tingginya rrealisasi sub kegiatan ini karena bertambah kendaraan yg melakukan uji karena adanya sisstem online.
 - Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota realisasinya 130 %, tingginya capaian

kinerja sub kegiatan ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota.

d) **KESIMPULAN**

Kesimpulan hasil Monev Tri Wulan 4 pada Dinas Perhubungan adalah :

Secara umum realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Perhubungan pada Monev Triwulan 4 sudah bagus hanya beberapa sub kegiatan yang masih dibawah 90 % dan diatas 100 % , hal ini karena baik target dan anggaran RKPD terlalu jauh selisihnya dengan APBD.

e) **SARAN**

Saran hasil monev Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto adalah :

- Sub kegiatan yang tidak terealisasi dan tidak mungkin teralisasi pada monev TW 3 Perlu dipertimbangkan untuk tidak dianggarkan pada perubahan anggaran agar tercapai target kinerja atau anggaran pada monev TW 4
- Target kinerja yang terlalu rendah atau terlalu tinggi perlu dirasionalkan pada RKPD perubahan.

-

19) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto pada Tahun 2023 melaksanakan 9 Program, 16 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan Anggaran APBD Perubahan Rp. 6.742.618.499,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV (Tw I-IV) sebesar Rp. 5.969.118.878,- (88,53%) dengan kategori tinggi.

a) Ada beberapa program yang realisasi kinerjanya = 100% antara lain adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (program yang dilaksanakan oleh Sekreariat) dengan realisasi anggarannya 91,71%.
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Program yang dilaksanakan oleh Bidang PTSP) dengan realisasi anggarannya 74,82%.

- b) Ada 3 program yang realisasi kinerjanya diatas 100% yaitu :
- Program Promosi Penanaman Modal (Program yang dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal) yaitu untuk indikator nilai investasi lokal 576,33%, dan nilai investasi nasional 398,90%. Dimana untuk program ini realisasi anggarannya = 57,04%.
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Program yang dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal) = 365% dengan realisasi anggarannya 99,62%.
 - Program Pelayanan Penanaman Modal (Program yang dilaksanakan oleh Bidang PTSP) = 150% dengan realisasi anggarannya 84,21%.
- c) Ada satu program yang realisasi kinerjanya sangat rendah (< 50%) yaitu : Program Hubungan Industrial (Program yang dilaksanakan oleh Bidang Tenaga Kerja) = 10% dengan realisasi anggarannya 77,17%. Ini perlu mendapat perhatian khusus untuk pelaksanaan kedepannya agar tujuan dari program bisa dicapai dengan baik.
- d) Ada beberapa sub kegiatan yang realisasi kinerjanya = 100% antara lain adalah :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggarannya 83,04%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggarannya 93,21%.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi anggarannya 90%.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggarannya 90,28%.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi anggarannya 59,17%.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi anggarannya 98,35%.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi anggarannya 24,21%.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi anggarannya 90,78%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggarannya 84,12%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi anggarannya 99,27%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi anggarannya 89,31%.
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan realisasi anggarannya 56,05%.
 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dengan realisasi anggarannya 51,49%.
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dengan realisasi anggarannya 69,06%.
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan realisasi anggarannya 92,24%.
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan realisasi anggarannya 99,62%.
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggarannya 57,04%.
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan realisasi anggarannya 74,36%.
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan realisasi anggarannya 74,82%.
- e) Ada beberapa Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 100% antara lain adalah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu 125% dengan realisasi anggarannya 84,75%.
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu 333,33% dengan realisasi anggarannya 4,21%.
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu 970,67% dengan realisasi anggarannya 89,52%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (267%) dengan realisasi anggarannya 94,30%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu 108,57% dengan realisasi anggarannya 93,16%.
- f) Ada beberapa Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya sangat rendah (< 50 %) antara lain yaitu :
- Perluasan Kesempatan Kerja yaitu 25% dengan realisasi anggarannya 90,60%.
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online yaitu 15% dengan realisasi anggarannya 52,11%.

Ini perlu perhatian khusus dalam pelaksanaan kedepannya agar tujuan dari sub kegiatannya bisa dicapai dengan baik.

- g) Kendala/Permasalahan pencapaian target kinerja secara umum adalah sebagai berikut :
- Kurang cermatnya OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (masih menggunakan pola lama yang hanya berfokus kepada anggaran saja, besarnya indikator kinerja diabaikan).
 - Beberapa sub kegiatan pelaksanaannya dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan sehingga realisasinya rendah.

h) Saran/Rekomendasi untuk perencanaan/pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya :

- Disarankan agar para PPTK kegiatan agar sebelum kegiatan dimulai sudah mempersiapkan administrasi kegiatan dengan baik dan lengkap, sehingga setelah kegiatan selesai administrasi pertanggungjawaban sudah bisa disampaikan pada bagian keuangan. Sehingga terwujud keselarasan antara tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian realisasi anggaran.
- Disarankan agar PPTK merencanakan output dan apa yang seharusnya dihasilkan, bagaimana tahapannya, sehingga dengan memperhatikan standar harga satuan barang/jasa, ditetapkan total anggaran yang dibutuhkan.
- Agar OPD meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak pihak.
- Agar para PPTK melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule dan rencana anggaran kas yang telah disusun.
- Serta disarankan agar PPTK menyusun “perencanaan” dengan pola “anggaran berbasis kinerja”, sehingga tidak ditemui lagi kondisi realisasi kinerja dan keuangan yang timpang/tidak berbanding lurus.

20) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan secara umum terdiri dari 33 Sub Kegiatan ,13 Kegiatan dan 4 Program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW IV tahun 2023 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan adalah : realisasi kinerja 100% dan

realisasi anggaran 93,67 % dengan anggaran APBD awal sebesar Rp. 3.498.935.200,- dan terealisasi s/d Desember 2023 sebesar Rp. 3.267.151.347,-

a) Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - o Pada umumnya pelaksanaan pekerjaan pada program ini telah mencapai 100% (kinerja). Dengan realisasi pemanfaatan anggaran pada angka 93,67%.
- Program Pembinaan Perpustakaan.
 - o Pelaksanaan kinerja pekerjaan telah mencapai 100% dengan realisasi pemanfaatan anggaran pada angka 96,50 %.
- Program Pengelolaan Arsip
 - o Kinerja pelaksanaan pekerjaan pada telah mencapai 100% dengan realisasi pencairan anggaran sebesar 99,65%.
- Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
 - o Pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 83.33% (kinerja) dan realisasi pemanfaatan anggaran pada angka 99,83%.

b) Kesimpulan

- Realisasi kinerja dan anggaran pada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN sampai dengan akhir Triwulan 4 2023 termasuk tinggi (kinerja 100% dan keuangan 93,67%).
- Kelebihan anggaran sebesar Rp. 231.783.853,- (4,7%) dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

c) Saran

Realisasi kinerja dan Pemanfaatan Anggaran tetap dipertahankan ditahun berikutnya.

21) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Kota Sawahlunto yang tercantum pada dokumen Anggaran Perubahan tahun 2023, dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. **6,431,265,977,- (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)**, untuk membiayai 48 sub kegiatan pada 12 kegiatan yang tersebar pada 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto. **Rata-rata capaian kinerja** sampai pada Triwulan IV (Desember) Tahun 2023 sebesar **91% dengan prediket “Sangat Tinggi”** dengan realisasi keuangan sebesar **81% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5,880,740,413,- (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah)** dengan prediket **“Tinggi”**

Berikut capaian kinerja lima program hasil pelaksanaan RKPD-Perubahan Kota Sawahlunto tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto sampai pada Triwulan IV.

a) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dilingkup Sekretariat (bulan) dan didukung oleh 6 kegiatan dengan 15 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 2,164,253,084,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah)** dan sudah terealisasi sampai TW IV (Desember 2023) sebesar **Rp. 2.005,584,729,- (Dua Milyar Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)** atau **94%**. Semua sub kegiatan sudah berjalan dengan **capaian kinerja rata-rata 90%**.

- **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan indicator Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis TIK, **target kinerja 95%**. Pencapaian indicator kinerja program didukung oleh 1 kegiatan dengan 10 Sub kegiatan, dengan alokasi anggaran **Rp. 1,337,310,523 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)**. Dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai triwulan IV, Anggaran telah terealisasi sebesar **Rp.883.886.171,- atau 66.09%**. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV tidak semua dapat terealisasi dikarenakan adanya Efisiensi Penganggaran, yaitu sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Kebijakan Publik, sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

- **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan indicator pencapaian kinerja Persentase Aplikasi Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota, dan dengan target 105 %. Alokasi anggaran **Rp. 2,051,366,250- (Dua Milyar Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)**. Realisasi Anggaran sampai dengan TW IV sebesar **Rp. 2,026,765,783,- (Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)** atau **95,38%**, dengan **tingkat capaian kinerja rata-rata 99%**. Berdasarkan hasil pemantauan, capaian kinerja pada program ini cukup tinggi.

b) **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program Penyelenggaraan Statistik sektoral, dengan indicator Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah, target 90%, didukung oleh 1 kegiatan dengan 5 sub kegiatan dan alokasi anggaran sebesar **Rp.**

77,279,125,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah). Capaian realisasi anggaran sampai dengan TW IV sebesar Rp. 46,040,040 atau 60%. Beberapa sub kegiatan pada program ini memang belum berjalan karena menunggu penetapan anggaran pada APBD Perubahan 2023, **namun pada Triwulan IV** tidak semua kegiatan dapat terealisasi dikarenakan adanya Edaran Walikota Sawahlunto perihal Efisiensi Penganggaran yaitu sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah, Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor.

c) **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

- **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Dengan indikator Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan), target 12 bulan, program ini pada RKPD Perubahan Kota Sawahlunto didukung dengan 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran **Rp. 32,214,050,- (Tiga puluh dua juta dua ratus empat belas ribu lima puluh rupiah).** Realisasi anggaran sampai dengan TW IV **Rp. 23,556,740 atau 73%,**-. Pada **Triwulan IV** tidak semua kegiatan dapat terealisasi dikarenakan adanya Edaran Walikota Sawahlunto perihal Efisiensi Penganggaran.

d) **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan pencapaian program dan kegiatan sudah baik dengan rata – rata realisasi kinerja sebesar **91% dengan prediket “ Sangat Tinggi”** dan realisasi keuangan sebesar Rp. **5,880,740,413,- atau 81,83% dengan prediket “Tinggi”**

B. Saran dan masukan

Untuk Monev selanjutnya agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional

Agar Program dan Kegiatan harus berorientasi pada sasaran yang hendak dicapai bukan pada ceremonial saja, maksudnya belanja yang dikeluarkan tidak berfokus pada belanja rutin tetapi output yang dicapai.

22) DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PEDAGANGAN

Koperindag secara umum terdiri dari 36 Sub Kegiatan, 20 Kegiatan dan 14 Program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan UMKM
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Secara umum capaian realisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW IV tahun 2023 dinas Koperindag adalah : realisasi kinerja 93 % dan realisasi anggaran 80 % dengan anggaran APBD sebesar Rp.

32.769.982.270,- dan terealisasi s/d Desember 2023 sebesar Rp. 26.104.797.405,-

a) Kesimpulan

- Realisasi Anggaran pada dinas Koperindag tidak tercapai 100% dikarenakan adanya surat edaran WAKO.
- Anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2023, ada beberapa Program pada dinas koperindag mengalami reconfusing
- Monev Dinas Koperindag Tahun 2023 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2025

b) Saran

- Agar Monev Tahun Selanjutnya agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional
- Agar Program dan Kegiatan harus berorientasi pada sasaran yang hendak dicapai bukan pada ceremonial saja, maksudnya Belanja yang dikeluarkan tidak berfokus pada belanja rutin tetapi output yang dicapai

23)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran secara umum terdiri dari 3 Program 9

Kegiatan 20 Sub kegiatan yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- a) Secara umum capaian ralisasi Kinerja dan anggaran Sub Kegiatan Monev TW IV tahun 2023 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah realisasi kinerja 95,20 % dan realisasi anggaran 91,80 % anggaran APBD awal sebesar Rp.7.811.199.082.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.135.024.-

- Program Pencegahan, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Realisasi anggaran APBD 95,12 %
 - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Realisasi anggaran APBD 71.90 %
 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Realisasi anggaran APBD 84.48%
- b) Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan yang realisasinya cukup tinggi (90-100 %) adalah:
- Pada umumnya realisasi kinerja dan anggaran Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Perubungan sudah mencapai 90-100 %, dan masih ada beberapa kegiatan/Sub kegiatan yang realisasi kinerja atau anggaran yang masih kurang 90 % dan lebih dari 100 % .
- c) Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan yang realisasinya rendah kurang dari 90 % adalah:
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggarannya 89,02 %, rendahnya capaian sub kegiatan ini karena perlunya pengurangan anggaran.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota realisasi kinerja 75,00 % dan realisasi anggaran 77,6%, rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah karena perlunya pengurangan anggaran.
 - Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa realisasi Kinerja 75 % dan realisasi anggaran 71,17 %, rendahnya realisasi anggaran Sub kegiatan ini adalah sesuai dengan kasus yang terjadi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang

Bernuansa Hak Asasi Manusia realisasi anggarannya 88,62 %, rendahnya realisasi anggaran ini karena perlunya pengurangan anggaran

- Sub Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran realisasi anggarannya 65,26 %, rendahnya capaian anggaran sub kegiatan ini adalah sesuai dengan kebutuhan
- Realisasi kinerja anggaran sub kegiatan yang sangat tinggi lebih dari 100 % adalah :
- Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota realisasi kinerjanya 279,17 %, tingginya realisasi kegiatan ini karena merupakan kegiatan baru pada anggaran perubahan
- Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota kinerjanya 106,67 %, hal ini sesuai dengan kasus kebakaran yang terjadi
- Sub kegiatan investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran realisasi kinerjanya 3.200 %, tingginya realisasi kinerja sub kegiatan ini karena perubahan indikator dari laporan menjadi dokumen

d) KESIMPULAN

Kesimpulan hasil Monev Tri Wulan 4 pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah :

- Secara umum realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran pada Monev Triwulan 4 sudah baik hanya beberapa sub kegiatan yang masih dibawah 90 % dan diatas 100 % , hal ini karena baik target dan anggaran RKPD terlalu jauh selisihnya dengan APBD.

e) SARAN

Saran hasil monev Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto adalah :

- Sub kegiatan yang tidak terealisasi dan tidak mungkin teralisasi pada monev TW 3 Perlu dipertimbangkan untuk tidak dianggarkan pada perubahan anggaran agar tercapai target kinerja atau anggaran pada monev TW 4
- Target kinerja yang terlalu rendah atau terlalu tinggi perlu dirasionalkan pada RKPD perubahan.

24)KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Rencana Kerja Kecamatan Silungkang yang termuat dalam RKPD 2023 Kota Sawahlunto terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 29 subkegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

Kecamatan **Lembah Segar**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Realisasi kinerja (100%), Realisasi Anggaran (92,76%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Publik Kinerja (100%) dan Realisasi Anggaran (94,11%)	tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kinerja (100%) dan Realisasi Anggaran (78,93%)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kinerja (100%) dan Realisasi Anggaran (68,44%)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pemerintahan Umum Kinerja (100%) dan Realisasi Anggaran (78,54%)	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kinerja (100%) dan Realisasi Anggaran (4543%)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- a) Dari program, kegiatan dan sub kegiatan diatas kegiatan yang tidak diakomodir dalam RKPD Perubahan Tahun 2023 yaitu:
- 1) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan
 - 2) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- b) Program dan kegiatan yang realisasinya masih rendah (dibawah 50%) dan sub kegiatan yang menjadi catatan:

- 1) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi anggaran baru sebanyak 23%, pemeliharaan yang direncanakan dilanjutkan di akhir tahun tidak dapat dilaksanakan karena kendala peraturan
 - 2) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi kinerja 25% dan realisasi anggaran 26%, pemeliharaan yang direncanakan dilanjutkan di akhir tahun tidak dapat dilaksanakan karena kendala peraturan
 - 3) Sub kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 39,38%. Penyerapan anggaran masih rendah karena terkendala peraturan baru tentang pencairan anggaran
 - 4) Sub kegiatan fasilitasi administrasi tata desa dan pemerintahan dengan capaian kinerja 20% dan realisasi anggaran sebesar 36%. Penyerapan anggaran masih rendah karena terkendala peraturan baru tentang pencairan anggaran.
- c) Kesimpulan
- Secara keseluruhan pencapaian program dan kegiatan Triwulan IV sudah baik dengan rata-rata realisasi kinerja 100% dan rata-rata realisasi anggaran menurut RKPD Perubahan sebesar 91,23% dan realisasi anggaran menurut APBD Perubahan sebesar 92,30%
 - Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dan target kinerja pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan

25)KECAMATAN BARANGIN

Rencana Kerja Kecamatan Barangin yang termuat dalam RKPD Perubahan 2023 Kota Sawahlunto terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 24 subkegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<p style="text-align: center;">Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Realisasi kinerja (100%), Realisasi Anggaran (92,31%)</p>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kinerja (100%) dan Realisasi Anggaran (96,15%)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja (100%) dan Realisasi Anggaran (71,81%)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kinerja (75%) dan Realisasi Anggaran (99,92%)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kinerja (100%) dan Realisasi Anggaran (98,48%)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kinerja (0%) dan Realisasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Anggaran (0%)		

a) **Dari program, kegiatan dan sub kegiatan diatas terdapat 1 sub kegiatan yang tidak diakomodir dalam APBD Perubahan Tahun 2023 yaitu:**

- 1) Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut
- 2) Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

b) **Program dan kegiatan yang realisasinya sangat rendah** (dibawah 50%) dan sub kegiatan yang menjadi catatan:

- 1) Sub kegiatan Evaluasi Kelurahan dengan realisasi kinerja dan anggaran masih 0%. Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan di tahun anggaran 2023 karena anggaran tidak proposional (anggran yang disediakan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut). Namun di RKPD Tahun 2024 telah dihilangkan dan kegiatannya dipadatkan ke sub kegiatan lain.

- 2) Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan realisasi kinerja dan anggaran masih 0%. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Bulan September, namun untuk realisasi anggaran tidak dapat dicairkan karena kendala peraturan.
- 3) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan realisasi kinerja dan anggaran masih 0%. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Bulan September, namun untuk realisasi anggaran tidak dapat dicairkan karena kendala peraturan

c) Kesimpulan

- Secara keseluruhan pencapaian program dan kegiatan sudah baik dengan rata-rata realisasi kinerja 100% dan rata-rata realisasi anggaran menurut RKPD Perubahan sebesar 90,57% dan realisasi anggaran menurut APBD Perubahan sebesar 99%
- Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dan target kinerja pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan

26)KECAMATAN SILUNGKANG

Dialokasikan anggaran pada Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebesar **Rp. 3,011,845,604,-** untuk membiayai 27 sub kegiatan dengan 11 kegiatan yang tersebar pada 6 program, dan capaian kinerja tahun 2023 kinerja sebesar **73%** dengan prediket “**Sedang**” dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2,138,330,473** atau **71%** dengan prediket “**Sedang**”. hal ini dikarenakan besarnya deviasi antara pagu anggaran RKPD perubahan dengan pagu APBD perubahan, dimana pagu APBD perubahan untuk kecamatan silungkang sebesar **Rp. 2,310,649,618,-** dengan 19 sub kegiatan, 9 kegiatan dan 4 Program, dengan Tingkat Capaian Kinerja **84%** dengan

prediket **“tinggi”** dan Realisasi APBD **93%** prediket **“sangat tinggi”** dengan rincian sebagai berikut:

a) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan) didukung dengan 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan pagu anggaran pada RPKP Perubahan sebesar **Rp. 2,787,645,404,-** dengan capaian kinerja **100%**, dan realisasi anggaran sebesar Rp. **2,074,509,359** atau **74%**. Capaian realisasi anggaran tidak optimal selain karena rasionalisasi anggaran pada APBDP juga dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang anggarannya tidak direalisasikan pada TW IV guna menindaklanjuti SE walikota terkait efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023 diantaranya Kegiatan:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi anggaran 75%, dan capaian kinerja 81%, capaian kinerja tidak optimal karena anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak terealisasi 100%, karena adanya penundaan pembayaran tunjangan ASN 1 bulan.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Realisasi Kinerja 100%, realisasi anggaran 35%, pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 82%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Kinerja 0%, Realisasi anggaran 0%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 51%

b) **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan dengan indikator kinerja persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik, program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan,

total anggaran RKPDP sebesar **Rp. 17,219,900**, dengan realisasi anggaran **Rp. 6,187,020** atau **36%**. Capaian kinerja tetap **100%**, karena penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public tetap dilaksana dengan baik.

Program ini selain mengalami rasionalisasi anggaran pada saat penetapan APBD perubahan, penggunaan anggarannya juga diefisiensikan pada TW IV, diantara kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 22%
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Realisasi Kinerja 100%, Realisasi anggaran 69 %

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif, program ini didukung dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total anggaran RKPDP Perubahan sebesar **Rp. 179,505,300,-**. Anggaran program ini juga dirasionalkan pada APBD perubahan menjadi **Rp. 59,541,894,-** sehingga jika dibandingkan dengan anggaran RKPDP, realisasi anggaran hanya sebesar **31% atau 55,955,294**, namun jika dibandingkan dengan anggaran APBD, realisasi anggaran **94%** dengan capaian kinerja sama-sama **100%**.

d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan indicator persentase terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik, capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran hanya 11 %, program ini didukung oleh 1 kegiatan, 3 sub kegiatan, dengan total anggaran pada RKPDP perubahan sebesar Rp. **15,510,000,-** namun dirasionalkan pada APBD perubahan menjadi **Rp. 5,578,800,-** . program ini mengalami efisiensi anggaran sesuai SE walikota, sehingga pada TW IV, anggaran tidak direalisasikan lagi.

e) Kesimpulan

- Secara keseluruhan pencapaian program dan kegiatan jika disandingkan dengan anggaran APBD perubahan sudah baik dengan rata-rata realisaasi

kinerja sebesar 84% dengan prediket “Tinggi” dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38,158,446,653 atau 93% dengan prediket “sangat tinggi”.

- Masih adanya target kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang tidak disesuaikan pada saat renja perubahan.
- Realisasi capaian anggaran yang belum optimal dikarena terbitnya surat edaran walikota terkait efisiensi penggunaan anggaran pada TW IV.

f) **Rekomendasi**

- Perangkat daerah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang capaian kinerja dan anggarannya masih rendah
- Perangkat Daerah memastikan kesesuaian antara program renja dengan renstra PD serta RPD
- Perangkat daerah agar lebih teliti dalam penetapan target kinerja dan penginputan target kinerja kedalam aplikasi SIPD
- Perangkat daerah agar lebih realistis dalam penetapan target kinerja dan anggaran sehingga tidak terjadi deviasi yang cukup besar antara RKPD dengan APBD

27)KECAMATAN TALAWI

Dialokasikan anggaran pada Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebesar **Rp. 3,674,781,283,-** untuk membiayai 28 sub kegiatan dengan 12 kegiatan yang tersebar pada 6 program, dan capaian kinerja tahun 2023 kinerja sebesar **92%** dengan prediket “**Sangat Tinggi**” dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2,264,302,546** dengan Tingkat Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah **62%** dengan prediket “**Rendah**”. hal ini dikarenakan besarnya deviasi antara pagu anggaran RKPD perubahan dengan pagu APBD perubahan, dimana pagu APBD perubahan untuk kecamatan Talawi sebesar **Rp. 2,433,768,926,-** dengan 22 sub kegiatan, 11 kegiatan dan 5 Program, dengan Tingkat Capaian Kinerja **92%** dengan prediket “**Sangat Tinggi**” dan Realisasi APBD **93%** prediket “**Sangat Tinggi**”.

Beberapa kegiatan realisasi anggarannya dibawah 90%, karena efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan surat edaran PJ walikota terkait efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023, diantaranya kegiatan :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Realisasi 76%)
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (68%)
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (85%)
4. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (50%)
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (60%)
6. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (0%)

Dari 6 program yang direncanakan pada saat RKPD perubahan, ada 1 program yang anggarannya di **Nol** kan saat penetapan APBD karena keterbatasan anggaran, yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indicator program Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%), kegiatannya berupa Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, peringatan hari-hari besar Nasional serta kegiatan Porkot.

a) Kesimpulan

- Secara keseluruhan pencapaian program dan kegiatan jika disandingkan dengan anggaran APBD perubahan sudah baik dengan rata-rata realisaasi kinerja sebesar 92% dengan prediket “ Sangat Tinggi” dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,433,768,926 atau 92% dengan prediket “sangat tinggi”.
- Masih adanya target kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang tidak disesuaikan pada saat renja perubahan.
- Realisasi capaian anggaran yang belum optimal dikarena terbitnya surat

edaran walikota terkait efisiensi penggunaan anggaran pada TW IV.

b) Rekomendasi

- Perangkat daerah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang capaian kinerja dan anggarannya masih rendah
- Perangkat Daerah memastikan kesesuaian antara program renja dengan renstra PD serta RPD
- Perangkat daerah agar lebih teliti dalam penetapan target kinerja dan penginputan target kinerja kedalam aplikasi SIPD

Perangkat daerah agar lebih realistis dalam penetapan target kinerja dan anggaran sehingga tidak terjadi deviasi yang cukup besar antara RKPD dengan APDB

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maksud dilaksanakannya Tugas Pembantuan ini adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dan atau pemerintahan provinsi dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2023 ini, Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh beberapa OPD, yakni :

- A. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
 - B. Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto
 - C. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sawahlunto
- Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dapat dilihat dari penjabaran berikut:

A. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- 1.2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187) dan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :882/3.4/OT.01/11/2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima

Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin 2 Tahun 2021

- 1.3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023.
- 1.4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

2.1. Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp. 5.235.071.676,-.

2.2. Program Kewirausahaan

Program Kewirausahaan Sosial adalah program kewirausahaan bagi keluarga miskin dan rentan yang mengkombinasikan kegiatan bisnis untuk mencegah dan mengatasi resiko sosial dan masalah sosial. Dalam program ini, adapun bantuan yang diberikan berupa modal usaha seperti gerobak, ternak, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan individu dengan cakupan sasaran yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti wanita rawan sosial ekonomi, disabilitas, fakir miskin, dan lain sebagainya.

2.3. Program Alat Bantu Untuk Disabilitas

Program ini bertujuan untuk memberikan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan individu, seperti kursi roda, tongkat, serta alat bantu lainnya yang dapat meringankan keterbatasan serta mobilitas penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI tahun 2023 dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 19 orang.

2.4. Program Permakanan Untuk Lansia dan Disabilitas

Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) yang menargetkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lansia serta penyandang disabilitas dengan permakanan. Bantuan yang diberikan Kementerian Sosial RI berupa sembako untuk 22 penyandang disabilitas dan 18 Lansia.

2.5. Program Sembako

Program sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bantuan pangan. Sebelumnya program ini bertransformasi berulang kali dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang diberikan total sebesar Rp. 3.446.400.000,-

2.6. Bantuan Langsung Tunai El Nino

Bantuan Langsung Tunai El Nino merupakan upaya pemerintah membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga akibat krisis iklim. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak fenomena El Nino. Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 571.200.000,-

2.7. Dana Desa.

Program Dana Desa salah satu upaya pemerintah dalam untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan peningkatan pendapatan asli Desa. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp. 22.432.440.155,-.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

3.1. Tugas Pembantuan dari Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

3.1.1. Program Keluarga Harapan (PKH).

3.1.1.1. Target Kinerja

- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran Program PKH adalah sebanyak 1.669 individu.
- Dana yang disediakan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp. 5.235.071.676,-

3.1.1.2. Realiasi

- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh Program PKH adalah sebanyak 1.669 individu.
- Realisasi anggaran yang diserap untuk Program PKH adalah sebesar Rp. . 5.235.071.676,-

3.1.2. Bantuan Kewirausahaan

3.1.2.1. Target Kinerja

- Jumlah PPKS yang menjadi sasaran sebanyak 89 orang.
- Bantuan yang disediakan berupa modal usaha.

3.1.2.2. Realisasi

- Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sebanyak 89 orang.
- Bantuan yang diberikan berupa modal usaha seperti gerobak, mesin jahit, bantuan ternak, usaha laundry, dan lain sebagainya dengan rincian:

Jenis Usaha	Jumlah
Pengembangan usaha warung	40
Bengkel/Pertukangan	5
Usaha Laundry	2
Usaha Jahit/Obras	5
Usaha Tenun / Songket	4

Jenis Usaha	Jumlah
Usaha Ternak ayam/kambing/ikan	22
Usaha produksi kerupuk	11
Total	89

3.1.3. Bantuan Alat Bantu Untuk Disabilitas

3.1.3.1. Target Kinerja

- Jumlah penyandang Disabilitas yang menjadi sasaran sebanyak 19 orang.
- Bantuan yang disediakan berupa alat bantu disabilitas

3.1.3.2. Realisasi

- Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sebanyak 19 orang.
- Bantuan yang diberikan berupa 8 unit kursi roda, 8 unit alat bantu dengar serta 3 unit tongkat kaki 3.

3.1.4. Bantuan Permakanan Untuk Lansia dan Disabilitas

3.1.4.1. Target Kinerja

- Jumlah penyandang Disabilitas yang menjadi sasaran sebanyak 22 orang dan lansia sebanyak 18 orang.
- Bantuan yang disediakan berupa sembako.

3.1.4.2. Realisasi

- Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sebanyak 22 orang dan lansia sebanyak 18 orang.
- Bantuan yang diberikan berupa sembako untuk 22 disabilitas dan 18 lansia.

3.1.5. Program Sembako

3.1.5.1. Target Kinerja

- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi sasaran sebanyak 1.436 KPM.
- Bantuan yang disediakan sebesar Rp. 3.446.400.000,-.

3.1.5.2. Realisasi

- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh bantuan sebanyak 1.436 KPM.
- Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 3.446.400.000,-.

3.1.6. Bantuan Langsung Tunai El Nino

3.1.6.1. Target Kinerja

- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi sasaran sebanyak 1.428 KPM.
- Bantuan yang disediakan sebesar Rp. 571.200.000,-.

3.1.6.2. Realisasi

- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh bantuan sebanyak 1.428 KPM.
- Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 571.200.000,-.

3.1.7. Dana Desa

3.1.7.1. Target Kinerja

- Jumlah Desa yang mendapat alokasi dana Desa dari Kemendes PDTT RI adalah sebanyak 27 Desa se Kota Sawahlunto.
- Dana yang disediakan oleh Pemerintah adalah sebesar sebesar Rp. 22.432.440.155,-

3.1.7.2. Realisasi

- Jumlah Desa yang mendapat alokasi dana Desa dari Kemendes PDTT RI adalah sebanyak 27 Desa se Kota Sawahlunto.
- Realisasi anggaran yang digunakan untuk Pembangunan Desa adalah sebesar Rp. 19.967.544.854,- atau 89,01% dari anggaran yang disediakan Pemerintah.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto

No	K/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Organisasi Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Sosial RI	1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).	1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. <i>Keluaran</i> : Tersalurkan nya bantuan sosial kepada keluarga miskin yang rentan yang terdaftar dalam DTKS 3. <i>Rincian Kegiatan</i> : Bantuan Sosial PKH adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan.	Kota Sawahlunto	Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto	5.235.071.676,-	5.235.071.676,-	100	Terbantunya 1669 KPM yang mendapat Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran 4 tahap dalam setahun, dengan komponen Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan Sosial.	100	

No	K/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Organisasi Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Kementerian Sosial RI.	1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako	Program Sembako	Kota Sawahlunto	Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto	3.446.400.000,-	3.446.400.000,-	100	Terbantunya 1.436 KK yang mendapat bantuan selama 12 bulan.	100	
3	Kementerian Sosial RI	-	Bantuan Langsung Tunai El Nino	Sawahlunto	Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto	571.200.000,-	571.200.000,-	100	Terbantunya 1.428 KK yang mendapat bantuan selama 2 bulan (November-Desember)	100	
4	Kementerian Sosial RI	-	Program Kewirausahaan	Sawahlunto	Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto	-	-	-	Terbantunya 89 KK dengan bantuan yang diberikan berupa modal usaha sesuai dengan kebutuhan individu	100	
5	Kementerian Sosial RI	-	Program Alat Bantu	Sawahlunto	Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto	-	-	-	Terbantunya 19 penyandang disabilitas dengan pemberian alat bantu yang sesuai	100	

No	K/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Organisasi Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									dengan kebutuhan yang dapat meringankan keterbatasan serta mobilitas penyandang disabilitas		
6	Kementerian Sosial RI	-	Program Permakanan Lansia dan Disabilitas	Kota Sawahlunto	Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto	-	-	-	Terbantunya 22 penyandang disabilitas dan 18 lansia dengan pemberian bantuan permakanan berupa sembako	100	
7	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi RI	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023	1. Program Dana Desa 2. Kegiatan : Dana Desa tersebut digunakan pada kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tentang	27 Desa se-Kota Sawahlunto	Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto	22.432.440.155,-	19.967.544.854,-	89,1	Terlaksananya pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat pada 27 Desa	100	

No	K/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Organisasi Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Proritas Penggunaan Dana Desa 3. <i>Keluaran</i> : Terlaksananya pembangunan fisik dan sarana prasarana Desa 4. <i>Rincian Kegiatan</i> : Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat pada 27 Desa.								

3.3. Permasalahan dan Kendala

- 3.2.1. Data Penerima Bantuan Sosial PKH dan Program Sembako masih ada yang belum update, karena ada Keluarga Penerima Manfaat yang sudah mengalami peningkatan menjadi keluarga yang sejahtera. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 3.2.2. Calon penerima bantuan sosial PKH sudah tidak ada komponen PKH seperti komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data di E-PKH dan membuat kategori Non Eligible.
- 3.2.3. Tidak ada data bayar bagi penerima Program Sembako dan BLT El Nino sehingga Dinas terkait tidak bisa memantau serta memonitoring penyaluran bantuan sosial.
- 3.2.4. Masih kurangnya kualitas dan kompetensi aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan desa, upaya yang dilaksanakan adalah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara Pengeluaran Desa.
- 3.2.5. Masih adanya perbedaan persepsi mengenai kewenangan Pemerintah Desa dan kewenangan Pemerintahan di tingkat Kota dalam hal pembangunan sarana fisik desa/ jalan Desa serta pembangunan non fisik. Upaya yang dilaksanakan adalah meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Desa.
- 3.2.6. Masih adanya masyarakat yang kurang sepakat dalam pembangunan fisik dan non fisik, sehingga rencana pembangunan desa yang sebelumnya sudah final mengalami kegagalan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan musyawarah kembali mengenai rencana pembangunan desa.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

- 3.4.1. Untuk mengecek adanya peningkatan keluarga menjadi lebih sejahtera, upaya tindak lanjut adalah melakukan pembaruan/ pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial PKH setiap bulan dan memadukan dengan data yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 3.4.2. Untuk mengecek komponen eligible pada keluarga penerima bantuan Program PKH, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data di E-PKH dan membuat kategori Non Eligible.
- 3.4.3. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan desa, upaya yang dilaksanakan adalah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi bagi Bendahara Pengeluaran Desa.
- 3.4.4. Untuk menyamakan persepsi mengenai kewenangan Pemerintah Desa dan kewenangan Pemerintahan di tingkat Kota dalam hal pembangunan sarana fisik desa/ jalan Desa serta pembangunan non fisik, maka upaya yang dilaksanakan adalah meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Desa.
- 3.4.5. Untuk meningkatkan partisipasi dan konsistensi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik, upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan musyawarah secara berjenjang mulai dari musyawarah dusun, musayawarah desa dan musyawarah tingkat kecamatan.

B. Dinas Pendidikan

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan

Ketentuan peraturan perundang - undangan yang mendasari Tugas Pembantuan bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1.1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 1.3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 1.6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- 1.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

- 1.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
- 1.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- 1.10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 1.11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
- 1.12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 160/P/2021 tentang Daftar Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis;
- 1.13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 8040/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

- 1.14.** Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 0298/c2/Ku.03.00/2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Penerima Dana Bantuan Penjaminan Mutu Tahap I tahun Anggaran 2021.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Perbantuan pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

2.1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan langkah utama dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan SDM masyarakat adalah melalui jaminan keberlanjutan pendidikan masyarakat.

Dalam konteks menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak usia 7- 15 tahun dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, maka Pemerintah menyediakan beasiswa melalui **Program Indonesia Pintar (PIP)**.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Tujuan PIP adalah :

- Membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus

SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

- Mencegah peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu terkena kemungkinan putus sekolah.
- Menarik siswa putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikannya.
- Meringankan biaya pendidikan setiap peserta didik.

Besaran dana bantuan PIP adalah :

- Siswa/siswi jenjang SD/MI/Paket A: Rp450.000/tahun
- Siswa/siswi SMP/MTs/Paket B: Rp750.000/tahun

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

3.1.1. Program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2023

3.1.1.1. Target Kinerja

- Terlaksananya kegiatan pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar untuk 1.397 orang siswa SD dan 808 orang siswa SMP di Kota Sawahlunto.

3.1.1.2. Realisasi

- Dana yang diserahkan oleh Kementerian Pendidikan kepada siswa yang berhak menerima PIP di Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. 549.375.000,- (Lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (tingkat SMP) dan Rp. 540.000.000 (Lima ratus empat puluh juta rupiah,-) (tingkat SD).

Tabel 2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan		Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan			Lokasi	OPD Pelaksana TP	Anggaran (Rp)		(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
									Alokasi	Realisasi				
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);		Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Program Indonesia Pintar Output : Beasiswa untuk : 1.397 orang siswa SD/MI dan 808 siswa SMP/MTs Rincian kegiatan : Pemberian beasiswa untuk 1.397 orang siswa SD/MI dan 808 siswa SMP/MTs		Kota Sawahlunto	Dinas Pendidikan		540.000.000 549.375.000	100	Terlaksananya kegiatan pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar (SD dan SMP)	100	

3.2. Permasalahan dan Kendala

Secara umum Program Pengelolaan Pendidikan (PIP) Tahun 2023 tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Karena bantuan beasiswa ini langsung diserahkan ke rekening siswa.

3.3. Saran dan tindak lanjut

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, perlu pembiayaan oleh Pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh masyarakat. Bagi masyarakat kurang mampu, pembiayaan diambilalih oleh beasiswa PIP. Dengan kondisi perekonomian saat ini, disarankan besaran nilai PIP untuk tahun berikutnya diperbesar dan volume pemberian juga ditambah.

C. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sawahlunto dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Perbantuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto

Tugas pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto anggaran bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Barat.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. APBD Propinsi

- Bantuan Bibit tanaman Pinang dan Bibit Pala
- Benih Ikan untuk Kelompok Masyarakat, yang terdiri dari ikan Garing 3 paket, ikan Nila 75.000 ekor beserta pakannya 2.460 kg

untuk 8 Kelompok. Masing-masing Pokdakan menerima benih ikan nila 9.375 ekor dan Pakan 300 kg.

- Induk ikan untuk Unit Pebenihan Rakyat sebanyak 2 Paket dimana di paket mendapat ikan jantan 25 kg, ikan betina 25 kg dan Pakan 200 kg.
- Sarana dan Prasarana Perikanan terdiri dari 2 paket terdiri dari kamera, teropong malam, teropong siang, HT Rojer, Senter, GPS, Rompi dan Plang nama, diterima oleh Pokmaswas Bersama (Talawi Hilir) 1 paket dan Pokmaswas Perikanan Tapian Data (kolok Nan Tuo)
- Bantuan Pakan dan Bibit Ayam untuk 13 kelompok dimana masing-masing kelompok mendapat 500 ekor, Pakan 3550 kg dan obat 1 Paket.
- Bantuan Pakan dan Bibit Puyuh 1 kelompok terdiri dari bibit puyuh 10.000 ekor, Pakan 10.000 kg dan 1 paket obat.
- Bantuan Kambing terdiri dari 2 kelompok sebanyak 22 ekor (5 jantan dan 17 betina) dan vitamin dengan obat-obatan 1 paket.

2. APBN

- Bantuan Kambing dan Bibit Rumput terdiri dari 3 kelompok sebanyak 25 ekor (23 ekor betina dan 2 jantan dan bibit rumput masing-masing 1 Paket .
- Pekarangan Hortikultura Lestari (P2L) APBN Dirjen Hortikultura Kementan sebanyak Rp 200.000.000 untuk 4 Kelompok Wanita Tani (KWT).
- Pengembangan Kawasan MANGgis seluas 30 Ha, untuk 17 Kelompok tani di Desa Kubang Utara Sikabu, Kubang Tengah dan Pasar Kubang.
- Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 500 ha (12,50 ton)
- Bantuan ALSINTAN terdiri dari :
 - Pompa Air 3 PK sebanyak 4 unit
 - Cultivator ISOKU sebanak 4 unit
 - Hand Sprayer Elektrik sebanyak 5 unit
 - TR3 Rotray Yanmar sebanyak 3 unit
 - TR 2 Impala sebanyak 6 unit
 - Kendaraan Roda Tiga sebanyak 2 unit

4. Permasalahan dan Kendala

Untuk bantuan masyarakat berupa Bibit tanaman, terkendala karena tahapan pendistribusian hingga bibit sampai ke masyarakat, yang terkadang memakan waktu sehingga terjadi penurunan kualitas bibit yang diterima.

5. Saran dan tindak lanjut

Upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari permasalahan dan kendala yang ada adalah dengan mengedukasi juga perangkat desa, agar pada saat menerima bibit sebelum diserahkan pada masyarakat, disiram dan dirawat terlebih dahulu, untuk memastikan bibit tidak menurun kualitasnya, dan setelah menerima bibit, masyarakat diminta langsung untuk menanamnya pada lahan masing-masing.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan meliputi :

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Kesetaraan;

Adapun penerima pelayanan dasar SPM pada pendidikan anak usia dini peserta didik yang berusia 5 sampai 6 tahun, pendidikan dasar adalah peserta didik yang berusia 7 sampai 15 tahun dan pendidikan kesetaraan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan kondisi terkini penerapan SPM kota Sawahlunto, visi dan misi ke 3 Walikota Sawahlunto yaitu Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan SDM yang ber Iman, Kreatif dan Berdaya Saing, maka pada tahun anggaran 2023 Kota Sawahlunto masih terus berupa meningkatkan capaian SPM Pendidikan.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan yang harus dilaporkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang sekaligus sebagai bagian dari penilaian kinerja perangkat daerah (pasal 18 PP Nomor 2 Tahun 2018). Diharapkan laporan penerapan SPM Pendidikan tahun anggaran 2022 ini dapat menjadi acuan dalam rangka mengetahui capaian kinerja pembangunan, khususnya bidang pendidikan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022, ditetapkan target dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target SPM Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN YANG HARUS DILAYANI	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	129 orang	1 tahun
2.	Pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	817 orang	1 tahun
3.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	215 orang	1 tahun

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pasal 7, dinyatakan bahwa mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dasar perhitungan SPM Pendidikan PAUD adalah jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Mutu pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 4.2
Target Jumlah Mutu Bidang PAUD

NO	JUMLAH MUTU BARANG/JASA/SDM	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN (TARGET)	TAHUN CAPAIAN
1	Angka Partisipasi Sekolah	86	2023
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	30	2023
3	Pertumbuhan Pendidik PAUD di S1/DIV	82	2023
4	Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	2	2023
5	Kecukupan Formasi Guru ASN	35	2023
6	Indeks Distribusi Guru	0,8	2023
7	Proporsi PTK bersertifikat	75	2023
8	Proporsi PTK Penggerak	30	2023
9	Pengalaman Pelatihan Guru	100	2023

2. Pendidikan Dasar

Dasar perhitungan SPM Pendidikan Dasar adalah jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar. Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Target Jumlah Mutu Bidang Pendidikan Dasar

NO	JUMLAH MUTU BARANG/JASA/SDM	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN (TARGET)	TAHUN CAPAIAN
SD (Sekolah Dasar)			
1	Angka Partisipasi Kasar	100	2023
2	Angka Partisipasi Sekolah	100	2023
3	Angka Partisipasi Murni	97	2023
4	Kemampuan Literasi	65.50	2023
5	Kemampuan Numerasi	47.14	2023
6	Perbedaan Skor Literasi	5	2023
7	Perbedaan Skor Numerasi	3	2023
8	Indeks Iklim Keamanan	77.03	2023
9	Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	74.15	2023
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	1	2023
11	Indeks Distribusi Guru	1	2023
12	Proporsi PTK Bersertifikat	96	2023
13	Proporsi PTK Penggerak	15	2023
14	Pengalaman Pelatihan Guru	80	2023
SMP (Sekolah Menengah Pertama)			
1	Angka Partisipasi Kasar	100	2023
2	Angka Partisipasi Sekolah	100	2023
3	Angka Partisipasi Murni	80	2023
4	Kemampuan Literasi	73.53	2023
5	Kemampuan Numerasi	72.87	2023
6	Perbedaan Skor Literasi	5	2023
7	Perbedaan Skor Numerasi	5	2023
8	Indeks Iklim Keamanan	74.79	2023

9	Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	71.49	2023
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	70	2023
11	Indeks Distribusi Guru	1	2023
12	Proporsi PTK Bersertifikatt	75	2023
13	Proporsi PTK Penggerak	14	2023
14	Pengalaman Pelatihan Guru	65	2023

3. Pendidikan Kesetaraan

Dasar perhitungan SPM Pendidikan Kesetaraan adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan. Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Target Jumlah Mutu Bidang Pendidikan Kesetaraan

NO	JUMLAH MUTU BARANG/JASA/SDM	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN (TARGET)	TAHUN CAPAIAN
1	Angka Partisipasi Kasar	13.50	2023
2	Angka Partisipasi Sekolah	80	2023
3	Angka Partisipasi Murni	40.10	2023
4	Kemampuan Literasi	67	2023
5	Kemampuan Numerasi	65	2023
6	Perbedaan Skor Literasi	7	2023
7	Perbedaan Skor Numerasi	4	2023
8	Indeks Iklim Keamanan	64.55	2023
9	Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	66	2023
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	100	2023
11	Indeks Distribusi Guru	1	2023

12	Proporsi PTK Bersertifikatt	100	2023
13	Proporsi PTK Penggerak	0	2023
14	Pengalaman Pelatihan Guru	100	2023

4.1.3 Realisasi Capaian SPM Daerah

Realisasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan tahun 2023 sudah mencapai 100% hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Realisasi SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	129	129	100 %
2.	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	817	817	100 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	215	215	100 %

		dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
--	--	---	--	--	--

Jika diperhatikan secara angka-angka realisasi capaian SPM bidang pendidikan tahun 2023 sudah mencapai 100%, Secara rinci pencapaian target SPM bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Capaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini.

Secara keseluruhan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Sawahlunto terdiri dari 9 (Sembilan) mutu minimal layanan dasar, capaian indicator terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Realisasi Jumlah Mutu Bidang PAUD

No	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Jumlah Mutu Yang Terlayani (Realisasi)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	% Capaian
1	Angka Partisipasi Sekolah	86	84.65	1.35	98.43
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	30	30	0	100.00
3	Pertumbuhan Pendidik PAUD di S1/DIV	82	82	0	100.00
4	Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	2	2	0	100.00
5	Kecukupan Formasi	35	35	0	100.00

	Guru ASN				
6	Indeks Distribusi Guru	0.8	0.7	0.1	87.5
7	Proporsi PTK bersertifikat	75	75	0	100.00
8	Proporsi PTK Penggerak	30	20	0	100.00
9	Pengalaman Pelatihan Guru	100	100	0	100.00

b. Capaian target SPM Pendidikan Dasar

Pelayanan Pendidikan Dasar Kota Sawahlunto terdiri dari 14 (empat belas) indikator. Capaian Mutu SPM Pendidikan Dasar dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.7
Realisasi Jumlah Mutu Bidang Pendidikan Dasar

No	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Jumlah Mutu Yang Terlayani (Realisasi)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	% Capaian
SD (Sekolah Dasar)					
1	Angka Partisipasi Kasar	100	104.72	-4.72	100.00
2	Angka Partisipasi Sekolah	100	99.03	0.97	99.03
3	Angka Partisipasi Murni	97	96.95	0.0499	99.95
4	Kemampuan Literasi	65.50	83.87	-18.37	100.00
5	Kemampuan Numerasi	47.14	68.8	-21.66	100.00
6	Perbedaan Skor Literasi	5	2.53	2.47	50.60
7	Perbedaan Skor Numerasi	3	1.21	1.79	40.33

8	Indeks Iklim Keamanan	77.03	73.49	3.54	95.40
9	Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	74.15	71.66	2.49	96.64
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	1	5	-4	100.00
11	Indeks Distribusi Guru	1	0.93	0.07	93.00
12	Proporsi PTK Bersertifikat	96	94.6	1.4	98.54
13	Proporsi PTK Penggerak	15	36	-2.1	100.00
14	Pengalaman Pelatihan Guru	80	78.3	1.7	97.88
SMP (Sekolah Menengah Pertama)					
1	Angka Partisipasi Kasar	100	105.85	-5.85	100.00
2	Angka Partisipasi Sekolah	100	98.05	1.95	98.05
3	Angka Partisipasi Murni	80	83.57	-3.57	100.00
4	Kemampuan Literasi	73.53	80.10	-6.57	100.00
5	Kemampuan Numerasi	72.87	57.52	15.35	78.94
6	Perbedaan Skor Literasi	5	5.19	-0.19	100.00
7	Perbedaan Skor Numerasi	5	1.94	3.06	38.80
8	Indeks Iklim Keamanan	74.79	71.45	3.34	95.53
9	Indeks Iklim	71.49	69.28	2.21	96.91

	Kebinekaan dan Inklusivitas				
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	70	50	20	71.43
11	Indeks Distribusi Guru	1	0.39	0.61	39.00
12	Proporsi PTK Bersertifikat	75	90.9	-15.9	100.00
13	Proporsi PTK Penggerak	14	18	-4	100.00
14	Pengalaman Pelatihan Guru	65	63.7	1.3	98.00

c. Capaian target SPM Pendidikan Kesetaraan

Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Kota sawahlunto terdiri dari 14 (empat belas) indikator. Capaian Mutu SPM Pendidikan Kesetaraan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.8
Realisasi Jumlah Mutu Bidang Pendidikan Kesetaraan

No	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Jumlah Mutu Yang Terlayani (Realisasi)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	% Capaian
1	Angka Partisipasi Kasar	13.50	12.7	0.8	94.07
2	Angka Partisipasi Sekolah	80	77.64	2.36	97.05
3	Angka Partisipasi Murni	40.10	38.13	1.97	95.09
4	Kemampuan Literasi	67	66.67	0.33	99.51
5	Kemampuan	65	50	15	76.92

	Numerasi				
6	Perbedaan Skor Literasi	7	6.26	0.74	89.94
7	Perbedaan Skor Numerasi	4	3.68	0.32	92.00
8	Indeks Iklim Keamanan	64.55	64.19	0.36	99.44
9	Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	66	65.61	0.39	99.41
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	100	100	100	100.00
11	Indeks Distribusi Guru	1	0.81	0.19	81.00
12	Proporsi PTK Bersertifikat	100	100	100	100.00
13	Proporsi PTK Penggerak	0	0	0	00.00
14	Pengalaman Pelatihan Guru	100	100	100	100.00

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

Target SPM Bidang Pendidikan yang telah dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto selama Tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Alokasi Anggaran SPM Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Total Serapan (%)	Ket
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	1 Pengadaan . Perlengkapan 1 Siswa PAUD	Rp.199.700.000	Rp. 199.699.800	100%	APBD
	1 Pengadaan . Perlengkapan 2 PAUD	Rp.204.630.700	Rp. 195.119.000	95%	APBD
	1 Penyediaan . Pendidik dan 3 Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp.463.885.400	Rp. 462.295.591	100%	APBD
	1 Penyelenggaraa . n Proses Belajar 4 PAUD	Rp.50.715.750	Rp. 50.210.750	99%	APBD
	1 Pengembangan . Karir Pendidik 5 dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp.469.044.650	Rp. 407.809.100	87%	APBD
	1 Pengelolaan . Dana BOP 6 PAUD	Rp.1.205.400.000	Rp. 1.142.100.000	95%	APBN
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah				
	2.1.1 Pengadaan . Perlengkapan Siswa SD	Rp.694.999.800	Rp. 693.684.630	100%	APBN
	2.1.2 Pengadaan . Perlengkapan SMP	Rp.109.999.880	Rp. 108.373.000	99%	APBN

	2.1.3 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp.1.491.318.680	Rp.1.362.451.868	91%	APBN
	2.1.4 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp.1.976.390.384	Rp. 1.877.084.462	95%	APBN
	2.1.5 Pengadaan mebel sekolah SD	Rp.269.242.710	Rp. 259.540.200	96%	APBN
	2.1.6 Pengadaan mebel sekolah SMP	Rp.363.359.700	Rp. 350.010.200	96%	APBN
	2.1.7 Pengembangan karir Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan SD	Rp.111.752..100	Rp. 91.394.100	82%	APBN
	2.1.8 Pengembangan karir Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan SMP	Rp.71.730.600	Rp. 56.079.000	78%	APBN
	2.1.9 Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar	Rp.526.297.900	Rp. 499.918.110	95%	APBN
	2.1.1 Pembinaan Minat dan Bakat	Rp.219.208.900	Rp. 197.901.900	90%	APBN

	Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar				
3.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
	3.1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/K esetaraan	Rp.81.900.000	Rp. 81.900.000	100%	APBD
	3.2 Pengadaan Perlengkapan Nonformal/kes etaraan	Rp.27.183.240	Rp. 23.413.500	85%	APBD
	3.3 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/K esetaraan	Rp.24.137.500	Rp. 23.837.500	99%	APBD
	3.4 Penyelenggar aan Proses Belajar Nonformal/kes etaraan	Rp.198.780.188	Rp. 153.202.576	77%	APBN / APBD
	3.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/K esetaraan	Rp.81.070.360	Rp. 74.466.050	92%	APBD
	3.6 Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/k esetaraan	Rp.222.300.000	Rp. 194.700.000	88%	APBN / APBD

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dinas Pendidikan Kota Sawahlunto didukung oleh 1.198 personil yang tersebar diseluruh satuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10
Dukungan Personil Penerapan SPM Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL		
		PNS	NON PNS	TOTAL
1	Dinas Pendidikan	39	34	73
2	Pengawas	10	-	10
3	TK	35	94	129
4	RA	6	40	46
5	SD	380	176	556
6	MI	32	22	54
7	SMP	187	74	261
8	MTs	30	29	59
6	SKB	6	4	10
	Jumlah	725	473	1.198

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penuntasan SPM Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto adalah antara lain:

- Masih kurangnya motivasi dari warga belajar dalam mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai alasan.
- Terjadinya pengurangan anggaran yang menyebabkan adanya keterbatasan dalam proses penerapan pelayanan maksimal

b. Solusi

Adapun rekomendasi dalam penuntasan SPM Bidang Pendidikan ini di Kota Sawahlunto adalah :

- Satuan Pendidikan selalu memotivasi Warga belajar melalui orang tuanya dan mendatangi rumah mereka agar tetap mengikuti PBM sampai mendapatkan Ijazah sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- Perlunya perhatian khusus pada Unit OPD pengampu standar pelayanan maksimal dalam pengurangan anggaran agar tercapainya pelayanan yang lebih maksimal.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Permenkes No 4 Tahun 2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, setelah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ini dilatarbelakangi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pemerintah Kota Sawahlunto perlu menerapkan SPM Bidang Kesehatan, karena kesehatan

adalah hak azasi manusia yang harus dipenuhi agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan modal ketangguhan suatu bangsa. Keterlibatan seluruh komponen bangsa, mencakup pemerintah, swasta, dan masyarakat dibutuhkan baik di pusat maupun daerah. Dengan menerapkan SPM Bidang Kesehatan maka masyarakat terpenuhi kebutuhan kesehatannya, masyarakat diedukasi supaya pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan meningkat sehingga dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan sendiri, masyarakat dapat berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Sesuai Standar pelayanan Antenatal	Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan layanan	Sesuai standar pelayanan	Bayi Baru Lahir

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
		kesehatan sesuai standar	bayi baru lahir	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Sesuai standar skrining kesehatan usia penduduk n dasar	Anak Usia 7-15 Tahun
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga negara Indonesia usia 15-59 Tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga negara Indonesia usia 60 Tahun keatas
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Sesuai standar pelayanan kesehatan hipertensi	Penderita Hipertensi
9	Pelayanan	Jumlah Penderita	Sesuai	Penderita

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
	Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	diabetes mellitus usia \geq 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	standar pelayanan kesehatan diabetes melitus	Diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Sesuai standar pelayanan kesehatan Jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/trans gender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)

Adapun penjelasan dari masing – masing layanan akan dijelaskan dalam uraian berikut ini :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

b. Pengertian

1. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
2. Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :
 - a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
 - b) Ukur tekanan darah;
 - c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
 - d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)
 - e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 - f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
 - g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
 - h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
 - i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;

j) Temu wicara (konseling)

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
---	---

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Pernyataan standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.
- 3) Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan

Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Persentase Ibu} \\ \text{bersalin yang} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan persalinan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan persalinan sesuai standar di} \\ \text{fasilitas pelayanan kesehatan di} \\ \text{wilayah kerja Kabupaten /Kota dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \end{array}} \times 100\% = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah} \\ \text{kerja Kabupaten/Kota dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun yang sama} \end{array}}$$

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
- 2) Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar}} \times 100\%$$

Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

4) Pelayanan Kesehatan Balita

a. Pernyataan standart

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

2) Pelayanan kesehatan, meliputi :

- a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun
- b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
- c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan balita sesuai standart}}{\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurunwaktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 sampai dengan kelas 9 yang dilakukan oleh Puskesmas.
- 2) Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :
 - a) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
 - b) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
 - d) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;

- e) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala; Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota adalah semua peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kabupaten/kota.

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}}} \times 100\%$$

6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

a. Pernyataan standart

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar

- a) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh:

- Dokter;

- Bidan;
 - Perawat;
 - Nutrisi/Tenaga Gizi.
 - Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih
- b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- c) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
- d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :
- Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkaran perut.
 - Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
 - Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.
 - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
 - Pemeriksaan ketajaman penglihatan
 - Pemeriksaan ketajaman pendengaran
 - Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun
- 2) Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.
- c. Definisi Operasional Capaian Kinerja
- Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/ kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 atas sesuai standar adalah:

a) Dilakukan sesuai kewenangan oleh :

- Dokter;
- Bidan;
- Perawat;
- Nutrisisionis/Tenaga Gizi;
- Kader Posyandu lansia/Posbindu

b) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

c) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekalisetahun.

d) Lingkup skrining adalah sebagai berikut :

- Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
- Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadargula darah
- Deteksi kadar kolesterol dalam darah

- Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS).

- 2) Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini
- 3) Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

Persentase Warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah kabupaten, kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}} \times 100\%$
--	--

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

- 1) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 2) Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi

kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

3) Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

4) Standar layanan kesehatan penderita hipertensi adalah:

- Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP
- Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
- Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis
- Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
- Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah penderita hipertensi usia yang ≥ 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
--	--

sesuai standar	dalam kurun waktu satu tahun	
	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	X 100%

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

- 1) Sasaran indikator ini adalah penyandang Diabete Melitus (DM) di wilayah kerja kabupaten/kota.
- 2) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- 3) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- 4) Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya
- 5) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan
- 6) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- 7) Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah penyandang DM usia } \geq 15 \text{ tahun didalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes meliitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

a. Pernyataan Standar

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- 1) Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan
- 2) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- 3) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
 - Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
 - Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
- 4) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat

(psikotik) di wilayah kerja nya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$$

Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah
- 2) Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain :
 - Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
 - Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- 3) Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

- 4) Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan
- 5) Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
--	--

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

a. Pernyataan Standar

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP

(Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta dilapas/rutan narkotika

2) Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
- b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:

- Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
- Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
- orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
- orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

d. Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
---	--

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan adalah 100% (seratus persen). Berikut rincian target pencapaian SPM Bidang Kesehatan:

Tabel 4.12
Target Pencapaian SPM Bidang urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian (%)	Jumlah Target Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	1.263
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	1.205
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	1.110
4	Pelayanan kesehatan balita	100	4.509
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	9.675
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	41.123
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	7.329
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	16.134
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	872
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	194
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	100	1.480
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human</i>	100	2.433

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian (%)	Jumlah Target Capaian
	<i>Immunodeficiency Virus)</i>		

4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang kesehatan tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi Capaian mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Capaian mutu pelayanan dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Sedangkan capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja.

Tabel 4.13
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
	INDEKS CAPAIAN SPM				84,56
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				69,03
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	49,03
	A. Jumlah Yang Harus dilayani	1263	774	489	61,28
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20,00
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1 Vaksin Tetanus Difteri (Td)	97	97	0	100,00
	2 Tablet tambah darah	69840	69840	0	100,00
	3 Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan	774	774	0	100,00
	4 Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	774	774	0	100,00

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

	5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	774	774	0	100,00
	6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	774	774	0	100,00
	7	Kartu ibu/rekam medis ibu	774	774	0	100,00
	8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	862	862	0	100,00
	9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	31	31	0	100,00
	10	Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00
	11	Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
	12	Kunjungan 4 kali Ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	774	774	0	100,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					77,23
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	57,23
	A.	Jumlah Yang Harus dilayani	1205	862	343	71,54
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20,00
	B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1	Formulir Partograf	862	862	0	100,00
	2	Kartu ibu (rekam medis)	862	862	0	100,00
	3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	862	862	0	100,00
	4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	31	31	0	100,00
	5	Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

	6	Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					80,18
		Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	60,18
	A.	Jumlah Yang Harus dilayani	1110	835	275	75,23
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20,00
	B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1	Vaksin Hepatitis B0	835	835	0	100,00
	2	Vitamin K1 injeksi	835	835	0	100,00
	3	Salep/tetes mata antibiotik	835	835	0	100,00
	4	Formulir bayi baru lahir	835	835	0	100,00
	5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	835	835	0	100,00
	6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	862	862	0	100,00
	7	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	34	34	0	100,00
	8	Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00
	9	Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita					88,73
		Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	68,73
	A.	Jumlah Yang Harus dilayani	4509	3874	635	85,92
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20,00

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

	B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	3874	3874	0	100,00
	2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	3874	3874	0	100,00
	3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	3874	3874	0	100,00
	4	Vitamin A Biru	761	761	0	100,00
	5	Vitamin A Merah	3113	3113	0	100,00
	6	Vaksin imunisasi dasar: HBO	761	761	0	100,00
	7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	254	254	0	100,00
	8	Vaksin imunisasi dasar: Polio	719	719	0	100,00
	9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	719	719	0	100,00
	10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	696	696	0	100,00
	11	Vaksin imunisasi dasar: Campak	718	718	0	100,00
	12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	718	718	0	100,00
	13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	969	969	0	100,00
	14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	969	969	0	100,00
	15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	969	969	0	100,00
	16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	3874	3874	0	100,00
	17	Peralatan Anafilaktik	6	6	0	100,00
	18	Tenaga kesehatan : Dokter	31	31	0	100,00
	19	Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00
	20	Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
	21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	23	23	0	100,00
	22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	515	515	0	100,00
	23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	204	204	0	100,00

5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				94,24
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	74,24
	A. Jumlah Yang Harus dilayani	9675	8978	697	92,80
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20,00
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1 Buku raport kesehatanku	8978	8978	0	100,00
	2 Buku pemantauan kesehatan	7	7	0	100,00
	3 Kuesioner skrining kesehatan	8978	8978	0	100,00
	4 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	7	7	0	100,00
	5 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	7	7	0	100,00
	6 Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	14	14	0	100,00
	7 Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00
	8 Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
	9 Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	23	23	0	100,00
	10 Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	0	100,00
	11 Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	515	515	0	100,00
	12 Tenaga Non kesehatan : Guru	97	97	0	100,00
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				78,65
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	58,65

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

	A.	Jumlah Yang Harus dilayani	41123	30147	10976	73,31
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			20,00		
	B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	14	14	0	100,00
	2	Alat ukur berat badan	24	24	0	100,00
	3	Alat : ukur tinggi badan	24	24	0	100,00
	4	Alat : Alat ukur lingkaran perut	24	24	0	100,00
	5	Alat : Tensimeter	24	24	0	100,00
	6	Alat : Glukometer	12	12	0	100,00
	7	Alat : Tes strip gula dara	603	603	0	100,00
	8	Alat : Lancet	302	302	0	100,00
	9	Alat : Kapas alkohol	302	302	0	100,00
	10	Alat : KIT IVA Tes	6	6	0	100,00
	11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	7	7	0	100,00
	12	Tenaga kesehatan : Dokter	31	31	0	100,00
	13	Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00
	14	Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
	15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	23	23	0	100,00
	16	Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	0	100,00
	17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1	1	0	100,00
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100,00

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	80,00
	A. Jumlah Yang Harus dilayani	7329	7329	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20,00
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1 Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	147	147	0	100,00
	2 Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatric (P3G)	7329	7329	0	100,00
	3 Buku kesehatan lansia	7329	7329	0	100,00
	4 Tenaga kesehatan : Dokter	31	31	0	100,00
	5 Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00
	6 Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
	7 Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	23	23	0	100,00
	8 Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	0	100,00
	9 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunya i Kualifikasi tertentu	174	174	0	100,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				45,52
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	25,52
	A. Jumlah Yang Harus dilayani	16134	5147	10987	31,90

Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20,00
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	12	12	0	100,00
2	Tensimeter	18	18	0	100,00
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	6	6	0	100,00
4	Tenaga kesehatan : Dokter	31	31	0	100,00
5	Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00
6	Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	0	100,00
8	Obat Hipertensi	5.147	5.147	0	100,00
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100,00
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	80,00
A.	Jumlah Yang Harus dilayani	1041	1041	0	100,00
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20,00
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
1	Alat : Glukometer	12	12	0	100,00
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	21	21	0	100,00
3	Alat : Kapas Alkohol	75	75	0	100,00
4	Alat : Lancet	75	75	0	100,00

	5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	6	6	0	100,00
	6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	12	12	0	100,00
	7	Tenaga kesehatan : Dokter	31	31	0	100,00
	8	Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00
	9	Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
	10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	23	23	0	100,00
	11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	0	100,00
	12	Obat Diabetes Melitus	1041	1041	0	100,00
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100,00
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	80,00
	A.	Jumlah Yang Harus dilayani	194	194	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20,00
	B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	6	6	0	100,00
	2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	6	6	0	100,00
	3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	582	582	0	100,00
	4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	12	12	0	100,00

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

	5	Tenaga kesehatan : Dokter	31	31	0	100,00
	6	Tenaga kesehatan : Perawat	6	6	0	100,00
	7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	1	1	0	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					81,14
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	61,14
	A.	Jumlah Yang Harus dilayani	1480	1131	349	76,42
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20,00
	B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	6	6	0	100,00
	2	Reagen Zn TB	1131	1131	0	100,00
	3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	1131	1131	0	100,00
	4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	1131	1131	0	100,00
	5	Catridge tes cepat molekuler	1131	1131	0	100,00
	6	Formulir pencatatan dan pelaporan	1131	1131	0	100,00
	7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	6	6	0	100,00
	8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	34	34	0	100,00
	9	Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
	10	Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	24	24	0	100,00

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

	11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	9	9	0	100,00
	12	Tenaga kesehatan masyarakat	28	28	0	100,00
	13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunya i Kualifikasi tertentu	1	1	0	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100,00
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum terlayani	80,00
	A.	Jumlah Yang Harus dilayani	2433	2433	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20,00
	B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00
	1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	12	12	0	100,00
	2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2433	2433	0	100,00
	3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2433	2433	0	100,00
	4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	2433	2433	0	100,00
	5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	34	34	0	100,00
	6	Tenaga kesehatan : Perawat	233	233	0	100,00
	7	Tenaga kesehatan : Bidan	163	163	0	100,00

8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	24	24	0	100,00
9	Tenaga kesehatan masyarakat	28	28	0	100,00
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	1	1	0	100,00

Hasil analisis dan evaluasi penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar 65.35%, atau 828 Ibu Hamil dari 1.267 sasaran. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 61.28% dimana 774 ibu hamil yang sudah dilayani sesuai standar dari 1.263 sasaran. Dari sebanyak 6 Puskesmas di Kota Sawahlunto 5 Puskesmas yang cakupannya telah mencapai diatas 50%, sedangkan Puskesmas Silungkang capaian 42.99%. Hal ini disebabkan karena masih ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan diluar Kota Sawahlunto dan tidak melaporkan kehamilannya kepada kader atau petugas kesehatan, masih ada ibu hamil yang belum menyelesaikan masa kehamilannya di tahun 2023 dan akan dihitung pada tahun berikutnya bagi ibu hamil yang belum dilaporkan. Akan tetapi secara Kinerja sudah 100% terlayani, sementara untuk kategori pencapaian SPM bidang Kesehatan untuk indikator 1 ini berada pada kategori Tuntas Muda dengan nilai 69.03. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.14
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil
1	Talawi	400	262	65,50

2	Kolok	160	102	63,75
3	Sei. Durian	252	180	71,43
4	K. Teleng	138	84	60,87
5	Lunto	92	51	55,43
6	Silungkang	221	95	42,99
Jumlah		1.263	774	61,28

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebesar 71.54% atau 862 ibu bersalin dari sasaran 1.205 orang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 73.88% atau 894 ibu bersalin dari sasaran 1.210 orang. Dari sebanyak 6 Puskesmas di Kota Sawahlunto 6 Puskesmas cakupannya telah mencapai diatas 50%, dengan nilai 77.23 kategori Tuntas pratama. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
1	Talawi	390	285	73.08
2	Kolok	151	107	70.86
3	Sei. Durian	236	181	76.69
4	K. Teleng	130	92	70.11
5	Lunto	87	68	78.16

6	Silungkang	211	129	61.14
Jumlah		1205	862	71.54

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 4.16
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1	Talawi	372	274	73.66
2	Kolok	139	109	78.42
3	Sei. Durian	202	172	85.15
4	K. Teleng	120	89	74.17
5	Lunto	81	64	79.01
6	Silungkang	196	127	64.80
Jumlah		1.110	835	75.23

Tabel menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar 873 orang dari 1.122 bayi baru lahir atau 77.81% ini menurun pada tahun 2023 untuk pencapaian bayi baru lahir sebesar 75.23%, atau 835 bayi baru lahir dari 1.110 sasaran. Secara kinerja sudah 100%, karena semua bayi baru lahir sudah diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan kategori Indek SPM tuntas madya dengan nilai 80.18.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 4.17
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pelayanan kesehatan balita
1	Talawi	1.376	1.351	98.18
2	Kolok	511	527	103.13
3	Sei. Durian	819	687	83.88
4	K. Teleng	636	396	62.26
5	Lunto	363	261	71.90
6	Silungkang	804	652	81.09
Jumlah		4.509	3.874	85,92

Tabel menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan balita di Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar 86.88%, atau 3.945 balita dari 4.541 sasaran. Tahun 2023 adanya penurunan capaian 0.96% menjadi 85.92% atau 3.874 balita yang dilayani dari 4.509 sasaran pada tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya orang tua balita yang menolak anaknya untuk diberikan imunisasi dasar dan lanjutan sehingga ini berpengaruh terhadap capaian SPM pelayanan balita sesuai standar. Untuk indikator ini indeks SPM dengan nilai 88.73 (Tuntas Madya)

5. Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan Dasar

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar 100%, atau 9.667 orang dari 9.667 sasaran. Capaian tahun 2023 adanya penurunan capaian untuk pencapaian 92.80% atau 8.978 sasaran yang dilayani sesuai standar dari 9.675 orang. Dengan kategori SPM Tuntas Utama (94.24) . Sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan Dasar Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
1	Talawi	3.009	2.926	97.24
2	Kolok	1.118	963	86.14
3	Sei. Durian	1.760	2.106	119.66
4	K. Teleng	1.298	1353	104.24
5	Lunto	767	546	71.19
6	Silungkang	1.723	1084	62.91
Jumlah		9.675	8.978	92.80

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Tabel 4.19
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah orang usia 15-59 Tahun di Kab/kota yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif
1	Talawi	12.790	9.830	76.86
2	Kolok	4.749	3.736	78.67
3	Sei. Durian	7.479	3.158	42.22

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah orang usia 15-59 Tahun di Kab/kota yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif
4	K. Teleng	5.520	4.975	90.13
5	Lunto	3.262	2.181	66.86
6	Silungkang	7.323	6.267	85.58
Jumlah		41.123	30.147	73.31

Tabel menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar 40.37%, atau 16.464 orang dari 40.785 sasaran. Adanya peningkatan capaian pada tahun 2023 ini disebabkan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti lintas sektor, Dinas Vertikal yang mau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dengan cara menginformasikan setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat sehingga bisa melakukan skrening kesehatan untuk mendokrak pencapaian indikator ini. Dimana pencapaian untuk tahun ini berada di 73.31% atau 30.147 orang yang terlayani dari 41.123 sasaran yang ada. Pada indikator ini kategori yang sudah dicapai yaitu Tuntas Pratama dengan nilai 78.65

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Tabel 4.20
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
1	Talawi	2.259	2.436	107.84
2	Kolok	886	964	108.80
3	Sei. Durian	1.397	1.106	79.17
4	K. Teleng	897	1.027	114.49
5	Lunto	607	702	115.84
6	Silungkang	1.283	1.094	85.27
Jumlah		7.329	7.329	100

Data tersebut menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan pada lanjut usia di Kota Sawahlunto tahun 2022 adanya warga negara yang mendapatkan pelayan Kesehatan untuk usia lanjut yaitu 5.062 orang dari 9.793 sasaran (51.62%). Adanya peningkatan pada tahun 2023 dimana semua sasaran lanjut usia 7.329 sudah dilayani sesuai standar (100%) dan secara kinerja juga sudah 100%. Katergori SPM untuk indikator ini adalah Tuntas Paripurna (100). Hal ini didukung oleh kegiatan yang dilakukan berupa adanya posyandu lansia kegiatan-kegiatan majelis taqlim yang bekerja sama dengan lintas sektor serta tokoh masyarakat.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel 4.21

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
1	Talawi	5.016	1.820	36.28
2	Kolok	1.864	967	51.88
3	Sei. Durian	2.934	685	23.35
4	K. Teleng	2.167	698	32.21
5	Lunto	1.280	222	17.34
6	Silungkang	2.873	755	26.28
Jumlah		16.134	5.147	31.90

Data menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar 3.776 orang dari sasaran 15.941 orang (23.69%) adanya peningkatan pada tahun 2022 sebesar 8.21%, atau 5.147 orang dari 16.134 sasaran. Banyaknya penemuan kasus penderita Hipertensi pada tahun 2023 didukung juga oleh inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Kolok “Jempol Sakti” (Jemput Bola Penderita Hipertensi) dan ini membawa kepala puskesmas kolok sebagai tenaga kesehatan teladan sampai ke Istana negara dengan inovasi yang dilakukan dalam pencegahan penyakit tidak menular. Walau belum Tuntas Paripurna tetapi semua tenaga kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melakukan berbagai upaya dalam penjangkauan penderita Hipertensi. Kategori SPM pada indikator ini belum tuntas dengan nilai 45.52

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan Kesehatan untuk menjangkau penderita Diabetes Melitus dengan melakukan skrining kesehatan, pemeriksaan berkala pada murid sekolah, melalui kegiatan posyandu lansia serta posyandu balita yang dilakukan pemeriksaan kepada orang tua balita pada saat kegiatan posyandu berlangsung. Ini bertujuan untuk mendorong capaian dan penemuan penderita sehingga bisa dilakukan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dan mencegah terjadinya komplikasi penyakit yang lain jika penyakit ini tidak diobati. Dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini :

Tabel 4.22
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus
1	Talawi	338	338	100
2	Kolok	74	74	100
3	Sei. Durian	194	194	100
4	K. Teleng	194	194	100
5	Lunto	87	87	100
6	Silungkang	154	154	100
Jumlah		1.041	1.041	100

Data menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus di Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar 76.68% atau sebanyak 661 orang yang dilayani sesuai standar dari sasaran 862 orang dan ini

meningkat pada tahun 2023 sebesar 100%, atau 1.041 orang dari 1.041 sasaran. Dengan kategori SPM Tuntas Paripurna dengan nilai 100

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel 4.23
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1	Talawi	49	49	100
2	Kolok	34	34	100
3	Sei. Durian	39	39	100
4	K. Teleng	20	20	100
5	Lunto	5	5	100
6	Silungkang	47	47	100
Jumlah		194	194	100

Data menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar 100%, atau 188 orang dari 188 sasaran. Dan adanya peningkatan penderita baru 194 orang dan dilayani 100% dan kategori SPM pada indikator ini yaitu Tuntas paripurna dengan nilai 100.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis di Kota Sawahlunto Tahun 2023 meningkat sekitar 36.04% jika dibandingkan dari tahun

2022 dengan 1.131 orang terduga dilakukan pemeriksaan dahak/sputum untuk menjangkit penderit dengan TBC positif dari 1.480 sasaran yang harus dilayani. Kategori SPM untuk indikator ini yaitu Tuntas Madya dengan nilai 81.14. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.24
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan dengan Tuberkulosis
1	Talawi	215	235	109.30
2	Kolok	176	315	178.98
3	Sei. Durian	120	117	97.50
4	K. Teleng	634	247	38.96
5	Lunto	64	43	67.19
6	Silungkang	271	174	64.21
Jumlah		1.480	1.131	76.42

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebesar 100%, atau 2.433 orang dari 2.433 sasaran sudah dilayani sesuai dengan standar pelayanan yang harus didapatkan. Dengan kategori SPM tuntas paripurna dengan nilai 100. Hal tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.25
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan risiko
----	----------------	---	---	---

		HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
1	Talawi	709	709	100
2	Kolok	959	959	100
3	Sei. Durian	425	425	100
4	K. Teleng	105	105	100
5	Lunto	77	77	100
6	Silungkang	158	158	100
Jumlah		2.433	2.433	100

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk mendukung penerapan SPM bidang kesehatan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.26

Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2023

Kode	Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.02	Kesehatan			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	273.573.050,00	171.199.940,00	62.6
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	65.581.350,00	38.491.050,00	58.7

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	106.442.600,00	26.924.000,00	25.3
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	331.818.000,00	237.974.000,00	71.7
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	116.000.250,00	95.681.150,00	82.5
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	52.680.000,00	32.950.000,00	62.5
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	82.885.000,00	82.390.000,00	99.4
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.999.900,00	0	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.900.000,00	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	4.999.900,00	0	0

	Berat			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	130.328.900,00	89.455.956,00	68.6
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.999.900,00	0	0
Jumlah		1.179.208.856,00	775.066.103,00	65.7

4.2.5 Dukungan Personil

Tabel 4.27
Dukungan Personil Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto
Tahun 2023

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH TENAGA
A.	Pejabat struktural	
	1. Eselon II,III,IV	9 orang
B.	Pejabat Fungsional	
	1. Dokter	10 orang
	2. Dokter Gigi	7 orang
	3. Bidan	105 orang
	4. Perawat	97 orang
	5. Perawat Gigi	6 orang
	6. Apoteker	7 orang
	7. Asisten Apoteker	16 orang
	8. Nutrisi	11 orang
	9. Pranata Laboratorium	5 orang
	10. Sanitarian	9 orang
	11. Perekam medis	8 orang
	12. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	9 orang

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH TENAGA
	13. Administrator Kesehatan	2 orang
	14. Epidemiologi Kesehatan	2 orang
	15. Pembimbing Kesehatan Kerja	1 orang
C.	Kontrak Daerah/SKPD/ Nusantara Sehat	
	1. Dokter	4 orang
	2. Dokter Gigi	2 orang
	3. Bidan	33 orang
	4. Perawat	11 orang
	5. Perawat Gigi	2 orang
	6. Apoteker	1 orang
	7. Sanitarian	1 orang
	8. Non Kesehatan	76 orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.28
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih ada ibu hamil yg tidak memeriksakan kehamilannya mulai usia kehamilan < 12 minggu karena ketidak tauan ibu akan kehamilannya	Memaksimalkan kegiatan kelas ibu hamil
		Melaksanakan kegiatan kelas prakonsepsi agar pemahaman akan kehamilan benar dan mempersiapkan kehamilan yang sehat.
		Kerjasama Disdalduk KB PP dan kemenag dalam memaksimalkan kegiatan Suscatin dan Binwin. Agar pasangan pengantin tahu bagaimana mempersiapkan kehamilan yg sehat termasuk didalamnya periksa kehamilan ke tenaga kesehatan sedini

		<p>2</p> <p>Karena masih banyak balita yg masih belum lengkap mendapatkan pelayanan kesehatan antara lain imunisasi rutin masih belum lengkap diterima oleh semua balita khususnya imunisasi booster usia 18-24 bln</p>	<p>3</p> <p>Masih belum semua balita dilakukan pemantauan perkembangan (SDIDTK) lengkap sesuai usianya</p>	<p>4</p> <p>Masih belum semua balita sakit diperiksa dengan manajemen balita sakit (MTBS)</p>	<p>5</p> <p>Target pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar tidak bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya karena adanya jumlah sekolah yang melebihi kapasitas petugas sehingga tidak semua sekolah bisa dilakukan skrining, serta belum optimalnya tim UKS di puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran di sekola</p>	<p>6</p> <p>Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrening usia</p>	<p>7</p> <p>Mungkin (<12 minggu)</p> <p>Maksimalkan kegiatan posyandu dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi bagi balita yang belum lengkap mendapatkan antigennya.</p> <p>Memaksimalkan pemeriksaan MTBS pada semua balita sakit yang datang ke faskes</p> <p>meningkatkan skil bidan, perawat dan dokter puskesmas dalam melakukan pemeriksaan MTB</p> <p>Perencanaan kegiatan penjangkaran secara cermat</p> <p>Melibatkan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran di sekolah</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah petugas yang berperan di
--	--	---	--	---	---	--	--

	produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.	<p>puskesmas hanya pengelola program PTM, Kualitas/pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan. Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di Dinas Kesehatan diperlukan programmer untuk PTM, Posbindu, kesehatan gilut, kesehatan indra, disabilitas dan gapti, agar bisa melaksanakan upaya pengendalian PTM dengan optimal. Sementara ini masih ada kekurangan tenaga di bagian ini. • Peningkatan kapasitas kader; - Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif - Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM
7	Belum semua instansi/lembaga/ organisasi/perkumpulan /komunitas dan lainlain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM	Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat
8	Kurangnya pencarian aktif oleh pustu dan poskesdes ke	Supervisi fasilitatif pada layanan yang terkendala

	masyarakat	
9	Kurangnya pemeriksaan kontak pasien TBC oleh tenaga kesehatan	Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes
10	Belum semua faskes melaporkan capaian kegiatan testing hiv melalui aplikasi SIHA, penyebab keterbatasan SDM dan sarpras elektronik	Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko dan memantau puskesmas yang belum melakukan pengentrian kedalam Aplikasi SIHA.
11	Penjangkauan pada populasi kunci hiv yang terbatas karena keterbatasan koordinasi lintas sektor	Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk penjangkauan populasi kunci.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari :

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

1) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/ cuci/mandi/ dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kab/Kota}} \times 100$$

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. SPALD Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk Atau Tangki Septik}}{\text{Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS Dengan Kepadatan Penduduk Pada Wil. Terbangun <25 jiwa/Ha}} \times 100$$

Adapun jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu
-----	-----------------	---------------------	----------------	-------------

1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air	920	Tahun 2023
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air	950	Tahun 2023

4.3.3 Realisasi Pencapaian SPM

Capaian SPM Pekerjaan Umum di Kota Sawahlunto Tahun 2023 terealisasi sebanyak 100% dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.30
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian (%)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	$\frac{920}{920} \times 100$	100
2.	Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	$\frac{950}{950} \times 100$	100

4.3.4 Alokasi Anggaran

Selama tahun 2023 sampai dengan semester 3 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja dan SPM yang ingin dicapai Dinas PUPR Kota Sawahlunto dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.5.254.150.000 yang bersumber dari APBD (Dana Alokasi Daerah). Anggaran tersebut diperuntukan untuk:

- a. Bidang Keciaptakaryaan sebesar Rp. 3.868.850.000,- untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang air bersih.
- b. Bidang Keciaptakaryaan sebesar Rp.1.385.300.000,- untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang sanitasi lingkungan. Untuk rincian anggaran dan realisasi perprogram kerja dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 4.31
Rincian Anggaran dan Realisasi Program Sub Bidang Sanitasi Lingkungan

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			
	a.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Terbangunna Sarana dan Prasarana Air Bersih	3.868.850.000	3.868.850.000
	b.Pembangunan Sarana Air Limbah	Terbangunnya Sarana dan Prasarana	1.385.300.000	1.385.300.000
JumlahTotal			5.254.150.000	5.254.150.000

4.3.5 Dukungan Personil

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Data kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2022 berjumlah sebanyak 173 orang dengan jumlah pejabat struktural 30 orang dan pelaksana sebanyak 143 orang.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik internal maupun eksternal yang perlu diatasi. Berdasarkan pengamatan maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

Internal :

- 1) Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu ditingkatkan keahliannya;
- 2) Belum lengkapnya data base pada masing-masing bidang;
- 3) Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
- 4) Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan;
- 5) Keterbatasan sumber dana;
- 6) Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Eksternal

- 1) Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya area terbuka hijau;
- 2) Ketidaktertarikan sebagian warga untuk mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan internal, ada beberapa solusi yang dapat dilaksanakan, antara lain:

- 1) Peningkatan sumber daya aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- 2) Pembuatan basis data yang terintegrasi dari masing-masing bidang;
- 3) Penyusunan master plan dan kebijakan umum pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dari semua aspek dan bidang.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan- permasalahan eksternal, solusi yang dapat dilaksanakan antara lain:

- 1) Peningkatan pengelolaan SPAM dan Sanitasi masyarakat;
- 2) Bekerja sama dengan dinas terkait mengenai sosialisasi pentingnya pengolahan air limbah domestik

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Ada dua jenis pelayanan dasar urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman yang ada di Kota Sawahlunto, yakni:

- a. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - 1) Pada saat masa pasca bencana;
 - 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
 - 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.
- b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
 - 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Tabel 4.32

Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan	Jumlah	100%	Setiap	Jumlah	100% (sesuai)	Setiap	Indikator

	dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kota Sawahlunto	Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		Tahun	Barang dan Jasa	dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Tahun	mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100 % (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4.4.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Perumahan Rakyat secara bertahap sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan.

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan

pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada. Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yg ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100$$

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

“Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. JDIH Kementerian PUPR Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100$$

Jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Sawahlunto adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.33
Target SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Sawahlunto Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	15	Tahun 2023
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	Tahun 2023

4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto selama 1(satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Hasil capaian SPM urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.34
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target		Realisasi		Ket
		Anggaran	Penerima Layanan	Anggaran	Penerima Layanan	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kota Sawahlunto	Rp. 407,541,000	15 Unit	Rp. 374,434,500 (91,88%)	15 Unit (100 %)	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	-	-	-	- (100%)	Tidak ada Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah

4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. Alokasi Anggaran Tahun 2023 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto untuk pencapaian penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Ket
----	-----------------	-----------------------------------	------------------	-----

	Dasar			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kota Sawahlunto	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Kegiatan 	<p>Rp. 56,610,200.-</p> <p>Rp. 21,263,600.-</p> <p>Rp. 320,781,000.-</p> <p>Rp. 8,886,200.-</p>	<p>APBD</p> <p>APBD</p> <p>APBD</p> <p>APBD</p>

		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto		Rp. 0.-	Tidak ada Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto

- Kepala Bidang : 1 Orang
- Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda : 1 Orang

- Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama :
2 Orang
- Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman : 3 orang
- Tenaga Teknis : 2 Orang

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan Perumahan rakyat dan Permukiman di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu:

- a. Dengan kondisi alam Sawahlunto berbukit, dan tingkat bencana tinggi.
- b. Rumah terdampak bencana berada diluar SK kawasan bencana.
- c. Belum tersedia lahan relokasi program pemerintah, karena kondisi geografis Sawahlunto yang berada pada daerah berkontur.

Adapun solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Bidang perumahan, dan Kawasan Permukiman terlibat aktif dalam tanggap bencana.
- b. Perlu pertimbangan RTLH bencana diluar SK Kawasan bencana sehingga dapat diakomodir dalam SPM.
- c. Perlu adanya kebijakan untuk penentuan lahan pemerintah untuk relokasi.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dapat dilihat dalam tabel indikator serta nilai SPM sebagai berikut:

Tabel 4.36 Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat				
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capain	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/perkada	100%	Tahun 2023
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	5326	Tahun 2023

3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebencanaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	250	Tahun 2023
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kebencanaan)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	528	Tahun 2023
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Tahun 2023

Pada tahun 2023 Penerapan Standar Pelayanan Minimal padang Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar Kota Sawahlunto dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto.

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun rumus capaian penerapan SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.37
Rumus Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Rumus Perhitungan
----	-----------------------	---------------------	-------------------

1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/perkada	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada}}{\text{Jumlah Penegakan Perda dan Perkada}} \times 100$
---	---	---	---

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh informasi rawan bencana. Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kota Sawahlunto yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah.

Indikator: Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\text{Persentase (\%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target Capaian : 100% paling lama satu tahun

2) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.

Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

$$\text{Persentase (\%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana} = \frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana}} \times 100\%$$

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebencanaan

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui serangkaian upaya kegiatan pra bencana.

Penerima Layanan : Setiap Warga Negara Indonesia di Kota Sawahlunto yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \\ \text{penyelesaian dokumen} \\ \text{sampai dengan} \\ \text{dinyatakan sah/legal} \end{array} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan} \\ \text{dokumen yang disusun} \\ \text{Jumlah satu dokumen RPB} \\ \text{lengkap dan sudah disahkan}}{x100\%}$$

2) Sub Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)

Sasaran : Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan selesai dan sah/legal.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ penyelesaian} \\ \text{dokumen sampai dengan} \\ \text{dinyatakan sah/legal} \end{array} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan} \\ \text{dokumen yang disusun} \\ \text{Jumlah satu dokumen} \\ \text{Renkon lengkap dan sudah disahkan}}{x100\%}$$

3) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%) jumlah aparatur} \\ \text{dan warga Negara yang ikut} \\ \text{pelatihan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah aparatur dan warga} \\ \text{Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga} \\ \text{Negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

4) **S** Persentase (%) jumlah warga
u Negara yang. Mendapat layanan
b pusdalops penanggulangan
 bencana dan sarana prasarana
 penanggulangan bencana

$$= \frac{\text{Jumlah warga Negara yang} \\ \text{mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada} \\ \text{di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

K

e Persentase (%) jumlah warga
g Negara yang ikut pelatihan
i

$$= \frac{\text{Jumlah warga} \\ \text{Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga} \\ \text{Negara yang berada} \\ \text{di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

a

tan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terlatihnya warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator: Persentase (%) jumlah warga Negara yang ikut pelatihan.

T

5) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.

Indikator: Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan.

$$\text{Persentase (\%) jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kebencanaan)

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kota Sawahlunto.

1) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam.

Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%).

$$\text{Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (\%)} = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$$

2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana

Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.

Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%).

$$\begin{array}{l} \text{Persentase kecepatan} \\ \text{respon kurang dari 24} \\ \text{jam untuk setiap} \\ \text{status darurat} \\ \text{bencana (\%)} \end{array} = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon} \\ \text{kurang dari 24 jam untuk} \\ \text{setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan} \\ \text{status darurat bencana}} \times 100\%$$

3) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas darurat bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase jumlah petugas yang} \\ \text{aktif dalam penanganan} \\ \text{darurat bencana} \end{array} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif} \\ \text{dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas} \\ \text{dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

4) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran: Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil, dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ jumlah} \\ \text{petugas yang aktif dalam} \\ \text{penanganan darurat} \\ \text{bencana} \end{array} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam} \\ \text{penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam} \\ \text{penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Adapun rumus capaian penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.38
Rumus Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Rumus Perhitungan
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah warga negara yang memperoleh	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak

	Korban Kebakaran	layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (respon time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran/Perangkat Daerah)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun x}} \times 100$
--	------------------	--	---

4.5.3 Realisasi Pencapaian SPM Daerah

Realisasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.39
Realisasi Penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Penghitungan Capaian	Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/perkada	$\frac{134}{134} \times 100$	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{5326}{5326} \times 100$	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	$\frac{250}{250} \times 100$	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	$\frac{528}{528} \times 100$	100%

		bencana		
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{32}{32} \times 100$	100%

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pada tahun 2023 di Kota Sawahlunto terjadi 32 (Tiga puluh dua) kasus kebakaran. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (response time) 15 menit sejumlah 32 (Tiga puluh dua) kejadian kebakaran, dengan data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.40
Data Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran di Kota Sawahlunto	32 Kejadian
2	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sawahlunto dalam waktu tanggap (response time) 15 menit	32 Kejadian
3	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran dalam waktu tanggap (response time) 15 menit	0 Kejadian
4	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani di luar waktu tanggap (response time) 15 menit oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sawahlunto dan Relawan Kebakaran	0 Kejadian
5	Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran	0 Orang

6	Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran yang berhasil dilakukan pertolongan dan penyelamatan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sawahlunto	0 Orang
7	Jumlah korban meninggal dunia	0
8	Jumlah korban yang mengalami luka bakar dan/atau luka fisik lainnya	0
9	Jumlah taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran	Rp. 2.000.000.000
10	Jumlah taksiran aset yang bisa diselamatkan sebagai akibat tidak menjalarnya kejadian kebakaran	Rp. -
11	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran)	166 sus

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah anggaran belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri oleh Kota Sawahlunto. Adapun besaran anggaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.41
Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan SPM Bidang	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	61.039.000	56.525.000
		Kegiatan	40.944.000	36.430.000

		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	19.770.000	18.818.000
		Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan	6.604.000	4.700.000

		Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	14.570.000	12.912.000
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	20.095.000	20.095.000
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	10.109.000	10.109.000
		Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan	0	0

		Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		
		Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	9.986.000	9.986.000
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	0
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	0
2		Pogram Penanggulangan Benana		
	Sosialisasi,Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (perjenis Kegiatan)	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Benana Kabupaten/Kota (perjenis Bencana)	8.210.000,-	8.154.105,-
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	30.432.500,-	30.221.400,-

		terhadap Bencana		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	22.907.500,-	22.907.237,-
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9.737.500,-	9.384.180,-
	Penanganan Pascabencana Kab/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	28.691.650,-	14.608.950,-
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	50.000.000,-	11.754.128,-
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	206.375.900,-	123.107.655,-
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	17.915.000,-	0,-

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	140.637.100	134.312.368
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	136.637.100	130.568.368
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	130.557.100	126.600.368
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	6.080.000	3.986.000
		Kegiatan		

		Investigasi Kejadian Kebakaran	2.000.000	2.000.000
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	2.000.000	2.000.000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	2.000.000	2.000.000
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2.000.000	2.000.000

4.5.5 Dukungan Personil

1. SatpolPP & Damkar

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto pada Januari tahun 2024 sebanyak 143 orang, terdiri dari :

ASN : 78 Orang

Non ASN : 65 Orang

Tabel 4.42

Jumlah Pegawai Satpol PP & Damkar Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama	IV.e	-
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-
3	Pembina Utama Muda	IV.c	-
4	Pembina Utama TK I	IV.b	2 Orang
5	Pembina	IV.a	1 Orang
6	Penata TK.I	III.d	5 Orang
7	Penata	III.c	4 Orang
8	Penata Muda TK.I	III.b	5 Orang
9	Penata Muda	III.a	11 Orang
10	Pengatur TK.I	II.d	9 Orang
11	Pengatur	II.c	9 Orang
12	Pengatur Muda TK.I	II.b	2 Orang
13	Pengatur Muda	II.a	30 Orang
14	Juru TK I	I.d	-
15	Juru	I.c	-
16	Juru Muda TK I	I.b	-
17	Juru Muda	I.a	-
JUMLAH			78 Orang

Tabel 4.43
Jumlah Pegawai Satpol PP & Damkar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	ASN	Non ASN
1	S-2	-	-	-
2	S-1	19 Orang	18 Orang	1 Orang
3	D-3	3 Orang	1 Orang	2 Orang
4	D-2	-	-	-
5	D-1	-	-	-
6	SLTA	112 Orang	56 Orang	56 Orang
7	SLTP	7 Orang	1 Orang	6 Orang

8	Paket C	2 Orang	2 Orang	-
9	Paket B	-	-	-
10	SD	-	-	-
	JUMLAH	143	78	65

2. BPBD

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana di Kota Sawahlunto tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan personil pada BPBD Kota Sawahlunto.

Jumlah pegawai BPBD Kota Sawahlunto sebanyak 63 orang, terdiri dari:

ASN : 23 orang
Non PNS : 34 orang
 Jumlah : 57 orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.44
Kendala, Permasalahan dan Solusi

NO	KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
1	Pada tahun 2023 tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan Pelatihan Diksar, Pelatihan Menembak, Pelatihan Bela Diri dan Peningkatan kapasitas PPNS serta Pelatihan Pemantapan Kinerja Limas serta Bintalsik Anggota Limnas, hal	Pada Tahun 2024 ini tersedianya anggaran untuk melaksanakan Peningkatan kapasitas PPNS serta Pelatihan Pemantapan Kinerja Linmas serta Bintalsik Anggota Limnas, hal ini dikarenakan dianggarkan untuk

	ini dikarenakan terjadinya pemotongan anggaran terhadap beberapa kegiatan dimaksud.	kegiatan tersebut, dan kegiatan dimaksud diharapkan dapat dilaksanakan 100 %. Dan memberikan spirit kepada Anggota Satpol PP agar mau mengikuti Pelatihan-pelatihan yang ada dengan memberikan reward bagi Anggota yang berprestasi dan memberikan funishmen kepada Anggota yang indisipliner.
2	Terbatasnya anggaran untuk mencapai target program kegiatan dalam rangka penerapan percepatan SPM	Mencoba mengajukan tambahan anggaran dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Program Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Bidang Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
3	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sehingga dengan mudah mereka melanggarnya.	Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat yang melanggar Perda, Peraturan Walikota dan Produk Hukum Lainnya agar mereka mematuhi setiap aturan yang ada dan memberikan sanksi kepada pelanggar Perda.
4	Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/instansi terkait	Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

		masyarakat.
Sub Urusan Bencana		
1	Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk di dalamnya anggaran, karena dalam PB anggaran termasuk faktor yang sangat penting.	Melakukan penguatan kelembagaan BPBD secara internal melalui koordinasi ke Propinsi maupun pusat, mengikuti pelatihan 11 listema PB. Meningkatkan upaya pemenuhan pengadaan sarana prasarana dan dukungan anggaran
2	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan : a. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; b. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.	Melakukan peningkatan kapasitas Pusdalops PB dan Satgas TRC serta pembentukan forum pengurangan risiko bencana di desa.
3	Belum adanya dukungan pendanaan dari pemangku kebijakan terkait SPM secara khusus dan jelas.	Melakukan upaya penguatan anggaran melalui Tim SPM Kota.
Sub Urusan Kebakaran		
1	Jauhnya jarak tempuh daerah rawan	Meningkatkan fungsi dan peran

	bencana dari posko komando bencana	serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.
2	Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana	Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
3	Terbatasnya sarana prasarana penyelamatan korban bencana	Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana prasarana penyelamatan.
4	Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Sawahlunto sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.	Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar WMK untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten / Kota. Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial meliputi:

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan

wajib daerah yang diperoleh setiap peyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.

Jenis Pelayanan Minimal bidang Sosial adalah untuk pemenuhan kebutuhan jenis layanan kebutuhan dasar.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota.

Dalam penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran – ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementrian terkait oleh karena itu wajib memperhatikan prinsip prinsip SPM yaitu sederhana Kongkrit mudah di ukur, terbuka, terjangkau dan dapat di pertanggung jawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut di atas, antara lain:

- 1) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria :
 - a) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
 - b) Tidak terpelihara,
 - c) Tidak terawat dan tidak terurus ;
- 2) Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
 - a) Jumlah pengungs/penyitas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - b) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
 - c) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Target penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.45
Target Penerapan SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun

4.6.3 Realisasi Pencapaian SPM Daerah

Realisasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.46
Pencapaian Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian 2023			Batas Waktu Capaian
				S	R	%	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	237	237	100%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	34	34	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	1587	1587	100%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	-	-	100%	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara Korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	276 KK	276 KK	100%	Setiap tahun

Berdasarkan tabel di atas capaian SPM Bidang Sosial berdasarkan Peraturan menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pelayanan

Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Kabupaten/ Kota, dapat di Uraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah Rehabilitasi dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terfasilitasi tahun 2023 adalah 237 orang, target capaian kinerja pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti adalah 100 %.
- b. Jumlah Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yang terfasilitasi tahun 2023 adalah 34 orang dari sasaran Jumlah Rehabilitasi target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti adalah 100 %.
- c. Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar lanjut Usia terlantar di luar panti yang terfasilitasi adalah dari sasaran Rehabilitasi Sosial dasar lanjut Usia terlantar di luar panti tahun 2023 adalah 1587 orang, target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut Usia terlantar di luar panti adalah 100 %.
- d. Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti tahun 2023 tidak ada sasaran, target capaian kinerja pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pelayanan Rehabilitasi sosial dasar tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti adalah 100%.
- e. Jumlah perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korbag bencana daerah kabupaten / kota yang terfasilitasi tahun 2023 adalah 276 KK dengan 1054 orang jiwa. target perlindungan dan jaminan Sosial pada saat capaian Pemerintah daerah perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota adalah 100 %.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Sosial di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.47
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial dana APBD Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial		
				Penyediaan Alat Bantu	Rp. 10.600.000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 49.400.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 153.000.000

2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial		RP. 10.000.000
				Penyediaan Permakanan	Rp. 10.000.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial		
				Pemberian Layanan Keaduratan	Rp. 198.000.000
				Penyediaan Permakanan lansia	Rp. 61.760.000
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan		

			korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial		
				Penyediaan Permakanan	Rp. 11.362.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota.	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna siaga bencana	Rp.30.565.150
			Perlindungan Sosial korban bencana alam dan Sosial Kab/kota	Penyediaan Permakanan	Rp. 29.595.000

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah dana yang di alokasikan untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Sosial kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah:

- Disabilitas terlantar Jenis Pelayanan Dasar Penyandang di luar panti, program Rehabilitasi Sosial, ada 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu ini terlaksana berupa fasilitasi penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, Kruk ketiak, dan Tripot dana yang di anggarkan dari dana APBD sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam ratus ribu rupiah). Sub kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada

keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti, kegiatan yang terfasilitasi adalah pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas, serta memfasilitasi kegiatan Home Visit kepada penderita ex gangguan jiwa. Serta peringatan Hari Disabilitas Internasional yang ke 31 tahun 2023, yang di hadiri Oleh 157 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Keluarga, Guru SLB, Forkopimda, OPD terkait dengan kegiatan yang dilakukan senam bersama, jalan santai, penampilan bakat dari anak-anak hebat, serta pameran hasil karya anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Sawahlunto. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 49.400.000,-, (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sub kegiatan Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar, kegiatan yang difasilitasi adalah pemberian Transportasi kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ke Sekolah yang diberikan kepada 85 orang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yang bersekolah di 6 SLB yang ada di Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut : SLB Rumah Tia 17 orang, SLB Al Kausar 8 orang, SLB Tunas Harapan Silungkang 14 orang, SLB Negeri 1 Sawahlunto 14 orang, SLB Negeri 2 Sawahlunto 15 orang, SLB YKB Talawi 17 orang. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 153.000.000 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).

- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial dengan sub kegiatan penyediaan, penyediaan permakanan kegiatan yang di fasilitasi pemberian paket sembako bagi penyandang disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus sebanyak 25 paket sembako. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 11.362.500, (Sebelas juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Dengan adanya bantuan yang diberikan untuk penyandang disabilitas dapat mengurangi kesenjangan disabilitas dalam peningkatan kemampuan individu, keluarga, untuk memiliki kekuatan kapasitas terus belajar dan tumbuh dan berubah komprehensif, holistic, dan terstandar melalui penghormatan, pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan akibat gangguan kejiwaan di karenakan ketiadaan biaya dan dengan kegiatan Home visit ex penderita gangguan jiwa dapat untuk memotivasi keluarga dan penderita untuk dapat bisa berinteraksi dan diterima di tengah keluarga, lingkungan dan masyarakat.

- Jenis Pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di luar panti, program Rehabilitasi Sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial kegiatan ini tergabung dalam sub kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti, kegiatan ini terfasilitasi pemberian permakanan pada anak terlantar. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- Jenis pelayanan dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti program Rehabilitasi Sosial, kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah). Kegiatan ini terealisasi berupa fasilitasi Bantuan uang tunai yang diberikan kepada lansia kurang mampu non produktif, serta pemberian permakanan bagi lansia terlantar yang diberikan kepada 160 orang lansia, dengan pemberian paket sembako. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 61.760.000 (Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dengan adanya Bantuan Uang tunai dan penyediaan permakanan bagi Lanjut usia kurang mampu / Non Produktif di Kota Sawahlunto Tahun 2023, maka dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dan mewujudkan lansia sehat dan berdaya.
- Jenis layanan Rehabilitasi Sosial khusus gelandangan dan pengemis untuk tahun 2023 tidak ada data sasaran di Kota Sawahlunto.

- Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota, Program Penanganan Bencana dengan 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana daerah Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggota Taruna Siaga Bencana sebanyak 35 orang. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 30.565.150,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah). Kegiatan ini terealisasi berupa fasilitasi operasional taruna siaga bencana dalam penanggulangan bencana Alam dan bencana Sosial.
 - 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, kegiatan yang terfasilitasi adalah pemberian bantuan sembako kepada korban bencana Alam dan Sosial, pada tahun 2023 tenpenuhinya kebutuhan pangan korban bencana alam sebanyak 110 KK dengan 324 Jiwa. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 29. 595.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Tabel 4.48
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dana APBN Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran
				APBN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Rp. 200.178.875
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Rp. 31.500.000

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Rp.3.160.800.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kota	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota.	bantuan beras dari kementerian Sosial
			Perlindungan Sosial korban bencana alam dan Sosial Kab/kota	bantuan beras dari kementerian sosial

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah dana yang di alokasikan untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Sosial kota Sawahlunto Tahun 2023 anggaran APBN adalah :

1. Jenis layanan Disabilitas terlantar, Jenis Pelayanan Dasar Penyandang di luar panti, program Rehabilitasi Sosial anggaran yang di fasilitasi dari APBN adalah Kegiatan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Bantuan ATENSI berupa Kursi Roda, Alat bantu dengar, kaki palsu, penyangga leher, tongkat kaki tiga, kruk, tongkat adektif, kaki palsu, Pemberian Sembako, Nutrisi dan sandang, serta program pemberian makanan pada penyandang disabilitas yang di salurkan dalam bentuk siap saji. Bantuan ini di berikan kepada 144 Orang Penerima manfaat PM besaran bantuan adalah Rp. 200.178.875.
2. Jenis Pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di luar panti, bantuan Atensi yang diberikan adalah sandang, biaya sekolah anak, di berikan kepada 34 orang anak Penerima manfaat besaran bantuan Rp. 31.500.000,-

3. Jenis pelayanan dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti program

Mendukung program rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar Kementerian Sosial melalui program keluarga harapan (PKH) program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH komponen penerima PKH adalah Pendidikan (SD, SMP, SMA/ sederajat, Kesehatan (Ibu hamil, Menyusui dan Balita, Kessos keluarga yang mempunyai lansia dan disabilitas berat). Jumlah Kelurga Penerima Manfaat (KPM) lansia penerima bantuan berjumlah 1317 orang dengan besaran Bantuan yang di terima Rp. 2.400.000 setahun, total bantuan yang di terima sebesar Rp. 3.160.800.000,-

Realisasi Anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.49
Realisasi Pencapaian Anggaran APBD Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Capaian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial				
				Penyediaan Alat Bantu	100%	Rp. 10.600.000,-	Rp. 7.927.953 (74,8 %)
				Masyarakat Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	100%	Rp. 49.400.000,-	Rp.40.967.750 ,- (83 %)

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

				Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan			
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100%	Rp. 153.000.000-	Rp. 152.100. 000,- (99,4 %)
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Penyediaan permakanan	100 %	Rp. 11.362.500.	Rp. 11. 349.750 (99,4 %)
2	Rehabilita si sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	100%	Rp. 10.000.000	Rp. 9.973.350 (99,7 %)

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial				
				Pemberian Layanan Kedaduratan	100%	Rp.- 198.000.000	Rp. 195.150.000,- (98,56 %)
				Penyediaan Permakanan	100%	Rp. 61.750.000	Rp. 60.882.952 (99,48 %)
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		-	-	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Penanganan bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/kota	Koordinasai Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga bencana	100 %	Rp. 26.065.150.	Rp. 19.898.500 (76,34 %)

			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Penyediaan Permakanan	100%	Rp. 29.595.000	Rp. 19.727.000 (69,9 %)
--	--	--	---	--------------------------	------	-------------------	---------------------------------

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah dana yang di alokasikan untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Sosial Kota Sawahlunto adalah :

1. Jenis Pelayanan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti, program Rehabilitasi Sosial, ada 2 kegiatan :
 - 1.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu dana yang di anggarkan sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan realisasi Rp. 7.927.953,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), (74,8%), sub kegiatan Pemberiaan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dana yang di anggarkan sebesar Rp. 49.400.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan realisasi anggaran Rp. 40.967.000,-(Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) (83,5%) sub kegiatan Pemberian Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, dana yang di anggarkan sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 152.100.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) (99,4 %).
 - 1.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti dengan sub kegiatan penyediaan permakanan dana yang di anggarkan sebesar Rp. 11.362.500,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam

Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) realisasi anggaran Rp. 11.349.750,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) (99,9%).

2. Jenis Pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di luar panti, program Rehabilitasi Sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan sub kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dana yang di anggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan realisasi anggaran Rp. 9.993.350 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) (99,9%).
3. Jenis pelayanan dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti program Rehabilitasi Sosial, kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Kedaduratan dana yang di anggarkan sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 195.150.000,-(Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (99,02%). Dan Sub Kegiatan penyediaan permakanan lansia dana yang di anggarkan sebesar Rp. 61.750.000,- (Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) realisasi anggaran Rp. 60.882.952,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
4. Jenis layanan Rehabilitasi Sosial khusus gelandangan dan pengemis untuk tahun 2023 tidak ada data sasaran di Kota Sawahlunto.
5. Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota, Program penanggulangan Bencana dalam program penanggulangan bencana ada dua kegiatan yaitu :
 - 5.1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten / Kota, Sub Koordinasi Sosialisasi dan

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Jumlah dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 26.065.150,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), realisasi anggaran adalah Rp. 19.898.500,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) (73,34%), realisasi anggran hanya mencapai 73,34 % di sebabkan karena keadaan penanggulangan bencana sesuai dengan kasus kejadian bencana yang terjadi, kegiatan yang di fasilitasi dalam kegiatan ini adalah Taruna siaga bencana melaksanakan evakuasi korban bencana alam dan sosial di Kota Sawahlunto maupun diluar Kota Sawahlunto. Dalam menunjang kegiatan ke lapangan TAGANA diberikan uang transpor sebesar Rp 100.000,- /orang untuk 1 hari, dan memfasilitasi makan minum Tagana yang turun ke lapangan.

5.2 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyediaan Permakanan kegiatan ini pemberian paket sembako yang diberikan kepada korban bencana alam dan sosial dana yang di anggarkan sebesar Rp. 29.595.000 realissai anggaran Rp. 18.897.000 (66,9%). Dengan pemberian bantuan permakanan kepada korban bencana alam dan sosial di Kota Sawahlunto dapat terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar pangan korban bencana Alam dan bencana sosial pemenuhan kebutuhan makanan hanya difasilitasi 1 paket Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000. Jumlah bantuan paket sembako yang diberikan sebanyak 20 KK dengan 60 orang jiwa. Kejadian bencana bulan Mei 2023 yang terjadi di Desa Silungkag Tigo dan Silungkang Duo yang difasilitasi sebanyak 256 yang di fasilitasi dari anggaran APBN.

Tabel 4.50
Realisasi Pencapaian Anggaran APBN Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	
				APBN	Jumlah Anggaran Realisasi

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Rp. 200.178.875	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Rp. 31.500.000	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Rp.3.160.800.000	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	-	-	

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kota	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota.	bantuan beras dari kementerian	100 %
			Perlindungan Sosial korban bencana alam dan Sosial Kab/kota	bantuan beras dari kementerian	100

4.6.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Sosial, 2 orang pejabat fungsional dan 6 orang staf dengan Mitra kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari Masyarakat seperti SDM PKH 6 orang, TKSK 4 orang, Sakti Peksos 1 orang, TAGANA 28 orang, PSM 38 orang dan Karang Taruna 37 orang.

Tabel 4.51
Tabel Dukungan Personil Tahun 2023

No.	Uraian	Nama Pejabat
1.	Kepala Dinas	EFRIYANTO, S,Sos.MM
2.	Sekretaris Dinas	YOFI ALDIANA ,SE.
	2.1 Kepala Subbag. Administrasi Umum dan Kepegawaian	RENI RUSLI, S.Sos
	2.2 Kepala Subbag. Program dan Pelaporan	SYOFNELDA, S.Sos
	2.3 Kepala Subbag. Administrasi Keuangan	TRIA MAYASARI, S.Ak
3.	Kepala Bidang Sosial	YOSRIZAL. SE, MM
	3.1 Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Sosial	ASTUTI SURYA NINGSIH, S.St

	3.2 Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Sosial	SITI ROHMATIN, S.Sos
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	ADRIUS SKM,M.Kes
	4.1 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat	YUL EFRINA, SKM
	4.2 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat	REGINA DIASKA VELLA,S.Stp,MM
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa	TRI SYAHPUTRI SSTP.MM
	5.1 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Desa	MERY HASTUTI, S.STP
	5.2 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Desa	EFRIDA, SE
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RINA NASRI, SKM
	6.1 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPA dan PP	EVRA QOMARIAH,SKM
	6.2 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat	NIA PRIMA SHARTIKA, SKM.M.Kes

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum maksimalnya jumlah bantuan yang diberikan kepada pemerlu pelayanan sosial.
- 2) Masih adanya Penyandang Disabilitas yang belum tersentuh bantuan, hal ini dikarenakan tidak memiliki identitas kependudukan, belum melakukan

sidik jari sehingga memakai identitas yang lama dengan NIK yang belum padan dengan DUKCAPIL.

- 3) Masih adanya lansia yang belum tersentuh oleh bantuan, hal ini dikarenakan tidak memiliki identitas kependudukan, belum melakukan sidik jari sehingga memakai identitas yang lama dengan NIK yang belum padan dengan DUKCAPIL.

b. Solusi

- 1) Sudah di sampaikan ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tentang belum adanya identitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- 2) Walaupun masih adanya keterbatasan Anggaran bukan menjadikan kita tidak melaksanakan kegiatan / melakukan pelayanan Reahabilitasi Sosial yang di syaratkan oleh SPM tetapi kita harus mampu memcarikan solusi yang terbaik terhadap kendala-kendala terutama masalah anggran, yakni melalui proposal, lobi-lobi CSR Perusahaan maupun koordinasi dengan UPTD-UPTD yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Kemensos RI.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan anggaran penerapan dan pencapaian SPM tahun 2023 telah di alokasikan pada APBD perubahan tahun 2023.

4.7. Program dan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal

program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan :

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 4.52
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP
			Kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD

**Bab IV Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal**

			Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU SD
			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah SD
			Pengadaan mebel sekolah SD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan SD
			Penyediaan biaya personil peserta didik SD
			Pengembangan karir Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan SD
			Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifitas Siswa
			Pengadaan mebel sekolah
			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah
			Penyediaan biaya personil peserta didik SMP
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP
			Pengembangan karir Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan SMP
2	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pengadaan Perlengkapan Nonformal/kesetaraan
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidik bagi satuan

			Pendidikan nonformal/kesetaraan
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
			Pengadaan Mebel PAUD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan Perencanaan SPM berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, program dan kegiatan yang tercakup adalah sebagai berikut :

- I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - A. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daearah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian SPM
 1. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil
 2. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin

3. Pengelolaan Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Pada usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan Bidang Keciptakarya yang Menunjang Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.53
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER DANA
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	
1	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10KK) di Kel. Lubang Panjang (APBD)	DAK TA. 2023
2	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10KK) di Kel. Kubang Sirakuk Selatan (APBD)	DAK TA. 2023
3	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10KK) di Desa Lumindai (APBD)	DAK TA. 2023
4	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10KK) di Desa Salak (APBD)	DAK TA. 2023

5	Pembangunan Tangki Septik Individu (1 KK) di Desa Talawi Mudik, Desa Rantih, Desa Batu Tanjung, Desa Sikalang, Desa Santur, Desa Talago Gunung, Desa Kubang Utara Sikabu, Desa Muaro Kalaban, Desa Lunto Barat, Desa Kubang Tangah, Kel. Aur Mulyo, Kel. Air Dingin, Kel. Pasar (APBD)	DAKTA. 2023
6	Peningkatan dan Optimalisasi SPAM Kota Sawahlunto (APBD)	DAKTA. 2023
7	Pembangunan Sarana Air Minum di Datar Mansiang (APBD)	DAKTA. 2023

4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Tabel 4.54

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

4.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.55

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
				Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa
				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan

			tugas yang bernuansa HAM
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Mitigasi Bencana	Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Lokasi Bencana/Rawan Bencana
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyebarluasan Informasi Kebencanaan dan Penguatan Peran Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pembentukan Desa Tangguh Peningkatan Kapasitas F-PRB
4	Pelayanan	Penanganan	Penanganan Kedaruratan Bencana/Rawan

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Darurat dan Evakuasi Korban Bencana	Bencana	
		Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penunjang Penanganan Bencana	Pengelolaan Logistik dan Peralatan/Perlengkapan bagi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
			Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

4.7.6 Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian standar Pelayanan Minimal pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.56
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait SPM Bidang Urusan Sosial

NO	SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, di luar panti
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, di luar panti
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, di luar panti
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar	-	-

	panti		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/kota	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Sawahlunto Tahun 2023, dalam konteks tatanan manajemen pemerintahan daerah merupakan pengaktualisasian prinsip konsepsi pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan suatu siklus dari proses komitmen dan *political will* dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar *stakeholder* terkait guna mewujudkan *Good Local Governance* dan secara *yuridis formil* didasarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan kerangka pemahaman tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto yang telah melaksanakan program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2023 wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur Sumatera Barat dalam kerangka mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun Anggaran 2023 dan pada gilirannya akan memberikan *feedback* secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), pada hakekatnya merupakan wujud nyata adanya hubungan antara penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan secara aplikatif menjadi media dan sarana bagi Pemerintah untuk

mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2023. Dan pada gilirannya dapat meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Kota Sawahlunto mulai dari proses perumusan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Sawahlunto yang Lebih Baik.

Dalam penjelasan pelaksanaan kegiatan dan beberapa hal selama tahun 2023 yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa catatan yang perlu kami sampaikan yakni sebagai berikut :

1. Walaupun terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disebabkan berbagai hal, namun secara umum seluruh Arah Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas pembangunan selama tahun 2023, telah dapat dituangkan dan direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan sebagaimana terakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023.
2. Melalui keberhasilan melaksanakan berbagai program dan kegiatan tersebut, maka roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kota Sawahlunto selama tahun 2023 telah dapat berjalan dengan baik. Pelayanan kepada masyarakat secara bertahap telah dapat ditingkatkan, kehidupan masyarakat telah berlangsung dalam suasana kondusif, aman tanpa gejolak yang berarti. Kehidupan ekonomi masyarakat dirasakan sudah agak membaik, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam arti luas

menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Semua itu berkat berbagai upaya yang telah dilakukan secara bersama dan berkesinambungan.

3. Kita semua berharap semoga berbagai keberhasilan yang dicapai dapat dijadikan modal dan motivasi untuk melanjutkan berbagai upaya yang telah dirintis dan kita laksanakan untuk membawa masyarakat kearah yang dicita-citakan yaitu *Sawahlunto yang Lebih Baik*. Sementara berbagai kelemahan dan kekurangan harus diperbaiki dan dijadikan pengalaman serta pelajaran yang berharga untuk tidak terulang kembali.
4. Perubahan *paradigma* penyelenggaraan Pemerintahan telah membuka mata dan membuat kita makin menyadari bahwa peranan dan partisipasi masyarakat untuk masa mendatang akan sangat penting dan dominan.
5. dalam menentukan arah dan jalannya roda pemerintahan. Berbagai mekanisme yang telah berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan *Good Governance* serta pelaksanaan Otonomi Daerah seperti pola Perencanaan Partisipatif, mekanisme pengambilan keputusan/ penetapan kebijakan publik melalui *duduk basamo* dan *public hearing* pengawasan masyarakat, mekanisme pembangunan sarana dan prasarana desa, anggaran berbasis kinerja penatausahaan keuangan berbasis akuntansi, dan lain sebagainya perlu ditingkatkan dan dijaga kesinambungannya, sehingga arah yang ditempuh dalam menyikapi Otonomi Daerah benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya tetap memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kebijakan dan program yang direalisasikan pada tahun 2023 dapat terlihat dengan nyata, menyentuh hingga tingkat *grassroot* dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlepas dari kekurangan dan keberhasilan terhadap realisasi kegiatan, hal ini merupakan wujud nyata hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, DPRD, Pihak Ketiga dan Masyarakat Kota Sawahlunto. Kekurangan perlu dilengkapi bersama dengan segala kewenangan

yang dimiliki, sedangkan keberhasilan patut dipertahankan bahkan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan penjelasan terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanahkan dalam APBD tahun 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang berpartisipasi sehingga tersusunnya laporan ini dengan baik, dan semoga dengan laporan ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada seluruh *stakeholder* kota secara umum dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat secara khusus dengan harapan dapat memberikan umpan balik dan masukan demi kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.